



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI
TAHUN 2021**



WALI KOTA GUNUNG SITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNG SITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNG SITOLI,

Menimbang :

- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas antara lain RPJMD;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN;

- d. bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun ~~s 2015 E~~ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 30. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA GUNUNGSIROLI

dan

~~SAMAERI~~
WALI KOTA GUNUNGSIROLI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

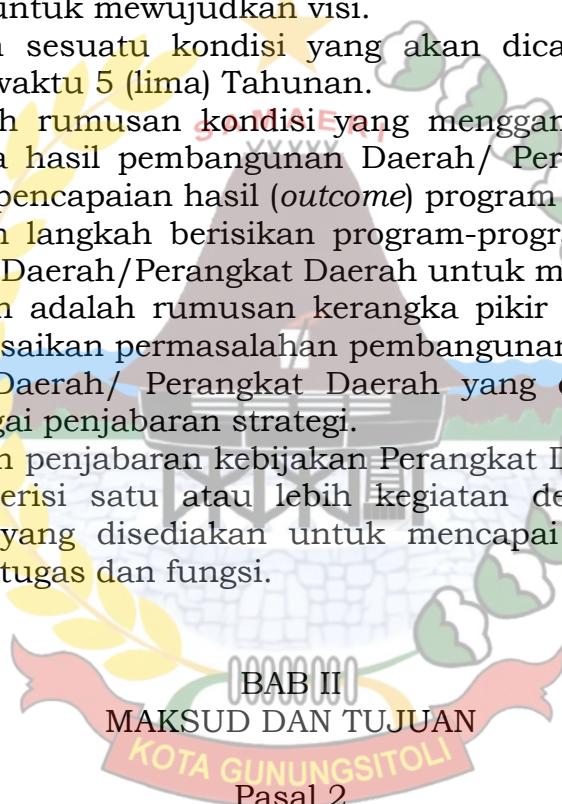
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli yang disusun setiap tahun sekali.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



Maksud ditetapkannya RPJMD adalah :

1. menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN;
2. pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RPJMD adalah :

1. memberikan gambaran capaian pembangunan daerah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020);
2. tersajinya informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kota Gunungsitoli selama 5 tahun yang lalu dan masa yang akan datang;
3. tersajinya informasi mengenai potensi/kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode 5 tahun lalu dan proyeksi 5 tahun ke depan;
4. tersajinya informasi perencanaan pembangunan daerah selama periode 5 tahun berikut kerangka pendanaannya.

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis;
 - b. pedoman bagi daerah dalam rangka menyusun RKPD;
 - c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026; dan
 - d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Daerah;
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- BAB IX : Penutup.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Wali Kota dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

SAMAERI Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kota dalam jangka waktu berlakunya RPJMD.
- (2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat melakukan Perubahan RPJMD dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan pada masa penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdapat kebijakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNG SITOLI,

ORANI WILFRID LASE, SH
NIP. 19700424 200112 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
GUNUNGSTITOLI TAHUN 2021-2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Gunungsitoli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Guna menghindari terjadinya kekosongan perencanaan pada tahun 2022, upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa peralihan periode RPJMD di Kota Gunungsitoli, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSI TOLI NOMOR 79



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan amanat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah tentang RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Periode 2021-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peraturan Daerah RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 telah disusun dengan mengedepankan asas keadilan serta pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli.

Peraturan Daerah tentang RPJMD ini juga telah melalui serangkaian tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Berkenaan dengan itu, dokumen ini akan menjadi panduan utama sekaligus referensi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Gunungsitoli selama 5 tahun kedepan.

Demikian dapat disampaikan, semoga perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli senantiasa di-ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga terwujudlah **Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman, dan Sejahtera**.

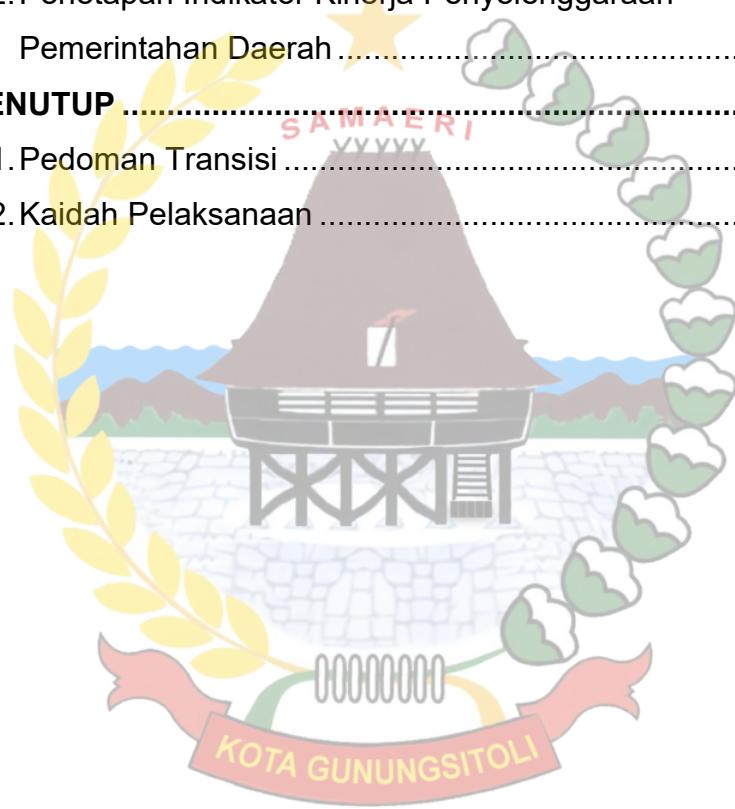
Gunungsitoli, November 2021

Wali Kota Gunungsitoli,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

DAFTAR ISI

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	242
6.1. Strategi.....	242
6.2. Arah Kebijakan.....	246
6.3. Program Pembangunan Daerah	260
6.4. Program Unggulan Daerah	273
6.5. Inovasi Daerah Kota Gunungsitoli.....	283
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	284
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	307
1.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama	307
1.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	314
BAB IX. PENUTUP	343
1.1. Pedoman Transisi	343
1.2. Kaidah Pelaksanaan	343



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	11
Tabel 2.2	Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli.....	11
Tabel 2.3	Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli.....	12
Tabel 2.4	Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara	14
Tabel 2.5	Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.....	14
Tabel 2.6	Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan (Ha).....	15
Tabel 2.7	Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan (Ha)	15
Tabel 2.8	Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (Ha)	16
Tabel 2.9	Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (Ha).....	16
Tabel 2.10	Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat (Ha)	17
Tabel 2.11	Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat (Ha)	18
Tabel 2.12	Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (Ha).....	18
Tabel 2.13	Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (Ha).....	19
Tabel 2.14	Sturuktur Geologi Kota Gunungsitoli	19
Tabel 2.15	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Gunungsitoli.....	20
Tabel 2.16	Nama-Nama Sungai di Kota Gunungsitoli.....	21
Tabel 2.17	Kondisi Curah hujan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020	23
Tabel 2.18	Kondisi Rata-Rata Suhu dan Kelembaban di Kota Gunungsitoli Tahun 2020	24
Tabel 2.19	Jenis Penggunaan Lahan.....	25
Tabel 2.20	Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kota Gunungsitoli.....	31
Tabel 2.21	Luas Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Kota Gunungsitoli	32
Tabel 2.22	Luas Wilayah Rawan Bencana Gempa di Kota Gunungsitoli	34
Tabel 2.23	Luas Wilayah Rawan Bencana Longsor di Kota Gunungsitoli.....	35
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2020	36
Tabel 2.25	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2000-2010 dan Tahun 2010-2020	37
Tabel 2.26	Jumlah Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020 (Jiwa).....	38
Tabel 2.27	Jumlah Akta Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020 (Jiwa).....	38
Tabel 2.28	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020	39

Tabel 2.29	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020	39
Tabel 2.30	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2020	40
Tabel 2.31	Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah) ...	41
Tabel 2.32	Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Milyar Rupiah) .	42
Tabel 2.33	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	44
Tabel 2.34	Laju Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2020.....	46
Tabel 2.35	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2020	50
Tabel 2.36	Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2016-2020	53
Tabel 2.37	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	53
Tabel 2.38	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Se- Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2020	55
Tabel 2.39	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	57
Tabel 2.40	Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	58
Tabel 2.41	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.42	Jumlah Guru dan Jenjang Pendidikan Dasar Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2020	61
Tabel 2.43	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2020	62
Tabel 2.44	Perkembangan Tingkat Kesehatan Masyarakat Kota Gunungsitoli Tahun 2016 s.d 2020	64
Tabel 2.45	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020....	65
Tabel 2.46	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan Tahun 2020	65
Tabel 2.47	Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	65
Tabel 2.48	Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan	

Tahun 2020	66
Tabel 2.49 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2020	66
Tabel 2.50 Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kota Gunungsitoli Tahun 2020.....	74
Tabel 2.51 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	75
Tabel 2.52 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2017-2020.....	76
Tabel 2.53 Kondisi Jembatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2020.....	76
Tabel 2.54 Realisasi Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2016 – 2020	76
Tabel 2.55 Panjang dan Kondisi Jaringan Irigasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016- 2020	77
Tabel 2.56 Rasio Indikator Bidang Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	78
Tabel 2.57 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020	79
Tabel 2.58 Rasio Rumah Layak Huni Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	81
Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.60 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.61 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kota Gunungsitoli Tahun 2020	83
Tabel 2.62 Penyelesaian dan Penegakan Perda Tahun 2016-2020	84
Tabel 2.63 Penyelesaian dan Penegakan Perda Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020	85
Tabel 2.64 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020	85
Tabel 2.65 Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	88
Tabel 2.66 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2020	89
Tabel 2.67 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pekerjaan/Kegiatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020	92

Tabel 2.68	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2020	92
Tabel 2.69	Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020	94
Tabel 2.70	Realisasi Indikator Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020	94
Tabel 2.71	Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.72	Realisasi Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020	96
Tabel 2.73	Realisasi Indikator Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	100
Tabel 2.74	Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.75	Realisasi Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.76	Realisasi Indikator Perhubungan Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.77	Realisasi Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	103
Tabel 2.78	Realisasi Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020	104
Tabel 2.79	Realisasi Penanaman Modal dan Investasi Kota Gunungsitoli.....	105
Tabel 2.80	Realisasi Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	107
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik Kota Gunungsitoli Tahun 2020	106
Tabel 2.82	Realisasi Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.83	Kondisi Sarana & Prasarana Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2019	109
Tabel 2.84	Realisasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.85	Realisasi Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.86	Perkembangan Luas Panen Pertanian Tahun 2016-2020	112
Tabel 2.87	Perkembangan Jumlah Hasil Produksi Pertanian Tahun 2016-2020 ...	112
Tabel 2.88	Realisasi Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.89	Realisasi Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.90	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2016-2020	114
Tabel 2.91	Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan, dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi Tahun 2015-2020	116

Tabel 2.92	Distribusi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Kab/Kota Se-Kepulauan Nias Tahun 2020.....	118
Tabel 2.93	Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2016-2020	119
Tabel 2.94	Capaian Indikator Kinerja Daerah Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.....	121
Tabel 2.95	Capaian Kinerja Misi 1 : Membangun Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	136
Tabel 2.96	Capaian Kinerja Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan	147
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Misi 3 : Membangun Infrastruktur Wilayah Serta Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan	156
Tabel 2.98	Capaian Kinerja Misi 4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, Dan Melayani.....	162
Tabel 2.99	Capaian Kinerja Misi 5 : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Berbudaya, Religius, Dan Taat Hukum	172
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A.2016-2020 Kota Gunungsitoli	179
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca T.A.2016-2020 Kota Gunungsitoli ...	185
Tabel 3.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gunungsitoli	190
Tabel 3.4	Defisit Riil Anggaran Kota Gunungsitoli Tahun 2018-2020	190
Tabel 3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Gunungsitoli Tahun 2018-2020	192
Tabel 3.6	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Gunungsitoli	193
Tabel 3.7	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Kota Gunungsitoli	195
Tabel 3.8	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	198
Tabel 3.9	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (2022 s/d 2026) Kota Gunungsitoli	199
Tabel 4.1	Penjabaran Masalah Pokok, Masalah Dan Akar Masalah Pembangunan Kota Gunungsitoli.....	202
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026	227
Tabel 5.2	Keterkaitan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026	

dengan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara	
Tahun 2019-2023 dan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 ...	232
Tabel 5.3 Keterkaitan Antar Misi dan Agenda/Program Prioritas Pembangunan	
Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional	238
Tabel 6.1 Keterkaitan Antara Misi, Tujuan dan Strategi RPJMD	
Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.....	243
Tabel 6.2 Penjabaran Arah Kebijakan RPJMD Kota Gunungsitoli	
Tahun 2022-2026.....	253
Tabel 6.3 Keterkaitan Strategi Dan Program Pembangunan Daerah	
Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.....	261
Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota	
Gunungsitoli Tahun 2021-2026	266
Tabel 6.5 Program Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026	274
Tabel 7.1 Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu	
indikatif	285
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Gunungsitoli	
Tahun 2021-2026.....	308
Tabel 8.2 Tabel Perbandingan Nilai Koefisien Gini	311
Tabel 8.3 Kategori Nilai Akhir Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	313
Tabel 8.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Gunungsitoli	
Tahun 2021-2026	315
Tabel 8.5 Penjabaran Indikator Kinerja Daerah Kota Gunungsitoli	
Tahun 2021-2026.....	330

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
Grafik 2.1	Piramida Penduduk Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	36
Grafik 2.2	PDRB Kota Gunungsitoli Tahun 2018 s.d. 2020	45
Grafik 2.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020 (persen)	47
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020.....	48
Grafik 2.5	Trend Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli Tahun 2015-2020 (Persen)	49
Grafik 2.6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan emiskinan (P2) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2020.....	52
Grafik 2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2015-2020	54
Grafik 2.8	Panjang Jalan di Kota Gunungsitoli Menurut Jenis Jalan Pada Tahun 2020 (Km).....	74
Grafik 2.9	Pengeluaran Per Kapita/Tahun Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020.	115
Grafik 2.10	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2020	134
Grafik 2.11	Pencapaian Kinerja Misi 1 Tahun 2016-2020	146
Grafik 2.12	Pencapaian Kinerja Misi 2 Tahun 2016-2020	155
Grafik 2.13	Pencapaian Kinerja Misi 3 Tahun 2016-2020	162
Grafik 2.14	Pencapaian Kinerja Misi 4 Tahun 2016-2020	171
Grafik 2.15	Pencapaian Kinerja Misi 5 Tahun 2016-2020	176
Grafik 3.1	Proporsi Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016–2020 Kota Gunungsitoli.....	182
Grafik 3.2	Persentase Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 Kota Gunungsitoli.....	182
Grafik 3.3	Gambaran Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kota Gunungsitoli.....	184
Grafik 3.4	Gambaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gunungsitoli.....	191
Grafik 3.5	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2022-2026 Kota Gunungsitoli	197

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan pada Tahun 2020 telah menetapkan Bapak Ir. Lakhomizaro Zebua sebagai Wali Kota dan Bapak Sowa'a Laoli, SE, M.Si sebagai Wakil Wali Kota terpilih Kota Gunungsitoli. Setelah terpilih dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 Tanggal 09 April 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara, maka kepala daerah terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. Ketentuan penyusunan RPJMD tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi.

Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses antara lain:

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas (*Top-down and Bottom Up*), yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 serta Dokumen RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan berorientasi pada substansi meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial, dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Pendekatan holistik tematik : dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif : dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial : dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaianya dengan rencana tata ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahun pada tingkat perangkat daerah, dan juga menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 579/Menhu-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
19. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Gunungsitoli Tahun 2017 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kota Gunungsitoli.

1 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN yang perlu mendapatkan dukungan dari Kota Gunungsitoli juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.

2 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli juga harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 antara lain terkait hasil pembaharuan data dan informasi pembangunan dari periode tahun 2013-2018 menjadi 2016-2020 serta isu strategis, sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program prioritas dan pelaksanaan kegiatan strategis nasional di daerah yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Gunungsitoli.

3 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Gunungsitoli

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahap keempat RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan. Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode keempat untuk perencanaan Tahun 2021–2026 terutama memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah :

- a. Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional, beretos kerja, dan anti KKN dalam iklim kehidupan politik yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
- b. Terwujudnya derajat kesehatan, perlindungan sosial, dan keberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.
- c. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbangunnya karakter diri sebagai insan religius yang bermartabat.
- d. Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah yang berbasis perdagangan, jasa dan industri.

4 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Gunungsitoli

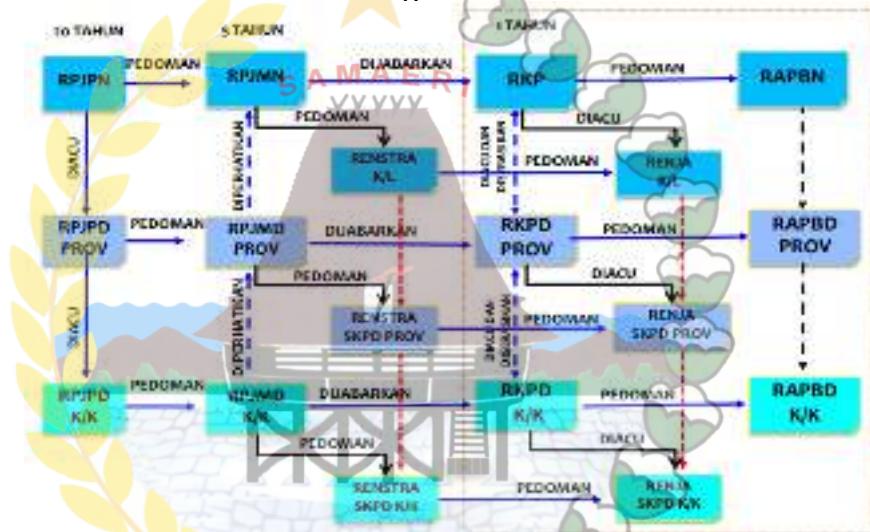
RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKPNS serta program strategis nasional. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan, yang disusun oleh

setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



6 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN, dengan Tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran capaian pembangunan daerah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020);
2. Tersajinya informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kota Gunungsitoli selama 5 tahun yang lalu dan masa yang akan datang;
3. Tersajinya informasi mengenai potensi/kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode 5 tahun lalu dan proyeksi 5 tahun ke depan;
4. Tersajinya informasi perencanaan pembangunan daerah selama periode 5 tahun berikut kerangka pendanaannya.

1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
4. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
5. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
6. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Daerah
7. BAB VII : Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah
8. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. BAB IX : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan gambaran mengenai kondisi pembangunan Kota Gunungsitoli, meliputi aspek geografis, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Selain itu juga Bab ini memberikan gambaran tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kota Gunungsitoli guna menjadi sumber daya pokok bagi pengembangan di masa depan serta evaluasi dan analisis terkait pencapaian pembangunan daerah Kota Gunungsitoli periode sebelumnya.

2.1 Aspek Geografis

2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Gunungsitoli terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah 469,36 km², atau mencapai 0,63% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas wilayah administrasi Kota Gunungsitoli meliputi :

1. Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Sitolu Ori);
2. Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias (Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias);
3. Timur : Berbatasan dengan Samudera Indonesia;
4. Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias (Kecamatan Hiliduho), dan wilayah Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa).

Secara astronomis, Kota Gunungsitoli terletak di antara 00°12'-1°32' Lintang Utara (LU) dan 970°00'-980°00' Bujur Timur (BT), memiliki kondisi bentang alam yang bervariasi didominasi oleh daerah perbukitan dan pesisir pantai dengan ketinggian 0-350 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari Posisi Geostrategis Kota Gunungsitoli sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kepulauan Nias memiliki posisi strategis karena letak geografisnya diapit oleh 4 (empat) Kabupaten di Kepulauan Nias. Kota Gunungsitoli merupakan pusat perdagangan dan jasa serta pintu masuk dan keluar Pulau Nias melalui Bandara Udara Binaka, Pelabuhan Angin

Gunungsitoli dan Pelabuhan Roro Desa Siwalubanua II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Secara administratif Kota Gunungsitoli terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, 98 (sembilan puluh delapan) desa dan 3 (tiga) kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 :

Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Terhadap Luas (%)
1.	Gunungsitoli	29	3	109.09	23.24
2.	Gunungsitoli Selatan	15	-	56.85	12.11
3.	Gunungsitoli Utara	10	-	79.73	16.99
4.	Gunungsitoli Idanoi	26	-	134.78	28.72
5.	Gunungsitoli Alo'oa	9	-	60.21	12.83
6.	Gunungsitoli Barat	9	-	28.70	6.11
JUMLAH		98	3	469.36	100.00

Sumber : *Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS*

2.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat menguraikan informasi mengenai potensi dan kendala fisik perkembangan suatu zona/wilayah. Kondisi topografi Kota Gunungsitoli secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Utara berada pada ketinggian/elevasi 0-300 meter di atas permukaan laut sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.2 :
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli

No	Nama Desa	Ketinggian (mdpl)				
		0-100	100-150	150-200	200-250	250-300
1	Miga	91	-	-	-	-
2	Sihareo II	91,85	106,15	-	-	-
3	Ilir	80,00	-	-	-	-

No	Nama Desa	Ketinggian (mdpl)				
		0-100	100-150	150-200	200-250	250-300
4	Sifalaete Tabaloho	132,00	-	-	-	-
5	Dahana	166,29	37,71	-	-	-
6	Sisobahili Tabaloho	132,00	-	-	-	-
7	Dahadano Gawugawu	79,66	28,34	-	-	-
8	Lasara Bahili	55	-	-	-	-
9	Mudik	46	-	-	-	-
10	Boyo	80	-	-	-	-
11	Hilinaa	131,19	6,81	-	-	-
12	Lelewonu Nikootano	34,57	28,33	56,57	45,53	-
13	Simandraolo	-	0,69	53,96	128,12	62,23
14	Madolaoli	8,80	82,21	17,99	-	-
15	Sisarahili Sisambualah	169,00	MAERI	-	-	-
16	Onowaembo	43,10	73,76	95,15	-	-
17	Fadoro Lasara	71,68	43,85	1,47	-	-
18	Tuhemberua Ulu	42,70	40,70	7,61	-	-
19	Onozitoli Sifaoroasi	43,82	11,18	-	-	-
20	Pasar Gunungsitoli	62,00	-	-	-	-
21	Saombo	39,00	-	-	-	-
22	Iraonogeba	44,57	54,27	14,15	-	-
23	Ombolata Ulu	89	-	-	-	-
24	Moawo	156	-	-	-	-
25	Saewe	192,00	-	-	-	-
26	Sifalaete Ulu	42,70	40,70	-	-	-
27	Hilimbaruzo	36,89	60,12	24,98	-	-
28	Hilihao	166,15	13,85	-	-	-
29	Sisarahili Gamo	7,74	118,75	1,51	-	-
30	Bawodesolo	290	-	-	-	-
31	Onozitoli Olora	241,00	-	-	-	-
32	Madula	265,21	26,64	7,15	-	-
JUMLAH		3.130,92	774,06	280,54	173,65	62,23

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.3 :
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (ha)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
1	Miga	12,07	19,07	36,87	7,61	15,39

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (ha)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
2	Sihareo II	20,01	47,84	54,19	60,98	14,98
3	Ilir	60,46	16,05	3,49	-	-
4	Sifalaete Tabaloho	43,17	29,48	19,09	21,11	19,16
5	Dahana	41,50	28,75	43,34	82,22	8,19
6	Sisobahili Tabaloho	6,45	20,33	32,40	38,82	-
7	Dahadano Gawu-Gawu	16,66	13,97	52,13	25,25	-
8	Lasara Bahili	11,74	7,17	11,42	24,67	-
9	Mudik	42,98	2,23	0,54	0,25	-
10	Boyo	34,86	12,43	12,72	19,99	-
11	Hilinaa	77,32	15,47	10,55	14,77	19,90
12	Lelewonu Nikootano	3,26	33,69	56,57	60,74	10,73
13	Simandraolo	52,37	56,14	71,14	53,19	12,16
14	Madolaoli	15,21	53,69	30,79	9,32	-
15	Sisarahili Sisambualahé	25,50	72,59	39,53	20,50	10,88
16	Onowaembo	30,93	55,45	41,01	39,59	45,00
17	Fadoro Lasara	14,76	26,09	29,10	42,40	4,65
18	Tuhemberua Ulu	3,74	9,68	8,64	35,13	33,81
19	Onozitoli Sifaoroasi	1,31	11,92	33,43	7,59	0,75
20	Pasar Gunungsitoli	29,45	15,89	5,47	11,18	-
21	Saombo	2,39	2,59	14,16	17,89	1,97
22	Iraonogeba	15,18	41,31	36,14	20,23	0,13
23	Ombolata Ulu	36,66	9,36	8,80	21,09	13,09
24	Moawo	66,67	38,76	22,55	20,60	7,42
25	Saewe	68,88	63,74	55,17	4,21	-
26	Sifalaete Ulu	40,34	61,58	23,73	24,29	1,07
27	Hilimbaruzo	13,96	24,58	24,50	32,64	26,32
28	Hilihao	91,63	47,63	25,59	12,09	3,05
29	Sisarahili Gamo	37,43	43,99	22,57	24,00	-
30	Bawodesolo	92,62	114,20	55,33	27,86	-
31	Onozitoli Olora	114,64	79,15	37,48	9,73	-
32	Madula	15,39	12,07	19,07	36,87	7,61
JUMLAH		1.139,54	1.086,89	937,51	826,81	256,26

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.4 :
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Nama Desa	Ketinggian (mpdl)			
		0-100	100-150	150-200	200-250
1	Hiligidu Ulu	224,38	27,62	-	-
2	Hilimbowo Olora	205,41	61,59	-	-
3	Olora	257,00	-	-	-
4	Gawu-Gawu Bouso	514,00	-	-	-
5	Loloanaa/Iolomoyo	450,82	24,18	-	-
6	Lasara Sowu	366,11	100,21	50,05	2,62
7	Hambawa	1062,64	343,49	54,87	-
8	Tetehosi Afia	693,52	8,48	-	-
9	Afia	414,00	-	-	-
10	Teluk Belukar	1094,74	27,26	-	-
JUMLAH		5.282,62	592,84	104,92	2,62

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.5 :
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan (%)				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
1	Hiligidu Ulu	35,89	79,92	103,89	32,30	-
2	Hilimbowo Olora	51,63	102,25	73,12	39,99	-
3	Olora	173,37	47,41	29,85	6,37	-
4	Gawu-Gawu Bouso	453,14	49,11	11,45	0,29	-
5	Loloanaa/Iolomoyo	138,54	201,43	89,01	44,10	1,92
6	Lasara Sowu	101,56	91,79	144,50	168,88	12,27
7	Hambawa	173,62	248,74	628,49	410,16	-
8	Tetehosi Afia	416,10	137,96	89,37	56,63	1,94
9	Afia	318,78	40,96	31,33	22,53	0,41
10	Teluk Belukar	882,35	137,13	80,17	22,35	-
Jumlah		2.744,97	1.136,71	1.281,18	803,61	16,53

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

2. Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Gunungsitoli Idanoi berada pada ketinggian/elevasi 0-287 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat dari kelerengannya, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi berada pada kawasan dengan kemiringan (lereng) antara 0->20% sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.6 :
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan (Ha)

No	Desa	Ketinggian Lahan (mpdl)				
		0-5	200-287	5-50	50-75	75-200
1	Faekhu	-	-	125,35	0,03	-
2	Fodo	46,9	-	23,78	0	-
3	Hiligara	-	3,05	18,49	61,94	195,03
4	Hiligodu Ombolata	-	0,81	31,47	160,54	103,28
5	Lolofaoso Tabaloho	-	-	79,2	24,26	2,92
6	Lololakha	-	41,65	102,43	170,36	305,43
7	Lolomboli	-	-	53,32	28,31	4,36
8	Luaha Laraga	9,03	-	58,64	71,34	10,57
9	Mazingo Tabaloho	-	-	184,08	90,34	67,11
10	Ombolata Simenari	-	6,82	78,99	55,58	110,96
11	Ononamolo I Lot	217,23	-	174,9	87,6	63,34
12	Onozitoli Tabaloho	-	0,15	254,78	117,39	104,04
13	Sihare'o I Tabaloho	-	25,28	0,98	98,41	290,02
14	Sisobahili II Tanoseo	-	14,59	-	25,78	283,22
15	Tetehosi Ombolata	-	27,59	-	31,98	259,65
JUMLAH		273,16	119,94	1.186,41	1.023,86	1.799,93

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.7 :
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan (Ha)

No	Desa	Kemiringan Lahan				
		0- 2 %	3-7 %	8-13 %	14-20 %	> 20 %
1	Faekhu	-	125,35	0,03	-	-
2	Fodo	46,9	23,78	-	-	-
3	Hiligara	-	18,49	61,96	195,03	3,03
4	Hiligodu Ombolata	-	31,49	160,52	103,28	0,81
5	Lolofaoso Tabaloho	-	79,2	24,26	2,92	-
6	Lololakha	-	102,43	170,36	305,43	41,65
7	Lolomboli	-	53,32	28,31	4,36	-
8	Luaha Laraga	9,03	58,65	71,33	10,57	-
9	Mazingo Tabaloho	-	184,08	90,34	67,11	-
10	Ombolata Simenari	-	78,99	55,58	110,96	6,82
11	Ononamolo I Lot	217,21	174,9	87,6	63,36	-
12	Onozitoli Tabaloho	-	254,78	117,39	104,04	0,15
13	Sihare'o I Tabaloho	-	0,98	98,41	290,03	25,27
14	Sisobahili II Tanoseo	-	-	25,78	283,22	14,59
15	Tetehosi Ombolata	-	-	31,98	259,65	27,59
JUMLAH		273,14	1.186,38	1.023,86	1.799,93	119,91

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.8 :
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (Ha)

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)				
		0-5	200-287	5-50	50-75	75-200
1	Awa'ai	-	64,92	-	7,05	238,86
2	Bawodesolo	139,29	-	61,45	-	-
3	Binaka	241,12	-	31,96	5,44	0,86
4	Dahana	91,48	-	72,68	4,88	-
5	Fadoro	-	7,81	64,28	37,8	72,52
6	Fowa	60,18	-	20,78	-	-
7	Helefanihka	-	21,11	6,35	31,35	145,27
8	Hilihambawa	-	258,58	-	-	127,36
9	Hilimbawadesolo	72,88	-	96,18	0,19	-
10	Hilimbowo Idanoi	-	1,1	0,75	38,74	177,49
11	Hiliweto Idanoi	-	21,55	13,53	67,35	149,25
12	Humene	11,61	-	51,21	-	-
13	Idano Tae	14,75	-	53,49	1,35	-
14	Lewuoguru Idanoi	-	62,39	31,09	26,24	148,17
15	Loloana'a Idanoi	12,1	15,88	36,83	11,84	56,96
16	Ombolata Idanoi	-	36,32	3,94	55,14	233,7
17	Onowaembo Idanoi	-	9,79	117,66	130,05	143,66
18	Samasi	-	0,86	4,35	42,24	119,32
19	Sifalaete	-	-	71,64	32,25	6,27
20	Simanaere	5,76	0,01	62,71	38,24	136,48
21	Siwalubanua II	11,27	-	59,5	19,95	5,66
22	Siwalubanua-I	-	44,35	4,72	24,74	198,7
23	Tetehosi II	-	73,77	80,62	108,04	306,08
24	Tetehosi-I	12,52	-	54,26	42,62	64,61
25	Tuhegeo I	72,6	-	56,28	26,63	25,4
26	Tuhegeo-II	-	-	-	25,72	164,7
JUMLAH		745,56	618,44	1.056,26	777,85	2.521,32

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.9 :
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (Ha)

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan				
		> 20 %	0-2 %	14-20 %	3-7 %	8-13 %
1	Awa'ai	64,92	-	238,86	-	7,06
2	Bawodesolo	-	139,29	-	61,45	-
3	Binaka	-	241,12	0,86	31,96	5,44
4	Dahana	-	91,48	-	72,67	4,89
5	Fadoro	7,81	-	72,51	64,28	37,8
6	Fowa	-	60,18	-	20,78	-
7	Helefanihka	21,11	-	145,27	6,36	31,35
8	Hilihambawa	258,58	-	127,37	-	-

No	Nama Desa	Kemiringan Lahan				
		> 20 %	0-2 %	14-20 %	3-7 %	8-13 %
9	Hilimbawadesolo	-	72,88		96,19	0,17
10	Hilimbowo Idanoi	1,1	-	177,49	0,75	38,74
11	Hiliweto Idanoi	0,42	-	71,3	4,69	14,15
12	Humene	-	11,61	-	51,21	-
13	Idano Tae	-	14,75	-	53,49	1,35
14	Lewuoguru Idanoi	62,39	-	148,17	31,09	26,25
15	Loloana'a Idanoi	15,88	12,1	56,97	36,82	11,84
16	Ombolata Idanoi	36,32	-	233,7	3,94	55,14
17	Onowaembo Idanoi	9,79	-	143,66	117,66	130,06
18	Samasi	22,41	-	268,58	17,88	109,6
19	Sifalaete	-	-	6,27	71,64	32,26
20	Simanaere	0,01	5,76	136,48	62,71	38,24
21	Siwalubanua II	-	11,27	5,66	59,5	19,95
22	Siwalubanua-I	43,94	-	127,41	0,04	10,55
23	Tetehosi II	73,77	-	306,08	80,62	108,03
24	Tetehosi-I	-	12,52	64,61	54,26	42,62
25	Tuhegeo I	-	72,6	25,4	56,28	26,64
26	Tuhegeo-II	-	-	164,7	-	25,72
JUMLAH		618,45	745,56	2.521,35	1.056,25	777,87

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

3. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Barat berada pada wilayah perbukitan dengan ketinggian/elevasi 150-350 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari sudut kelerengannya, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Barat terdiri atas beberapa kategori yaitu kemiringan lereng 0%-8% (datar), kemiringan lereng >8%-15% (landai), kemiringan lereng >15%-25% (bergelombang), kemiringan lereng >25%-40% (curam) dan kemiringan lereng >40% (sangat curam) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 :
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat (Ha)

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mpdl)								
		10-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150	150-200	200-250	250-300
1	Lolomoyo Tuhemberua	0,25	36,62	39,37	52,83	46,14	31,46	41,12	16,72	13,41
2	Sihare'o Saiwahili	41,55	42,75	15,84	9,83	3,25	0,03	-	-	-
3	Tumori	7,07	18,73	25,22	26,77	16,03	12,07	39,08	10,50	-
4	Tumori Balohili	114,70	17,60	14,70	8,99	-	-	-	-	-

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mpdl)								
		10-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150	150-200	200-250	250-300
5	Gada	-	-	0,14	51,26	103,55	143,40	144,05	47,70	0,92
6	Hilinakhe	-	-	2,20	21,11	59,40	89,78	98,31	20,95	-
7	Orahili Tumori	6,14	12,72	15,76	49,01	75,22	36,28	46,21	23,16	-
8	Ononamolo I Lot	-	-	-	-	5,62	36,87	328,06	308,12	24,66
9	Onozikho	-	-	1,01	26,33	88,11	131,79	181,35	51,77	-
Total		169,70	128,42	114,24	246,13	397,31	481,67	878,18	478,92	38,99

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.11 :
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat (Ha)

No	Desa	Kemiringan Lahan				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %
1	Lolomoyo Tuhemberua	34,71	63,95	94,93	66,40	17,92
2	Sihare'o saiwahili	44,08	27,62	30,46	10,97	0,12
3	Tumori	16,83	32,94	57,44	46,49	1,75
4	Tumori Balohili	104,30	30,53	17,39	3,54	0,22
5	Gada	67,60	129,23	202,16	87,85	4,19
6	Hilinakhe	21,96	61,94	104,72	89,12	14,01
7	Orahili Tumori	36,93	59,32	99,96	62,43	5,87
8	Ononamolo II lot	105,47	209,96	268,31	105,25	14,34
9	Onozikho	60,55	118,59	197,99	95,88	7,35
Total		492,42	734,08	1.073,35	567,94	65,78

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.12 :
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (Ha)

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)									
		10-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150	150-200	200-250	250-300	300-350
1	Irano Lase				4,57	25,57	73,74	65,47	2,32		
2	Lololawa	0,65	9,75	32,26	37,23	57,61	82,91	122,06	14,41		
3	Orahili Tanoseo						0,98	18,33	93,70	35,76	
4	Tarakhaini						2,67	128,25	107,96	25,22	
5	Fadoro Hilimbowo								58,40	104,23	18,66
6	Fadoro You			26,97	110,59	147,73	74,18	17,41	1,47		
7	Nazolou Alo'oa			20,06	40,21	63,92	76,27	176,81	299,19	0,63	

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)									
		10-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150	150-200	200-250	250-300	300-350
8	Nazalou Lolowua		138,08	148,48	106,96	80,58	68,16	140,22	62,83		
9	Niko'otano Dao		1,30	38,41	72,49	115,21	122,15	447,55	305,40	11,16	
	Total	0,65	149,13	266,18	372,03	490,60	501,06	1.116,10	945,68	176,99	18,66

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.13 :
Kemiringan Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (Ha)

No	Desa	Kemiringan Lahan				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %
1	Irano Lase	47,95	74,75	43,85	4,79	0,32
2	Lololawa	32,71	77,61	145,33	85,44	15,77
3	Orahili Tanoseo	26,08	49,52	54,77	17,93	0,47
4	Tarakhaini	64,72	86,73	78,67	31,22	2,76
5	Fadoro Hilimbowo	39,28	62,45	49,20	30,07	0,29
6	Fadoro You	64,62	121,48	147,83	43,45	0,97
7	Nazolou Alo'oa	174,24	188,34	256,62	52,18	5,70
8	Nazolou Lolowua	192,93	179,39	314,09	57,78	1,12
9	Niko'otano Dao	315,92	324,20	373,46	95,30	4,79
	Total	958,44	1.164,47	1.463,81	418,15	32,21

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

2.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi, serta memiliki peran terbentuknya satu bentukan lahan di Wilayah tersebut. Sebaran struktur geologi yang terdapat di Kota Gunungsitoli didominasi oleh Alluvium (Qa), Formasi Gomo (Tmpg1), Formasi Gunungsitoli (QTgs), dan Formasi Lolomatua (Tml4) secara rinci diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14 :
Struktur Geologi Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Struktur Geologi (Ha)			
		Alluvium (Qa)	Formasi Gomo (Tmpg1)	Formasi Gunungsitoli (QTgs)	Formasi Lolomatua (Tml4)
1	Gunungsitoli	702,588	1.612,74	2.139,66	
2	Gunungsitoli Utara	36,95	1.673,81	3.418,41	853,63
3	Gunungsitoli Selatan	979,83	2.319,12	951,13	153,22
4	Gunungsitoli	1.773,74	2.983,47	854,87	107,39

No	Kecamatan	Struktur Geologi (Ha)			
		Alluvium (Qa)	Formasi Gomo (Tmpg1)	Formasi Gunungsitoli (QTgs)	Formasi Lolumatua (Tml4)
	Idanoi				
5	Gunungsitoli Barat	-	2.933,53	0,04	-
6	Gunungsitoli Alo'oa	-	2.354,31	90,407	1.592,34
Total		705.378,52	13.876,98	7.454,52	2.706,58

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi suatu daerah, paling tidak dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni posisi (geografi), iklim (curah hujan), dan geologi. Posisi suatu daerah yang berada di dekat pantai di kelilingi laut akan berbeda dengan daerah yang berada di tengah pulau. Ditinjau dari kondisi hidrologi Kota Gunungsitoli memiliki 13 Daerah Aliran Sungai (DAS), berikut ini merupakan daftar DAS di wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.15 :
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Gunungsitoli

No	Nama DAS	Panjang (m)
1.	DAS Sowu	142.676
2.	DAS Boe	5.520
3.	DAS Afia	37.486
4.	DAS Bo'uso	21.268
5.	DAS Olora	38.645
6.	DAS Gamo	9.718
7.	DAS Moawo	18.775
8.	DAS Nou	85.059
9.	DAS Miga	77.951
10.	DAS Idanoi	120.093
11.	DAS Ndra Humene	14.263
12.	DAS Fowa	12.980
13.	DAS Gido Si'ite	63.280
Total		647.714

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota
Gunungsitoli

Air permukaan/sungai di Kota Gunungsitoli terdapat cukup banyak, yang mengalir dari pegunungan di tengah Pulau Nias menuju ke arah perairan laut. Kebanyakan sungai-

sungai yang mengalir di Kota Gunungsitoli tidak terlalu besar, sehingga tidak semua sungai tercatat memiliki nama. Wilayah Kota Gunungsitoli posisinya berdekatan dengan pantai dan dialiri beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun.

Tabel 2.16 :
Nama-nama Sungai di Kota Gunungsitoli

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
1	Sungai Ndra Humene	Gunungsitoli Idanoi	5,0	Kecil
2	Sungai Foa	Gunungsitoli Idanoi	7,2	Kecil
3	Sungai Madawa	Gunungsitoli Idanoi	4,0	Kecil
4	Sungai Umbu Dahana	Gunungsitoli Idanoi	4,0	Kecil
5	Sungai Miga Seuba	Gunungsitoli Selatan	10,0	Sedang
6	Sungai Miga Si'ite	Gunungsitoli Selatan	10,0	Sedang
7	Sungai Siwali	Gunungsitoli Selatan	5,0	Kecil
8	Sungai Bo'u	Gunungsitoli Selatan	3,0	Kecil
9	Sungai Idanoi	Gunungsitoli Selatan	20,0	Sedang
10	Sungai Nou	Gunungsitoli Barat	12,0	Sedang
11	Sungai Bo'adulo	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
12	Sungai Simangani	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
13	Sungai Bona'a	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
14	Sungai Sumui	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
15	Sungai Bodalu	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
16	Sungai Mola	Gunungsitoli Barat	7,0	Kecil
17	Sungai Bogaoha	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
18	Sungai Matemate	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
19	Sungai Solotu	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
20	Sungai Simaosso	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
21	Sungai Larumae	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
22	Sungai Tawaya	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
23	Sungai Ra'ura'u	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
24	Sungai Fazizi	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
25	Sungai Alasa	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
26	Sungai Tagawa	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
27	Sungai Bogaölö	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
28	Sungai Hele'akhe	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
29	Sungai Maera	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
30	Sungai Zöluzölu	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
31	Sungai Mo'awō	Gunungsitoli	10,0	Sedang
32	Sungai Bogalitō	Gunungsitoli	4,0	Kecil
33	Sungai Saombō	Gunungsitoli	2,0	Kecil

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
34	Sungai Walo	Gunungsitoli	2,0	Kecil
35	Sungai Sifadõlõ	Gunungsitoli	2,0	Kecil
36	Sungai Sahõndrõ	Gunungsitoli	2,0	Kecil
37	Sungai Tohia	Gunungsitoli	2,0	Kecil
38	Sungai Totoa	Gunungsitoli	2,0	Kecil
39	Sungai Boyo	Gunungsitoli	7,0	Kecil
40	Sungai Alimbungõ	Gunungsitoli	2,0	Kecil
41	Sungai Idanõmanu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
42	Sungai Idanõ Fandindina	Gunungsitoli	3,0	Kecil
43	Sungai Idanõgohõ	Gunungsitoli	3,0	Kecil
44	Sungai Idanõmalõwu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
45	Sungai Lelewõnu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
46	Sungai Fafa	Gunungsitoli	4,0	Kecil
47	Sungai Waru	Gunungsitoli	4,0	Kecil
48	Sungai Faekhuzihamba	Gunungsitoli	5,0	Kecil
49	Sungai Bodõwu	Gunungsitoli	7,0	Kecil
50	Sungai Bodõwu So'ene	Gunungsitoli	4,0	Kecil
51	Sungai Bozulu	Gunungsitoli	4,0	Kecil
52	Sungai Tebai'oyo	Gunungsitoli	4,0	Kecil
53	Sungai Delamawõ	Gunungsitoli	3,0	Kecil
54	Sungai Azue	Gunungsitoli	3,0	Kecil
55	Sungai Sitoba'a	Gunungsitoli	3,0	Kecil
56	Sungai Simangani	Gunungsitoli	3,0	Kecil
57	Sungai To'õ	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
58	Sungai Bofino	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
59	Sungai Si'arawi	Gunungsitoli Utara	4,0	Kecil
60	Sungai Tambalou	Gunungsitoli Utara	12,0	Sedang
61	Sungai Lawu-Lawu	Gunungsitoli Utara	15,0	Sedang
62	Sungai Bo'e	Gunungsitoli Utara	15,0	Sedang
63	Sungai Hela	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
64	Sungai Menau	Gunungsitoli Utara	10,0	Sedang
65	Sungai Lotu	Gunungsitoli Utara	10,0	Sedang
66	Sungai Mbombo Ebua	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
67	Sungai Leŵuöguru	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
68	Sungai Gamo	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar
69	Sungai Olora	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar
70	Sungai Bo'usõ	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
71	Sungai Afia	Gunungsitoli Alo'oa	25,0	Besar
72	Sungai Mbombo Seuba	Gunungsitoli Alo'oa	6,0	Kecil
73	Sungai Bōziwawō	Gunungsitoli Alo'oa	10,0	Sedang
74	Sungai Sotufo	Gunungsitoli Alo'oa	10,0	Sedang
75	Sungai Namōlō	Gunungsitoli Alo'oa	8,0	Kecil
76	Sungai Dudunou	Gunungsitoli Alo'oa	10,0	Sedang
77	Sungai Bowulu	Gunungsitoli Alo'oa	8,0	Kecil
78	Sungai Tanōse'ō	Gunungsitoli Alo'oa	8,0	Kecil

Keterangan : *) Kecil < 10 Km

*) Sedang 10 s.d. 20 Km

*) Besar > 20 Km

Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS

2.1.5 Kondisi Klimatologi

Letak Kota Gunungsitoli yang dekat dengan garis khatulistiwa menyebabkan curah hujan setiap tahun cukup tinggi. Pada tahun 2020 rata-rata curah hujan mencapai 268,83 mm³ perbulan dengan banyaknya hari hujan mencapai 286 hari setahun atau rata-rata 23-24 hari per bulan. Curah hujan yang paling besar terjadi pada bulan September dengan jumlah hari hujan sebanyak 18 hari dan curah hujan mencapai 382 mm³. Sementara curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan hanya sebanyak 14 hari dengan curah hujan hanya mencapai 124 mm³.

Curah hujan yang tinggi setiap tahun mengakibatkan kondisi alam Kota Gunungsitoli sangat lembab dan basah dengan rata-rata kelembaban antara 84–91 persen. Di samping itu struktur bantuan dan susunan tanah di Kota Gunungsitoli pada umumnya bersifat labil, mengakibatkan sering terjadinya patahan pada jalan-jalan aspal dan longsor, demikian juga sering ditemui daerah aliran sungai yang berpindah-pindah.

Keadaan iklim Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara dalam satu tahun rata-rata 26,76°C, dengan rata-rata minimum per bulan sebesar 26, 0°C dan rata-rata maksimum 27,9°C. Kecepatan angin rata-rata dalam satu bulan sebesar 5,17 Knot/Jam.

Tabel 2.17 :
Kondisi Curah hujan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	144	30
2.	Februari	124	14

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
3.	Maret	199	18
4.	April	270	25
5.	Mei	336	26
6.	Juni	155	21
7.	Juli	330	26
8.	Agustus	334	24
9.	September	382	18
10.	Oktober	365	28
11.	November	309	29
12.	Desember	278	27

Sumber : Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Tabel 2.18 :

Kondisi Rata-Rata Suhu dan Kelembaban di Kota Gunungsitoli Tahun 2020

No	Bulan	Rata-Rata Suhu Udara Temperatur (°C)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
1.	Januari	27,1	88
2.	Februari	27,9	84
3.	Maret	27,6	88
4.	April	27,2	91
5.	Mei	26,8	90
6.	Juni	26,8	88
7.	Juli	26,4	88
8.	Agustus	26,7	86
9.	September	26,2	87
10.	Oktober	26,0	89
11.	November	26,3	89
12.	Desember	26,1	90

Sumber : Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Letak geografis Kota Gunungsitoli yang berada pada kawasan kepulauan Nias berpotensi terjadi bencana gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Potensi bencana alam geologi di Pulau Nias tersebut diakibatkan oleh kondisi geologi dan aktivitas tektonik yang telah berlangsung sejak Oligosen (sekitar 30 juta tahun lalu) sampai saat ini.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Kota Gunungsitoli memiliki luas lahan 27,899 Ha yang sebagian berupa kawasan pertanian lahan kering seluas 16.631,7 Ha (59,61%), kawasan hutan seluas 8.154,9 Ha (29,99%) dan kawasan permukiman seluas 1.034,5 Ha (3,7%). Bila ditinjau dari kondisi penggunaan lahan saat ini, Kota Gunungsitoli masih memiliki lahan yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai kawasan budaya dengan tetap berpedoman pada pembangunan yang berkelanjutan. Secara rinci jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19 :
Jenis Penggunaan Lahan

No.	Jenis Guna Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
1	Area Terbuka	218,61	0,7836
2	Badan Air	104,43	0,3743
3	Hamparan Pasir	17,10	0,0613
4	Hutan	8.154,96	29,2299
5	Hutan Mangrove	111,04	0,3980
6	Jalan	196,49	0,7043
7	Kawasan Perkebunan	290,83	1,0424
8	Kawasan Hankam	4,77	0,0171
9	Kawasan Hutan	3,85	0,0138
10	Kawasan Industri	30,71	0,1101
11	Kawasan Kesehatan	6,67	0,0239
12	Kawasan Olahraga	2,26	0,0081
13	Kawasan Pariwisata dan Hiburan	26,78	0,0960
14	Kawasan Pendidikan	60,11	0,2155
15	Kawasan Perdagangan dan Jasa	59,47	0,2132
16	Kawasan Pergudangan	1,27	0,0046
17	Kawasan Peribadatan	14,90	0,0534
18	Kawasan Perkantoran dan Perekonomian	21,43	0,0768
19	Kawasan Permukiman	1.034,54	3,7081
20	Kawasan Persampahan	8,32	0,02981
21	Kawasan Persampahan	8,29	0,0297
22	Kawasan Persampahan	0,01	0,00001
23	Kawasan Peternakan	3,22	0,0115
24	Kawasan RTH	18,05	0,0647
25	Kawasan Sosial	12,96	0,0465
26	Kawasan Transportasi	45,96	0,1647
27	Pertanian Lahan Kering	16.631,70	59,6133

No.	Jenis Guna Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
28	Sawah Eksisting	818,57	2,9340
29	Telekomunikasi	0,33	0,0012
	Total	27.907,63	100,03

Sumber : Materi Teknis RDTR, Dinas PUPR Kota Gunungsitoli

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.7.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budaya sesuai dengan fungsi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011–2031 pengembangan kawasan budidaya di Kota Gunungsitoli terdiri dari :

1. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya dengan dominasi kegiatan perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Luas pengembangan kawasan perikanan di Kota Gunungsitoli yang terdiri dari :

- a. Kawasan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli, Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli Idanoi.
- b. Kawasan budidaya air tawar meliputi seluruh Kecamatan di Wilayah Kota Gunungsitoli.
- c. Kawasan budidaya air payau meliputi Desa Teluk Belukar, Desa Afia, Desa Olora (Kecamatan Gunungsitoli Utara); dan Desa Siwalubanua I, Desa Tetehosi I, Desa Idanotae, Desa Fowa (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi).
- d. Kawasan industri perikanan meliputi Desa Saewe, Desa Ombolata Ulu (Kecamatan Gunungsitoli), Desa Olora, Desa Teluk Belukar (Kecamatan Gunungsitoli Utara), Desa Fowa, Desa Humene, (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi), dan Desa Luaha Laraga (Kecamatan Gunungsitoli Selatan).

- e. Kawasan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan meliputi Desa Sisarahili Gamo, Desa Ombolota Ulu (Kecamatan Gunungsitoli), Desa Olora, Desa Teluk Belukar (Kecamatan Gunungsitoli Utara), dan Desa Luaha Laraga (Kecamatan Gunungsitoli Selatan).
 - f. Kawasan Keramba Jaring Apung (KJA) meliputi Muara Indah/Laguna Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara.
 - g. Kawasan konservasi mangrove di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pertanian lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 1.164 Ha yang meliputi :
- a. Kecamatan Gunungsitoli Utara (D.I Sowu, D.I To'o Hilimbowo, D.I Gawu-gawu Bouso, D.I Sinoto Bodalu, D.I Umbu, D.I Afia, D.I Bori, , D.I Hiligafia, D.I Lewuoguru Sowu).
 - b. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (D.I Ndra Humene, D.I Umbu Dahana, D.I Madawa, D.I Bozuni, D.I Nikholo, D.I Namosebolo).
 - c. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (D.I Nazalou Lolowua, D.I Bozilimo, D.I Megana).
 - d. Kecamatan Gunungsitoli (D.I. Bodowu).
 - e. Kecamatan Gunungsitoli Barat (D.I. Nou).

3. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pengembangan kawasan pariwisata di kota Gunungsitoli meliputi pariwisata alam, pariwisata bahari dan pariwisata lainnya seluas kurang lebih 75 Ha yang meliputi :

- a. Objek Wisata Air Terjun Humogo;
- b. Objek Wisata Gua Togindrawa;

- c. Objek Wisata Muara Indah;
- d. Tugu Gempa;
- e. Taman Yaahowu.
- f. Tugu Durian.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli. Pengembangan kawasan industri terletak di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara (Desa Teluk Belukar dan Desa Hilimbowo Olora).

5. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Gunungsitoli terdiri dari :

- a. Pasar Tradisional
- b. Pasar Modern
- c. Kegiatan pergudangan

Pasar yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan di Kota Gunungsitoli antara lain:

- a. Pasar rakyat di Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara.
- b. Pasar rakyat di Desa Hilimbawadesolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
- c. Pusat pasar sembako, pasar ikan (sore), pasar pagi, pasar induk, pasar Ya'ahowu, Kecamatan Gunungsitoli.
- d. Pekan Hiligodu, Tetehosi, Simanaere, Hiligara, Somolo-molo di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
- e. Pekan Humene, Fadoro Idanoi, Ombolata Idanoi , Onowaembo Idanoi, Fowa, dan Samasi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
- f. Pasar Idanoi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
- g. Pasar Tabaloho di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
- h. Pasar Fondrako di Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Pengembangan kegiatan pergudangan di wilayah Kota Gunungsitoli meliputi kawasan pergudangan Olora (Kecamatan Gunungsitoli Utara), pergudangan sekitar PLTD Gunungsitoli (Kecamatan Gunungsitoli) dan kawasan pergudangan (Kecamatan Gunungsitoli Idanoi).

6. Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan adalah kawasan dengan dominasi fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pengembangan kawasan perumahan di Kota Gunungsitoli yaitu seluas lebih 5.237 Ha.

7. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pengembangan kawasan perkantoran di Wilayah Kota Gunungsitoli seluas 114 Ha, yang terdiri dari : area perkantoran pemerintahan skala regional meliputi kawasan area perkantoran di Desa Mudik, Desa Dahana Tabaloho, Desa Saewe (Kecamatan Gunungsitoli) dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, area perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa/kelurahan serta Area perkantoran swasta ditetapkan di pusat pelayanan kota dan di sub pusat pelayanan kota.

8. Kawasan Pendidikan

Pengembangan Kawasan Pendidikan di wilayah Kota Gunungsitoli seluas 90 Ha meliputi :

- a. Pengembangan kawasan perguruan tinggi di wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
- b. Pengembangan kawasan pendidikan dasar dan menengah diarahkan di seluruh sub pusat pelayanan kota
- c. Pengembangan kawasan pendidikan khusus kejuruan

9. Kawasan Kesehatan

Pengembangan Kawasan Kesehatan di wilayah Kota Gunungsitoli meliputi :

- a. Pusat Kesehatan skala kecamatan di seluruh wilayah kecamatan se-Kota Gunungsitoli
- b. Pusat Kesehatan skala desa di seluruh wilayah desa se-Kota Gunungsitoli

10. Kawasan Peribadatan

Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan meliputi gereja, mesjid, vihara, pura di wilayah Kota Gunungsitoli.

11. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan di wilayah Kota Gunungsitoli seluas 99 Ha meliputi Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Gunungsitoli meliputi Komando tingkat Distrik, Komando Resimen, Batalyon di Kecamatan Gunungsitoli dengan luas kurang lebih 2 Ha.

2.1.6.2 Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kawasan lindung di Kota Gunungsitoli terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung dengan luas 2.805 Ha meliputi Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Utara.
 - b. Kawasan resapan air di Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kecamatan Gunungsitoli Utara.
2. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai dengan luas kurang lebih 420 Ha dan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 127 Ha.
3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota berlokasi di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 40 Ha.

- Kawasan ekosistem mangrove meliputi Kawasan Laguna Muara Indah dan Vegetasi Hutan Mangrove di Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara seluas kurang lebih 64 Ha.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kota Gunungsitoli menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi meliputi bencana gempa, tsunami, banjir dan tanah longsor. Dari semua potensi bencana yang ada, bencana gempa bumi tektonik merupakan bencana yang rawan terjadi di Kota Gunungsitoli. Kawasan rawan bencana secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Rawan Banjir.

Daerah yang sering terkena banjir merupakan kawasan dengan permukaannya dibentuk oleh lempung hingga pasir. Banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai membentuk pola yang sebagian mengikuti aliran sungai dan sebagian lagi tak beraturan. Kawasan Kota Gunungsitoli yang sering terkena banjir akibat meluapnya wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya curah hujan. Berdasarkan data BPBD Kota Gunungsitoli, kawasan cukup tinggi mengalami rawan bencana banjir adalah adalah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan Kecamatan Gunungsitoli Utara. Bencana banjir yang terjadi umumnya disebabkan karena adanya luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Idanoi serta adanya kegiatan penggalian tipe c disekitar sungai yang menyebabkan ketinggian bibir sungai rendah dan sungai menjadi dangkal.

**Tabel 2.20 :
Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir di Kota Gunungsitoli**

No .	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha)
1.	Gunungsitoli	766,56
2.	Gunungsitoli Selatan	561,63
3.	Gunungsitoli Utara	2.768,77
4.	Gunungsitoli Idanoi	3.189,79
5.	Gunungsitoli Alo'oa	-
6.	Gunungsitoli Barat	2,62
Jumlah		7.289,37

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2. Kawasan Rawan Tsunami

Terjadinya gelombang tsunami dikarenakan oleh adanya gerakan implusif dari dasar laut atau dasar permukaan air. Gerakan implusif dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik, letusan gunung api, longsoran di dasar laut atau kombinasi ketiganya. Artinya tsunami hanya berpotensi terjadi bila gempa bumi berada di laut dan pada dasar laut terjadi perubahan morfologi akibat perpindahan massa batuan berupa patahan/sesar naik atau sesar turun saat terjadi gempa. Berdasarkan hal tersebut, maka akan ada hubungan antara kekuatan gempa dengan tsunami, dimana potensi tsunami akan terjadi bila kekuatan gempanya lebih besar dari 6,5 SR dan kedalaman gempanya tergolong dangkal (<60 km atau mencapai 80 km). Dari ketiga penyebab tsunami tersebut, tsunami akibat gempa tektonik yang sering terjadi bahkan yang paling banyak menimbulkan bencana, baik korban jiwa maupun harta benda.

Kecepatan bergeraknya tsunami berbanding lurus dengan kedalaman, kecepatan akan tinggi bila di kedalaman dan semakin berkurang kecepatannya pada wilayah atau kedalaman yang dangkal. Kondisi tersebut mengakibatkan ketinggian gelombang saat mencapai pantai meningkat karena terjadi akumulasi air dan diikuti peningkatan energi, terutama di pantai yang cekung atau pantai yang berbentuk teluk atau kawasan pantai yang kemiringan lerengnya tergolong datar.

Di wilayah Kota Gunungsitoli, kawasan yang paling rawan terjadi tsunami adalah kawasan pantai timur dengan ketentuan bila terjadi gempa yang bersumber dari laut di bagian timur dengan kekuatan > 6,5 atau >7 SR atau bila sumber gempa berasal dari bagian utara Pulau Nias dan dengan kekuatan yang lebih besar dari 8 atau 9 SR. Hal lain yang juga mempengaruhi terjadi tsunami di sepanjang pantai adalah bentuk topografi serta bentuk pantainya, terutama pada pantai dengan topografi datar dan berbentuk teluk serta keberadaan sungai besar yang dapat memicu tingginya perluasan genangan tsunami. Berdasarkan data BPBD Kota Gunungsitoli luas wilayah rawan bencana tsunami dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21 :
Luas Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Kota Gunungsitoli

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Tsunami (Ha)
1.	Gunungsitoli	657,48
2.	Gunungsitoli Selatan	350,83

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Tsunami (Ha)
3.	Gunungsitoli Utara	1.755,69
4.	Gunungsitoli Idanoi	1.420,23
5.	Gunungsitoli Alo'oa	-
6.	Gunungsitoli Barat	-
	Jumlah	4.184,23

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

3. Rawan Bencana Gempa Bumi

Potensi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi terutama disebabkan oleh adanya goncangan tanah (*ground shaking*), geseran tanah (*ground faulting*) dan gelombang pasang (tsunami). Besarnya goncangan saat terjadi gempa bumi ditandai oleh magnitudo atau besarnya kekuatan gempa, kedalaman dan jarak dari pusat gempa serta sifat fisik maupun struktur batuan dan sifat dari bangunan baik jenis, kualitas maupun umur bangunan.

Pusat-pusat gempa terutama terjadi di sepanjang pantai barat, utara, timur dan juga terjadi di daratan dengan kedalaman umumnya dangkal (< 60 km) dengan kekuatan magnitudo rata-rata berkisar 0-3,9 SR, sebagian berkekuatan 4-4,9 dan hanya beberapa berkekuatan 5-9,9 SR. Skala Intensitas gempa umumnya berkisar VI-IX MMI (*Modified Mercalli Intensity*) untuk kekuatan gempa 6-9 SR, untuk gempa bumi dengan kekuatan < 6 SR intensitas gempa lebih kecil dari skala V atau IV MMI.

Peristiwa gempa 28 Maret 2005 menyebabkan kehancuran yang signifikan di wilayah Kota Gunungsitoli. Kehancuran tersebut terutama disebabkan oleh kondisi batuan yang bersifat kurang kompak (endapan alluvial, korall) mengalami goncangan yang lebih kuat saat terjadi gempa. Ditambah lagi dengan jumlah bangunan yang cukup banyak dan rapat dan dengan kondisi/kualitas bangunan yang kurang memadai dibangun di atas alluvial atau timbunan lahan terumbu karang/koral. Kondisi demikian yang menyebabkan resiko bencana gempa di wilayah Gunungsitoli tergolong tinggi. Melihat kondisi geologi/tektonik Pulau Nias yang memang sangat rawan terjadi gempa, maka berdasarkan kondisi kegempaan yang umumnya berkekuatan < 3,9-4,9 SR dengan kedalaman dangkal dan dengan memperhatikan kondisi batuan penyusun serta struktur geologi yang berkembang, maka potensi bencana gempa bumi di Kota Gunungsitoli dibagi atas dua, yaitu:

- a. Kawasan rawan bencana gempa bumi sangat tinggi, berada pada wilayah yang disusun oleh batuan yang bersifat lepas atau kurang kompak, yaitu endapan alluvial (Qa) dan terumbu karang dari Formasi Gunungsitoli (QTg). Kawasan ini terutama di Kecamatan Gunungsitoli Utara, bagian timur (sepanjang pantai) Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan.
- b. Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, berada pada daerah yang disusun batuan sedimen dari Formasi Gomo (Tmpg) dan Formasi Lölömatua (Tml), yaitu di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Idanoi, serta dibagian barat Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan. Berdasarkan data BPBD Kota Gunungsitoli luas wilayah rawan bencana gempa di Kota Gunungsitoli dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 2.22 :
Luas Wilayah Rawan Bencana Gempa di Kota Gunungsitoli**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Rawan Gempa (Ha)
1.	Gunungsitoli	10.909
2.	Gunungsitoli Selatan	5.685
3.	Gunungsitoli Utara	7.973
4.	Gunungsitoli Idanoi	13.478
5.	Gunungsitoli Alo'oa	6.021
6.	Gunungsitoli Barat	2.870
Jumlah		46.936,00

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

4. Bencana Longsor/Gerakan Tanah

Potensi gerakan tanah di Kota Gunungsitoli berdasarkan kondisi geologi dipengaruhi oleh kondisi stratigrafi batuan sedimen Formasi Lölömatua dan Formasi Gomo yang terdiri dari perselingan perlapisan batu pasir dibagian atas dan batu lempungan dibagian bawah.

Bila musim hujan atau curah hujan cukup tinggi, akan terjadi peningkatan berat masa batuan dibagian atas dan mengakibatkan gaya pendorong masa batuan di atas lereng lebih besar dibanding gaya penahanan dan akhirnya terjadi pergerakan masa batuan/tanah atau longsoran. Potensi longsoran juga dapat terjadi pada batuan yang telah mengalami pelapukan dan menghasilkan batuan lapuk yang cukup tebal. Bila kondisi batuan demikian berada pada topografi dengan kemiringan lereng yang besar, dan dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi, juga dapat terjadi longsor. Bila kondisi batuan demikian

berada pada topografi dengan kemiringan lereng yang besar, dan dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi, juga dapat terjadi longsor. Curah hujan di Kota Gunungsitoli tergolong dapat memicu terjadinya longsor atau sebesar 2500-3500 mm/tahun

Curah hujan yang juga tergolong tinggi dan guncangan gempa bumi yang memang sering terjadi di wilayah Pulau Nias serta adanya aktivitas manusia yang mengurangi kemampuan lahan menyerap air menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka wilayah Kota Gunungsitoli yang rentan terhadap bencana longsor terutama di Kecamatan Gunungsitoli (terutama di Desa Sisarahili Sisambualaha bagian barat daya), Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (di Desa Lölölawo) Kecamatan Gunungsitoli Barat (terutama di Desa Lölömoyo Tuhemberua), dan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (terutama di Desa Hilimbawa Desõlõ, Desa Tetehõsi I, Desa Tetehõsi II) Kecamatan Gunungsitoli Selatan (di Desa Lölölakha, Desa Ombölata Simaneri, Hiligodu, Onozitoli Tabaloho, Hiligara, Ononamõlõ I Lot), luas kawasan rawan bencana longsor di Kota Gunungsitoli disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23 :
Luas Wilayah Rawan Bencana Longsor di Kota Gunungsitoli

No .	Kecamatan	Luas Wilayah Longsor (Ha)
1.	Gunungsitoli	5.983,62
2.	Gunungsitoli Selatan	4.626,63
3.	Gunungsitoli Utara	3.412,94
4.	Gunungsitoli Idanoi	9.597,15
5.	Gunungsitoli Alo'oa	4.431,89
6.	Gunungsitoli Barat	2.440,64
Jumlah		30.492,87

Sumber : BPBD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.2 Aspek Demografi

2.2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 sebanyak 135.797 jiwa yang terdiri atas 66.271 jiwa penduduk laki-laki dan 69.621 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk tahun 2020 mencapai 277 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Data lengkap jumlah dan struktur penduduk Kota Gunungsitoli diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 2.24 :
Jumlah Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Gunungsitoli	30.213	31.349	61.562
2	Gunungsitoli Selatan	7.181	7.550	14.731
3	Gunungsitoli Utara	8.939	9.585	18.524
4	Gunungsitoli Idanoi	11.914	12.649	24.563
5	Gunungsitoli Alo'oa	3.866	4.106	7.972
6	Gunungsitoli Barat	4.158	4.287	8.445
Total Penduduk		66.271	69.526	135.797

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli
Tahun 2021

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Kota Gunungsitoli
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020



Sumber : BPS, Kota Gunungsitoli, 2021.

Berdasarkan piramida penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2020 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kelompok umur tertinggi yaitu pada usia 0-4 tahun sebanyak 15.127 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan kelompok umur terendah yaitu pada usia 60-64 tahun sebanyak 3.625 jiwa. Dari komposisi tersebut dapat diketahui karakteristik piramida penduduk Kota Gunungsitoli merupakan kategori Ekspansif (Muda), dimana jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua.

2.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2000-2010 yaitu sebesar 1,06% dan mengalami penurunan pada periode Tahun 2010-2020 menjadi 0,73%, dengan laju pertumbuhan tertinggi berada di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebesar 1,45%. Gambaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan wilayah kecamatan kurun waktu 2010-2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.25:
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2000–2010 dan Tahun 2010–2020

No	Kecamatan	2000	2010	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
						(2000-2010)	(2010-2020)
1	Gunungsitoli Idanoi	22.414	21.482	22.485	23.674	-0,36	0,94
2	Gunungsitoli Selatan	13.046	13.739	14.707	14.806	0,44	0,73
3	Gunungsitoli Barat	7.663	7.436	7.813	8.007	-0,25	0,72
4	Gunungsitoli	46.604	60.625	72.843	63.655	2,23	0,47
5	Gunungsitoli Alo'oa	6.429	6.708	7.037	7.781	0,36	1,45
6	Gunungsitoli Utara	15.223	16.212	17.541	18.094	0,53	1,07
	Kota Gunungsitoli	111.379	126.202	142.426	136.017	1,06	0,73

Sumber : *Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS*

2.2.3 Dinamika Penduduk

Dinamika Penduduk merupakan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dimana ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Pada periode tahun 2016–2020 tingkat kelahiran di Kota Gunungsitoli terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana tingkat kelahiran tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu mencapai 15.170 kelahiran. Tingkat kematian mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016–2020, dimana pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, pada tahun 2019

menurun dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan. Berikut tabel yang menggambarkan kondisi dinamika penduduk Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.26 :
Jumlah Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan
Tahun 2016-2020 (Jiwa)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gunungsitoli Idanoi	1.069	2.144	2.815	5.432	4.370
2	Gunungsitoli Selatan	578	1.254	1.185	1.503	2.290
3	Gunungsitoli Barat	467	620	728	3.685	650
4	Gunungsitoli	3.233	2.729	4.405	1.730	3.824
5	Gunungsitoli Alo'oa	459	1.062	474	2.044	329
6	Gunungsitoli Utara	899	923	3.160	776	559
	Kota Gunungsitoli	6.705	8.732	12.767	15.170	12.022

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Tabel 2.27 :
Jumlah Akta Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan
Tahun 2016-2020 (Jiwa)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gunungsitoli Idanoi	361	388	226	401	443
2	Gunungsitoli Selatan	93	121	128	149	197
3	Gunungsitoli Barat	70	101	70	288	56
4	Gunungsitoli	82	202	544	160	488
5	Gunungsitoli Alo'oa	17	78	40	131	41
6	Gunungsitoli Utara	46	73	261	78	77
	Kota Gunungsitoli	669	963	1.269	1.207	1.302

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli
Tahun 2021

2.2.4 Distribusi dan Sebaran Penduduk

Distribusi dan persebaran penduduk merupakan bentuk dari merata atau tidaknya penyebaran penduduk di suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Faktor yang menyebabkan persebaran dan kepadatan penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis serta faktor kebudayaan dan teknologi.

Berdasarkan data tahun 2020, distribusi dan sebaran penduduk Kota Gunungsitoli sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Gunungsitoli yaitu sebesar 45,33% dari total jumlah penduduk yang ada dengan tingkat kepadatan mencapai 564 jiwa/km². Hal tersebut

mengindikasikan bahwa sebaran penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah dan hanya terpusat pada satu kecamatan sehingga berdampak pada munculnya kawasan kumuh serta permasalahan pada pengelolaan lingkungan perkotaan. Berikut tabel yang mengambarkan distribusi dan sebaran penduduk Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.28 :
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Gunungsitoli Tahun 2020

No	Kecamatan	Percentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Gunungsitoli	45,33%	564
2	Gunungsitoli Selatan	10,85%	259
3	Gunungsitoli Utara	13,64%	232
4	Gunungsitoli Idanoi	18,09%	182
5	Gunungsitoli Alo'oa	5,87%	132
6	Gunungsitoli Barat	6,22%	294

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.2.5 Komposisi Penduduk

Komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Bila ditinjau dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Gunungsitoli dengan lulusan SD mencapai 20.244 jiwa, SMP 9.854 jiwa serta lulusan Perguruan Tinggi/Universitas mencapai 9.600 jiwa. Selanjutnya untuk komposisi agama yang dianut, berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli tahun 2020, jumlah penganut agama terbesar adalah agama Kristen Protestan sebesar 116.435 orang.

Tabel 2.29 :
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sekolah Dasar atau lebih rendah	20.244
2	Sekolah Menengah Pertama	9.854
3	Sekolah Menengah Atas	12.623
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	8.379
5	Diploma I/II/III/Akademi	3.115

No	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
6	Universitas	9.600
	Tolal	63.815

Sumber : *Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS*

Tabel 2.30 :
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2020

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Gunungsitoli Idanoi	2.114	19.412	2.377	-	-
2	Gunungsitoli Selatan	256	12.261	1.136	-	-
3	Gunungsitoli Barat	13	13.015	360	-	-
4	Gunungsitoli	15.331	51.010	5.634	-	328
5	Gunungsitoli Alo'oa	24	6.980	152	-	-
6	Gunungsitoli Utara	4.241	13.757	704	-	-
	Kota Gunungsitoli	21.979	116.435	10.363	-	328

Sumber : *Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli Tahun 2020*

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya, dan olahraga.

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh potensi yang terdapat pada suatu wilayah yang akan dibangun. Secara umum potensi utama Kota Gunungsitoli terlihat meliputi 3 sektor utama yaitu :

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Peternakan
- c. Sektor Kelautan dan Perikanan
- d. Sektor Perdagangan dan Jasa

Keempat sektor diatas merupakan sektor yang telah dikembangkan dan selanjutnya akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi skala prioritas dalam setiap perencanaan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai bagian dalam pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) atau juga menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Gunungsitoli adalah sebesar Rp.5.776,11 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah Rp.5.513,92 miliar. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Gunungsitoli adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dengan besar kontribusi sebesar Rp.1.533.26 miliar, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar Rp.1.171,83 miliar, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.864,51 miliar.

**Tabel 2.31 :
Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)**

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	595.79	663.06	736.44	805.18	864.51
B. Pertambangan dan Penggalian	115.09	126.98	140.21	155.51	159.97
C. Industri Pengolahan	7.45	8.15	8.91	9.78	10.32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.48	3.98	4.47	4.99	5.35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.51	4.98	5.48	6.02	6.23
F. Konstruksi	884.32	990.70	1095.48	1202.95	1171.83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1017.87	1.141	1273.02	1405.32	1533.26
H. Transportasi dan Pergudangan	351.44	392.01	435.59	482.21	489.86

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.54	174.59	195.17	217.77	240.27
J. Informasi dan Komunikasi	65.86	72.10	80.26	89.63	95.29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	136.82	149.55	163.35	178.25	189.97
L. Real Estate	213.70	239.74	265.78	292.98	313.57
M. Jasa Perusahaan	12.99	14.53	16.16	17.75	18.59
N. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	216.57	241.47	270.82	303.94	316.21
O. Jasa Pendidikan	208.79	229.98	253.59	279.08	293.13
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.78	34.41	38.65	43.05	47.05
Q. Jasa lainnya	14.21	15.83	17.64	19.51	20.68
Produk Domestik Regional Bruto	4.034,20	4.503,05	5.001,03	5.513,92	5.776,11

Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021

Sementara untuk PDRB atas dasar harga konstan 2020 adalah sebesar 3.441,65 miliar rupiah, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah Rp. 3.428,45 miliar. PDRB atas harga konstan juga digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun. Berdasarkan harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah sebesar 0,38%, mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 6,05%.

Tabel 2.32 :
Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	427.37	449.22	472.32	493.97	499,32
B. Pertambangan dan Penggalian	78.20	81.79	85.60	89.85	90,00

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
C. Industri Pengolahan	5.34	5.55	5.77	6.01	6,10
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.22	3.45	3.66	3.88	4,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.16	3.29	3.42	3.55	3,64
F. Konstruksi	597.54	637.65	679.60	724.71	681,68
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	785.12	839.30	897.35	959.91	989,82
H. Transportasi dan Pergudangan	236.33	251.38	267	283.93	282,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101.81	107.77	114.24	121.46	126,34
J. Informasi dan Komunikasi	63.05	66.59	70.52	74.80	79,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	92.50	96.94	101.18	105.42	109,96
L. Real Estat	138.39	145.16	152.21	159.48	162,80
M. Jasa Perusahaan	8.14	8.56	9.02	9.50	9,59
N. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	141.70	147.70	155.24	164.65	163,38
O. Jasa Pendidikan	164.84	173.74	183.24	193.01	198,30
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.06	21.05	22.15	23.38	23,59
Q. Jasa lainnya	9.58	10	10.44	10.93	10,94
Produk Domestik Regional Bruto	2.876,34	3.049,12	3.232,97	3.428,45	3.441,65

Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021,BPS

PDRB Kota Gunungsitoli dapat dilihat dari distribusi menurut lapangan usaha untuk mengetahui sejauh mana kontribusi lapangan usaha dalam menghasilkan PDRB setiap tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) dan sektor konstruksi menyumbang hampir setengah persentase PDRB setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2020 kedua sektor tersebut masih tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Perbandingan antara lapangan usaha terhadap distribusi persentase PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.33 :
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

Kategori/Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,77	14,72	14,73	14,6	14,97
B Pertambangan dan Penggalian	2,85	2,82	2,8	2,82	2,77
C Industri Pengolahan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
F Konstruksi	21,92	22,00	21,91	21,82	20,29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,23	25,34	25,46	25,49	26,54
H Transportasi dan Pergudangan	8,71	8,71	8,71	8,75	8,48
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,83	3,88	3,90	3,95	4,16
J Informasi dan Komunikasi	1,63	1,60	1,60	1,63	1,65
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39	3,32	3,27	3,23	3,29
L Real Estat	5,30	5,32	5,31	5,31	5,43
M,N Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,37	5,36	5,42	5,51	5,47
P Jasa Pendidikan	5,18	5,11	5,07	5,06	5,07
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,76	0,77	0,78	0,81

Kategori/Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
R,S,T,U Jasa lainnya	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

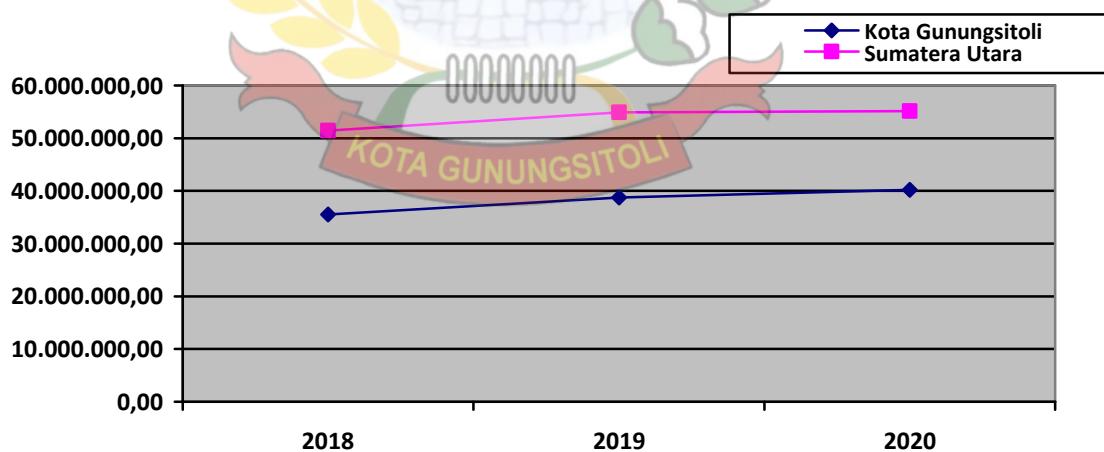
Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021,BPS

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara.

PDRB per kapita Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 sebesar Rp. 40,17 juta meningkat bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 sebesar Rp. 38,71 juta serta menempati urutan ke-20 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara umum, PDRB per kapita Kota Gunungsitoli masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 55,17 juta.

Grafik 2.2
PDRB Kota Gunungsitoli
Tahun 2018 s.d. 2020



Sumber data : Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS

2.3.1.3 Laju Inflasi

Sejak Bulan Januari tahun 2020, Kota Gunungsitoli telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu kota pengukuran inflasi daerah di Sumatera Utara disamping Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

Pada tahun 2020, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi dan deflasi. Dalam perkembangan laju inflasi sepanjang Tahun 2020 diketahui bahwa Kota Gunungsitoli telah mengalami 3 kali deflasi yaitu pada Bulan Februari, April dan Bulan Juli. Komoditas yang paling berpengaruh terhadap laju inflasi antara lain cabe keriting, bawang merah, semen, rokok, ikan asin, daging babi dan daging ayam. Sedangkan penyumbang deflasi terbesar antara lain di sektor transportasi yaitu tiket pesawat. Berikut tabel yang menggambarkan laju inflasi Kota Gunungsitoli.

**Tabel 2.34 :
Laju Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2020**

No	Bulan	Laju Inflasi (%)	Keterangan
1	Januari	1.31	
2	Februari	0.73	Deflasi
3	Maret	0.43	
4	April	0.71	Deflasi
5	Mei	0.37	
6	Juni	0.22	
7	Juli	0.01	Deflasi
8	Agustus	0.61	
9	September	1.00	
10	Oktober	0.71	
11	November	0.15	
12	Desember	1.87	

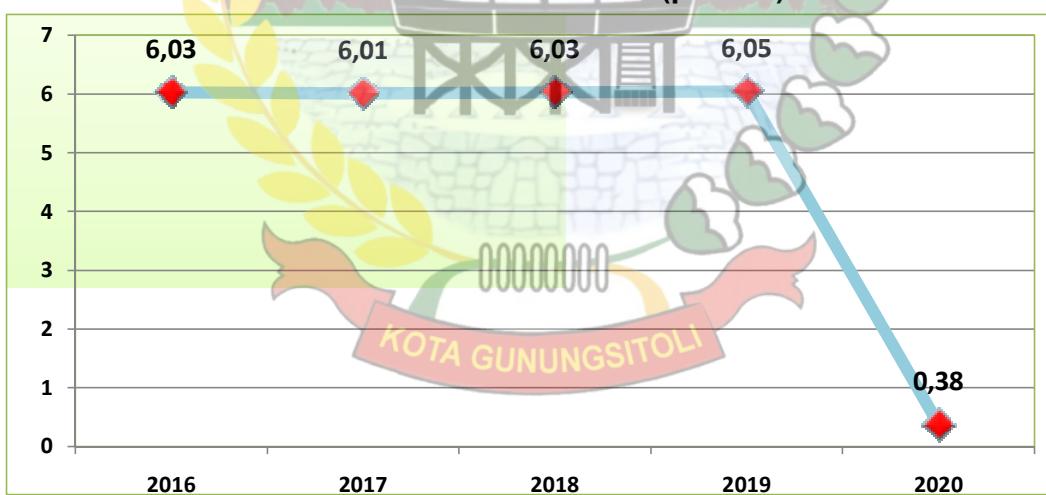
Sumber : *Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS*

2.3.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Gunungsitoli periode 2016–2020 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni pada tahun 2016 sebesar 6,03%, tahun 2017 sebesar 6,01%, tahun 2018 sebesar 6,03% dan tahun 2019 sebesar 6,05%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan akhir. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori konstruksi yang selalu tumbuh di atas 5% setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Sementara pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2020 berada pada angka 0,38% sebagai akibat/dampak Pandemi Covid-19. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020.

**Grafik 2.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2020 (persen)**

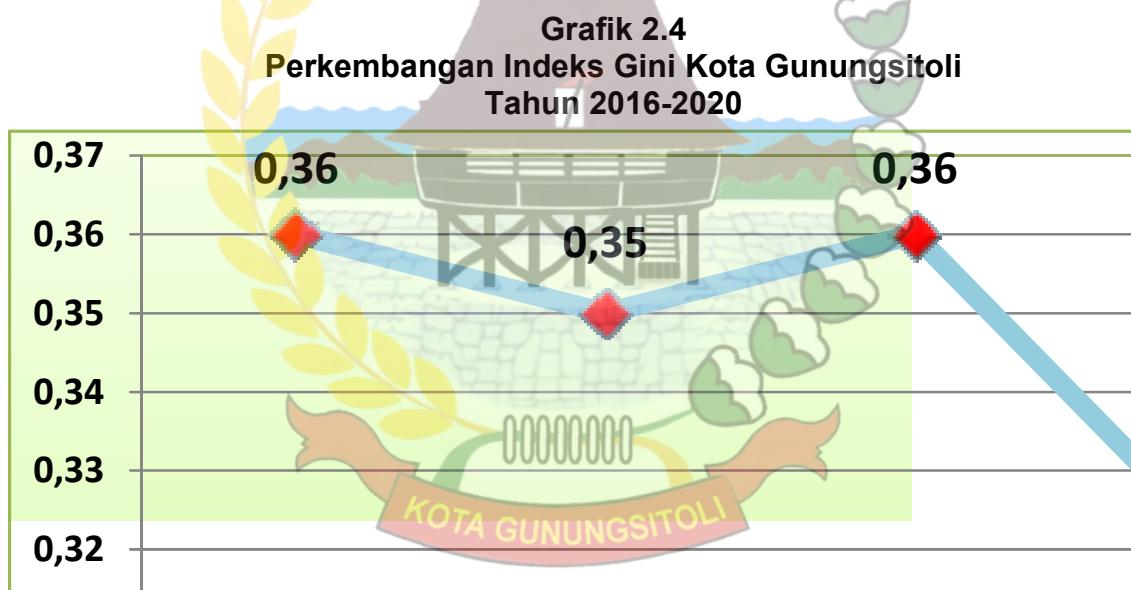


Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi adalah pelaksanaan program prioritas dalam bidang infrastruktur dan ekonomi secara simultan dan berkesinambungan. Sedangkan yang menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020 yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Indeks Gini (Gini ratio) atau koefisien gini Kota Gunungsitoli merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dimana koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila *gini ratio* bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai *gini ratio* lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 0,4 berarti ketimpangan rendah. Nilai *gini ratio* antara 0,4 sampai dengan 0,5 berarti ketimpangan sedang. Nilai *gini ratio* lebih dari 0,5 sampai dengan kurang dari 1 berarti ketimpangan tinggi.

Laju indeks gini Kota Gunungsitoli mengalami tren penurunan dalam kurun periode 5 Tahun terakhir. Pada Tahun 2016 indeks gini tercatat sebesar 0,36 dan mengalami penurunan sebesar 0,32 pada Tahun 2020 dengan klasifikasi ketimpangan rendah. Perkembangan laju indeks gini Kota Gunungsitoli digambarkan melalui grafik sebagai berikut :



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli

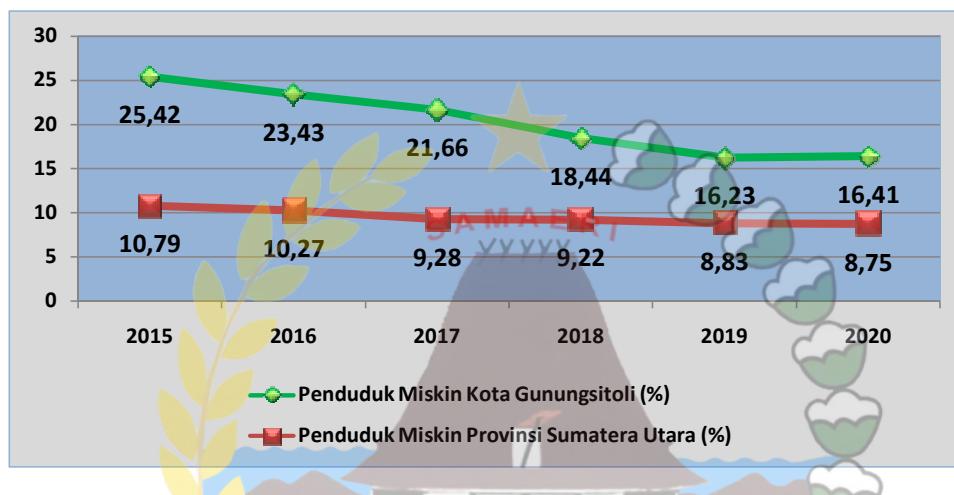
2.3.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 23.540 orang atau sebesar 16,41 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli mengalami kenaikan 480 orang bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 sebanyak

23.060 orang atau sebesar 16,23%. Persentase penduduk miskin Kota Gunungsitoli berada pada peringkat 29 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kota Gunungsitoli sebesar Rp. 370.967 per kapita per bulan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, sebesar Rp. 339.671 per kapita per bulan.

Grafik 2.5
Trend Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli
Tahun 2015-2020 (Persen)



Sumber: *Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS*

Faktor Pendukung yang menekan penurunan Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli antara lain :

1. Pemberian pupuk gratis bagi kelompok masyarakat petani;
2. Penyediaan bantuan Beras Kesejahteraan Daerah beras miskin (Rastrada);

Sedangkan Faktor Penghambat yang menyebabkan peningkatan Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Tabel. 2.35 :
Percentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun (Persen)				Peringkat
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Deli Serdang	4,62	4,13	3,89	3,88	1
2	Binjai	6,75	5,88	5,66	5,71	2
3	Padangsidimpuan	8,25	7,69	7,26	7,40	3
4	Serdang Bedagai	9,30	8,22	7,90	7,97	4
5	Medan	9,11	8,25	8,08	8,01	5
6	Dairi	8,87	8,20	7,70	8,04	6
7	Pematangsiantar	10,10	8,70	8,63	8,27	7
8	Labuhanbatu Selatan	11,63	10,00	8,94	8,34	8
9	Padang Lawas	9,10	8,41	8,28	8,37	9
10	Labuhanbatu	8,89	8,61	8,44	8,44	10
11	Simalungun	10,65	9,31	8,81	8,46	11
12	Tapanuli Selatan	10,60	9,16	8,60	8,47	12
13	Karo	9,97	8,67	8,23	8,70	13
14	Toba Samosir	10,19	8,67	8,60	8,71	14
15	Asahan	11,67	10,25	9,68	9,04	15
16	Mandailing Natal	11,02	9,58	9,11	9,18	16
17	Pakpak Bharat	10,53	9,74	9,27	9,28	17
18	Humbang Hasundutan	9,85	9,00	8,75	9,36	18
19	Tapanuli Utara	11,35	9,75	9,48	9,37	19
20	Labuhanbatu Utara	11,28	10,12	9,57	9,53	20
21	Padang Lawas Utara	10,70	10,06	9,60	9,70	21
22	Langkat	11,15	10,20	9,91	9,73	22
23	Tebing Tinggi	11,90	10,27	9,94	9,85	23
24	Batu Bara	12,48	12,57	12,14	11,88	24
25	Sibolga	13,69	12,38	12,36	11,95	25
26	Tapanuli Tengah	14,66	13,17	12,53	12,38	26
27	Samosir	14,72	13,38	12,52	12,48	27
28	Tanjungbalai	14,46	14,64	14,04	13,33	28
29	Gunungsitoli	21,66	18,44	16,23	16,41	29

No	Kabupaten/Kota	Tahun (Persen)				Peringkat 2020
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
30	Nias	18,11	16,37	15,94	16,60	30
31	Nias Selatan	18,48	16,65	16,45	16,74	31
32	Nias Utara	29,06	26,56	24,99	25,07	32
33	Nias Barat	27,23	26,72	25,51	25,69	33
	Sumatera Utara	10,22	9,22	8,83	8,75	
	Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	

Sumber :BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode 2011-2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) secara umum mengalami penurunan. Pada Maret 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 2,59 pada Maret 2019 menjadi 1,74 pada Maret 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,54 menjadi 0,30 pada periode yang sama. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, sedangkan penurunan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Gunungsitoli semakin rendah.

Grafik 2.6
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
 Kemiskinan (P2) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2020**



Sumber: Berita Resmi Statistik Tahun 2021, BPS

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan. Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melalui angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.2.1 Angka Melek Huruf

Manfaat dari Angka Melek Huruf yaitu untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Pada Tahun 2020 Angka Melek Huruf di Kota Gunungsitoli mencapai 96,90% dengan tingkat Buta Huruf sebesar 3,10%. Berikut tabel yang mengambarkan perkembangan Angka Melek Huruf Kota Gunungsitoli 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.36 :
Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2016-2020

Tahun	Melek Huruf (%)	Buta Huruf (%)
2016	97,05	2,95
2017	96,71	3,29
2018	97,57	2,43
2019	97,22	2,78
2020	96,90	3,10

Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS

2.3.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Kota Gunungsitoli telah menempuh pendidikan hingga 8,58 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas III. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,73 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan Rata-rata lama sekolah juga meningkat secara konsisten dari tahun 2016 sebesar 8,20 tahun sampai 8,61 tahun pada Tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Gunungsitoli hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 2,44 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 0,12 persen.

Tabel 2.37 :
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (%)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2016	8,20	0,25
2017	8,40	2,44
2018	8,41	0,12
2019	8,58	2,02
2020	8,61	0,35

Sumber data : BPS Kota Gunungsitoli Tahun 2021,BPS

2.3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Grafik 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli
Tahun 2015-2020



Sumber data : BPS Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Tabel 2.38 :
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kota Se-Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2020

NO	Kabupaten/Kota	Tahun (Persen)				Peringkat 2020
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Medan	79,98	80,65	80,97	80,98	1
2	Pematangsiantar	77,54	77,88	78,57	78,75	2
3	Binjai	74,65	75,21	75,89	75,89	3
4	Deli Serdang	73,94	74,92	75,43	75,44	4
5	Padangsidimpuan	73,81	74,38	75,06	75,22	5
6	Tebing Tinggi	73,9	74,5	75,08	75,17	6
7	Toba Samosir	73,87	74,48	74,92	75,16	7
8	Karo	73,53	73,91	74,25	74,43	8
9	Sibolga	72,28	72,65	73,41	73,63	9
10	Tapanuli Utara	72,38	72,91	73,33	73,47	10
11	Simalungun	71,83	72,49	72,98	73,25	11
12	Labuhanbatu	71	71,39	71,94	72,01	12
13	Labuhanbatu Utara	70,79	71,08	71,43	71,61	13
14	Dairi	70,36	70,89	71,42	71,57	14
15	Labuhanbatu Selatan	70,48	70,98	71,39	71,4	15
16	Langkat	69,82	70,27	70,76	71	16
17	Samosir	69,43	69,99	70,55	70,63	17
18	Asahan	69,1	69,49	69,92	70,29	18
19	Serdang Bedagai	69,16	69,69	70,21	70,24	19
20	Tapanuli Selatan	68,69	69,1	69,75	70,12	20
21	Padang Lawas Utara	68,34	68,77	69,29	69,85	21
22	Gunungsitoli	67,68	68,33	69,30	69,31	22
23	Tapanuli Tengah	67,96	68,27	68,86	69,23	23
24	Humbang Hasundutan	67,3	67,96	68,83	68,87	24
25	Tanjungbalai	67,41	68	68,51	68,65	25
26	Batu Bara	67,2	67,67	68,35	68,36	26
27	Padang Lawas	66,82	67,59	68,16	68,25	27

NO	Kabupaten/Kota	Tahun (Persen)				Peringkat 2020
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
28	Pakpak Bharat	66,25	66,63	67,47	67,59	28
29	Mandailing Natal	65,13	65,83	66,52	66,79	29
30	Nias Utara	60,57	61,08	61,98	62,36	30
31	Nias	60,21	60,82	61,65	61,93	31
32	Nias Selatan	59,85	60,75	61,59	61,89	32
33	Nias Barat	59,56	60,42	61,14	61,51	33
	Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	
	Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	

Sumber : BPS, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia, 2021

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kota Gunungsitoli mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 68,33 menjadi 69,30 pada Tahun 2019 (peringkat 23 dari 33 Kab/Kota Se-Sumatera Utara) dan pada Tahun 2020 tercatat sebesar 69,31. Berdasarkan kriteria UNDP, IPM Kota Gunungsitoli Tahun 2020 berada pada status "sedang". IPM Kota Gunungsitoli tahun 2020 masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Kota Gunungsitoli menempati peringkat ke-22 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah pada bidang pendidikan, disusun sebuah Indeks Pendidikan. Indeks pendidikan dibuat untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidakmerataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian bidang pendidikan secara keseluruhan di suatu daerah.

Indeks pendidikan yang akan dicapai dalam target kurun waktu 2021-2026 memiliki 7 komponen pembentuk utama yaitu : (1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); (2)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD; (3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP; (4) Rasio Ruang Kelas kategori baik SD; (5) Rasio Ruang Kelas kategori baik SMP; (6) Nilai Rata-Rata UN SD dan (7) Nilai Rata-Rata UN SMP.

Keseluruhan komponen diatas membentuk indeks pendidikan secara proporsional dan terukur sehingga akan menggambarkan tingkat pembangunan di bidang pendidikan.

2.3.2.3 Indeks Pengeluaran

Dalam mengukur indeks pengeluaran Kota Gunungsitoli melalui pendekatan Perkembangan Pengeluaran Perkapita/Tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Gunungsitoli mencapai Rp 7,98 juta per tahun, menurun dari Rp. 8,06 juta per tahun pada tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan pengaruh pandemi covid-19 yang cukup berpengaruh dibidang perekonomian masyarakat. Laju pertumbuhan pengeluaran per kapita tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,97 persen, sedangkan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,49 persen. Selama sembilan tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat secara rata-rata tumbuh sebesar 2,40 persen. Pengeluaran per kapita Kota Gunungsitoli tahun 2020 masih berada jauh di bawah pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Utara yang sebesar Rp. 10,42 juta per tahun.

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung yang ditangani serta pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Adapun capaian fokus tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.39 :
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian	63	68	73	76	76
2	Jumlah gedung kesenian	63	68	73	76	76
3	Jumlah klub olahraga	51	51	16	29	29
4	Jumlah gedung olahraga	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator yang kurang optimal adalah jumlah klub olahraga yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 jumlah klub olahraga sebanyak 51 klub kemudian turun menjadi 16 klub pada tahun 2018 dan kembali bertambah menjadi 29 klub di tahun 2019 dan tahun 2020.

Dalam merencanakan pembangunan di bidang Seni Budaya dirumuskan suatu indikator kinerja mandiri yaitu Indeks Budaya Lokal. Indeks budaya lokal terdiri dari beberapa komponen pembentuk utama yaitu :

1. Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun;
2. Persentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya;
3. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan pendidikan berkualitas, yang semakin merata dan mudah di akses oleh masyarakat. Program-program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap kecamatan serta tersedianya beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi. Untuk menangani urusan pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun telah memberikan hasil positif bagi masyarakat.

Pada urusan pendidikan terdapat beberapa indikator meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah dan Angka Melek Huruf (AMH). Berikut tabel yang menguraikan realisasi urusan pendidikan dari Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.40 :
Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kota Gunungsitoli
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK (%)					
	PAUD	44,09	58,12	40,31	69,35	76,41
	SD/MI	105,16	104,02	104,93	101,71	98,38
	SMP/MTs	97,84	112,86	100,07	105,26	107,94
2	APM (%)					

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	SD/MI	105,16	92,76	104,93	85,71	87,54
	SMP/MTs	71,89	74,29	75,25	77,01	80,25
3	Angka Putus Sekolah (%)					
	SD/MI	0,04	0,01	0,29	0,11	0,17
	SMP/MTs	0,06	0,01	0,81	0,65	0,29
4	Angka Melek Huruf (%)	97,05	96,71	97,57	97,22	96,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami perkembangan pada periode Tahun 2016–2020, hal tersebut terlihat dari APK PAUD yang terus mengalami peningkatan yaitu mencapai 76,41% pada Tahun 2020.

Untuk perkembangan capaian kinerja APK SD/MI mengalami penurunan setiap tahunnya dimana pada Tahun 2016 sebesar 105,16% dan pada tahun 2020 turun menjadi 98,38%. Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP rata-rata berada di atas 100 persen, hal ini disebabkan jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP masih terdapat anak usia diatas 15 tahun masih bersekolah di tingkat SMP dan adanya anak-anak yang belum berusia 12 tahun tapi sudah masuk SMP Sedangkan APK SMP/MTs mengalami peningkatan dalam periode 5 tahun terakhir dimana pada Tahun 2016 sebesar 97,84% mengalami kenaikan menjadi 107,94% di Tahun 2020.

Capain indikator APM SD/MI periode tahun 2016–2020 mengalami kondisi yang fluktuasi, dimana pada Tahun 2016 sebesar 105,16% mengalami penurunan 92,76% di Tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 104,93% pada Tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan menjadi 85,71% di Tahun 2019 hingga kemudian pada Tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 87,54%. Namun untuk APM SMP/MTs mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2016 sebesar 71,89% terus mengalami peningkatan menjadi 80,25% di Tahun 2020.

Realisasi untuk indikator Angka Putus Sekolah SD dan SMP dalam kurun waktu 2016–2020 menunjukkan trend yang negatif karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana untuk Angka Putus Sekolah SD/MI pada Tahun 2016 mencapai 0,04% bertambah menjadi 0,17% di Tahun 2020. Sama halnya dengan Angka Putus Sekolah SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 0,06% di tahun 2016 menjadi 0,29% pada tahun 2020. Sedangkan capaian Angka Melek Huruf mengalami fluktuatif dimana pada Tahun 2016 Angka Melek Huruf sebesar 97,05% menjadi 96,14% pada Tahun 2020.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja bidang yang bertujuan untuk melihat ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik serta sarana prasarana penunjang pendidikan. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2016 sebesar 56,61%, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 59,81% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 59,73%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTS Tahun 2016 Rasio Ketersediaan Sekolah sebesar 54,79% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 43,73% dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 43,36%.

Tabel 2.41 :
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	105	105	115	115	115
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	18.548	19.899	19.267	19.227	19.253

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	tahun					
1.3	Rasio	56,61	52,77	59,69	59,81	59,73
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	34	34	40	40	40
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.206	10.580	9.437	9.148	9.226
2.3	Rasio	54,79	32,14	42,39	43,73	43,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

3. Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Rasio Guru/Murid untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2017 sebesar 13,53%, mengalami peningkatan menjadi 14,26% pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 12,74%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Tahun 2017 Rasio Guru/Murid sebesar 11,78 persen, mengalami peningkatan menjadi 14,16% Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 13,14%.

Tabel 2.42 :
Jumlah Guru dan Jenjang Pendidikan Dasar
Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	-	1.419	1.552	1.371	1.487
1.2	Jumlah Murid	-	19.201	20.216	19.556	18.942
1.3	Rasio	13,53	13,03	14,26	12,74	
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	-	753	911	680	758
2.2	Jumlah Murid	-	8.871	9.444	9.629	9.959
2.3	Rasio	11,78	10,37	14,16	13,14	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2020 dapat digambar dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.43 :
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Kota Gunungsitoli Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia dini yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{2.336}{5.574} \times 100\%$	100	41,91
2	Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat SD/MI dan SMP/MTs atau sedang belajar di satuan SD/MI dan SMP/MTs dibagi Jumlah anak usia 7-15 tahun di Kota Gunungsitoli	$\frac{24.259}{28.479} \times 100\%$	100	85,18
	a. Pendidikan pada Sekolah Dasar	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{16.855}{19.253} \times 100\%$	100	87,54

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan SMP dibagi Jumlah anak usia 12-15 tahun di Kota Gunungsitoli	$\frac{7.404}{9.226} \times 100\%$	100	80,25
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah anak usia 7-18 tahun di Kota Gunungsitoli	$\frac{311}{37.580} \times 100\%$	100	0,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.1.2 Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan hal mutlak untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli. Beberapa cara untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat adalah melalui Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup. Perkembangan Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Jumlah kelahiran hidup periode 2016–2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.44 :
Perkembangan Tingkat Kesehatan Masyarakat Kota Gunungsitoli
Tahun 2016 s.d 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup	70,36	70,42	70,67	71,02	71,19
2	Angka Kematian Bayi (21 per 1000 kelahiran hidup)	12,8	18,89	20,11	8,79	13,75
3	Angka Kematian Ibu (28,5 per 1000 kelahiran hidup)	20,6	4,97	15,47	15,5	22,92
4	Jumlah Kelahiran Hidup	2.418	1.712	1.939	1.935	1.745
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) persen	0	4,90	5,80	3,35	2,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Umur Harapan Hidup terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 Harapan Hidup Kota Gunungsitoli sebesar 70,36 tahun terus meningkat mencapai 71,19 tahun ditahun 2020. Umur Harapan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2020 berada di atas umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 69,10 tahun.

Pada Tahun 2016 Angka Kematian Bayi mencapai 12,8 dari 1.000 kelahiran hidup. Dalam kurun waktu 2016-2020, angka kematian tersebut bersifat fluktuatif pada setiap tahunnya. Selaras dengan AKB, pada kurun waktu yang sama angka kematian ibu dan jumlah kelahiran hidup juga mengalami fluktuatif.

Peningkatan sarana dan prasarana maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus terus diupayakan oleh pemerintah, karena sarana dan prasarana kesehatan tersebut sangatlah diperlukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup. Untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal, pemerintah Kota Gunungsitoli dari tahun ke tahun terus membangun sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik/Balai Kesehatan. Selain pemerintah, pihak swasta juga turut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli. Pada tahun 2020 jumlah sarana kesehatan di Kota Gunungsitoli yaitu 8 Unit Puskesmas, 18 Unit Puskesmas Pembantu, 39 Unit Pos Kesehatan Desa, 4 Unit Poliklinik, 25 Unit Praktek Dokter, dan 4 Unit Posyandu. Berikut jumlah fasilitas kesehatan di Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020.

Tabel 2.45 :
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Puskesmas	6	6	6	8	8
2	Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
3	Pos Kesehatan Desa	39	39	39	39	39
4	Poliklinik	40	44	6	4	3
5	Praktek Dokter (Umum/Spesialis)	18	22	23	25	36
6	Posyandu	4	4	4	4	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Tabel 2.46 :
Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli
Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pos Kesehatan Desa	Poliklinik	Praktek Dokter (umum/spesialis)	Posyandu
1	Gunungsitoli	2	4	5	3	36	-
2	Gunungsitoli Idanoi	2	3	12	-	-	-
3	Gunungsitoli Selatan	1	6	3	-	-	-
4	Gunungsitoli Barat	1	2	4	-	-	-
5	Gunungsitoli Alo'oa	1	1	8	-	-	-
6	Gunungsitoli Utara	1	2	7	-	-	-
	Jumlah	8	18	39	3	36	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli 2021

Tenaga kesehatan di Kota Gunungsitoli masih sangat terbatas jumlahnya, terutama Dokter Spesialis. Tahun 2020 jumlah Dokter Spesialis sebanyak 2 orang, Dokter Umum sebanyak 32 orang, Dokter Gigi sebanyak 6 orang, Perawat 175 orang, Bidan 348 orang dan Apoteker 8 orang yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Gunungsitoli. Berikut perkembangan jumlah Tenaga Medis di Kota Gunungsitoli:

Tabel 2.47 :
Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli
Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	2

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Dokter Umum	16	17	23	32	32
3	Dokter Gigi	3	4	6	5	6
4	Perawat	138	161	183	174	175
5	Bidan	179	239	272	286	348
6	Apoteker	1	1	6	8	8
7	DII	50	68	52	59	145

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Tabel 2.48 :
Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Apoteker	DII
1	Gunungsitoli	1	8	2	54	115	2	51
2	Gunungsitoli Idanoi	-	4	1	40	70	2	25
3	Gunungsitoli Selatan	1	8	1	28	49	1	19
4	Gunungsitoli Barat	-	4	1	16	37	1	17
5	Gunungsitoli Alo'oa	-	3	-	15	25	1	72
6	Gunungsitoli Utara	-	5	1	22	52	1	17
Jumlah		2	32	6	175	348	8	145

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Gunungsitoli Tahun 2020 dapat digambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Kota Gunungsitoli Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja	$\frac{1.600}{2.060} \times 100\%$	100	77.67

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%			
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan Dikali 100%	$\frac{1.721}{1.759} \times 100\%$	100	97,84
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar pada tahun berkenaan	$\frac{1.654}{1.745} \times 100\%$	100	94,79

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%			
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{8.194}{9.478} \times 100\%$	100	86,45
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	$\frac{0}{28.852} \times 100\%$	100	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			standar yang ada di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%			
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia 15–59 tahun di kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah Warga Negara usia 15–59 tahun di kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{38.462}{84.413} \times 100\%$	100	45.56
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan	$\frac{6.860}{10.778} \times 100\%$	100	63.65

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dibagi Jumlah semua Warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%			
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah	$\frac{8.105}{34.105} \times 100\%$	100	23.76

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			kerjanya berdasarkan angka prevalensi kota pada tahun berkenaan dikali 100%			
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{1.645}{1.795} \times 100\%$	100	91,64

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan dikali 100%	$\frac{39}{201} \times 100\%$	100	19,40
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang pada tahun berkenaan dibagi Jumlah orang yang terduga TBC pada tahun berkenaan Dikali 100%	$\frac{114}{270} \times 100\%$	100	42,22
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun berkenaan dibagi Jumlah	$\frac{1.082}{2.174} \times 100\%$	100	49,77

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
	(Human Immunodeficiency Virus)	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	orang dengan risiko terinfeksi HIV di kota pada tahun berkenaan dikali 100%			

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur di daerah sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan secara riil dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang aksesibilitas masyarakat di bidang ekonomi. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami beberapa permasalahan, diantaranya pembebasan lahan dan keterbatasan personil dalam pengawasan. Namun demikian, tetap berupaya semaksimal mungkin mensukseskan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan pada bidang kebinamargaan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka tercapainya indikator kinerja daerah. Fokus utama pembangunan yaitu peningkatan infrastruktur kawasan strategis di masing-masing kecamatan, penuntasan pembangunan jalan lingkar luar Kota Gunungsitoli serta pengembangan sistem pengelolaan air minum/air bersih yang melayani jaringan Sambungan Rumah (SR) khususnya di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

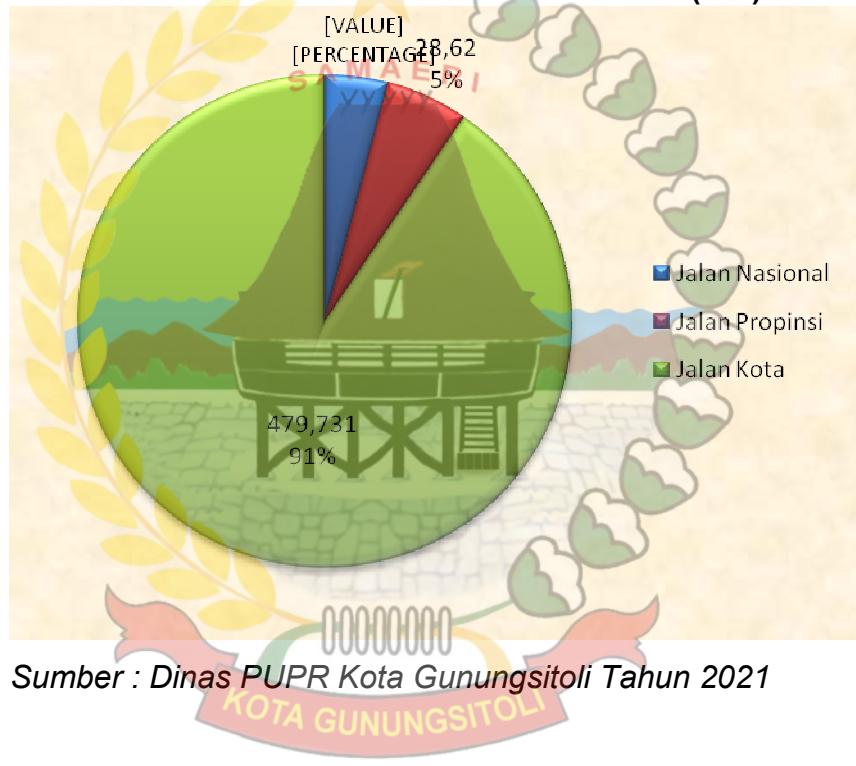
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli, panjang jalan keseluruhan menurut jenisnya pada Tahun 2020 yaitu mencapai 530,194 km yang meliputi Jalan Nasional dengan panjang 21,843 km, Jalan Provinsi 28,620 km dan Jalan Kota dengan panjang 479,731 km. Berikut adalah tabel dan grafik panjang jalan menurut status jalan pada Tahun 2020:

Tabel 2.50 :
Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kota Gunungsitoli Tahun 2020

No	Uraian	Panjang (Km)
1	Jalan Nasional	21,843
2	Jalan Provinsi	28,620
3	Jalan Kota	479,731

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Grafik 2.8
Panjang Jalan di Kota Gunungsitoli
Menurut Jenis Jalan Pada Tahun 2020 (Km)



Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Jaringan infrastruktur jalan dengan kondisi baik merupakan salah satu indikator utama peningkatan daya saing daerah. Kondisi infrastruktur jalan memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan. Kondisi infrastruktur jalan dengan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020, meliput Jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 16,11 km, Jalan Provinsi dalam kondisi baik sepanjang 15,28 km, dan Jalan Kota dalam kondisi baik sepanjang 267,20 km. Berikut tabel yang menggambarkan proporsi panjang kondisi jalan dalam kondisi baik di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.51 :
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Panjang Jalan Nasional - Kondisi Baik - Kondisi Sedang - Kondisi Rusak Ringan - Kondisi Rusak Berat	*	15.250 5.100 1.493 -	15.250 5.100 1.493 -	15.250 5.100 1.493 -	16.112 4.798 942 -	m m m m
2	Panjang Jalan Propinsi - Kondisi Baik - Kondisi Sedang - Kondisi Rusak Ringan - Kondisi Rusak Berat	*	14.820 6.500 4.800 2.500	14.820 6.500 4.800 2.500	14.820 6.500 4.800 2.500	15.280 6.789 4.110 2.441	m m m m
3	Panjang Jalan Kab/Kota - Kondisi Baik - Kondisi Sedang - Kondisi Rusak Ringan - Kondisi Rusak Berat	*	255.545 97.178 104.010 22.998	255.545 97.178 106.311 21.784	260.412 96.481 101.053 21.784	267.201 96.021 98.310 18.198	m m m m

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Berdasarkan jenis permukaan jalan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 jaringan jalan terpanjang yakni jenis permukaan aspal/hotmix sepanjang 408,202 km, disusul jaringan jalan dengan permukaan beton sepanjang 61,140 km, dan permukaan kerikil/telford sepanjang 10,389 km. Kondisi permukaan jalan di wilayah Kota Gunungsitoli sebagian besar dalam kondisi baik, namun demikian beberapa wilayah terutama di sentra-sentra produksi masyarakat, pusat-pusat pelayanan publik, serta daerah yang relatif terisolir, memiliki kondisi jenis permukaan jalan yang masih kurang memadai.

Tabel 2.52 :
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2016-2020

No	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal/Hotmix	km	*	295,78	339,60	373,34	408,202
2	Beton	km	*	-	-	78,32	61,140
3	Kerikil/Telford	km	*	70,76	72,830	28,07	10,389
4	Tanah	km	*	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2. Proporsi jembatan dalam kondisi baik

Proporsi jembatan dalam kondisi baik di Kota Gunungsitoli tahun 2020 sebanyak 71 unit, kondisi rusak sedang sebanyak 10 unit, kondisi rusak ringan sebanyak 5 buah serta kondisi rusak berat sebanyak 2 unit. Gambaran umum kondisi jembatan di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.53 :
Kondisi Jembatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	Unit	*	63	55	64	71
2	Kondisi Sedang	Unit	*	8	12	9	10
3	Kondisi Rusak Ringan	Unit	*	1	10	5	5
4	Kondisi Rusak Berat	Unit	*	6	2	1	2

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Capaian indikator pembangunan sarana dan prasarana wilayah meliputi drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat, panjang turap/talud/bronjong, panjang bangunan pengendalian sungai dan pengaman pantai, serta pembangunan instalasi dan jaringan air minum. Berikut tabel yang menggambarkan capaian indikator pembangunan sarana dan prasarana wilayah periode tahun 2016–2020.

Tabel 2.54 :
Realisasi Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Drainase dalam kondisi baik/pembangunan air	%	80,00	85,00	87,00	89,45	93,92

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	tidak tersumbat						
2	Panjang Turap/Talud/Bronjong	%	19,04	38,91	26,71	38,22	76,69
3	Panjang bangunan pengendalian sungai dan pengaman pantai	%	10,95	13,82	14,03	23,46	82,25
4	Instalasi dan jaringan air minum	%	28,76	50,00	54,00	57,27	76,47

Sumber: Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Realisasi capaian indikator drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana tahun 2016 mencapai 80,00% dan naik menjadi 93,92% pada tahun 2020. Dalam pembangunan turap/talud/bronjong trend capaian juga mengalami peningkatan sebesar 19,04% pada tahun 2016 menjadi 76,69% pada tahun 2020. Sama halnya dengan capaian pembangunan pengendalian sungai dan pengaman pantai mengalami peningkatan dari 10,95% di tahun 2016 menjadi 82,25% di tahun 2020. Sementara untuk indikator pembangunan instalasi dan jaringan air minum juga mengalami peningkatan signifikan dimana pada tahun 2016 dari 28,76 persen menjadi 76,47 persen pada tahun 2020.

4. Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik

Pada tahun 2020 kondisi jaringan saluran irigasi primer dalam kondisi baik sepanjang 7.688,31 meter, jaringan saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik sepanjang 17.569,08 meter dan untuk jaringan saluran irigasi tersier dalam kondisi baik yaitu sepanjang 879,71 meter. Berikut tabel panjang dan kondisi jaringan irigasi yang ada di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.55 :

Panjang dan Kondisi Jaringan Irigasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Panjang Saluran Irigasi Primer - Kondisi Baik - Kondisi Sedang - Kondisi Rusak Ringan	*	6.935,31 2.000 404	6.935,31 2.000 404	6.935,31 2.000 404	7.688,31 2.000 404	meter meter meter

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	Panjang Saluran Irigasi Sekunder - Kondisi Baik - Kondisi Sedang - Kondisi Rusak Berat	*	14.845,68 5.403 2.161	14.956,68 5.403 2.161	16.790,58 5.403 2.137	17.569,08 5.403 2.083	meter meter meter
3	Panjang Saluran Irigasi Tersier - Saluran Kondisi Baik	*	879,71	879,71	879,71	879,71	meter
4	Jumlah Bangunan Irigasi	*	96	96	102	113	Unit
5	Luas Sawah Beririgasi Teknis	*	376,03	376,03	466,07	486,96	Ha
6	Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	*	504,41	504,41	414,37	410,37	Ha
7	Luas Daerah Irigasi Teknis	*	1.344,85	1.344,85	1.344,85	1.344,85	Ha

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

5. Penataan Ruang

Capaian indikator untuk bidang penataan ruang diantaranya meliputi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HBG, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dan ketaatan terhadap RTRW. Pada tabel berikut diuraikan capaian indikator urusan penataan ruang dari tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.56 :
Rasio Indikator Bidang Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HBG	Persen	2,4	5,00	21,10	21,10	43,45
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	0,9	6,04	7,98	5,37	8,94

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	-	-	-	55,80	55,80
4	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	-	-	-	70,95	74,90

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Pada tabel tersebut terlihat bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah ber HPL/HBG cenderung naik setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat rasio sebesar 2,4% naik menjadi 43,45% pada tahun 2020. Untuk rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,9% di tahun 2016 menjadi 8,94% di tahun 2020. Sedangkan untuk rasio tempat pemakaman umum tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 55,8%. Sementara untuk ketaatan terhadap RTRW mengalami kenaikan sebesar 74,9% ditahun 2020 dengan total izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebanyak 57 izin.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.56 :
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
Kota Gunungsitoli Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah domestik dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{8.904}{29.192} \times 100\%$	100	30,50
	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari melalui SPAM JP	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum melalui jaringan	$\frac{8.904}{29.192} \times 100\%$	17,20	30,50

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGA N		
1	2	3	4	5	6	7
			perpipaan dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli dikali 100%			
	b. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari melalui SPAM BJP	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum melalui jaringan bukan perpipaan	Jumlah rumah tangga terlayani penyediaan air minum melalui jaringan bukan perpipaan dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{20.288}{29.192} \times 100\%$	82,80	69,50
		Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah domestik dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{1.707}{29.192} \times 100\%$	100	5,85
		a. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah melalui SPALD-S	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli dikali 100%	$\frac{0}{29.192} \times 100\%$	94,15	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGA N		
1	2	3	4	5	6	7
		b. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah melalui SPALD-T	Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-T dibagi Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli	$\frac{1.707}{29.192} \times 100\%$	5,85	5,85

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan memiliki peran dalam penentuan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang merupakan upaya strategis dalam rangka mencapai pembangunan sarana dan prasarana permukiman di Wilayah Kota Gunungsitoli.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yakni dari 73,97% tahun 2016 menjadi 78,73% tahun 2020. Demikian juga halnya, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 20.285 unit tahun 2016 menjadi 21.805 unit tahun 2020.

Tabel 2.58 :

Ratio Rumah Layak Huni Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni	Persen	73,97	75,5	77,22	78,73	78,73
2	Rumah layak huni	Unit	20.285	20.705	21.386	21.805	21.805

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 20,12% dan pada tahun 2020 menjadi 52,36%. Cakupan rumah tangga bersanitasi di Wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, relatif masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Upaya peningkatan kualitas sanitasi rumah tinggal, secara berkesinambungan dilaksanakan melalui sejumlah program dan kegiatan pembangunan di bidang sanitasi.

Tabel 2.59 :

Percentase Rumah Tangga Bersanitasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	20,12	25,57	27,65	50,14	52,36
2	Rumah tangga ber-Sanitasi	Unit	5518	6930	7582	8250	8615

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli Tahun 2021

3. Persentase Lingkungan Perumahan yang Tertata

Persentase lingkungan perumahan yang tertata di Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2016 -2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 20,12 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 56,32 persen. Berikut tabel yang menguraikan luas permukiman yang tertata, luas lingkungan permukiman serta luas lingkungan permukiman kumuh.

Tabel 2.60 :

Percentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Luas pemukiman yang tertata	Persen	20,12	48,78	49,37	56,32	56,32
2	Lingkungan Pemukiman	Ha	1.614,4	1.735,5	2.275,84	1.799,1	1.799,1
3	Lingkungan pemukiman kumuh	Ha	420,24	410,73	402,17	402,04	402,04
4	Luas kawasan kumuh di perkotaan	Ha	17,10	17,10	17,10	17,10	16,59

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kota Gunungsitoli Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.61 :
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Kota Gunungsitoli Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang tertangani	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100%		100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah tangga penerima Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tanggapene rimasubsidi uangsewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi		100	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan dikali 100%			

Sumber : Dinas PUPR Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum relatif kondusif. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum lebih ditekankan pada upaya preventif melalui pendekatan persuasif. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Wilayah Kota Gunungsitoli, menjadi fokus program keamanan dan ketertiban kurun waktu 2016-2020. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum dewasa ini, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor perekonomian, harus diantisipasi sedemikian rupa, untuk menjaga tingkat kondisifitas daerah. Gambaran umum perkembangan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.62 :
Penyelesaian dan Penegakan Perda Tahun 2016-2020

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan Perda	122	93	82	48	35
2	Jumlah pelanggaran Perda	135	95	85	49	35

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Tabel 2.63 :
Penyelesaian dan Penegakan Perda Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

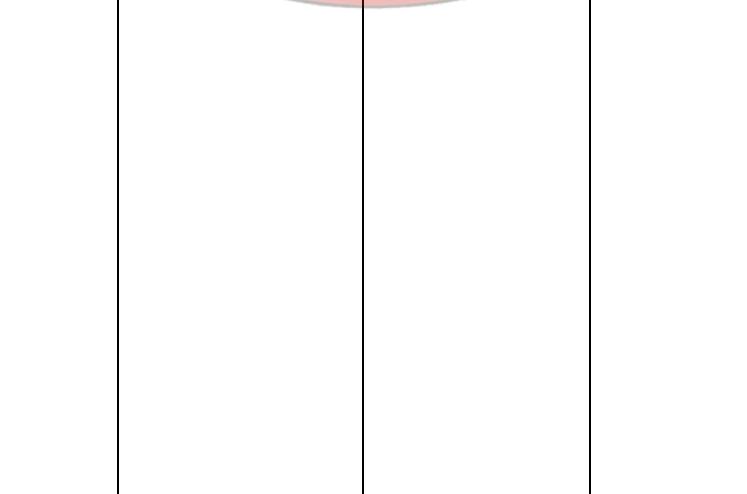
No.	Kecamatan	Jumlah penyelesaian penegakan Perda	Jumlah Pelanggaran Perda
1	Gunungsitoli	171	178
2	Gunungsitoli Idanoi	58	60
3	Gunungsitoli Selatan	20	22
4	Gunungsitoli Barat	28	30
5	Gunungsitoli Alo'oa	20	23
6	Gunungsitoli Utara	83	86
	Jumlah	380	399

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.64 :
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
A. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
1	Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian material dan layanan pengobatan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dibagi Jumlah Warga Negara yang mengajukan		100	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti			
B. Sub Urusan Kebakaran						
1	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi Warga Negara yang menjadi korban kebakaran				100	0
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi Warga Negara yang terdampak kebakaran				100	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah yang menangani sub urusan kebakaran wajib kebakaran	menangani sub urusan kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kota Gunungsitoli pada tahun berkenaan			
3		Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh perangkat Daerah yang menangani sub urusan wajib kebakaran	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh perangkat Daerah yang menangani sub urusan wajib kebakaran di Kota Gunungsitoli dalam tahun berkenaan		0	0

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Dalam mengukur perencanaan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban dirumuskan suatu indikator kinerja mandiri yaitu Indeks Ketentraman dan Ketertiban. Indeks Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari beberapa komponen pembentuk utama yaitu :

1. Tingkat Keamanan;
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA;
3. Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS.

2.4.1.6 Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir relatif mengalami mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 jumlah PMKS di Kota Gunungsitoli sebanyak 5.783 jiwa, mengalami peningkatan menjadi 22.616 jiwa di tahun 2020. Pemerintah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa program dan kegiatan pembangunan dimaksud antara lain, pemberian bantuan, pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembinaan bagi penyandang cacat, dan pemberian bantuan bagi korban bencana. Gambaran umum pembangunan bidang pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.65 :

Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	jiwa	5.783	8.918	23.229	23.467	22.616
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Ha	8.289	30.756	27.222	27.223	27.915
3	Jumlah PMKS yang tertangani	Ha	89	1.630	1.675	1.706	656
4	Jumlah PMKS yang ada	jiwa	8.289	30.756	27.222	27.223	27.915
5	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	jiwa	5.872	10.548	24.904	25.173	23.272
6	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	jiwa	8.289	30.756	27.222	27.223	27.915
7	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	jiwa	-	160	20	-	-

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8	Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	16	16	18	20	19
9	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	jiwa	10	20	7	9	18
10	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	jiwa	38	22	39	24	49

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kota Gunungsitoli tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.66 :
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Kota Gunungsitoli Tahun 2020**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPIAAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial		100	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dibagi Populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial		100	0
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dibagi Populasi lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial		100	0
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dibagi Populasi tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial		100	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	RUMUS PERHITUNGAN KINERJA		TARGET (%)	CAPAIAN (%)
			RUMUS	PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7
			luar panti sosial			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Populasi korban bencana yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		100	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Dalam mengukur pembangunan bidang Sosial telah dirumuskan suatu indikator kinerja mandiri yaitu Indeks Harmoni Sosial. Indeks harmoni sosial merupakan indeks yang memiliki komponen pembentuk yaitu :

1. Indeks ketentraman dan ketertiban;
2. Indeks budaya lokal.

2.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan data statistik pada tahun 2020 di Kota Gunungsitoli terdapat 63.815 penduduk yang tergolong dalam usia kerja (15 tahun atau lebih). Sebanyak 60.024 orang terserap dalam lapangan kerja (bekerja), sebanyak 3.791 orang masih menganggur atau mencari pekerjaan. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak termasuk dalam angkatan kerja digolongkan ke dalam bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lain selain bekerja untuk mendapatkan upah. Sebanyak 101.579 penduduk Kota Gunungsitoli termasuk dalam golongan ini. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih kecil

bila dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang bekerja adalah sebanyak 48.569 orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 53.010 orang.

Tabel 2.67 :
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pekerjaan/Kegiatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Angkatan Kerja	36.465	27.350	63.815
Bekerja	34.418	25.606	60.024
Pengangguran Terbuka	2.047	1.744	3.791
Bukan Angkatan Kerja	12.104	25.660	37.764
Sekolah	5.349	5.468	10.817
Mengurus Rumah Tangga	2.828	18.275	21.103
Lainnya	3.927	1.917	5.844
Jumlah	48.569	53.010	101.579
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,08	51,59	62,82
Tingkat Pengangguran (%)	5,61	6,38	5,94

Sumber : Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2021, BPS

Tabel 2.68:
Percentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	TPT Tahun (Persen)				Peringkat tahun 2020
	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6
Pematangsiantar	8,8	12,14	11,09	11,5	1
Medan	9,46	8,25	8,53	10,74	2
Tebing Tinggi	9,73	7,23	8,6	9,98	3
Deli Serdang	6,16	7,06	5,74	9,5	4
Binjai	5,95	7,4	6,14	8,67	5
Sibolga	9,29	8,61	7,4	8	6
Tapanuli Tengah	7,39	6,38	7,26	7,54	7
Padangsidimpuan	3,78	5,18	4,34	7,45	8
Asahan	5,95	5,26	6,86	7,24	9
Langkat	3,57	4,67	5,3	7,02	10
Tanjungbalai	5,5	5,58	6,82	6,97	11
Labuhanbatu Utara	6,35	5,67	5,84	6,82	12
Mandailing Natal	5,75	4,43	6,37	6,5	13
Batu Bara	5	5,39	6,69	6,48	14
Labuhanbatu	7,09	6,98	5,7	6,05	15
Gunungsitoli	6	5,92	5,59	5,94	16
Serdang Bedagai	5,98	5,1	4,37	5,54	17

Kabupaten/Kota	TPT Tahun (Persen)				Peringkat tahun 2020
	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6
Labuhanbatu Selatan	5,68	4,79	4,8	4,9	18
Simalungun	5,62	5,1	4,39	4,58	19
Nias Utara	2,67	2,4	3,07	4,54	20
Tapanuli Selatan	5,8	5,28	4,17	4,42	21
Nias Selatan	1,28	3,77	2,25	4,15	22
Padang Lawas	4,24	4,1	4,24	4,11	23
Nias	1,19	1,62	1,09	3,49	24
Padang Lawas Utara	3,21	3,15	3,21	3,11	25
Tapanuli Utara	1,89	1,42	1,33	2,94	26
Toba Samosir	2,18	2,15	1,26	2,5	27
Pakpak Bharat	0,49	0,43	0,19	1,93	28
K a r o	1,34	1,5	1,09	1,83	29
D a i r i	1,42	1,69	1,58	1,75	30
Nias Barat	1,23	1,23	1,63	1,71	31
Samosir	1,28	1,35	1,25	1,2	32
Humbang Hasundutan	0,31	0,34	0,33	0,84	33
Sumatera Utara	5,6	5,56	5,41	6,91	
Nasional	5,5	5,3	5,23	7,07	

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas tingkat pengangguran terbuka di Kota Gunungsitoli tahun 2020 berada pada peringkat 16 dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Angka pengangguran terbuka Kota Gunungsitoli tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum masih dalam tataran penguatan kelembagaan. Belum meratanya kesamaan pemahaman terkait dengan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya upaya pemberdayaan yang dilakukan. Seiring meningkatnya tuntutan pembangunan terhadap percepatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka pemerintah daerah berkewajiban menyikapi hal tersebut dalam program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Gambaran umum capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.69 :
Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Persen	54,27	83,3	100	100	100
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	38,41	71,6	63,71	50,75	46,20
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	52,7	30,52	67,87	53,37	72,00
4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	53	-	36,38	49,24	49,00

Sumber : Dinas P5A Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.2.3 Ketahanan Pangan

Capaian indikator kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.70 :
Realisasi Indikator Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Energi dan protein	Persen	-	57,3	82,60	91,50	92,50
2	Ketersediaan cadangan Pangan	Persen	-	16,4	31,40	51,00	52,00
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah	Persen	-	20,7	82,05	78,31	78,37
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Persen	-	21,2	44,00	60,00	60,00
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	-	78	72,90	66,50	66,50
6	Penganekaragaman dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	-	22,9	-	75,00	77,00
7	Penanganan Kerawanan Pangan	Persen	-	16,1	83,30	83,30	83,80
8	Konsumsi beras/kapita/tahun	Kalori	-	122,9 5	-	93,10	93,10
9	Cakupan Penyalur Terhadap kelompok Tani	Persen	35,00	13,49	11,00	8,19	8,19

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

1. Pembangunan Lumbung Padi

Pada Tahun 2022 di Kota Gunungsitoli direncanakan pembangunan lumbung padi di Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Barat untuk mendukung tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan;

2. Penyusunan Dokumen Harga Minimum Pangan Daerah

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyusun dokumen harga minimum daerah untuk pangan lokal yang berlaku untuk seluruh kecamatan.

3. Pemenuhan Konsumsi Pangan

Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun di seluruh kecamatan untuk mendukung pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi untuk mendukung skor pola pangan harapan.

4. Kerawanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merencanakan penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Gunungsitoli untuk mendukung penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan segar.

2.4.2.4 Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.71 :

Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengadaan tanah pemerintah	Ha	5	1,82	0,002	1,20	0,38

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli 2021

2.4.2.5 Lingkungan Hidup

Setelah berakhirnya era *Millenium Development Goals* (MDG's), dilanjutkan dengan era pembangunan baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's). Pembangunan dengan memperhatikan isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Dimana kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Secara sederhana

kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan hidup yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Gambaran umum capaian indikator urusan lingkungan hidup Kota Gunungsitoli untuk periode 2016 – 2020 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72 :
Realisasi Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencemaran Status Mutu Air	Persen	10	24	19,51	40,24	*
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	Persen	13	48	52,08	57,92	63,13
3	Penegakan Hukum Lingkungan	Persen	50	100	100	100,00	100,00
4	Persentase Penanganan Sampah	Persen	42,15	41,84	42,08	43,40	49,07
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	42,15	28,46	28,62	29,40	29,19

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Realisasi program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan program kegiatan untuk pencapaian indikator Pencemaran Status Mutu Air. Berdasarkan data statistik Kota Gunungsitoli jumlah sungai di Kota Gunungsitoli adalah 78 sungai dan sumber mata air sejumlah 4 titik. Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2017 melaksanakan pemantauan terhadap beberapa sungai dan mata air yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat untuk diuji dan dianalisa kualitasnya. Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pemantauan dan analisa terhadap titik sungai maupun sumur. Pelaksanaan pemantauan dan analisa kualitas lingkungan terhadap pencemaran status mutu air di Kota Gunungsitoli sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) di Medan. Karena Pandemi COVID-19, pemantauan dan analisa terhadap pencemaran status mutu air oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 belum terlaksana disebabkan karena adanya refocusing anggaran, dimana terjadinya pembatalan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di awal periodenamun diprediksikan tidak dapat dilakukan pada tahun berkenan.

Untuk pencapaian kinerja cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator daerah bidang Lingkungan Hidup tersebut adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Selama tahun 2020, jumlah dokumen lingkungan yang telah disahkan dan/atau diterbitkan Izin lingkungan adalah SPPL=162 dokumen; UKL-UPL=2 dokumen; dan Amdal=0 dokumen. Dari data tersebut maka disimpulkan jumlah dokumen lingkungan yang telah disahkan dan/atau diterbitkan Izin Lingkungan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2020 adalah SPPL=1.940 dokumen; UKL-UPL=51 dokumen, DPLH=13 dokumen, Amdal=3 dokumen dan DELH=1 dokumen. Sehingga dari keseluruhan data tersebut maka persentase pencapaian indikator kinerja daerah untuk cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen adalah sebesar 63,13% dari target sebesar 60% yang merupakan perbandingan antara jumlah seluruh perusahaan wajib dokumen lingkungan hidup yang telah diawasi terhadap jumlah seluruh perusahaan wajib dokumen lingkungan.

Capaian indikator kinerja daerah untuk indikator penegakan hukum lingkungan adalah sebesar 100%. Hal ini merupakan perbandingan jumlah kasus lingkungan yang telah diselesaikan terhadap jumlah kasus yang ada di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Jumlah kasus lingkungan yang ada selama tahun 2020 ada 6 kasus yang merupakan pengaduan masyarakat terhadap kasus lingkungan yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli dan kasus lingkungan tersebut telah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup memiliki sub tugas yang sangat prioritas dan membutuhkan daya dan dana yang cukup besar. Kota Gunungsitoli yang semakin berkembang berpengaruh terhadap perilaku hidup masyarakat setiap hari. Perilaku hidup masyarakat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan kebersihan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang mendukung fungsi tersebut adalah kegiatan Pengelolaan Persampahan. Kegiatan ini merupakan salah satu sub tugas pencapaian indikator kinerja bidang lingkungan hidup khususnya persentase penanganan sampah.

Volume sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2020 adalah 65.668 m³/tahun dari volume sampah yang diproduksi/ dihasilkan oleh penduduk Kota Gunungsitoli sebesar 133.828 m³/tahun dari jumlah penduduk sebanyak 135.797 jiwa. Dari data tersebut persentase penanganan sampah di Kota Gunungsitoli selama tahun 2020 adalah sebesar 49,07% dari target sebesar 56,53%. Meskipun indikator kinerja daerah untuk persentase penanganan sampah pada tahun berkenan tidak tercapai, akan tetapi secara makro mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (43,40%) atau meningkat sekitar 5,67% dan strategi penanganan/pemecahan permasalahan sampah terus dilakukan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui pengadaan prasarana pengelolaan sampah, penanganan dan pengelolaan secara partisipatif dan terpadu dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari tahun ke tahun kebersihan Kota Gunungsitoli terus mengalami perubahan hingga tahun 2020.

Indikator kinerja daerah untuk Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan jumlah daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk di wilayah Kota Gunungsitoli. Dari data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli pencapaian indikator kinerja terhadap Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) pada Tahun 2020 per satuan penduduk sebesar 29,19% dari target 59,65%. Pada tahun berkenan (tahun 2020), pencapaian indikator kinerja bidang lingkungan hidup untuk bidang ini tidak tercapai dan mengalami penurunan sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya (29,40%). Pencapaian indikator kinerja bidang lingkungan hidup untuk bidang ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah daya tampung TPS/TPA yang dimiliki oleh Kota Gunungsitoli sementara jumlah penduduk dan jumlah pengunjung dari luar wilayah Kota Gunungsitoli terus meningkat menyebabkan bertambahnya produksi sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem tersebut dengan skala yang lebih detail, skala 1 : 50.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk kota. Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ecoregion dan penutup lahan (*landcover/landuse*) sebagai penaksir atau *proxy*. Dengan demikian terdapat empat

konsep penting dalam penyusunan daya dukung lingkungan. Beberapa batasan konsep diantaranya adalah :

1. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
2. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
3. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan bentang alam, daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati dan sosial budaya (UU 32 Tahun 2009). Dalam operasionalisasinya penetapan ekoregion menggunakan pendekatan bentang lahan (*landscape*) dengan mengikuti sistem klasifikasi yang digunakan *verstappen*. Selanjutnya jenis-jenis bentang lahan (*landscape*) akan dijadikan salah satu komponen penaksir atau *proxy jasa ekosistem* (*landscape based proxy*).
4. Penutup Lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Dalam operasionalisasinya, digunakan sistem klasifikasi penutup lahan dari SNI 7645-2014, dimana jenis-jenis penutup lahan tersebut dijadikan salah satu komponen penaksir atau *proxy jasa ekosistem* (*landcover/landused based proxy*).

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026, berikut diuraikan daya dukung dan daya tampung sebagai berikut :

1. Daya Dukung Air

Kota Gunungsitoli memiliki ketersediaan air 521.757.832,60 m³ dan kebutuhan airnya 227.881.600 m³ per tahun. Sementara itu status daya dukung air Kota Gunungsitoli diperoleh indeks sebesar 2,29 poin. Menurut klasifikasinya, status daya dukung air lebih dari 1 adalah masuk kategori surplus;

2. Daya Dukung Pertanian

Berdasarkan perhitungan Daya Dukung Pangan, Kota Gunungsitoli memiliki nilai 0,96. Skor tersebut < 1 sehingga Kota Gunungsitoli memiliki Daya Dukung Pangan yang kategorinya defisit. Untuk memenuhi kebutuhan pangannya, Kota Gunungsitoli tidak dapat memenuhinya secara domestik, dan mendapatkannya dari wilayah lain.

3. Daya Dukung Lahan Bangunan

Berdasarkan hasil analisis, luas lahan terbangun di Kota Gunungsitoli adalah 3.043,67 ha, dan Daya Dukung Lahan Bangunan adalah 6,37 ha sehingga masuk kategori surplus.

2.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan kebutuhan dokumen kependudukan di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum relatif sudah terlaksana dengan baik. Pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dokumen kependudukan di masa mendatang, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan wajib menjadi perhatian dalam penetapan skala prioritas pembangunan daerah. Gambaran umum perkembangan kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.73 :
Realisasi Indikator Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Percentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	94,51	99,12	96,11	98,03	99,18
2	Percentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	Persen	74,15	97,28	87,03	95,66	96,60
3	Percentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	38,53	105,20	95,41	70,72	80,76
4	Percentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia Anak (penduduk usia 0-18 tahun)	Persen	68,95	108,49	87,6	92,95	95,40
5	Percentase Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	24,29	85,92	71,88	72,80	74,74
6	Percentase Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	46,79	84,16	52,3	58,66	64,25

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
7	Rasio Ketergantungan	Persen	-	-	52,97	53,62	52,29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya pemberdayaan masyarakat dan desa kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan, baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas. Penguatan kelembagaan masyarakat dan desa, menjadi fokus perhatian dalam upaya mempercepat kemandirian masyarakat desa. Gambaran umum perkembangan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.74 :
Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	0,5	1	1	100	100
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	0,5	1	4	100	100
3	LPM Berprestasi	%	-	-	-	-	-
4	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
5	Posyandu Aktif	%	-	-	-	100	100
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	0,02	71,43	100	100	100
7	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		10	71,43	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB di Wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 33,2 persen tahun 2016 menjadi 66,45 persen tahun 2020. Sementara Jumlah Cakupan KB Aktif cenderung mengalami peningkatan yakni dari 33,2 persen menjadi 63,97 persen pada tahun 2020. Peningkatan

rasio akseptor KB kurun waktu 2016-2020, secara umum disebabkan pertumbuhan pasangan usia subur yang sebanding dengan pertumbuhan jumlah akseptor KB. Gambaran umum realisasi indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Gunungsitoli tahun 2016–2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.75 :
Realisasi Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	persen	4,34	2,16	1,53	1,32	1,10
2	Rasio Akseptor KB	persen	33,2	17,17	63,03	64,02	66,45
3	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	33,2	30,48	43,18	53,66	63,97
4	Keluarga Sejahtera Pra dan Keluarga Sejahtera I	persen	92,5	60,12	63,09	45,15	39,54

Sumber : Dinas P5A Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.2.9 Perhubungan

Kondisi jumlah penumpang angkutan umum di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, yakni dari 375.658 orang tahun 2016 menjadi 347.826 orang pada tahun 2020. Kondisi infrastruktur strategis perhubungan di wilayah Kota Gunungsitoli, terdiri dari pelabuhan laut sebanyak 3 unit, pelabuhan udara sebanyak 1 unit, dan terminal bis sebanyak 3 unit. Cakupan pelayanan infrastruktur perhubungan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan kapasitas. Untuk kebutuhan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kapasitas pelabuhan laut dan udara menjadi prioritas utama. Gambaran umum Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.76 :
Realisasi Indikator Perhubungan Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	375.658	465.754	491.055	601.126	347.826
2	Rasio ijin trayek	Persen	0	0,007	0	0,00	0,00
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	0	50	764	1.547	1.547

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis	Unit	4	5	5	7	11
5	Jumlah angkutan umum darat	Persen	38	14,39	16,33	31,5	55
6	Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan	Persen	20	44	48,12	56,83	45,39

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan jaringan komunikasi yang memadai merupakan salah satu indikator peningkatan daya saing daerah. Meningkatnya pemanfaatan jaringan komunikasi dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat, merupakan dampak dari arus informasi yang semakin mengglobal. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan berbagai layanan jaringan komunikasi dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan. Gambaran umum perkembangan jaringan komunikasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2016–2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.77 :
Realisasi Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan komunikasi	Persen	-	-	58,33	58,33	73,08
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Persen	-	0,0108	0,0071	0,0071	0
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Unit	-	42	46	46	104
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Unit	-	19	20	20	22
5	Website milik pemerintah daerah	Unit	-	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, belum optimal memberikan kontribusi yang signifikan dalam struktur perekonomian daerah. Gambaran umum perkembangan koperasi di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.78 :
Realisasi Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	Persen	8,21	47,34	59,63	59,63	62,39
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	366	582	582	615	5.497
3	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	2,37	96,80	331,22	340,7	72,68
4	Jumlah BPR/LKM	Unit	-	0	1	1	0

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Perkembangan kelembagaan UKM di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yakni dari 366 unit tahun 2016 menjadi 5.497 unit pada tahun 2020. Peningkatan kelembagaan UKM secara umum, belum diikuti dengan peningkatan daya saing kelembagaan usaha. Rendahnya akses permodalan dan daya saing produk-produk UKM, menjadi permasalahan utama peningkatan daya saing UKM dalam struktur perkonomian daerah.

2.4.2.12 Penanaman Modal

Capaian penanaman modal dan investasi di Kota Gunungsitoli dalam kurun lima tahun terakhir diuraikan sebagai berikut :

1. Galangan Kapal

Cahaya Baru *Shipyard* merupakan perusahaan pertama dan satu-satunya di Kepulauan Nias yang bergerak di bidang jasa galangan kapal khususnya perbaikan kapal blusting dan painting. Berdiri tahun 2017 dan mulai beroperasi sejak awal 2019, berlokasi di Jln. Arah Lintas Nias Utara km. 12 Desa Afia Gunungsitoli Utara.

2. Peternakan

PT. The Semangat Baru bergerak dibidang peternakan babi dengan kapasitas 5.000 ekor. Selain itu juga mengembangkan usaha ke hulu, melalui produksi pakan ternak dengan kapasitas produksi 50 ton per bulan. Perusahaan ini memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di bidang peternakan dengan peternakan modern dan pakan ternak yang diproduksi di Kota Gunungsitoli, dapat membantu suplai pakan ternak untuk Kepulauan Nias.

3. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji (SPPBE)

Pada tahun 2020, PT Elnusa Petrofin (EPN) selaku anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) mengoperasikan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji (SPPBE) di Kota ~~SAMAEPI~~ Gunungsitoli. Bangunan SPPBE berdiri di atas lahan seluas 4.970 meter persegi, sedangkan sarana dan fasilitas SPPBE yang dimiliki dan dikelola oleh Elnusa Petrofin ini terdiri dari 3 unit tangki LPG dengan total kapasitas sebesar 150 metrik ton.

**Tabel 2.79 :
Realisasi Penanaman Modal dan Investasi Kota Gunungsitoli**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp)	
			2019	2020
1	PT. Cahaya Baru Shipyard	Galangan Kapal, pembangunan dan perbaikan kapal motor	5.350.000.000	
2	PT. The Semangat Baru	Peternakan Babi dan Industri Pakan Ternak	2.500.000.000	
3	PT. Elnusa Petrofin	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam		15.010.060.600
4	PT. Alfa Midi	Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan,minuman, atau tembakau		*)
	Total		7.850.000.000	15.010.060.600

*) Nilai realisasi investasi akan dilaporkan pada Triwulan IV Tahun 2020

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Industri Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Keterangan:

Nilai realisasi investasi didasarkan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Kemudahan perizinan berusaha dan penanaman modal yang diakomodir oleh daerah dalam bentuk Peraturan Walikota Gunungsitoli, regulasi atau website antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor : 503/001/K/DPMPPPTSP/2017 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
4. LKPM Online <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id>;
5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui website <https://oss.go.id> atau <https://lkpmonline.bkpm.go.id>.

2.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yakni dari 15 organisasi tahun 2016 menjadi 23 organisasi tahun 2020. Berdasarkan wilayah kecamatan, organisasi pemuda mayoritas berada di Kecamatan Gunungsitoli. Perkembangan jumlah organisasi olahraga di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Terbatasnya upaya pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat perkembangan organisasi olahraga, baik di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan.

Perkembangan jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, relatif sangat terbatas. Kegiatan yang dilakukan umumnya bersifat agenda rutin organisasi. Upaya pembinaan kegiatan kepemudaan kurun waktu 2016-2020, belum optimal sebagaimana potensi kepemudaan yang tersedia. Perkembangan kegiatan

keolahragaan di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, relatif sangat terbatas pada cabang-cabang olah raga tertentu. Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga serta minimnya penyelenggaraan event-event olah raga, sebagai salah satu faktor rendahnya perkembangan jumlah kegiatan keolahragaan. Demikian juga halnya, upaya pemasyarakatan olahraga oleh pemerintah daerah, masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Gambaran umum bidang kepemudaan dan olahraga Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.80 :
Realisasi Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga	Klub	51	51	51	29	29
2	Jumlah gedung olahraga	Unit	5	5	5	5	5
3	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	15	15	23	23	23
4	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	8	8	12	12	12
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jenis	3	5	3	4	0
6	Jumlah kegiatan olahraga	Jenis	4	3	6	5	2
7	Lapangan olahraga	Buah	71	71	71	71	71

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.2.14 Statistik

Capaian indikator kinerja pelaksanaan bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.81 :
Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik Kota Gunungsitoli Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Kinerja Tahun 2020	
			Target	Capaian
1	Buku Gunungsitoli Dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Gunungsitoli	Ada/tidak	Ada	Ada

Sumber : BPS Kota Gunungsitoli

Berdasarkan tabel di atas, hasil capai indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik Kota Gunungsitoli selama tahun 2020 menunjukkan ketersediaan Buku Gunungsitoli Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Gunungsitoli tahun 2020.

2.4.2.15 Kebudayaan

Upaya pelestarian nilai-nilai kearifan budaya daerah di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum sudah terlaksana dengan baik namun dalam cakupan dan skala yang masih sangat terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain rehabilitasi rumah adat Nias, pembinaan sanggar seni budaya, pemugaran tempat bersejarah dan lain-lain. Gambaran umum perkembangan pelestarian dan pengembangan kebudayaan kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.82 :
Realisasi Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian	Per 10.000 Penduduk	0,0063	0,0068	0,0073	0,0076	0,0080
2	Jumlah gedung kesenian	Per 10.000 Penduduk	0,0063	0,0068	0,0073	0,0076	0,0080
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	9	7	6	1
4	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	60	62	66	68	68
5	Benda, Situs dan kawasan	Persen	27,65	36,22	41,94	51,46	51,46

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Cagar Budaya yang dilestarikan						

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kondisi sarana dan prasarana Kelautan Perikanan Kota Gunungsitoli dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.83 :
Potensi, Kondisi Sarana dan Prasarana
Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli
Tahun 2020

Garis pantai	:	45	Km
Laguna	:	40	Ha
Hutan bakau	:	60	Ha
Nelayan	:	1.735	Orang
Pembudidaya ikan	:	656	Orang
Sarana dan Prasarana	:		
Perahu tanpa motor	:	565	Unit
Perahu bermotor 0,5 GT	:	743	Unit
Kapal ≥ 3 GT	:	136	Unit
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	:	2	Unit
Balai Benih Ikan Air Tawar	:	1	Unit

Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Potensi Kota Gunungsitoli di sektor Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari capaian produksi perikanan laut pada tahun 2020 terealisasi sebesar 6.248 ton. Produksi perikanan darat pada tahun 2020 terealisasi sebesar 135,20 ton. Produksi ikan olahan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 13,20 ton. Capaian konsumsi ikan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 76,25 persen. Serta cakupan bina kelompok nelayan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 120 persen. Capaian indikator kinerja pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.84 :
Realisasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan laut	ton	3992	4001,5	5323	5.521	6.248
2	Produksi perikanan darat	ton	72	88,11	98	98,04	135,20
3	Produksi ikan olahan	ton	0	0	8	12,6	13,20
4	Konsumsi ikan	persen	32	33	76,77	74,62	76,25
5	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	117	2	41,22	41,05	120

Sumber : Dinas Perikanan Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.3.2 Pariwisata

Pembangunan sektor kepariwisataan kurun waktu lima tahun terakhir, meliputi penataan sarana dan prasarana kepariwisataan, pelatihan sumber daya manusia kepariwisataan, penyusunan dokumen perencanaan di bidang kepariwisataan. Perkembangan jumlah wisatawan di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, cenderung mengalami fluktuatif karena pandemi Covid-19. Tahun 2016 jumlah wisatawan domestik yang berkunjung sebanyak 24.151 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah wisatawan sebanyak 19.898 orang. Sementara pada tahun 2016 jumlah wisatawan luar negeri yang berkunjung sebanyak 340 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 102 orang. Gambaran umum perkembangan sektor pariwisata kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.85 :
Realisasi Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	24.151	49.992	54.541	64.287	19.898
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Luar Negeri	Orang	340	426	391	480	102

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Kota Gunungsitoli termasuk kedalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Nias-Simeulue dan sekitarnya. Lebih khusus lagi Kota Gunungsitoli merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Nias Barat dan sekitarnya. Kota Gunungsitoli telah menetapkan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah

melalui Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2025, hal ini untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata secara khusus di Kepulauan Nias dan secara umum di Provinsi Sumatera Utara.

2.4.3.3 Pertanian

1. Luas Panen dan Produksi Taman Pangan

Perkembangan luas panen tanaman pangan yang meliputi padi, jagung dan kedelai kurun waktu lima tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Tahun 2016 luas panen sebesar 3.177 ha, mengalami peningkatan menjadi 3.694 ha pada tahun 2020. Demikian juga dari sisi produksi tanaman pangan kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yakni dari 17.455 ton tahun 2016, meningkat menjadi 18.300,84 ton di tahun 2020. Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan pertanian kurun waktu lima tahun terakhir, memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi ini menjadi peluang perekonomian daerah khususnya sektor jasa, perdagangan, dan industri, untuk mengembangkan produk-produk unggulan daerah.

2. Luas Panen dan Produksi Taman Hortikultura

Perkembangan luas panen tanaman hortikultura kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2016 luas panen sebesar 35 ha, mengalami penurunan menjadi 20 ha pada tahun 2020. Demikian juga dari sisi produksi tanaman hortikultura kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan yakni dari 192 ton tahun 2016, meningkat menjadi 79,80 ton di tahun 2020.

3. Luas Panen dan Produksi Taman Perkebunan

Perkembangan luas panen tanaman perkebunan kurun waktu lima tahun terakhir mengalami trend penurunan. Tahun 2016 luas panen sebesar 5.230 ha, mengalami penurunan menjadi 2.013,51 ha pada tahun 2020. Demikian juga dari sisi produksi tanaman hortikultura kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami penurunan yakni dari 2.900 ton tahun 2016, turun menjadi 2.165,10 ton di tahun 2020. Gambaran umum perkembangan luas panen dan produksi pertanian kurun waktu lima tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.86 :
Perkembangan Luas Panen Pertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan	Ha	3.177	3.398	4.224	3.807	3694,70
	Padi	Ha	2.867	3.372	3.968	3.698	3.561,2
	Jagung	Ha	307	24	256	109	133,50
	Kedelai	Ha	3	2	-	-	-
2	Tanaman Hortikultura	Ha	35	14	63	74	20,00
	Cabe	Ha	35	14	63	74	20,00
	Bawang Merah	Ha	-	-	-	-	-
	Pisang	Ha	-	-	-	-	-
3	Tanaman Perkebunan	Ha	5.230	4.861	4.637	4.687	2.013,51
	Karet	Ha	4.964	4.530	4.389	4.439	1890,50
	Kakao	Ha	266	331	248	248	123,01
	Kelapa	Ha	-	-	-	-	-
	durian	Ha	-	-	-	-	-

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Tabel 2.87 :
Perkembangan Jumlah Hasil Produksi Pertanian Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan	ton	17.455	18.280	22.482	20.421	18.300,84
	Padi	ton	16.175	18.180	21.428	19.971	17.728,69
	Jagung	ton	1277	99	1054	450	572,15
	Kedelai	ton	3	1	-	-	-
2	Tanaman Hortikultura	ton	192	78	355	421	79,80
	Cabe	ton	192	78	355	421	79.80
	Bawang Merah	ton	-	-	-	-	-
	Pisang	ton	-	-	-	-	-
3	Tanaman Perkebunan	ton	2.900	2.717	2.573	2.600	2.165,10
	Karet	ton	2.681	2.446	2.370	2.397	1.283,70
	Kakao	ton	219	271	203	203	186.67
	Kelapa	ton	-	-	-	-	694,72
	durian	ton	-	-	-	-	-
4	Peternakan	ton	-	2.513	2.650	2.715	*
	Jumlah Hasil Produksi Daging Babi	ton	-	2.302	2.387	2.409	*
	Jumlah Produksi Daging Kerbau/Sapi	ton	-	21	22	15	*
	Jumlah Produksi Daging Kambing	ton	-	3	4	2	*
	Jumlah Produksi Daging Ayam	ton	-	187	237	289	*

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.3.4 Perdagangan

Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan kurun waktu lima tahun terakhir meliputi pembangunan pasar rakyat dan revitalisasi pasar tradisional. Cakupan pelayanan sarana dan prasarana perdagangan di Kota Gunungsitoli relatif masih sangat terbatas. Gambaran umum pembangunan sektor perdagangan kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.88 :
Realisasi Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Distribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	25,66	26	25,34	25,56	30,15
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	31	69,23	41,67	41,67	84,23
3	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Kelompok	4	4	4	9	*
4	Jumlah Kelompok Pedagang /Usaha Informal yang menerima bantuan dari Pemerintah	Kelompok	1	-	-	-	*
5	Jumlah Komoditi yang dikirim keluar daerah	Kg	16.844.602	15.654.494	17.393.883	18.309.350	*

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.3.5 Perindustrian

Perkembangan pembangunan sektor perindustrian kurun waktu lima tahun terakhir, meliputi pelatihan bagi para pelaku industri, pemberian bantuan peralatan, dan penguatan kelembagaan. Gambaran umum perkembangan pembangunan sektor perindustrian di Kota Gunungsitoli kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.89 :
Realisasi Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Distribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	0,2	0,2	0,18	0,18	0,30
2	Pertumbuhan Industri	Persen	15,8	17,38	17,06	24,68	20,57
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	25	36,36	-	-	223
4	Jumlah Kelompok Pengrajin	Kelompok	1	4	6	11	*

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah Kelompok Pengrajin yang menerima bantuan dari Pemerintah	Kelompok	1	2	-	-	*

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.4.3.6 Pengawasan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Gunungsitoli telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel 2.89 berikut:

Tabel 2.90 :
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Gunungsitoli	Nilai	C	CC	CC	CC	CC

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pencapaian di bidang pengawasan khususnya reformasi birokrasi masih berada dalam kategori rendah.

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

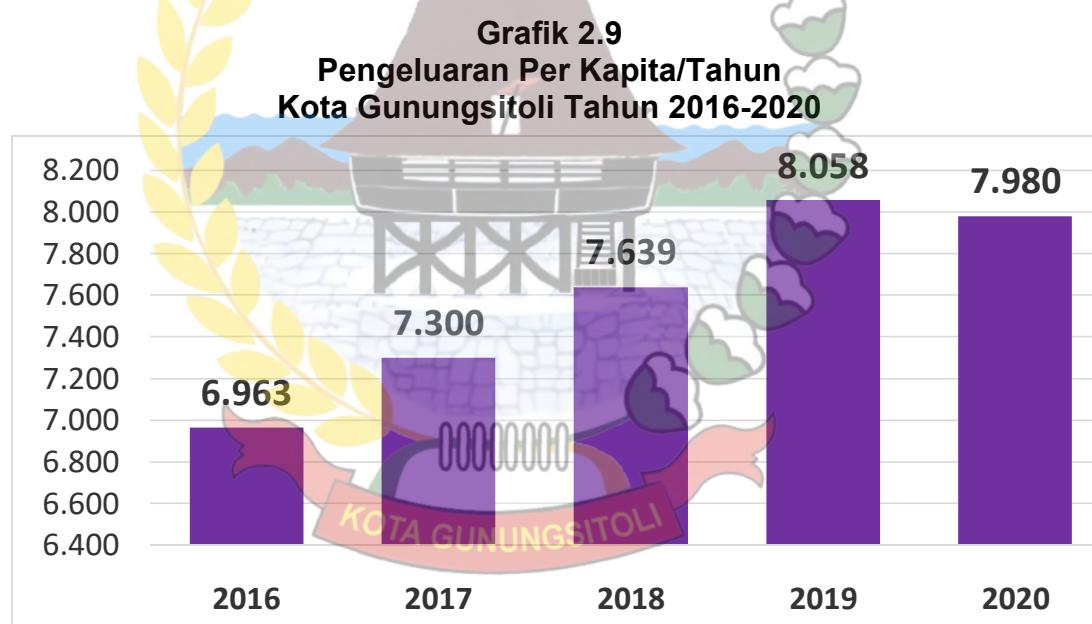
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda

antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Pada Tahun 2016 pengeluaran perkapita penduduk Kota Gunungsitoli sebesar 6,96 juta rupiah, mengalami penurunan menjadi 7,98 juta rupiah pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pengeluaran perkapita yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat Kota Gunungsitoli selama periode 2016-2020 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,82% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 5,49%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,86%.



Sumber : BPS Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.5.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentuk barang modal. Peningkatan yang terjadi pada realisasi nilai tukar petani pada tahun 2016–2020 berarti semakin tinggi daya beli petani di pedesaan. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh petani yakni mahalnya harga sarana

produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberi subsidi atau insentif bagi petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2016 tidak tersedia, sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebesar 94,3%. Kemudian kembali pada tahun 2018 & 2019 tidak tersedia hingga pada tahun 2020 kembali tercatat sebesar 95,79%.

2.5.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (non pangan). Biasanya pengeluaran untuk makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik menarik antara dua pengeluaran tersebut dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan atau pangan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Bila dibandingkan antara konsumsi makanan dan non makanan, terlihat bahwa proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan adalah sebesar 53,64%, dan untuk non makanan sebesar 46,54% dalam satu bulan. Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli masih relatif belum baik. Berikut tabel yang mengambarkan pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita Kota Gunungsitoli.

**Tabel 2.91 :
Rata-Rata Pengeluaran/Kapita/Bulan, dan Persentase Rata-Rata
Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi Tahun 2015-2020**

Tahun	Pengeluaran/Kapita/Bulan			% Pengeluaran/Kapita/Bulan		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
2015	325.203	268.002	593.206	54,82	45,18	100,00
2016	366.740	299.599	666.339	55,04	44,96	100,00
2017	375.885	293.954	669.839	56,12	43,88	100,00
2018	448.903	433.418	882.321	50,88	49,12	100,00
2019	466.016	465.238	931.254	50,04	49,96	100,00
2020	466.955	406.534	873.488	53,46	46,54	100,00

Sumber : BPS Kota Gunungsitoli Tahun 2021

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di

berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktifitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik berbeda.

Pada tahun 2016 proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 km/jam) sebesar 7,98 % dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 75,71 % pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan di Kota Gunungsitoli masih mampu menampung jumlah kendaraan/arus barang dan jasa disektor perekonomian. Secara ekonomi hal tersebut menunjukkan ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Gunungsitoli masih baik dan mampu menampung pertumbuhan ekonomi di Kota Gunungsitoli.

Bila ditinjau dari sisi penataan ruang di Kota Gunungsitoli sudah cukup baik, luas wilayah produktif berkembang dengan intervensi pemerintah melalui pemberian Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW Kota Gunungsitoli. Sedangkan perkembangan wilayah perkotaan menunjukkan peningkatan dinamis, meskipun cukup lambat. Sehingga pembangunan infrastruktur perlu mengacu dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu melakukan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator luas wilayah banjir yang semakin menurun menunjukkan bahwa sistem drainase perkotaan yang semakin baik dan akan meningkatkan umur prasarana wilayah yang dibangun.

Pada bidang lembaga keuangan telah tumbuh cukup signifikan. Ketersediaan fasilitas bank dan non bank (perusahaan asuransi) sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah dan pembiayaan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Di Kota Gunungsitoli terdapat lembaga keuangan perbankan adalah PT. Bank SUMUT, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Taspen dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sementara lembaga keuangan non perbankan yang beroperasi adalah PT. Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga asuransi diantaranya: PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT. Prudential Life Assurance dan lembaga asuransi skala kecil lainnya.

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan restoran dan rumah makan adalah indikator tumbuhnya pariwisata daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi harus dibarengi dengan ketersediaan hotel, restoran dan rumah makan serta fasilitas akomodasi lainnya yang representatif. Pada tahun 2020 di Kota Gunungsitoli terdapat 24 hotel/penginapan dengan kapasitas kamar 483 unit, restoran/cafe sebanyak 30 tempat, serta tempat penjualan cinderamata dan kuliner khas Nias.

Untuk indikator Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Gunungsitoli terbagi atas dua kategori yaitu jumlah rumah tangga yang terlayani melalui sistem perpipaan mencapai 6.505 RT dan jumlah rumah tangga yang memanfaatkan air bawah tanah 19.662 RT. Selanjutnya penyediaan listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data dari PLN Sumut Region Nias Area, penggunaan energi listrik di Kota Gunungsitoli meliputi kebutuhan rumah tangga 55,29 %, komersil 12,19 %, industri 1,97 %, pemerintah 8,06 %, sosial 5,79 % dan penggunaan lain-lain sebanyak 0,4 %. Distribusi persentase rumah tangga dengan sumber penerangan di Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.92 :
Distribusi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Kab/Kota Se-Kepulauan Nias Tahun 2020**

No	Kab/Kota	Listrik PLN (%)	Listrik Non PLN (%)	Bukan Listrik (%)
1	2	3	4	5
1	Kota Gunungsitoli	96,69	2,51	0,81
2	Kabupaten Nias	70,16	19,03	10,81
3	Kabupaten Nias Utara	80,02	8,47	11,51
4	Kabupaten Nias Selatan	91,72	6,77	1,50
5	Kabupaten Nias Barat	83,25	10,13	6,62

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Utara, 2020

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah

menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas setiap tahun. Angka kriminalitas di Kota Gunungsitoli setiap tahunnya mengalami penurunan setiap tahunnya dimana tahun 2018 terdapat 654 kasus turun menjadi 624 kasus pada tahun 2019. Selain angka kriminalitas, kejadian demonstrasi juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan, sepanjang tahun 2020 ini jumlah demonstrasi yang terjadi di wilayah kota Gunungsitoli kurang lebih sebanyak 4 kegiatan demonstrasi. Sehingga faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, oleh karena itu penting bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan penurunan angka kriminalitas. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Gunungsitoli.

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing daerah, dan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat terelakan lagi. Rasio lulusan S1/S2/S3 di lingkup pemerintah Kota Gunungsitoli terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada capaian Indikator lulusan S1/S2/S3 di tahun 2016 mencapai 50,22 persen dan mengalami penambahan menjadi 63,31 persen di tahun 2020. Untuk rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut tabel yang mengambarkan secara umum kondisi Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.93 :
Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2016-2020

No	Indikator SDM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Persen	50,22	*	54,56	59,25	63,31

No	Indikator SDM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2	Rasio Ketergantungan	Persen	*	*	52,97	53,62	52,29

Sumber : BKPSDM Tahun 2021

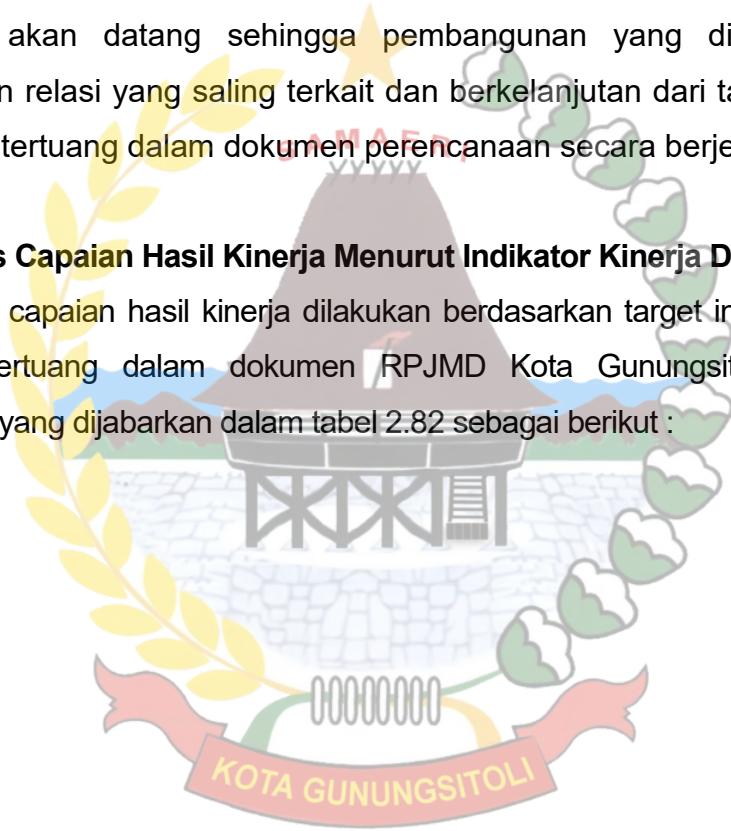
* : Data tidak diterbitkan oleh lembaga yang berwenang

2.6. Analisis Capaian Hasil Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020

Analisis capaian hasil kinerja RPJMD Tahun 2016-2020 bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima tahun). Hasil capaian kinerja ini akan menjadi dasar dalam perumusan target serta prioritas pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki hubungan dan relasi yang saling terkait dan berkelanjutan dari tahun ke tahun sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara berjenjang.

2.6.1. Analisis Capaian Hasil Kinerja Menurut Indikator Kinerja Daerah

Analisis capaian hasil kinerja dilakukan berdasarkan target indikator kinerja daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel 2.82 sebagai berikut :



Tabel 2.93
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH MENURUT PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSTITOLI
TAHUN 2016-2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian											
1.1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	6,05	6,01	6,03	6,05	0,38	6,24	6,29	6,09	TIDAK TERCAPAI	
1.2	PDRB ADH Berlaku	Miliar	3.948,97	4.503,05	5.001,03	5.513,92	5.776,11	5.685,89	6.198,72	101,59	TERLAMPAUI	
1.3	PDRB ADH Konstan	Miliar	2.885,15	3.049,12	3.232,97	3.428,45	3.441,65	3.665,80	3.896,30	93,89	TIDAK TERCAPAI	
1.3	PDRB Per kapita	Rupiah	28.653.653	32.300.000	35.500.000	38.700.000	40.174.402	39.117.493	42.081.739	102,70	TERLAMPAUI	
1.4	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	18,332,624,000,00	29.769.903.264,10	29.456.354.562,94	32.209.121.389	25.530.252.953	34.846.651.699,20	42.164.448.556,03	73,32	TIDAK TERCAPAI	
1.5	Tingkat Kemiskinan	Persen	29,23	21,66	18,44	16,23	16,41	22,78	20	138,82	TERLAMPAUI	
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	29,23	67,68	68,33	69,3	69,31	71,33	71,82	97,17	TIDAK TERCAPAI	
B	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1	Pendidikan											
1.1	Angka Melek Huruf	Persen	95,20	96,71	97,19	97,57	96,14	98,55	98,97	97,55	TIDAK TERCAPAI	
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
1.2.1	APK SD/MI	Persen	99,44	104,02	104,93	101,71	98,38	103,88	105,00	94,71	TIDAK TERCAPAI	
1.2.2	APK SMP/MTs	Persen	94,09	112,86	110,07	105,26	107,94	97,21	98,00	111,04	TERLAMPAUI	
1.2.3	APK SMA/SMK/MA	Persen	105,51					109,95	111,06			
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM)											

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
1.3.1	APM SD/MI	Persen	83,45	92,76	89,13	85,71	87,54	85,49	86,00	102,40	TERLAMPAUI	
1.3.2	APM SMP/MTs	Persen	63,56	74,29	75,25	77,01	80,25	79,12	83,00	101,43	TERLAMPAUI	
1.3.3	APM SMA/SMK/MA	Persen	69,70					72,38	73,07			
2	Kesehatan											
2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,19	70,36	70,34	70,67	71,19	76	78	93,67	TIDAK TERCAPAI	
2.2	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita	Persen	19	2,90	4,0	6,02	4,6	18,2	18	174,73	TERLAMPAUI	
2.3	Angka Kematian Ibu	Per 10.000 KH	29	4,97	15,47	16	22,92	27,5	27	116,65	TERLAMPAUI	
2.4	Angka kematian Bayi	Per 1.000 KH	21,1	18,8	20,11	8,79	13,75	20	19,5	131,25	TERLAMPAUI	
2.5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Per 1.000 KH	-20,1	-17,8	-19,11	-7,79	-12,75	-19	-18,5	149,02	TERLAMPAUI	
2.6	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	30	0	3,61	0,71	0,21	15	10	198,60	TERLAMPAUI	
2.7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta(bawah dua tahun) persen	Persen	0	4,90	5,8	3,35	2	33	32	193,39	TERLAMPAUI	
3	Ketenagakerjaan											
3.1	Tingkatkan partisipasi angkatan kerja	Persen	66,50	70,58	68,07	71,67	62,82	84,10	85,23	74,70	TIDAK TERCAPAI	
3.2	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5	6,00	5,92	5,58	5,94	3,88	3,33	65,32	TIDAK TERCAPAI	
3.3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	4	100,00	0	25	60,72	60,72	85,02	100	TERCAPAI	
C	Fokus Seni Budaya											
1	Kebudayaan											

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
1.1	Jumlah grup kesenian	Per 10.000 Penduduk	0.0063	0.0068	0,0073	0.0078	0.0080	0.0083	0.0088	96,39	TIDAK TERCAPAI	
1.2	Jumlah gedung kesenian	Per 10.000 Penduduk	0.0063	0.0068	0,0073	0.0078	0.0080	0.0083	0.0088	96,39	TIDAK TERCAPAI	
2	Pemuda dan Olah Raga											
2.1	Jumlah klub olahraga	Klub	5	51	16	29	29	20	20	145,00	TERLAMPAUI	
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1	5	5	5	5	20	20	25,00	TIDAK TERCAPAI	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM											
A	Fokus Layanan Urusan Wajib											
1	Pendidikan											
1.1	Pendidikan Dasar											
1.1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD	Persen	54,79	52,8	59,69	59,81	59,73	74,95	80,00	79,69	TIDAK TERCAPAI	
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah SMP	Persen	38,92	32,14	42,39	43,73	43,36	71,80	80,00	60,39	TIDAK TERCAPAI	
1.1.3	Rasio guru/murid SD	01:20	12,97	15,88	13,03	14,26	12,74	18,59	20	156,99	TERLAMPAUI	
23,1	Rasio guru/murid SMP	01:20	12,47	11,78	10,37	14,16	13,14	18,49	20	152,21	TERLAMPAUI	
1,2	Pendidikan Menengah											
1.2.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	Persen	32,82			61,13		70,56	80,00			
1.2.2	Rasio guru/murid SMA/SMK/MA	01:20	12,4					18,48	20			
1,3	Fasilitas Pendidikan											
1.3.1	sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	66,93	75,2	77,39	87,83	93,04	93,21	96,50	99,82	TIDAK TERCAPAI	
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	62,35	70,38	85	85	85	84,71	87,50	100,34	TERLAMPAUI	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
1.3.3	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	70,59						90,52	95,5		
1,4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
1.4.1	APK PAUD	Persen	64,49	58,12	47,94	69,35	76,41	83,41	85,80	91,61	TIDAK TERCAPAI	
1,5	Angka Putus Sekolah											
1.5.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,004	0,09	0,272	0,11	0,17	0,002	0,001	1,18	TIDAK TERCAPAI	
1.5.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,007	0,06	0,773	0,65	0,29	0,005	0,004	1,72	TIDAK TERCAPAI	
1.5.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	Persen	0,081					0,056	0,050	0,00		
1,6	Angka Kelulusan											
1.6.1	Angka kelulusan SD/MI	Persen	100	100	92,67	99,39	99,72	100	100	99,72	TIDAK TERCAPAI	
1,62	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	102,04	99,13	99,43	100	100	99,43	TIDAK TERCAPAI	
1.6.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	100					100	100	0,00		
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	112,22	93,35	103,27	104,75	109,94	114,7	115,00	95,85	TIDAK TERCAPAI	
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		123,85			124,6		124,85	125	0,00		
1.6.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	75,91	85,04	77,59	78,16	80,73	92,87	95,00	86,93	TIDAK TERCAPAI	
1.6.7	Guru yang memenuhi kualifikasi S2	Persen	0,00	0,27	0,32	0,92	0,74	1,83	2,01	40,44	TIDAK TERCAPAI	
1.6.8	Guru yang memenuhi kualifikasi S3	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	TIDAK TERCAPAI	
2	Kesehatan											
2.1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,04	0,04	0,17	0,06	0,06	0,07	0,07	85,71	TIDAK TERCAPAI	
2.2	Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,13	0,15	0,22	0,27	0,30	0,22	0,22	136,36	TERLAMPAUI	
2.3	Rasio Paramedis per satuan penduduk	Per 1.000 Pendudu	2,30	2,90	3,31	3,46	3,94	2,96	2,96	133,11	TERLAMPAUI	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
		k										
2.4	Rasio Poskesdes terhadap jumlah desa/kelurahan	Persen	38,61	38,61	38,61	38,61	38,61	38,61	73,27	73,27	52,70	TIDAK TERCAPAI
2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	38,46	0	0	100,00	100	100	76,92	89,74	130,01	TERLAMPAUI
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang											
3.1	Pekerjaan Umum											
3.1.1	Proporsi Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM /jam)	Persen	60,57	83,36	54,28	74,39	75,71	81,34	85	93,08		TIDAK TERCAPAI
3.1.2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	38,62	49,18	73,29	75,17	76,61	78,05	85,01	98,16		TIDAK TERCAPAI
3.1.3	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen	67,38	72,69	93,89	94,01	94,48	82,35	84,99	114,73		TERLAMPAUI
3.1.4	Proporsi panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	23,01	64,43	56,06	71,15	76,56	75,71	85,01	101,12		TERLAMPAUI
3.1.5	Panjang turap/Talud/Bronjong	Persen	10,49	38,91	26,71	70,59	76,69	73,82	85	103,89		TERLAMPAUI
3.1.6	Panjang bangunan pengendalian sungai dan Pengaman Pantai	Persen	12,91	13,85	14,03	35,43	82,25	74,19	85	110,86		TERLAMPAUI
3.1.7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	33,89	85,00	87	90	93,92	77,33	85	121,45		TERLAMPAUI
3.1.8	Instalasi dan jaringan air minum	Persen	39,99	50,00	54	60	76,47	78,24	84,99	97,74		TIDAK TERCAPAI
3.1.9	Jumlah alat berat	Unit	10	14	14	14	14	46	49	30,43		TIDAK TERCAPAI
3.2	Penataan Ruang											
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	4,9	5,01	20,10	68,45	43,45	40,00	50,00	108,63		TERLAMPAUI
3.2.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	5,88	6,04	7,98	8,75	8,94	13,08	16,92	68,35		TIDAK TERCAPAI
3.2.3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	27,57	0	55,8	55,8	60,9	34,93	36,77	174,35		TERLAMPAUI
4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persen										

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
4.1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	20,21	25,27	27,65	50,14	52,36	65,12	80,12	80,41	TIDAK TERCAPAI	
4.2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	39,65	28,46	28,62	29,4	29,19	59,65	64,65	48,94	TIDAK TERCAPAI	
4.3	Rasio rumah layak huni	Persen	74,00	75,50	77,22	78,73	78,73	78,00	79,00	100,94	TERLAMPAUI	
4.4	Rasio pemukiman layak huni	Persen	74,00	76,50				78,00	79,00	0,00	TIDAK TERCAPAI	
4.5	Lingkungan Pemukiman	Ha	1.614,35	1.735,50	1.760,25	1.799,10	1.799,10	1.860,51	1.922,05	96,70	TIDAK TERCAPAI	
4.6	Rumah tangga ber-Sanitasi	Unit	5.518	6.930	7.582	8.250	8.615	7.295	7.764	118,09	TERLAMPAUI	
4.7	Lingkungan Pemukiman kumuh	Ha	420,24	410,73	402,17	402,04	402,04	402,27	398,71	100,06	TERLAMPAUI	
4.8	Rumah layak huni	Unit	20.286	20.705	21.386	21.805	21.805	22.218	22.653	98,14	TIDAK TERCAPAI	
4.9	Persentase penanganan sampah	Persen	38,8	41,84	42,08	43,40	49,07	56,53	65,04	86,80	TIDAK TERCAPAI	
4.1	Persentase Luas pemukiman yang tertata	Persen	20	48,78	49,77	56,32	56,32	67	75	84,06	TIDAK TERCAPAI	
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat											
5.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000	Persen	39,82	14,24	13,86	13,79	13,94	39,80	39,83	35,03	TIDAK TERCAPAI	
5.2	Penegakan Perda	Persen	92	97,89	96,47	97,95	100	95	100	105,26	TERLAMPAUI	
5.3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Persen	30	66,67	66,47	66,67	66,67	75	90	88,89	TIDAK TERCAPAI	
6	Sosial											
6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	28,21	54,22	79,13	74,45	99,12	72,5	86,5	136,72	TERLAMPAUI	
6.2	Penanganan penyadang masalah kesejahteraan sosial	persen	26,71	57,69	57,69	76,92	80,77	73,07	88,4	110,54	TERLAMPAUI	
7	Tenaga kerja											
7.1	tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	66,5	70,58	68,07	71,67	62,82	84,1	85,23	74,70	TIDAK TERCAPAI	
7.2	tingkat pengangguran terbuka	persen	5	6,00	5,92	5,58	5,94	3,88	3,33	153,09	TERLAMPAUI	
7.3	perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	persen	4	100,00	0	25	100,00	60,72	85,02	164,69	TERLAMPAUI	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
8.1	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	28	28,36	36,38	49,24	49	41	45	119,51	TERLAMPAUI	
8.2	partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	38,42	71,6	63,71	50,75	46,2	38,42	38,42	120,25	TERLAMPAUI	
8.3	penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	persen	60,00	83,30	100,00	100,00	100,00	80	80	125	TERLAMPAUI	
8.4	partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	56,4	30,52	67,87	53,37	72	70	70	102,86	TERLAMPAUI	
9	pangan											
9.1	ketersediaan energi dan protein	persen	51,60	57,3	82,6	91,5	92,5	86,32	90,64	107,16	TERLAMPAUI	
9.2	keresediaan cadangan pangan	persen	NA	16,40	31,40	51,00	52,00	60,00	75,00	86,67	TIDAK TERCAPAI	
9.3	keresediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	persen	NA	20,70	82,05	78,31	78,37	80,00	90,00	97,96	TIDAK TERCAPAI	
9.4	stabilitas harga dan pasok pangan	persen	NA	21,20	41,78	60,00	60,00	80,00	90,00	75,00	TIDAK TERCAPAI	
9.5	skor pola pangan harapan (pph)	persen	60,20	78	72,9	66,5	66,5	84,13	90,02	79,04	TIDAK TERCAPAI	
9.6	penganekaragaman dan pembinaan keamanan pangan	persen	NA	22,90	0,00	75,00	77,00	80,00	90,00	96,25	TIDAK TERCAPAI	
9.7	penaganan kerawanan pangan	persen	NA	16,10	83,30	83,30	83,80	60,00	75,00	139,67	TERLAMPAUI	
9.8	konsumsi beras / kapita / tahun	kalori	113,5	122,95	104,04	93,1	93,1	109,0	107,9	85,41	TIDAK TERCAPAI	
9.10	regulasi ketahanan pangan daerah		NA	1				0	0	0		
9,11	Cakupan Penyuluhan Terhadap Kelompok Tani	Person	8,30	13,49	11 ¹¹	12,2	8,19	12,15	13,37	67,41	TIDAK TERCAPAI	
10	Pertanahan											
10,1	Pengadaan Tanah Pemerintah	Ha	5	1,82	0,002	1,20	0,38	5	25	17,01	TIDAK TERCAPAI	
11	Lingkungan Hidup											
11,1	Pencemaran Status Mutu Air	Persen	24,00	24	19,51	40,24	0	40,00	44,00	0,00	TIDAK TERCAPAI	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
11,2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	Persen	40,00	48	52,08	57,92	63,13	60,00	65,00	105,22	TERLAMPAUI	
11,3	Penegakan Hukum Lingkungan	Persen	50,00	100	100	100	100	74,00	80,00	135,14	TERLAMPAUI	
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil											
12,1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	97,01	99,12	96,11	98,03	99,18	98,8	99,10	100,38	TERLAMPAUI	
12,2	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	Persen	83,50	97,28	96,11	95,66	96,6	95,5	98,50	101,15	TERLAMPAUI	
12,3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	60,00	105,2	95,41	70,72	89,92	80,00	90,00	112,40	TERLAMPAUI	
12,4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia Anak (penduduk usia 0 - 18 tahun)	Persen	65,00	108,49	87,6	92,95	95,4	85,00	90,00	112,24	TERLAMPAUI	
12,5	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	60,00	85,92	71,88	63,48	74,74	80,00	85,00	93,43	TIDAK TERCAPAI	
12,6	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	25,00	84,16	52,3	58,66	73,97	33,00	35,00	224,15	TERLAMPAUI	
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa											
13,1	Rata - rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	0,50	1	1	1	1,5	2,00	2,00	100	TERCAPAI	
13,2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Persen	0,50	1	1	1	1,5	2,00	2,00	100	TERCAPAI	
13,4	LPM Berprestasi	Persen	0,00	0	0	0	0	6,00	6,00	0,00	TIDAK TERCAPAI	
13,5	PKK aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	TERCAPAI	
13,6	posyandu aktif	persen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	TERCAPAI	
13,7	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	persen	20,00	15,00	22	23	25	25,00	25,00	100	TERCAPAI	
13,8	pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	persen	10,00	14,29	29,4	40	50	50,00	50,00	100	TERCAPAI	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana											
14,1	rata - rata jumlah anak per keluarga	persen	4,34	4,34	1,53	1,32	1,10	3,00	3,00	272,73	TERLAMPAUI	
14,2	rasio akseptor kb	persen	61,00	17,17	63,03	64,02	66,45	65,00	65,00	102,23	TERLAMPAUI	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
14.3	cakupan perserta kb aktif	persen	64,00	30,48	43,18	53,66	63,97	80,00	80, 00	79,96	TIDAK TERCAPAI	
14.4	keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	persen	70,00	60,12	63,09	45,15	39,54	50,00	50, 00	126,45	TERLAMPAUI	
15	Perhubungan											
15.1	jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	400,000	465.754	491.055	601.126	347826	630000	650, 000	55,21	TIDAK TERCAPAI	
15.2	rasio ijin trayek	persen	0,00	0,007	0,00	0,00	0,00	0,07	0, 07	0,00	TIDAK TERCAPAI	
15.3	jumlah uji kir angkutan umum	unit	0,00	50	764	1547,00	1547	2500	3, 500	61,88	TIDAK TERCAPAI	
15.4	jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bis	unit	10	5	5	7	11	8	11	137,50	TERLAMPAUI	
15.5	jumlah angkutan umum darat	persen	38,00	14,39	16,33	31,50	55,00	58,00	63, 00	94,83	TIDAK TERCAPAI	
15.6	pemasangan fasilitasi perlengkapan jalan	persen	25,00	44,00	48,12	56,83	45,39	45,00	50, 00	100,87	TERLAMPAUI	
16	Komunikasi dan informatika											
16.1	jumlah jaringan komunikasi	persen	5,70	11,10	16,60	58,33	73,08	4,70	4, 40	1554,89	TERLAMPAUI	
16.2	rasio wartel / warnet terhadap penduduk	persen	0,0112	0,0112	0,0108	0,0071	0	0,0071	0,0071	0,00	TIDAK TERCAPAI	
16.3	jumlah surat kabar nasional / lokal	unit	25	42	42	46	104	29	30	358,62	TERLAMPAUI	
16.4	jumlah penyiaran radio/ TV lokal	unit	17	18	19	20	22	21	22	104,76	TERLAMPAUI	
16.5	website milik pemerintahan daerah	unit	tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	TERCAPAI	
17	koperasi, usaha kecil, dan menegah											
17.1	persentase koperasi aktif	persen	57	47,34	59,63	59,63	62,39	62	65	100,63	TERLAMPAUI	
17.2	jumlah ukm non BPR/LKM UKM	unit	366	582	582	615	5497	550	600	999,45	TERLAMPAUI	
17.3	jumlah BPR/LKM	unit	0		1	1	0	2	3	0,00	TIDAK TERCAPAI	
17.4	usaha mikro dan kecil	persen	2,37	96,8	260,33	340,7	72,68	30	40, 00	242,27	TERLAMPAUI	
18	penanaman modal											
18.1	jumlah investor	investor	0	0	0	1	6	1	3	600	TERLAMPAUI	
19	kepemudaan dan olahraga											

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (TerCapai/Tidak TerCapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
19.1	jumlah organisasi pemuda	organisasi	15	15	23	23	23	23	16	16	143,75	TERLAMPAUI
19.2	jumlah organisasi olahraga	organisasi	5	8	12	12	12	12	9	10	133,33	TERLAMPAUI
19.3	jumlah kegiatan kepemudaan	jenis	3	5	8	4	0	0	4	4	106,25	TERLAMPAUI
19.4	jumlah kegiatan olahraga	jenis	3	3	7	5	2	2	6	6	80,95	TIDAK TERCAPAI
19.5	lapangan olahraga	buah	20	20	71	71	71	71	30	30	236,67	TERLAMPAUI
20	statistik											
20.1	buku gunungsitoli dalam angka	ada/tidak	ada		ada		ada	ada	ada	ada	100,00	TERCAPAI
20.2	buku PDRB kota gunungsitoli	ada/tidak	ada		ada		ada	ada	ada	ada	100,00	TERCAPAI
21	persandian											
21.1	peningkatan SDM pengelola persandian	orang	0	0	0	0	0	0	1	5	0,00	TIDAK TERCAPAI
22	kebudayaan											
22.1	penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2	12	7	6	1	6	7	16,67	TIDAK TERCAPAI	
22.2	jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	unit	60	68	66	68	68	68	70	100,00	TERCAPAI	
22.3	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	27,65	34,75	41,94	51,46	51,46	56,02	63,12	91,86	TIDAK TERCAPAI	
23	Perpustakaan											
23.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	0	1	1	1	1	1	5	100	TERCAPAI	
23.2	Koleksi Buku perpustakaan	Buku	0	764	907	1671	682	25	125	2728	TERLAMPAUI	
24	Kearsipan											
24.1	Peningkatan SDM pengelola karsipan	Orang	0	0	0	0	0	0	1	5	0,00	TIDAK TERCAPAI
B	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
1	Kelautan dan perikanan											
1,1	Produksi Perikanan Laut	Ton	3726	4.001,45	5.323	5.521	6.248	6.000	6.500	104,13	TERLAMPAUI	
1,2	Produksi Perikanan Darat	Ton	57	88,11	98	98,04	135,2	135	135	100,15	TERLAMPAUI	
1,3	Produksi ikan olahan	Ton	0		0,008	12,6	13,2	2000	2500	0,66	TIDAK TERCAPAI	

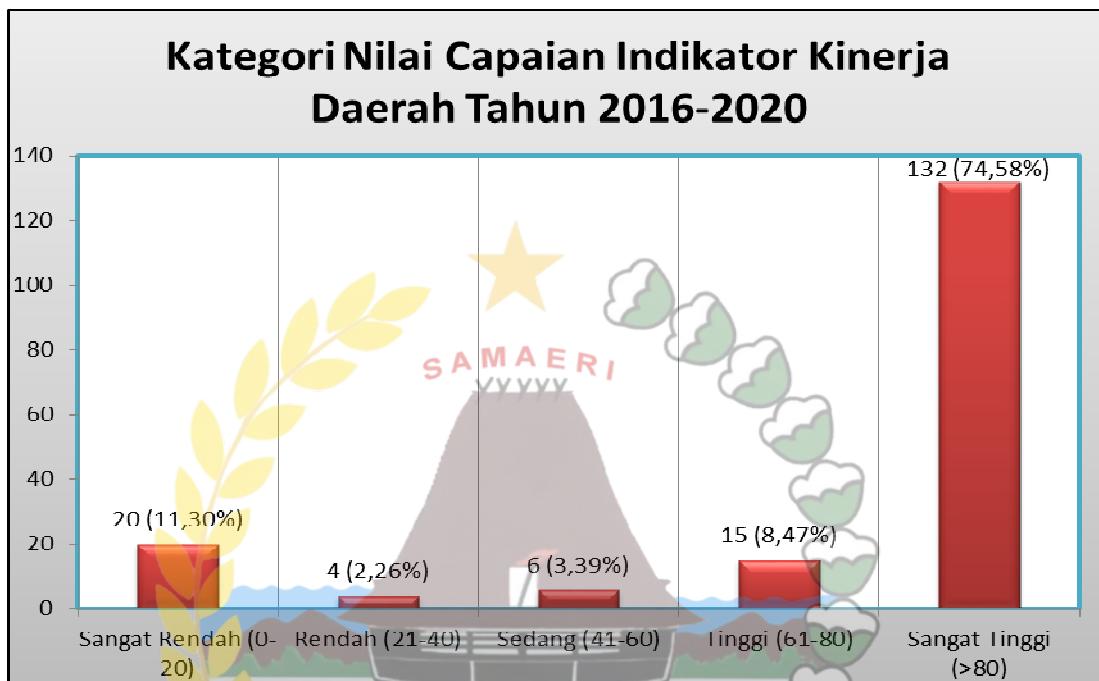
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
1,4	Konsumsi Ikan	Persen	42	33	76,77	74,62	76,25	43,25	43,5	176,30	TERLAMPAUI	
1,5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	131	24	41,22	41,05	120	20	20	600,00	TERLAMPAUI	
2	Pariwisata											
2,1	Kunjungan Wisata	Persen	32	157,87	62	64	20	60	70	33,33%	TIDAK TERCAPAI	
2,2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	5	6	7	8	9	9	15	100,00%	TERCAPAI	
3	Pertanian											
3,1	Kontribusi Terhadap PDRB											
3.1.1	Kontribusi sektor pertanian,Kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	14,50	14,81	14,72	14,72	14,72	15,09	15,24	97,55	TIDAK TERCAPAI	
3.1.2	Kontribusi Produksi Kelompok petani terhadap PDRB	Persen	NA	0,01	1	1	1	0,04	0,05	2500	TERLAMPAUI	
3,2	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	35,00	24,36				20	35,00			
3,3	Tanaman Pangan											
3.3.1	Produktivitas Padi	Ton	5,06	5,39	5,4	5,4	5,3	6,07	6,64	87,31	TIDAK TERCAPAI	
3.3.2	Produksi Padi GKP	Ton	11.324	19.282,71	21.428,2	19.971	18.169	14.301	14.995	127,05	TERLAMPAUI	
3,4	Palawija											
3,4.1	Produktivitas Jagung	Ton	3,74	3,73	4	4	5,9	7,48	8,98	78,88	TIDAK TERCAPAI	
3,4.2	Produksi Jagung	Ton	26	896,319	1.024	435,8	366	356,796	475,728	102,58	TERLAMPAUI	
3,4.3	Produktivitas Kedelai	Ton	1	1,04		0	0	1,2	1,31	0,00	TIDAK TERCAPAI	
3,4.4	Produksi Kedelai	Ton	3	2,04		0	0	3,6	3,94	0,00	TIDAK TERCAPAI	
3,5	Perkebunan											
3,5.1	Produktivitas Karet	Ton	0,52	0,62	0,68	1,9	0,82	0,73	0,88	112,33	TERLAMPAUI	
3,5.2	Produksi Karet	Ton	2.603	1.175,76	2.985	1.953	1.946	3.599	4.354	54,07	TIDAK TERCAPAI	
3,5.3	Produktivitas Kakao	Ton	0,0947	0,54	0,121	0,12	1,27	0,0994	0,1024	1277,67	TERLAMPAUI	
3,5.4	Produksi Kakao	Ton	85,00	178,07	204,68	204,68	147	89,29	91,95	164,63	TERLAMPAUI	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
3,6	Peternakan											
3.6.1	Produksi Daging	Kg	2.465,371	2.514,63	2.555		2.717,07	3.038,22	2.662,60	2.766,15	114,11	TERLAMPAUI
3.6.2	Produksi Telur	Kg	157,79	162,509	163,76		239,3	268,546	184,61	203,15	145,47	TERLAMPAUI
4	Kehutanan											
4,1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	0	0	0		0	0	50	50	0,00	TIDAK TERCAPAI
5	Energi dan Sumber Daya Mineral											
5,1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	2,76	25,10	0		2,65	2,82	5,89	7,90	47,88	TIDAK TERCAPAI
6	Perdagangan											
6,1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	27,00	26	25,34		25,56	30,15	31,00	35,00	97,26	TIDAK TERCAPAI
6,2	Cakupan Bina Kelompok pedagang/usaha informal	Persen	55,00	69,23	41,67		41,67	84,23	68,00	70,00	123,87	TERLAMPAUI
7	Perindustrian											
7,1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	0,21	0,2	0,18		0,18	0,30	0,3	0,31	100,00	TERCAPAI
7,2	Pertumbuhan Industri	Persen	15,80	17,38	24,68		24,68	20,57	30	35,00	68,57	TIDAK TERCAPAI
7,3	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	25,00	36,36	0		0	223	45	50,00	495,56	TERLAMPAUI
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
A	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1,1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Persen	54,97	*	*		*	*	56,91	57,66	*	
1,2	Produktivitas Total Daerah (PDRB ADH)	Miliar	Rp.3.948,97	Rp.4.034,20	Rp.4.503,05		Rp.5.001,03	Rp.5.513,92	Rp.5.685,89	Rp.6.198,72	96,98	TIDAK TERCAPAI
B	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
1	Perhubungan											
1,1	Rasio panjang jalan per jumlah	Persen	24,45						25,98	27,32		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Kinerja pada akhir periode RPJMD	Persen tase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
				2016	2017	2018	2019	2020				
	kendaraan											
1,2	jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	7,125						11.345	12.675		
1,3	jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	358.860						359.415	359.890		
2	Penataan Ruang											
2,1	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	50,00	67	70,95	74,95	79,35	70	75,00	113,36	TERLAMPAUI	
2,2	Luas wilayah produktif	Ha	12.339,37	13.996,70		13.990,38	17771,81	14283,37	14.769,37	124,42	TERLAMPAUI	
3	Lembaga Keuangan/Perbankan											
3,1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	7				5	8	8	62,50	TIDAK TERCAPAI	
3,2	jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	4				0	6	6			
4	Perhotelan/Restoran											
4,1	jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit	12	98	247			20	25			
4,2	jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	Unit	6	21	21	21	21	14	15	150,00	TERLAMPAUI	
5	lingkungan Hidup											
5,1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Persenta se	75	28,34	26,67	26,49	26,73	90	95	29,69	TIDAK TERCAPAI	
6	Energi dan Sumber Daya Mineral											
6,1	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	Persen	92,37	92,17	97,83	95,66	97,30	96,89	100	100,42	TERLAMPAUI	
C	Fokus Sumber Daya Manusia											
1	Ketenagakerjaan											
1,1	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persen	7,50		54,56	59,25	63,31	27,45	35,09	230,64	TERLAMPAUI	
1,2	Rasio Ketergantungan	Persen	60,07	59,44	59,18	58,90	56,10	58,21	57,89	96,38	TIDAK TERCAPAI	

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan kategori nilai capaian indikator kinerja daerah tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Grafik 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik di atas, jumlah indikator kinerja daerah Kota Gunungsitoli pada tahun 2016-2020 sebanyak 177 indikator. Selanjutnya dapat digambarkan dalam enam kategori capaian, sebagai berikut:

1. Kategori sangat rendah, terdiri dari 20 indikator dengan persentase sebesar 11,30%.
2. Kategori rendah, terdiri dari 4 indikator dengan persentase sebesar 2,26%.
3. Kategori sedang, terdiri dari 6 indikator dengan persentase sebesar 3,39%.
4. Kategori tinggi, terdiri dari 15 indikator dengan persentase sebesar 8,47%.
5. Kategori sangat tinggi, terdiri dari 132 indikator dengan persentase sebesar 74,58%.

2.6.1. Analisis Capaian Hasil Kinerja Menurut Misi Daerah

Analisis capaian hasil kinerja dilakukan berdasarkan misi daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021, yang merupakan bagian dari Visi Misi Walikota Gunungsitoli tahun 2016-2021. Adapun penjabaran dijabarkan dalam beberapa tabel sebagai berikut :



Tabel 2.95
CAPAIAN KINERJA MISI 1 : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	Dinas Pendidikan	%	83,41	0,00	58,21	47,73	69,35	76,41	91,61%	TIDAK TERCAPAI
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi	Dinas Pendidikan	%	103,88	105,16	104,02	104,93	101,71	98,38	94,71%	TIDAK TERCAPAI
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Dinas Pendidikan	%	97,21	97,84	112,86	100,07	105,26	107,94	111,04%	TERLAMPAUI
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Dinas Pendidikan	%	85,49	100,93	92,76	89,13	85,71	87,54	102,40%	TERLAMPAUI
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Dinas Pendidikan	%	67,12	71,89	74,29	75,25	77,01	80,25	119,56%	TERLAMPAUI
		Angka Kelulusan SD/Mi	Dinas Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	92,67	99,39	99,72	99,72%	TIDAK TERCAPAI
		Angka kelulusan SMP/Mts	Dinas Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	102,04	99,13	99,43	99,43%	TIDAK TERCAPAI
		Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan Baik	Dinas Pendidikan	%	93,21	0,00	75,20	77,39	82,61	93,04	99,82%	TIDAK TERCAPAI
		Sekolah Pendidikan	Dinas Pendidikan	%	84,71	0,00	70,38	85,00	85,00	85,00	100,34%	TERLAMPAUI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		SMP/Mts Kondisi bangunan Baik										
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru berkualifikasi Pendidikan S-1	Dinas Pendidikan	%	92,87	75,91	85,04	77,59	78,16	80,73	86,93	TIDAK TERCAPAI
		Rasio Guru berkualifikasi Pendidikan S-2	Dinas Pendidikan	%	1,83	0,00	0,27	0,32	0,92	0,74	40,44	TIDAK TERCAPAI
		Rasio Guru berkualifikasi Pendidikan S-3	Dinas Pendidikan	%	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERCAPAI
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	per 10.000 KH	27,50	29,00	4,97	15,47	15,50	22,92	116,65%	TERLAMPAUI
		Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	per 1.000 KH	20,00	21,10	18,89	20,11	8,79	13,75	131,25%	TERLAMPAUI
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Angka Kematian Balita	Dinas Kesehatan	per 1.000 KH	15,00	30,00	0,00	3,61	0,71	0,21	198,60%	TERLAMPAUI
3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Dinas Kesehatan	%	18,20	4,80	2,90	3,97	6,02	4,60	174,73%	TERLAMPAUI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak badut (bawah dua tahun)	Dinas Kesehatan	%	33,00	0,00	4,90	5,80	3,35	2,00	193,39%	TERLAMPAUI
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)	Dinas Kesehatan	%	80,00	85,00	73,16	95,00	84,50	97,02	125,00%	TERLAMPAUI
		Persentase obat yang memenuhi syarat (%)	Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	TERCAPAI
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kesakitan (%)	Dinas Kesehatan	%	15,00	33,67	34,04	11,28	14,31	18,44	77,08%	TIDAK TERCAPAI
6	Program Pengawasan obat dan makanan	Persentase Apotik/TPM yang mendapat pengawasan (%)	Dinas Kesehatan	%	100,00	100,00	64,60	80,00	51,00	95,00	90,00%	TIDAK TERCAPAI
7	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Desa/kel memiliki Tanaman Obat keluarga (TOGA)	Dinas Kesehatan	%	80,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERCAPAI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan memiliki UKBMD minimal 5 Pokja (%)	Dinas Kesehatan	%	80,00	0,00	51,49	55,45	75,25	85,15	106,44%	TERLAMPAUI
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa/Kelurahan Sehat (%)	Dinas Kesehatan	%	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00%	TERLAMPAUI
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi TB/100.00 Penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100.000 Penduduk	297,00	117,65	104,11	140,50	155,87	100,16	166,28%	TERLAMPAUI
		Prevalensi HIV (%)	Dinas Kesehatan	%	0,60	0,00	0,00	0,01	0,01	0,005	199,17%	TERLAMPAUI
		jumlah Desa/kelurahan mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TERCAPI
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi (%)	Dinas Kesehatan	%	100,00	0,00	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00%	TERCAPI
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase kepesertaan SJSN kesehatan	Dinas Kesehatan	%	95,00	86,09	85,87	87,35	87,58	85,76	90,28%	TIDAK TERCAPI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		n (%)										
13	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Persentase Faskes yang memenuhi permenkes No.75 Tahun 2014 (%)	Dinas Kesehatan	%	85,00	46,67	75,67	79,00	84,00	90,00	105,88%	TERLAMPAUI
14	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase kota memiliki 1 RSUD	Dinas Kesehatan	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
15	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase RSUD yang memenuhi standar sesuai permenkes no.56 th.2014	Dinas Kesehatan	%	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
16	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Kerjasama lintas program & lintas sektor minimal 5 MOU	Dinas Kesehatan	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00%	TERLAMPAUI
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persentase Desa/Kel yang memiliki Posyandu lansia (%)	Dinas Kesehatan	%	40,00	44,55	51,49	55,45	77,23	91,09	227,72%	TERLAMPAUI
18	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pengelolaan TPM	Dinas Kesehatan	%	70,00	48,75	68,67	21,20	47,80	85,00	121,43%	TERLAMPAUI

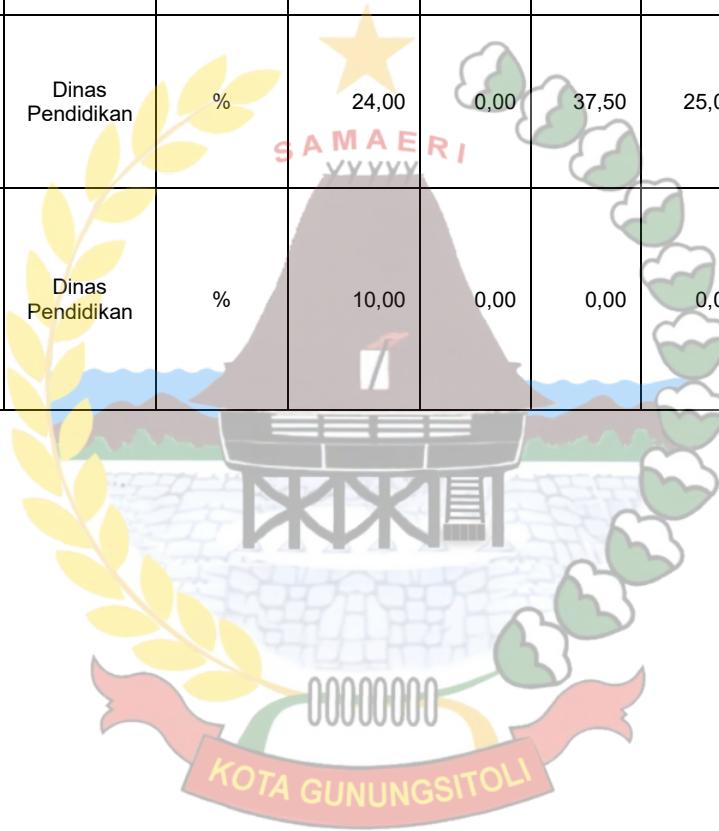
No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		laik sehat (%)										
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase Puskesmas melaksakan upaya kesehatan remaja (%)	Dinas Kesehatan	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00%	TERLAMPAUI
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase SKPD menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (%)	Dinas P5A	%	20,00	0,00	35,00	45,00	50,00	80,00	400,00%	TERLAMPAUI
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Penanganan korban Kekerasaan Perempuan dan Anak (%)	Dinas P5A	%	20,00	0,00	15,00	25,00	25,00	34,00	170,00%	TERLAMPAUI
3	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Dinas P5A	%	15,00	0,00	25,00	35,00	45,00	80,00	533,33%	TERLAMPAUI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		unan (%)										
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan daerah untuk Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan (%)	Dinas P5A	%	20,00	0,00	76,00	76,40	76,40	99,73	498,65%	TERLAMPAUI
2	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang Anak	Rasio Upaya Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang Anak (%)	Dinas P5A	%	75,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	133,33%	TERLAMPAUI
	Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rasio tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (%)	Dinas P5A	%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU PADU	Rasio Pengembangan Model Operasional BKB-	Dinas P5A	%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		POSYAN DU PADU (%)										
	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB (%)	Dinas P5A	%	65,00	61,00	17,17	63,03	64,02	66,45	102,23%	TERLAMPAUI
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pencapaian peserta KB Baru menurut Jenis Kontrasepsi (%)	Dinas P5A	%	80,00	0,00	58,07	28,22	9,53	15,12	18,90%	TIDAK TERCAPAI
	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri (%)	Dinas P5A	%	65,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	92,30%	TIDAK TERCAPAI
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rasio Upaya pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (%)	Dinas P5A	%	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00	125,00%		TERLAMPAUI
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan	Cakupan Pengembangan	Dinas Pendidikan	%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA

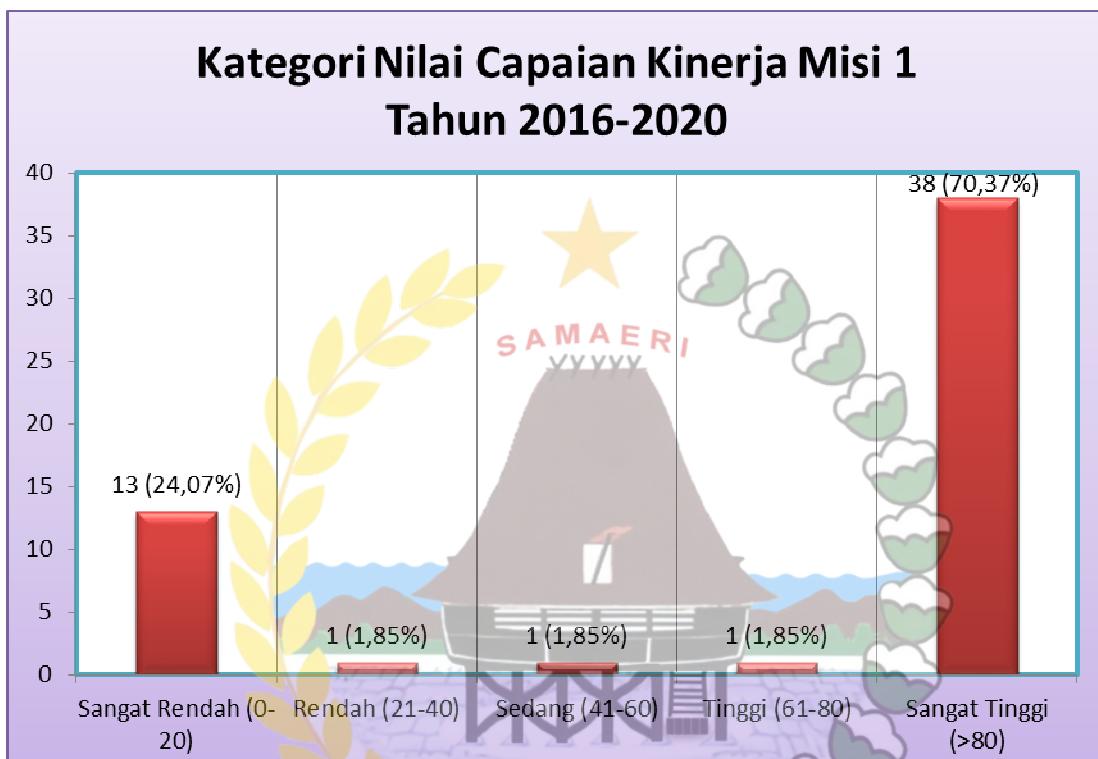
No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
	Pemuda	dan Keserasian Kebijakan Pemuda (%)										
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan peningkatan peran serta kepemudaan (%)	Dinas Pendidikan	%	24,00	0,00	28,57	14,29	14,29	7,14	29,75%	TIDAK TERCAPAI
3	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (%)	Dinas Pendidikan	%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
4	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Cakupan peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (%)	Dinas Pendidikan	%	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
1	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Dinas Pendidikan	%	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		(%)										
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (%)	Dinas Pendidikan	%	24,00	24,00	0,00	37,50	25,00	25,00	104,17%	TERLAMPAUI
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (%)	Dinas Pendidikan	%	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA



Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan kategori nilai capaian indikator pada Misi 1 yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Grafik 2.11
Pencapaian Kinerja Misi 1Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik di atas, jumlah indikator yang mendukung capaian Misi 1 pada tahun 2016-2020 sebanyak 54 indikator. Selanjutnya dapat digambarkan dalam lima kategori capaian, sebagai berikut:

1. Kategori sangat rendah, terdiri dari 13 indikator dengan persentase sebesar 24,07%.
2. Kategori rendah, terdiri dari 1 indikator dengan persentase sebesar 1,85%.
3. Kategori sedang, terdiri dari 1 indikator dengan persentase sebesar 1,85%.
4. Kategori tinggi, terdiri dari 1 indikator dengan persentase sebesar 1,85%.
5. Kategori sangat tinggi, terdiri dari 38 indikator dengan persentase sebesar 70,37%.

Tabel 2.96
CAPAIAN KINERJA MISI 2 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Persentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)							
						2016	2017	2018	2019	2020									
Tujuan 1 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan																			
Sasaran 1.1 : Meningkatnya produktivitas																			
1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Cakupan Peningkatan produktivitas tenaga kerja	DPMPPPTS P	%	69,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA							
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Peningkatan Kesempatan kerja	DPMPPPTS P	%	76,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA							
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan Peningkatan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DPMPPPTS P	%	68,42	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	87,69%	TIDAK TERCAPAI							
Tujuan 1 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan																			
Sasaran 1.2 : Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perternakan, kelautan dan perikanan																			
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan protein (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	86,32	51,60	57,30	82,60	91,50	92,50	107,16	TERLAMPUAI							
		Ketersediaan cadangan Pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	60,00	NA	16,40	31,40	51,00	52,00	86,67%	TIDAK TERCAPAI							
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	80,00	NA	20,70	82,05	78,31	78,37	97,96%	TIDAK TERCAPAI							

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Persentase Capaian	Status (Ter capai/Tidak Ter capai/Ter lampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		Stabilitas Harga dan Pasok Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	80,00	NA	21,20	41,78	60,00	60,00	75,00	TIDAK TERCAPAI
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	84,13	60,20	78,00	72,90	66,50	66,50	79,04	TIDAK TERCAPAI
		Penganekar agaman dan Keamanan Pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	80,00	NA	22,90	0,00	75,00	77,00	96,25	TIDAK TERCAPAI
		Penanganan Kerawanan Pangan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	60,00	NA	16,10	83,30	83,30	83,80	139,67%	TERLAMPAUI
2	Program pemberdayaan penyuluh	Percentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	75	100,00	96,00	94,00	100,00	0,00	104,00%	TERLAMPAUI
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rasio Peningkatan Kesejahteraan Petani (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	98	0,00	94,30	0,00	95,79	0,00	38,79%	TIDAK TERCAPAI
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rasio peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
5	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rasio penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	100	0,00	96,59	87,91	99,82	99,96	99,96%	TIDAK TERCAPAI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		(%)										
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Produksi Padi (Ton/Ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	20	0,00	86,03	79,92	80,99	89,06	445,30%	TERLAMPAUI
		Produksi Jagung (Ton/Ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	80	0,00	7,04	70,47	3,40	15,00	18,75%	TIDAK TERCAPAI
		Produksi Kedelai (Ton/Ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
		Produksi Karet (Ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	50	0,00	50,20	72,84	72,84	48,92	97,84%	TIDAK TERCAPAI
		Produksi Kakao (Ha)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	20	0,00	99,26	74,97	53,11	53,84	269,20%	TERLAMPAUI
7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rasio pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	20	99,98	99,55	99,86	93,88	90,48	452,40%	TERLAMPAUI
8	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi Ayam ras petelur (ekor)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	40	0,000	27,325	12,700	10,400	0,00	25,21%	TIDAK TERCAPAI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		Produksi - Ayam Buras super (ekor)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
		Produksi Itik petelur (ekor)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
		Produksi Puyuh petelur (ekor)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
		Produksi Babi (ekor)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	20	4,00	8,00	10,00	12,00	14,00	70,00%	TIDAK TERCAPAI
		Produksi - Kambing (ekor)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
9	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rasio peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	80	99,63	0,00	96,26	94,08	89,77	112,21%	TERLAMPUAI
10	Program peningkatan penerapan teknologi perternakan	Rasio peningkatan penerapan teknologi peternakan (%)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%	0	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
11	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Cakupan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (%)	Dinas Perikanan	%	20	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11%	TIDAK TERCAPAI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
12	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan (%)	Dinas Perikanan	%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
13	Program pengembangan budidaya perikanan	Cakupan pengembangan budidaya perikanan (%)	Dinas Perikanan	%	40	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	83,33%	TIDAK TERCAPAI
14	Program pengembangan perikanan tangkap	Cakupan pengembangan perikanan tangkap (%)	Dinas Perikanan	%	40	0,00	88,90	106,50	100,40	104,10	260,25%	TERLAMPAUI
15	Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan Pengembangan sistem penyuluhan perikanan (%)	Dinas Perikanan	%	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERCAPAI
16	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (%)	Dinas Perikanan	%	40	0,00	0,00	0,00	0,80	0,70	3,75%	TIDAK TERCAPAI
17	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Cakupan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (%)	Dinas Perikanan	%	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA

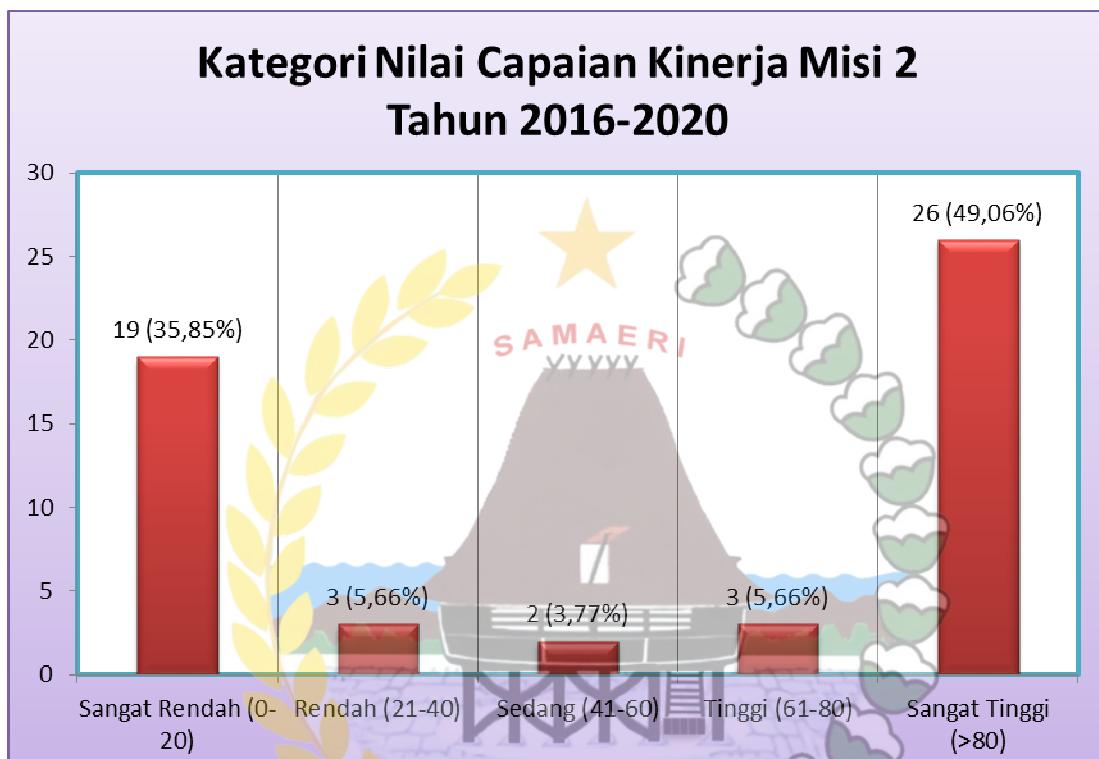
No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)							
						2016	2017	2018	2019	2020									
Tujuan 1 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan																			
Sasaran 1.3 : Meningkatnya produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kreatif, serta industri kecil dan menengah																			
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	70	63,00	50,00	37,50	37,50	37,50	53,57%	TIDAK TERCAPAI							
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	20	25,00	29,17	20,83	37,50	41,70	208,50%	TERLAMPAUI							
3	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	20	0,00	69,23	84,23	41,67	84,23	421,15%	TERLAMPAUI							
4	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA							
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	25	16,00	17,38	20,57	24,68	20,57	82,28%	TIDAK TERCAPAI							
6	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	20	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA							

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Percentase Capaian	Status (Ter capai/Tidak Ter capai/Ter lampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
7	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan Penataan Struktur Industri (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	15	16,00	17,38	20,57	24,68	20,57	137,13%	TERLAMPAUI
8	Program Pengembangan sentrasentra industri potensial	Cakupan Pengembangan sentrasentra industri potensial (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	20	33,33	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
Tujuan 1 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan												
Sasaran 1.4 : Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM												
1	Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang kondusif	Rasio Iklim usaha UKM yang kondusif (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	65	33,00	16,67	16,67	0,00	16,67	25,65%	TIDAK TERCAPAI
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rasio Upaya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	70	33,00	91,50	77,32	85,91	10,01	14,30%	TIDAK TERCAPAI
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rasio Ketersediaan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	60	50,00	2,37	167,51	260,33	72,68	121,13%	TERLAMPAUI
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rasio Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	65	15,60	47,34	31,40	59,63	62,39	95,98%	TIDAK TERCAPAI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					Persentase Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)							
						2016	2017	2018	2019	2020									
Tujuan 1 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan																			
Sasaran 1.5 : Meningkatnya kunjungan wisata daerah																			
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Upaya Pemasaran Kepariwisataan Daerah (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	19	20,00	70,00	20,00	30,00	10,00	52,63%	TIDAK TERCAPAI							
2	Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan Daerah (%)	Cakupan Pengembangan Destinasi Kepariwisataan Daerah (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	18	0,00	7,14	7,14	14,29	21,43	119,06%	TERLAMPAUI							
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Cakupan Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan Daerah (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	10	0,00	5,08	6,77	12,69	8,46	84,60%	TIDAK TERCAPAI							
Tujuan 1 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan																			
Sasaran 1.6 : Meningkatnya iklim usaha																			
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor berskala Nasional PMDN/PMA (Perusahaan)	DPMPPTS P	%	3	0	0	2	2	6	200,00%	TERLAMPAUI							
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor PMDN/PMA (Rp)	DPMPPTS P	%	3 MILYAR	0	0	2.5 M	4.85 M	15.94 M	531,33%	TERLAMPAUI							
3	Program Pelayanan Perizinan	Jumlah Izin Yang di terbitkan (Dokumen)	DPMPPTS P	%	1500	2064	1452	1257	2068	1986	132,40%	TERLAMPAUI							

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan kategori nilai capaian indikator pada Misi 2 yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Grafik 2.12
Pencapaian Kinerja Misi 2Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik di atas, jumlah indikator yang mendukung capaian Misi 2 pada tahun 2016-2020 sebanyak 53 indikator. Selanjutnya dapat digambarkan dalam lima kategori capaian, sebagai berikut:

1. Kategori sangat rendah, terdiri dari 19 indikator dengan persentase sebesar 35,85%.
2. Kategori rendah, terdiri dari 3 indikator dengan persentase sebesar 5,66%.
3. Kategori sedang, terdiri dari 2 indikator dengan persentase sebesar 3,77%.
4. Kategori tinggi, terdiri dari 3 indikator dengan persentase sebesar 5,66%.
5. Kategori sangat tinggi, terdiri dari 26 indikator dengan persentase sebesar 49,06%.

Tabel 2.97
CAPAIAN KINERJA MISI 3 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR WILAYAH SERTA PEMANFAATAN RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)							
						2016	2017	2018	2019	2020									
Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata																			
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan																			
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kondisi Jalan dan Jembatan Baik	Dinas PUPR	%	82,04	265,00	60,94	83,59	84,53	85,55	104,27%	TERLAMPAUI							
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kondisi Jalan dan Jembatan Baik	Dinas PUPR	%	80,52	20,83	78,02	74,09	84,15	85,10	105,68%	TERLAMPAUI							
3	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Kondisi Jalan dan Jembatan Baik	Dinas PUPR	%	70,47	0,00	60,94	83,59	84,53	85,55	121,39%	TERLAMPAUI							
Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata																			
Sasaran 1.2 : Terciptanya kawasan perkotaan modern, asri dan nyaman																			
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	Dinas PUPR	%	40,00	4,90	5,01	20,10	68,45	43,45	108,63%	TERLAMPAUI							
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman dan asri (%)	Dinas Perkim	%	70,00	20,00	48,81	49,77	56,32	56,32	80,45%	TIDAK TERCAPAI							
Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata																			
Sasaran 1.3 : Meningkatnya konsistensi terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang																			

1	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang (%)	Dinas PUPR	%	70,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	47,61%	TIDAK TERCAPAI
2	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan Pemanfaatan Ruang struktur ruang, pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis (%).	Dinas PUPR	%	13,08	0,00	6,04	7,98	5,37	8,94	68,35%	TIDAK TERCAPAI
3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan peruntukannya (%)	Dinas PUPR	%	15,00	50,00	67,00	70,95	74,95	79,35	529,00%	TERLAMPAUI

Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.4 : Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup

1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio Pengelolaan Sampah (%)	Dinas Lingkungan Hidup	%	56,63	38,80	41,84	42,08	43,40	49,07	86,80	TERLAMPAUI
		Rasio Pengelolaan Sampah (%)	Dinas Lingkungan Hidup	%	56,63	38,80	41,84	42,08	43,40	49,07	86,80	TERLAMPAUI
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%)	Dinas Lingkungan Hidup	%	15,00	0	24	20,73	40,24	0	113,29%	TERLAMPAUI
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio Peningkatan Upaya Perlindungan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup	%	24,00	0	10	50	60	0	100,00%	TERCAPAI

		(%)											
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rasio Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)	Dinas Lingkungan Hidup	%	25,00	0	0	0	0	0	0,00%	TIDAK TERLAKSANA	
5	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Rasio Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan (%)	Setda	%	79,00	22	21	40	54	79	100,00%	TERCAPAI	
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio Peningkatan Upaya Perlindungan Sumber Daya Alam (%)	Setda	%	80,00	10	27	44	61	80	100,00%	TERCAPAI	

Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.5 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan pemukiman

1	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Perumahan (%)	Dinas Perkim	%	25,00	73,247 879	74,76	77,22	78,73	78,73	314,93%	TERLAMPUAI
2	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Cakupan Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya ya (%)	Dinas Perkim	%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA

Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.6 : Meningkatnya upaya pengendalian banjir dan penanggulangan bencana												
1	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Genangan air permukaan yang terkendali	Dinas PUPR	%	77,33	33,89	85,00	87,00	90,00	93,92	121,45%	TERLAMPAUI
2	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Sungai dan Lereng Kondisi Stabil	Dinas PUPR	%	73,82	10,49	38,91	26,71	70,59	76,69	103,89%	TERLAMPAUI
3	Program Pengendalian Banjir	Sungai dan Pantai Kondisi Stabil	Dinas PUPR	%	74,19	12,91	13,85	14,03	35,43	82,25	110,86%	TERLAMPAUI
4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (%)	Dinas BPBD	%	16,77	0,00	0,00	89,49	75,49	98,12	585,09%	TERLAMPAUI
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (%)	Dinas Sosial	%	81,25	5,74	54,22	79,13	74,45	99,12	121,99%	TERLAMPAUI

Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.7 : Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan

1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	Dinas Perhubungan	%	40,00	25	50,00	25,00	25,00	25,00	62,50%	TIDAK TERCAPAI
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan (%)	Dinas Perhubungan	%	65,00	12,5	50	37,5	37,5	37,5	57,69%	TIDAK TERCAPAI

3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan pelayanan angkutan (%)	Dinas Perhubungan	%	60,00	33	33	50	66	66	110,00%	TERLAMPAUI
4	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Cakupan pengamanan lalu lintas (%)	Dinas Perhubungan	%	50,00	20	44	44	44,25	45,39	90,78%	TIDAK TERCAPAI
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Cakupan kelaikan kendaraan bermotor (%)	Dinas Perhubungan	%	60,00	0	10	50,93	77,35	61,88	103,13%	TERLAMPAUI

Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.8 : Meningkatnya penyediaan kebutuhan sumber daya energy listrik

1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio Peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan (%)	Setda	%	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
---	---	---	-------	---	-------	------	------	------	------	------	-------	------------------

Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

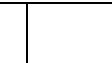
Sasaran 1.9 :Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan kota Gunungsitoli

1	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan pengelolaan areal pemakaman (%)	Dinas PUPR	%	34,93	27,57	0,00	55,80	55,80	60,90	174,35%	TERLAMPAUI
2	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%)	Satpol	%	17,44	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	344,00%	TERLAMPAUI
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	Dinas Perkim	%	58,00	28,95	52,63	73,68	81,58	81,58	140,65%	TERLAMPAUI

Tujuan 1 :
Mewujudkan
penyediaan

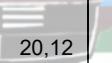
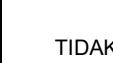
infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.10 : Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi

1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan	Air Irigasi yang memadai untuk Pertanian Rakyat	Dinas PUPR	%		75,71		23,01		64,43		56,06		71,15		76,56		101,12%		TERLAMPAUI
---	---	---	------------	---	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---------	---	------------

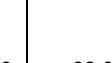
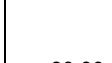
Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.11 : Meningkatnya cakupan pelayanan kebutuhan air bersih, sanitasi lingkungan dan pengelolaan air limbah

1	Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		Dinas PUPR	%		78,24		39,99		50,00		54,00		60,00		76,47		97,74%		TIDAK TERCAPAI
2	Program Pengelolaan Air Limbah Pemukiman	Cakupan Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (%)		Dinas Perkim	%		59,00		20,12		42,12		46,08		50,14		52,36		88,75%		TIDAK TERCAPAI

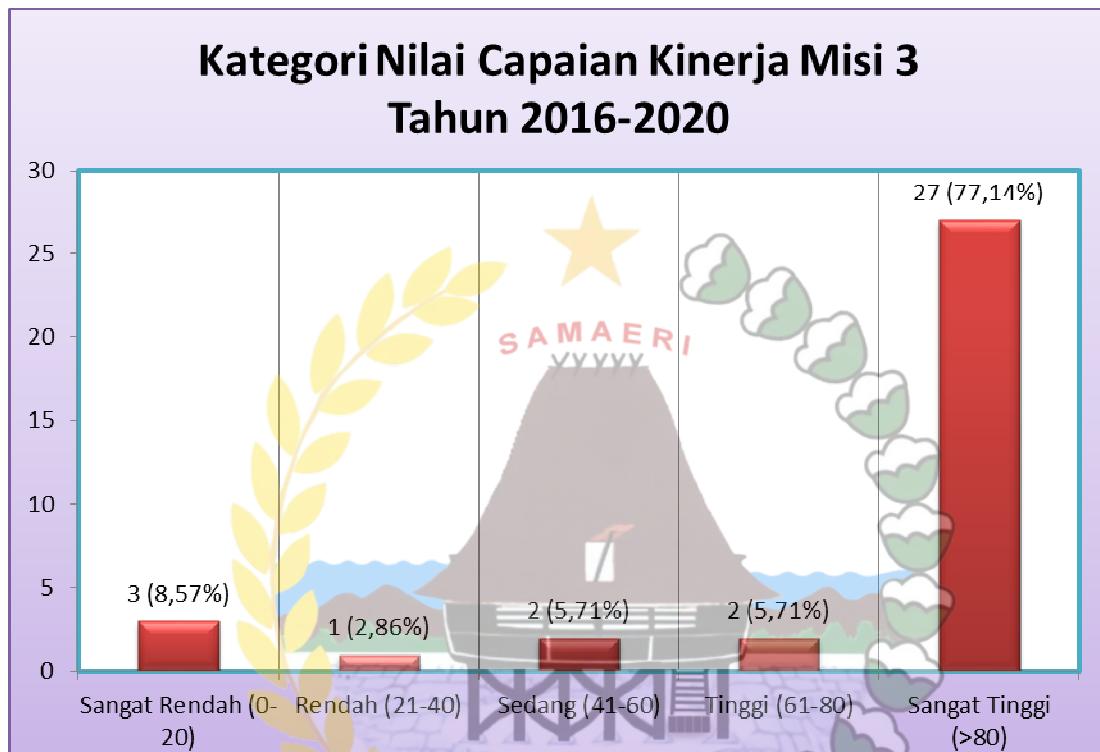
Tujuan 1 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata

Sasaran 1.12 : Meningkatnya ketersediaan alat-alat berat

1	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Alat-alat Berat, Kendaraan dan alat-alat ukur yang memadai		Dinas PUPR	%		87,76		300,00		78,00		47,00		32,00		30,00		34,18%		TIDAK TERCAPAI
---	--	--	---	------------	---	---	-------	---	--------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--------	---	----------------

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan kategori nilai capaian indikator pada Misi 3 yaitu Membangun Infrastruktur Wilayah serta Pemanfaatan Ruang yang Berwawasan Lingkungan tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Grafik 2.13
Pencapaian Kinerja Misi 3 Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik di atas, jumlah indikator yang mendukung capaian Misi 3 pada tahun 2016-2020 sebanyak 35 indikator. Selanjutnya dapat digambarkan dalam lima kategori capaian, sebagai berikut:

1. Kategori sangat rendah, terdiri dari 3 indikator dengan persentase sebesar 8,57%.
2. Kategori rendah, terdiri dari 1 indikator dengan persentase sebesar 2,86%.
3. Kategori sedang, terdiri dari 2 indikator dengan persentase sebesar 5,71%.
4. Kategori tinggi, terdiri dari 2 indikator dengan persentase sebesar 5,71%.
5. Kategori sangat tinggi, terdiri dari 27 indikator dengan persentase sebesar 77,14%.

Tabel 2.98
CAPAIAN KINERJA MISI 4 : MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHANYANG AKUNTABEL,PROFESIONAL, DAN MELAYANI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)							
						2016	2017	2018	2019	2020									
Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati																			
Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah																			
1	Program Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana	Cakupan Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana (%)	SETDA	%	80,00	0,00	50,00	52,00	62,85	80,00	100,00%	TERCAPAI							
2	Program Penyusunan Penyelenggaraan Analisis Jabatan	Cakupan Penyusunan Penyelenggaraan Analisis Jabatan (%)	SETDA	%	89,00	0,00	30,00	53,50	74,50	89,00	100,00%	TERCAPAI							
3	Program Pendidikan Kedinasan	Rasio ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan (%)	BKPSDM	%	90,00	71,30	77,77	80,80	47,70	0,00	61,68%	TIDAK TERCAPAI							
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rasio Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)	BKPSDM	%	72,00	96,00	100,00	87,00	67,70	87,00	120,83%	TERLAMPAUI							
Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati																			
Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik																			
1	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Rasio Upaya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa (%)	Diskominfo	%	80,00	10,00	20,00	40,00	60,00	92,86	116,08%	TERLAMPAUI							

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
2	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rasio Ketersediaan Regulasi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (%)	Diskominfo	%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
3	Program kerjasama informasi dengan media massa	Rasio kerjasama informasi dengan media massa (%)	Diskominfo	%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan sistem administrasi kearsipan (%)	Dinas perpustakaan dan kearsipan	%	66,00	0,00	60,00	62,00	64,00	66,00	100,00%	TERCAPI
5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah (%)	Dinas perpustakaan dan kearsipan	%	45,00	5,00	20,00	25,00	35,00	45,00	100,00%	TERCAPI
6	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan (%)	Dinas perpustakaan dan kearsipan	%	48,00	8,00	18,00	28,00	38,00	48,00	100,00%	TERCAPI
7	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan kualitas pelayanan informasi (%)	Dinas perpustakaan dan kearsipan	%	66,00	0,00	60,00	62,00	64,00	66,00	100,00%	TERCAPI
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Dinas perpustakaan dan kearsipan	%	57,50	12,50	27,50	37,50	47,50	57,50	100,00%	TERCAPI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		n (%)										
9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98,80	97,01	99,12	96,11	98,03	99,18	100,38%	TERLAMPAUI
		Rasio Penduduk yang memiliki e-KTP (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,50	83,50	97,28	96,11	95,66	96,60	101,15%	TERLAMPAUI
		Rasio Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	80,00	60,00	105,20	95,41	70,72	89,92	112,40%	TERLAMPAUI
		Rasio Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	80,00	60,00	85,92	71,88	63,48	74,74	93,43%	TIDAK TERCAPAI
		Rasio Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	17,00	0,00	0,00	5,48	17,22	21,37	125,71%	TERLAMPAUI
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan (%)	Dinas perpustakaan dan kearsipan	%	57,50	12,50	27,50	37,50	47,50	57,50	100,00%	TERCAPAI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
11	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98,80	97,01	99,12	96,11	98,03	99,18	100,38%	TERLAMPAUI
Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati												
Sasaran 1.3 : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan												
1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Cakupan peningkatan kapasitas Aparatur perencanaan pembangunan daerah (%)	Bappeda	%	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107,53%	TERLAMPAUI
2	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	Bappeda	%	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	107,53%	TERLAMPAUI
3	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Ekonomi (%)	Bappeda	%	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	94,11%	TIDAK TERCAPAI
4	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya (%)	Bappeda	%	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	106,38%	TERLAMPAUI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh (%)	Bappeda	%	89,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	TIDAK TERCAPAI
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana (%)	Bappeda	%	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
7	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang (%)	Bappeda	%	80,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	75,00%	TIDAK TERCAPAI

Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati

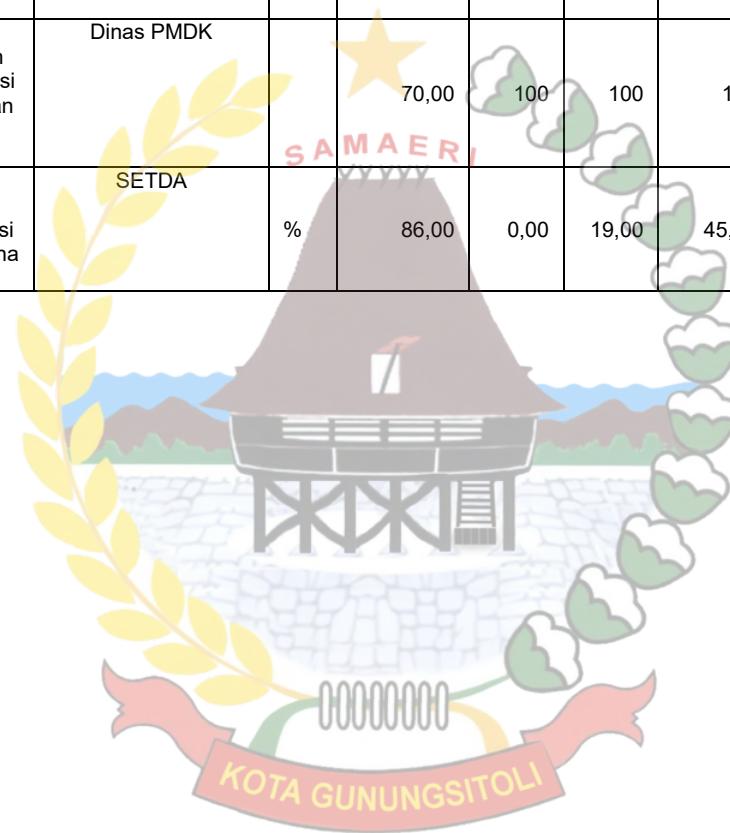
Sasaran 1.4 : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	BPKPD	%	97,00	85	97,35	98,07	100	92,31	94,55%	TIDAK TERCAPAI
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	BPKPD	%	91,00	84	94,04	100	100	100	109,89%	TERLAMPAUI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
3	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Pengadaan Tanah Pemerintah (Ha)	BPKPD	Ha	5	5	1,82	0,002	1,20	0,38	17,01	TIDAK TERCAPAI
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rasio Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	SETDA	%	86,44	99,49	92,15	98,3	96,3	100	115,69%	TERLAMPAUI
Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati												
Sasaran 1.5 : Meningkatnya kualitas pengawasan internal												
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (%)	Inspektorat	%	83,00	88,89	77,78	77,78	95,22	101,88	122,75%	TERLAMPAUI
2	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (%)	Inspektorat	%	83,00	46,67	66,67	100,00	105,33	83,33	100,40%	TERLAMPAUI
3	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Izin Yang di terbitkan (Dokumen)	Inspektorat	%	83,00	200	100	100	100	100	120,48%	TERLAMPAUI
Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati												
Sasaran 1.6 : Meningkatnya penguatan kelembagaan DPRD												
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Cakupan peningkatan kapasitas	Sekretariat DPRD	%	85,00	0	0	100	100	100	117,65%	TERLAMPAUI

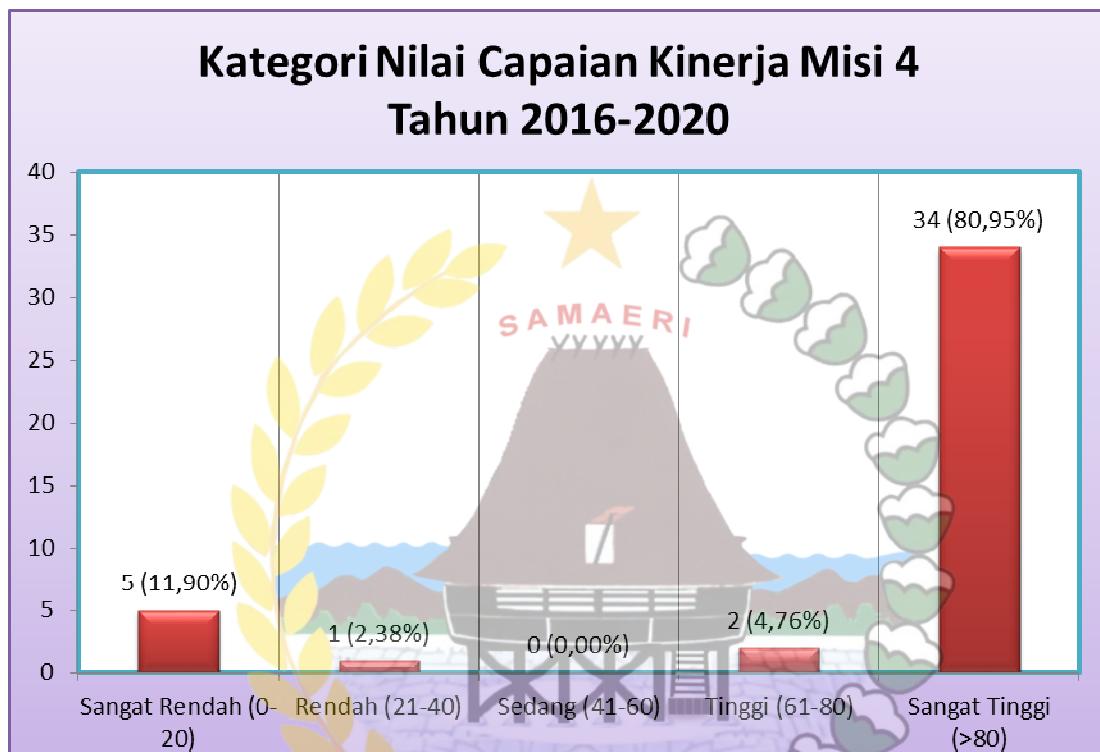
No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
	daerah	lembaga perwakilan rakyat daerah (%)										
2	Program kerjasama informasi dengan media massa	Rasio kerjasama informasi dengan media massa (%)	Sekretariat DPRD	%	70,00	80	90	100	100	100	142,86%	TERLAMPAUI
Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati												
Sasaran 1.7 : Meningkatnya kerjasama daerah												
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (%)	SETDA	%	80,00	0	20	40	60	80	100,00%	TERCAPAI
Tujuan 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif profesional dan melayani dengan hati												
Sasaran 1.8 : Meningkatnya pembinaan pemerintahan kecamatan dan desa												
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rasio Upaya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa (%)	Dinas PMDK	%	60,00	100	74	100	96	92	153,33%	TERLAMPAUI
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rasio Upaya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (%)	Dinas PMDK	%	65,00	100	100	100	100	100	153,85%	TERLAMPAUI
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	Dinas PMDK	%	70,00	100	0	0	0	0	28,51%	TIDAK TERCAPAI
4	Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rasio peningkatan Kapasitas	Dinas PMDK	%	70,00	80	100	96	98	0	106,85%	TERLAMPAUI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		Aparatur Pemerintah Desa (%)										
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (%)	Dinas PMDK	%	70,00	100	100	100	100	100	142,86%	TERLAMPAUI
6	Program Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan Penataan Administrasi Pemerintahan (%)	SETDA	%	86,00	0,00	19,00	45,50	71,50	86,00	100,00%	TERCAPAI



Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan kategori nilai capaian indikator pada Misi 4 yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional dan Melayani tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Grafik 2.14
Pencapaian Kinerja Misi 4 Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik di atas, jumlah indikator yang mendukung capaian Misi 4 pada tahun 2016-2020 sebanyak 42 indikator. Selanjutnya dapat digambarkan dalam lima kategori capaian, sebagai berikut:

1. Kategori sangat rendah, terdiri dari 5 indikator dengan persentase sebesar 11,90%.
2. Kategori rendah, terdiri dari 1 indikator dengan persentase sebesar 2,38%.
3. Kategori tinggi, terdiri dari 2 indikator dengan persentase sebesar 4,76%.
4. Kategori sangat tinggi, terdiri dari 34 indikator dengan persentase sebesar 80,95%.

Tabel 2.99
CAPAIAN KINERJA MISI 5 : MEMPERKOKOH KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKAT YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, DAN TAAT HUKUM

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)							
						2016	2017	2018	2019	2020									
Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hukum																			
Sasaran 1.1 : Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin																			
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (%)	DINAS SOSIAL	%	72,00	100,00	100,00	100,00	70,00	100,00	138,89%	TERLAMPAUI							
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (%)	DINAS SOSIAL	%	74,80	85,00	100,00	75,00	87,00	50,00	106,00%	TERLAMPAUI							
3	Program pembinaan anak terlantar	Cakupan pembinaan anak terlantar (%)	DINAS SOSIAL	%	78,10	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	102,43%	TERLAMPAUI							
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan pembinaan para penyandang cacat dan trauma (%)	DINAS SOSIAL	%	76,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	131,51%	TERLAMPAUI							
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan panti asuhan/ panti jompo (%)	DINAS SOSIAL	%	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	103,00%	TERLAMPAUI							

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
6	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) (%)	DINAS SOSIAL	%	76,00	100,00	100,00	100,00	75,00	0,00	98,68%	TIDAK TERCAPAI
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (%)	DINAS SOSIAL	%	75,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	132,10%	TERLAMPAUI

Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hukum

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kesadaran dan ketiaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

1	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan (%)	Satpol	%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (%)	Satpol	%	20,00	50,00	66,67	66,67	66,67	66,67	333,35%	TERLAMPAUI
3	Program pemberantasan penyakit masyarakat	Cakupan pemberantasan penyakit	Satpol	%	20,00	66,67	50,00	50,00	25,00	0,00	191,67%	TERLAMPAUI

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
	(pekat)	masyarakat (pekat) (%)										
4	Cakupan Penataan Administrasi Pemerintahan (%)	Cakupan Bantuan Pelayanan Hukum bagi ASN (%)	Setda	%	90,00	74,57	100,00	100,00	81,05	100,00	111,11%	TERLAMPAUI
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Cakupan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. (%)	Kesbangpol	%	80,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	106,25%	TERLAMPAUI
Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hukum												
Sasaran 1.3 : Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai ideologi bangsa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan												
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Cakupan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. (%)	Satpol	%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan (%)	Kesbangpol	%	85,00	70,00	75,00	80,00	85,00	45,00	83,25%	TIDAK TERCAPAI
5	Program pendidikan Politik masyarakat	Cakupan Peningkatan Pemahaman masyarakat dalam bidang politik (%)	Kesbangpol	%	85,00	75,00	80,00	83,00	85,00	90,00	105,88%	TERLAMPAUI
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan	Dinas Sosial	%	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	TIDAK TERLAKSANA

No.	Program	Indikator	Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi					% Capaian	Status (Tercapai/Tidak Tercapai/Terlampaui)
						2016	2017	2018	2019	2020		
		Kebangsaan (%)										
Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hukum												
Sasaran 1.4 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagaman sebagai landasan moral dan etika dalam membangun kerukunan hidup umat beragama												
2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan (%)	Kesbangpol	%	80,00	65,00	70,00	75,00	80,00	95,00	118,75%	TERLAMPAUI
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan (%)	Setda	%	80,00	95,64	85,50	98,50	88,60	70,00	110,00%	TERLAMPAUI
Tujuan 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hukum												
Sasaran 1.5 : Meningkatnya pelestarian budaya daerah secara berkelanjutan												
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pengembangan Nilai Budaya (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	16,00	12,50	33,33	25,00	20,00	16,67	104,19%	TERLAMPAUI
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	24,00	12,50	36,22	41,94	51,46	51,46	214,42%	TERLAMPAUI
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	10,00	0,00	44,50	53,00	52,50	50,50	505,00%	TERLAMPAUI
4	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Cakupan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya (%)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	600,00%	TERLAMPAUI

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan kategori nilai capaian indikator pada Misi 5 yaitu Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berbudaya, Religius dan Taat Hukum tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Grafik 2.15
Pencapaian Kinerja Misi 5 Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik di atas, jumlah indikator yang mendukung capaian Misi 5 pada tahun 2016-2020 sebanyak 22 indikator. Selanjutnya dapat digambarkan dalam lima kategori capaian, sebagai berikut:

1. Kategori sangat rendah, terdiri dari 3 indikator dengan persentase sebesar 13,64%.
2. Kategori sangat tinggi, terdiri dari 19 indikator dengan persentase sebesar 86,36%.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pembangunan yang lebih memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli didasarkan pada kondisi kinerja keuangan (2016-2020), baik kinerja keuangan maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya dalam menyusun proyeksi pendapatan, belanja, dan pemiyaan sebagai kerangka pendanaan dimasa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan anggaran termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pemiyaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja (komponen belanja yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019), proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Gunungsitoli selama kurun waktu 2016–2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2016 Pendapatan mencapai Rp. 706.416.779.805, di tahun 2017 pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp. 691.423.299.086, di tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 702.840.277.059 dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 730.739.514.034, hingga pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan Rp. 703.793.539.789.

Tabel 3.1 :
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A.2016-2020
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	Pendapatan	706,416,779,805	691,423,299,086	702,840,277,059	730,739,514,034	703,793,539,789	(0,05)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29,185,403,160	29,769,903,264	29,456,354,563	32,209,121,389	25,530,252,953	(2,61)
1.1.1.	Pajak Daerah	11,539,708,660	13,254,315,199	15,015,862,740	15,090,778,123	11,951,902,720	1,96
1.1.2.	Retribusi Daerah	1,356,153,690	1,377,137,370	1,978,330,163	2,215,837,017	2,591,503,580	18,54
1.1.3.	Lain-lain PAD Yang Sah	16,289,540,810	15,138,450,695	12,462,161,660	14,902,506,249	10,986,846,653	(7,86)
1.2.	Pendapatan Transfer	676,519,182,325	655,653,395,822	652,692,802,496	666,125,335,624	563,459,655,681	(4,22)
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645,387,832,707	626,325,686,898	628,040,259,110	644,061,706,827	543,252,176,779	(3,95)
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31,131,349,618	29,327,708,924	24,652,543,386	22,063,628,797	20,207,478,902	(10,16)
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	712.194.320	6.000.000.000	20.691.120.000	32.405.057.021	114.803.631.155	324,55

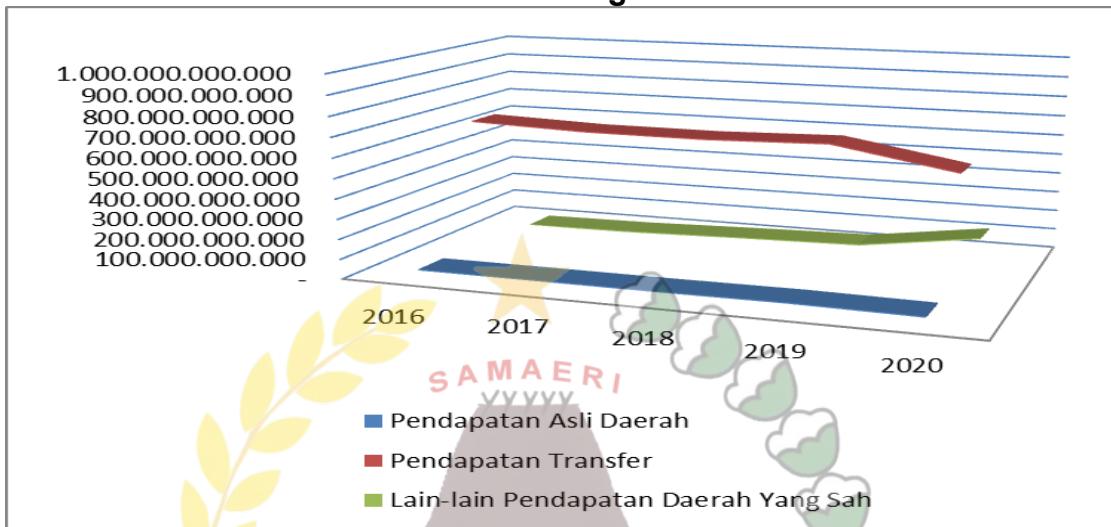
No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	712.194.320	6.000.000.000	20.691.120.000	32.405.057.021	114.803.631.155	324,55
2	Belanja	705,994,577,295	778,005,373,505	702,837,581,847	732,295,074,460	719,249,942,772	0,74
2.1.	Belanja Operasi	387,716,374,946	379,293,207,001	403,871,329,215	438,717,517,702	436,757,404,950	3,12
2.1.1.	Belanja Pegawai	273,202,312,425	260,433,408,460	283,196,425,346	292,987,120,659	256,834,602,839	(1,21)
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	109,888,218,756	112,876,474,541	112,857,294,644	136,663,819,000	143,244,890,361	7,17
2.1.3.	Belanja Hibah	4,325,843,765	5,288,400,000	7,377,200,000	8,626,274,500	35,990,311,750	98,97
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	300,000,000	694,924,000	440,409,225	440,303,543	687,600,000	37,79
2.2.	Belanja Modal	260,138,208,349	249,617,598,853	183,521,284,315	156,757,286,042	145,877,614,736	(13,01)
2.2.1.	Belanja Modal	260,138,208,349	249,617,598,853	183,521,284,315	156,757,286,042	145,877,614,736	(13,01)
2.3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	113,839,706	-	4,868,795,526	1.019,22

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	-	-	113.839.706	-	4.868.795.526	1.019,22
2.4.	Belanja Transfer	58.139.994.000	149.094.567.651	115.331.128.611	136.820.270.716	131.746.127.560	37,18
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	58.139.994.000	149.094.567.651	115.331.128.611	136.820.270.716	131.746.127.560	37,18
3.	Pembiayaan	129.864.892.284	130.087.094.794	43.505.020.376	41.491.235.587	38.935.675.160	(7,49)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	129.864.892.284	130.087.094.794	43.505.020.376	43.491.235.587	39.935.675.160	(18,65)
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.864.892.284	130.087.094.794	43.505.020.376	43.491.235.587	39.935.675.160	(18,65)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		-		2.000.000.000	1.000.000.000	(12,50)
3.2.1.	Pemberian Dana Bergulir		-		2.000.000.000	1.000.000.000	(12,50)

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Realisasi pendapatan Kota Gunungsitoli dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan persentase rata-rata 0,05%, proporsi realisasi dari masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut :

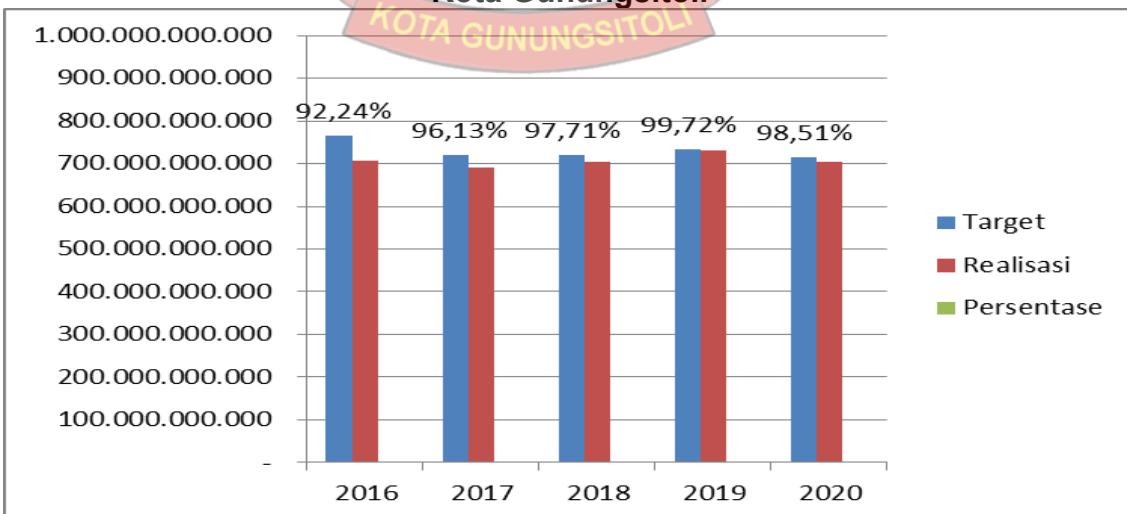
Grafik 3.1
Proporsi Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016–2020
Kota Gunungsitoli



Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Selanjutnya Realisasi pendapatan daerah Kota Gunungsitoli dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan peningkatan sampai pada Tahun 2018, dengan kontraksi 1% s/d 2% sampai pada Tahun 2020 sekaligus menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Adapun tingkat capaian kinerja pendapatan dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Grafik 3.2
Persentase Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020
Kota Gunungsitoli



Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

B. Belanja

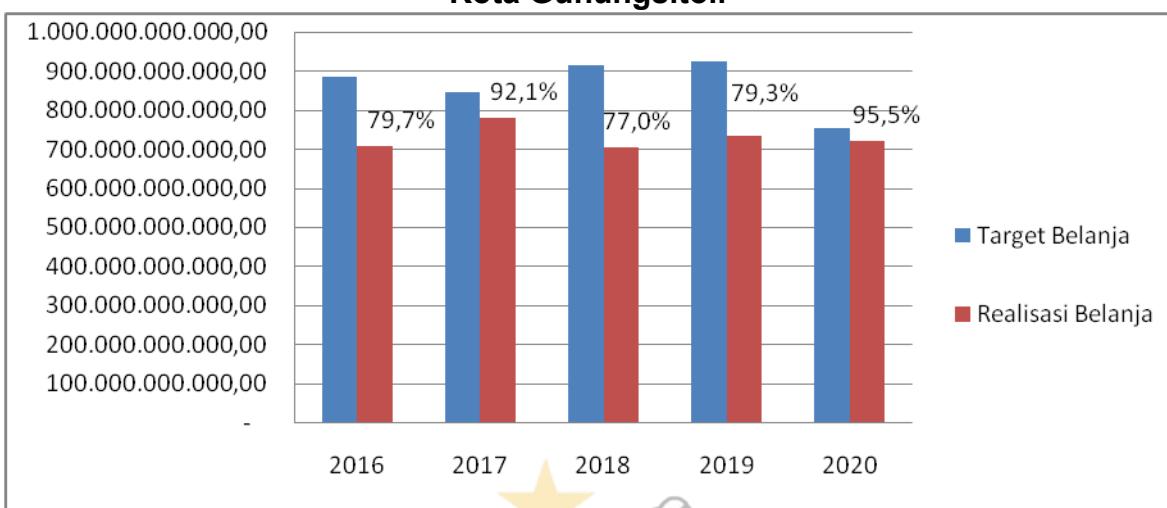
Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penganti PP Nomor 58 Tahun 2005, maka struktur belanja yang semula adalah Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) mengalami perubahan dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Realisasi belanja daerah Kota Gunungsitoli pada periode 2016-2020, mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai pada Tahun 2017, kemudian melandai dan kembali menguat pada Tahun 2019 dengan realisasi sebesar 79,3% dan pada Tahun 2020 sebesar 95,5%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi kendala penyerapan anggaran termasuk berbagai perubahan dan keterlambatan petunjuk teknis (juknis) dan/atau petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana transfer.

Grafik 3.3
Gambaran Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020
Kota Gunungsitoli



Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan Perangkat Daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada menajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada

suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Gunungsitoli dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca T.A.2016-2020
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata (%)
1	Aset	1.505.124.079.301	1.508.064.500.651	1.647.652.810.473	1.599.153.973.515	1.621.192.685.802	2.03
1.1.	Aset lancar	164,519,969,255	53,228,438,549	62,655,633,534	66,745,484,060	46,960,353,468	(18,26)
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	130,232,406,354	44,826,724,642	44,150,631,337	40,578,590,909	24,141,237,342	(28,92)
1.1.2.	Piutang Pajak Daerah	19,736,716,702	6,131,162,628	11,910,694,088	11,661,988,657	8,650,423,779	(0,65)
1.1.3.	Penyisihan Piutang	(3,406,017,011)	(2,646,885,703)	(2,334,685,648)	(1,826,845,136)	(2,337,366,957)	(6,97)
1.1.4.	Beban Dibayar Dimuka	180,071,830	113,165,845	130,439,959	100,929,282	92,886,456	(13,21)
1.1.5	Persediaan	17,776,791,380	4,804,271,137	8,798,553,798	16,230,820,348	16,413,172,848	23,9
1.2.	Investasi Jangka Panjang	0	0	0	2.000.000.000	3.000.000.000	12,5
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	2.000.000.000	3.000.000.000	12,5
1.3.	Aset tetap	1.321.384.031.522	1.303.844.084.370	1.558.148.610.872	1.500.449.022.410	1.540.425.262.680	4,28
1.3.1	Tanah	314.973.433.644	236.070.932.974	380.096.952.750	381.488.688.805	416.899.379.941	11,4
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	139.284.435.666	160.526.221.975	176.856.299.050	196.774.343.038	226.565.209.011	13,0
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	286.651.436.403	293.382.005.722	412.524.936.887	459.924.138.463	469.596.901.592	14,1

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata (%)
1.3.4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	737.944.172.570	937.116.101.178	1.164.713.791.941	1.271.274.851.020	1.350.710.431.745	16,7
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	10.151.517.502	18.584.389.081	23.205.166.651	25.724.288.796	27.756.491.832	31,7
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.161.385.273	20.327.267.448	35.941.346.347	14.009.722.524	29.440.846.811	22,8
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(198.782.349.536)	(362.162.834.010)	(635.189.882.756)	(848.747.010.238)	(980.543.998.253)	51,7
1.5.	Aset Lainnya	18.526.764.186	149.609.687.165	26.096.795.189	29.242.350.331	33.807.069.651	163
1.5.1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.664.143.500	4.664.143.500	4.664.143.500	4.664.143.500	4.843.743.500	1,0
1.5.2.	Aset Tidak Berwujud	792.308.000	792.308.000	835.856.400	835.856.400	835.856.400	1,4
1.5.3.	Aset Lain-lain	13.070.312.686	144.153.235.665	20.596.795.289	23.742.350.431	28.127.469.751	237
2.	Kewajiban	26.525.788.770	4.213.644.464	11.412.892.824	5.294.072.475	17.917.504.975	67,9
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	26.525.788.770	4.213.644.464	11.412.892.824	5.294.072.475	17.917.504.975	67,9
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	144.648.605	157.756.329	0	0	0	2,27
2.1.2.	Utang Belanja	1.242.268.578	650.416.198	1.534.265.955	16.750.606	12.108.183.106	18,0
2.1.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	25.138.871.587	3.405.471.937	9.878.626.869	5.277.321.869	5.809.321.869	16,8
3	Ekuitas	1.477.904.976.196	1.502.468.565.620	1.635.488.146.771	1.593.142.784.327	1.606.275.180.826	2,2
3.1.	Ekuitas	1.477.904.976.196	1.502.468.565.620	1.635.488.146.771	1.593.142.784.327	1.606.275.180.826	2,2
3.1.1.	Ekuitas	1.477.904.976.196	1.502.468.565.620	1.635.488.146.771	1.593.142.784.327	1.606.275.180.826	2,2

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistik tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah termasuk pendapatan pihak ketiga;
4. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan desa;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi dan nasional, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga), Kebijakan pengeluaran pembiayaan

dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini :

1. Fungsi otoritas, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi penganguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilitas, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan data yang digunakan terkait APBD Tahun Anggaran 2016-2020 adalah data yang sudah diaudit oleh BPK dimana Pemerintah Kota

Gunungsitoli telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 3 (tiga) kali.

Kondisi proposi penggunaan anggaran di Kota Gunungsitoli terhitung dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 cukup dinamis, hal ini memperlihatkan bahwa APBD Kota Gunungsitoli mengoptimalkan pengurangan belanja aparatur untuk memaksimalkan pembangunan yang merata disegala bidang. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja diuraikan pada tabel dibawah ini :

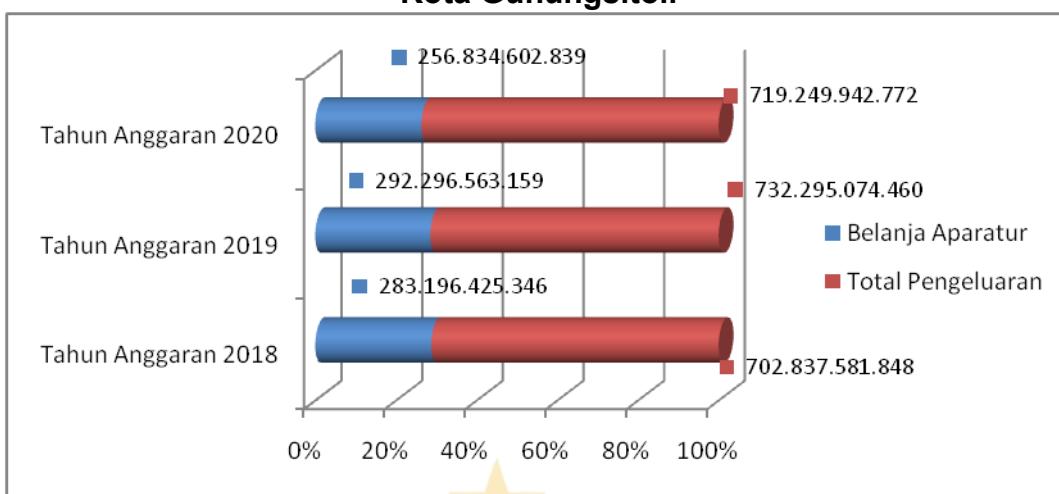
Tabel 3.3
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Percentase (%) $=(a)/(b) \times 100\%$
		(a)	(b)	
1	Tahun Anggaran 2018	283.196.425.346	702.837.581.848	40,3%
2	Tahun Anggaran 2019	292.296.563.159	732.295.074.460	40,0%
3	Tahun Anggaran 2020	256.834.602.839	719.249.942.772	35,7%

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Total belanja untuk pemenuhan aparatur Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mengalami efisiensi faktornya dikarenakan perubahan kebijakan seperti efisiensi anggaran dan refocusing selang Pandemi Covid-19. Untuk total pengeluaran yaitu Belanja daerah ditambah pembiayaan Tahun Anggaran 2018-2020 mengalami fluktuatif. Berdasarkan persentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tahun Anggaran 2018 belanja daerah digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur mencapai 40,3%, pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 40,0% dan terakhir juga mengalami penurunan sebesar 35,7% pada Tahun 2020. Hal ini memperlihatkan bahwa APBD Kota Gunungsitoli berusaha untuk menekan belanja pegawai dengan tujuan untuk optimalisasi belanja pembangunan sehingga mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat.

Grafik 3.4
Gambaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Gunungsitoli



Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berikut tabel yang menguraikan Defisit Riil Anggaran dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Gunungsitoli tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran Kota Gunungsitoli Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	702.840.277.059	730.739.514.034	703.793.539.789
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	702.837.581.848	732.295.074.461	719.249.942.772
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	2.000.000.000	1.000.000.000
A	Defisit Riil	2.695.212.00	444.439.573	(14.456.402.983)

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Dari tabel Defisit Riil Anggaran Kota Gunungsitoli Tahun 2018–2020 Pemerintah Kota Gunungsitoli memiliki surplus riil yang cukup sebagai akumulatif dari defisit riil dengan total realisasi pembiayaan daerah, dimana menunjukan adanya surplus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 terjadi surplus mencapai Rp. 2.695.212.00. Selanjutnya kembali mengalami surplus sebesar Rp. 444.439.573 di Tahun 2019 dan kemudian mengalami defisit sebesar Rp. 14.456.402.983 pada Tahun 2020. Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Gunungsitoli Tahun 2018-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2018(%)	2019(%)	2020(%)
	Ditutup dengan :	2,0%	1,0%	36,2%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya	43.505.020.376	43.491.235.587	39.935.675.160
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	43.505.020.376	43.491.235.587	39.935.675.160
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	42.617.039.166	43.046.796.014	25.479.272.177

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif atau negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya PAD sehingga terjadi over target dan bersamaan dengan efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif apabila tertundanya belanja dari Program dan Kegiatan pada Pemerintah Daerah. SiLPA yang terdapat pada APBD Kota

Gunungsitoli sebagian besar bersumber dari tertundaanya belanja untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana kedepan agar Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat secara efektif menjalankan program/kegiatan yang telah direncanakan sehingga jumlah SiLPA APBD Kota Gunungsitoli dapat diperkecil.

Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Gunungsitoli

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	SILPA	42.617.039.166	98%	43.046.796.014	99%	25.479.272.177	64%
2	Pelampauan Penerimaan PAD						
3	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer						
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
5	Penerimaan Pinjaman Daerah						
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Dari tabel komposisi penutup defisit riil anggaran Kota Gunungsitoli di atas terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berkenan (SiLPA) dari tahun anggaran sebelumnya. Terhitung SILPA Tahun 2018 sejumlah Rp. 42.617.039.166 pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 43.046.796.014 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 25.479.272.177 di Tahun 2020.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pemberian yang tidak dapat dihindari atau harus dalam satu tahun anggaran.

Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektivitas kinerja aparatur (birokrasi) maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah berupa pengurangan anggaran yang bersifat insentif.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Gunungsitoli diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata pertumbuhan untuk pendapatan sebesar 6,81 persen, pertumbuhan belanja mencapai 6,36 persen dan pemberian (7,49) persen.

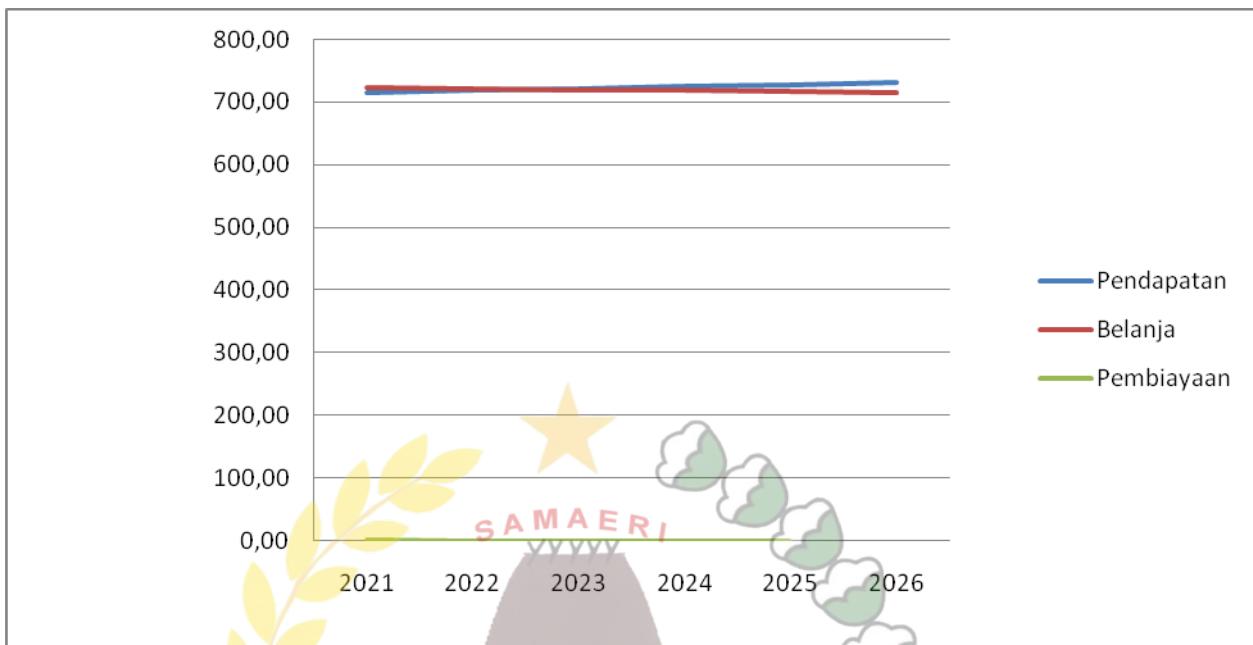
Tabel 3.7
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	Rata-Rata (%)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	5,21	800.535,16	838.259,33	881.654,86	928.824,41	980.713,09
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,46	32.191,70	33.627,45	35.127,23	36.693,90	38.330,45
1.1.1.	Pajak Daerah	4,46	12.870,00	13.444,00	14.043,60	14.669,95	15.324,23
1.1.2.	Retribusi Daerah	4,46	2.686,50	2.806,32	2.931,48	3.062,22	3.198,80
1.1.3.	Lain-lain PAD Yang Sah	4,46	16.635,20	17.377,13	18.152,15	18.961,73	19.807,42
1.2.	Pendapatan Transfer	4,35	742.076,20	771.994,82	805.976,08	841.745,21	879.778,90
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,34	721.076,20	750.058,22	783.061,11	817.808,23	854.774,33
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4,46	21.000,00	21.936,60	22.914,97	23.936,98	25.004,57
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24,25	26.267,26	32.637,06	40.551,55	50.385,30	62.603,74
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	24,25	26.267,26	32.637,06	40.551,55	50.385,30	62.603,74
2	Belanja	4,46	773.030,64	809.841,62	846.652,60	883.463,58	920.274,57
2.1.	Belanja Operasi	4,46	465.479,49	487.645,18	509.810,87	531.976,56	554.142,25
2.1.1.	Belanja Pegawai	4,46	260.166,09	272.554,95	284.943,82	297.332,68	309.721,54
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,46	164.999,27	172.856,38	180.713,49	188.570,60	196.427,71
2.1.3.	Belanja Hibah	4,46	39.367,96	41.242,63	43.117,29	44.991,96	46.866,62
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	4,46	946,16	991,21	1.036,27	1.081,32	1.126,38
2.2.	Belanja Modal	4,46	164.041,14	171.852,63	179.664,11	187.475,59	195.287,07
2.2.1.	Belanja Modal	4,46	498,75	522,50	546,25	570,00	593,75

No	Uraian	Rata-Rata (%)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2.3.	Belanja Tidak Terduga	4,46	4.776,75	5.004,21	5.231,67	5.459,14	5.686,60
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	4,46	4.776,75	5.004,21	5.231,67	5.459,14	5.686,60
2.4.	Belanja Transfer	4,46	1.554	1.628	1.702	1.776	1.850
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	4,46	1.554	1.628	1.702	1.776	1.850
3.	Pembiayaan						
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	4,46	23.545,20	24.666,40	25.787,60	26.908,80	28.030,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,46	24.595,20	25.766,40	26.937,60	28.108,80	29.280,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	4,46	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
3.2.1.	Pemberian Dana Bergulir	4,46	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Grafik 3.5
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2022-2026
Kota Gunungsitoli
(dalam jutaan rupiah)



Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2021

Dalam analisis proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 tidak hanya mengacu pada metode rata-rata pertumbuhan maupun metode regresi linear, namun perspektif perencanaan untuk menghindari terjadinya ketimpangan proyeksi penganggaran pendapatan dan belanja pada tahun awal perencanaan dengan tahun akhir perencanaan RPJMD. Berdasarkan tabel diatas proyek pendapatan pada APBD Kota Gunungsitoli mengalami tren peningkatan dari tahun awal sampai tahun akhir tahun rencana. Pada tahun 2022 jumlah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. 800.535.160.000 dan pada akhir tahun RPJMD diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 980.713.094.777.

Selanjutnya untuk proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, maka dapat diproyeksikan kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2022-2026). Berdasarkan tabel di atas Belanja Daerah yang

terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun awal sampai dengan tahun akhir RPJMD. Pada tahun 2022 total proyeksi Belanja pada APBD Kota Gunungsitoli yaitu sebesar Rp. 773.030.640.000 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 920.274.540.000 di Tahun 2026.

Berikutnya untuk analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Maka dapat dihitung proyeksi kapasitas penerimaan pembiayaan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2022- 2026).

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli 2021-2026. Berikut tabel yang menguraikan Kapasitas Riil keuangan daerah untuk mendanai Program prioritas untuk 5 tahun kedepan.

Tabel 3.8

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	800.535,16	838.259,33	881.654,86	928.824,41	980.713,09
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	23.545,20	24.666,40	25.787,60	26.908,80	28.030,00
	Total Penerimaan	824.080,36	862.925,73	907.442,46	955.733,21	1.008.743,09
	Dikurangi:					
4	Belanja Pegawai	260.166,09	272.554,95	284.943,82	297.332,68	309.721,54

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5	Pengeluaran Pembiayaan	724	722	720	718	716
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	563.190,27	589.648,78	621.778,64	657.682,53	698.305,55

Tabel 3.9
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
(2022 s/d 2026)
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	Proyeksi (Miliar Rupiah)				
		2022	2023	2024	2025	2026
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	563.190,27	589.648,78	621.778,64	657.682,53	698.305,55
I.1	Prioritas I	281.595,14	294.824,39	310.889,32	328.841,27	349.152,78
I.2	Prioritas II	168.957,08	176.894,63	186.533,59	197.304,76	209.491,67
I.3	Prioritas III	112.638,05	117.929,76	124.355,73	131.536,51	139.661,11

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan/sub kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan Prioritas III. Dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II dan seterusnya. Sehingga prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicate*) Kepala Daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMN atau Kebijakan Nasional dan Provinsi. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja pembangunan yang wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas pada level Perangkat Daerah yang meliputi penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan erat dengan program/kegiatan/sub kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang memiliki dampak luas kepada masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan

permasalahan yang dihadapi. Baik yang berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk kapasitas kelembagaan.

Prioritas III merupakan prioritas yang diarahkan untuk alokasi belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja tidak terduga. Pengalokasian anggaran pada Prioritas III harus memperhatikan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dari analisis kerangka pendanaan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 563.190.270.000 meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2026 mencapai nilai sebesar Rp. 698.305.550.000.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas I, II dan III bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus menetapkan pagu program atau pagu Perangkat Daerah. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan, sisanya dialokasikan untuk persentasi final prioritas III.

BAB IV

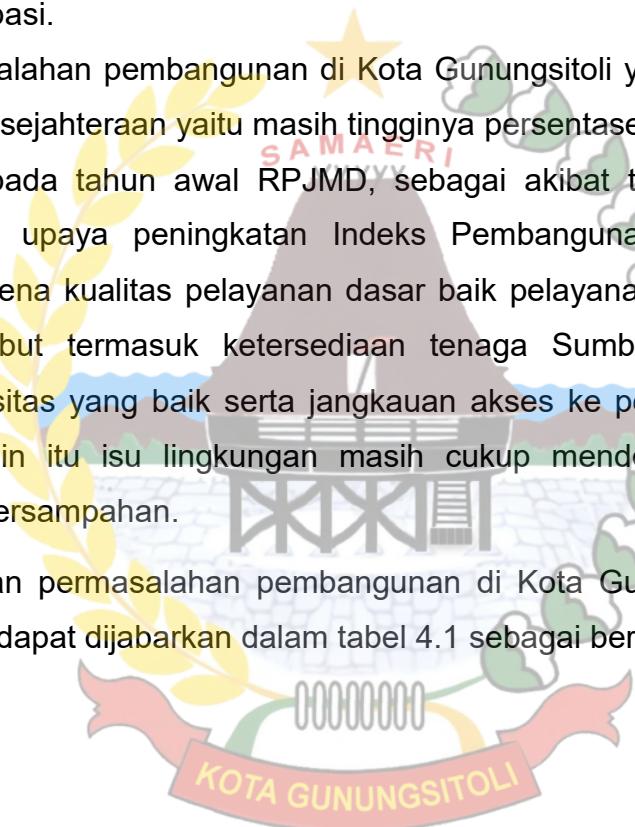
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kota Gunungsitoli yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu masih tingginya persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli pada tahun awal RPJMD, sebagai akibat terjadinya Pandemi Virus Covid-19 dan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terkendala karena kualitas pelayanan dasar baik pelayanan infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas. Selain itu isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti masalah pengelolaan persampahan.

Rumusan permasalahan pembangunan di Kota Gunungsitoli kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :



TABEL 4.1

PENJABARAN MASALAH POKOK, MASALAH DAN AKAR MASALAH PEMBANGUNAN KOTA GUNUNGSTITOLI

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya APK PAUD dan APK SMP dari target akhir RPJMD; b. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik baik SD maupun SMP; c. Masih kurangnya ruang perpustakaan SMP dalam kondisi baik; d. Masih rendahnya persentase pendidik TK, SD dan SMP memiliki sertifikasi. 	Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan.
		<ul style="list-style-type: none"> a. Masih ditemukan kematian bayi, balita dan ibu melahirkan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, tenaga kesehatan yang belum optimal, dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat belum optimal; b. Masih ditemukannya gizi buruk dan <i>stunting</i> serta meningkatnya obesitas; c. Masih ditemukannya penularan penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; b. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal; c. Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>(TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta, Malaria) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker dan Jantung).</p> <p>a. Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat ber-KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber-KB;</p> <p>b. Belum optimalnya indeks ketahanan keluarga hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam BKB, BKL dan BKR.</p>	
		<p>a. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga;</p> <p>b. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kota Gunungsitoli (organisasi kepemudaan);</p> <p>c. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.</p>	
2	Tingginya Jumlah Penduduk Miskin.	<p>a. Belum optimalnya Peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;</p> <p>b. Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;</p> <p>c. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan</p>	Belum terkelolanya data PMKS dan PSKS secara Optimal.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		sosial bagi PMKS.	
		<p>a. Belum optimalnya capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>a. Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal; beberapa ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum semuanya mengikuti diklat pengembangan kompetensi;</p> <p>b. Profesionalisme ASN masih belum sesuai harapan.</p> <p>a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>a. Belum optimalnya pelaksanaan Audit Kinerja dan Terdokumentasinya Audit Berbasis Resiko.</p>	
		<p>a. Belum optimalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);</p> <p>b. Belum optimalnya ketersediaan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;</p>	<p>a. Belum terpenuhinya SPM bidang Pekerjaan Umum</p> <p>b. Masih terdapat kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi</p>

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>c. Terbatasnya Penanganan Infrastruktur penataan bangunan dan lingkungan;</p> <p>d. Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik;</p> <p>e. Terbatasnya Penanganan Infrastruktur drainase perkotaan.</p>	rusak (sedang dan berat) yang harus dipelihara/ditingkatkan terutama menuju kawasan pemukiman masyarakat, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sentra-sentra produksi.
		<p>a. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani;</p> <p>b. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni;</p> <p>c. Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak.</p>	<p>a. Masih belum teridentifikasi kebutuhan rumah pada daerah yang akan terkena dampak program pemerintah;</p> <p>b. Masih rendahnya kawasan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana utilitas dalam kondisi baik;</p> <p>c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.</p>
		<p>a. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA;</p> <p>b. Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah;</p> <p>c. Belum optimalnya capaian indeks kualitas</p>	<p>a. Belum optimalnya penanganan tutupan lahan;</p> <p>b. Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air;</p>

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4		lingkungan hidup.	c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah.
		Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tanggap bencana.	Belum terciptanya sistem peringatan dini.
		a. Sarana dan prasarana perdagangan yang masih minim dan belum tersebar secara merata di wilayah Kota Gunungsitoli; b. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif.	Ketersediaan lahan.
5	Rendahnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah.	Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah.	
		a. Masih terjadinya potensi konflik di masyarakat; b. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat.	

4.1.1. RENDAHNYA IPM DAERAH

IPM daerah Kota Gunungsitoli sampai dengan Tahun 2020 sebesar 69,31 Poin dan berada pada peringkat 22 Se-Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Melihat kondisi tersebut jelas bahwa perkembangan IPM yang relatif rendah menjadi masalah pokok daerah dalam lintas sektoral sehingga perlu dirumuskan dalam langkah-langkah strategis perencanaan pembangunan daerah.

4.1.2. TINGGINYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi utamanya disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan dalam sektor ekonomi. Selain itu lapangan pekerjaan yang terbatas serta akselerasi percepatan ekonomi yang rendah membuat jumlah penduduk miskin menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah di Kota Gunungsitoli.

4.1.3. RENDAHNYA INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks reformasi birokrasi tercatat sampai dengan Tahun 2020 dengan nilai CC. Hal ini jelas menunjukkan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu masalah pokok yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4.1.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH BELUM MEMADAI

Infrastruktur wilayah secara keseluruhan masih menjadi masalah pokok terutama dari sisi pemerataan serta pertumbuhan sektor pembangunan ekonomi dan ketersediaan ruang publik khususnya di wilayah kecamatan maupun perbatasan.

4.1.5. RENDAHNYA KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH

Peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi perhatian khusus dimana pembangunan daerah cenderung diikuti oleh dinamika sosial maupun perubahan regulasi secara berjenjang, sehingga tingkat pengetahuan serta kepatuhan masyarakat yang terbatas terhadap aturan mengakibatkan hambatan terutama dari sisi pembangunan daerah.

Selain pendekatan tabel 4.1 di atas, rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan melalui masing-masing perangkat daerah berwenang sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih rendahnya APK PAUD dan APK SMP dari target akhir RPJMD;
- b. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik SD maupun SMP;
- c. Masih kurangnya ruang perpustakaan SMP dalam kondisi baik;
- d. Masih rendahnya persentase pendidik TK, SD dan SMP memiliki sertifikasi;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan.

2. Kesehatan

- a. Masih ditemukan kematian bayi, balita dan ibu melahirkan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, tenaga kesehatan yang belum optimal, dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat **belum optimal**;
- b. Masih ditemukannya gizi buruk dan *stunting* serta meningkatnya obesitas;
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
- d. Belum semua penduduk mendapat standar pelayanan minimal;
- e. Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker dan Jantung).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Belum optimalnya ketersediaan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
- c. Terbatasnya Penanganan Infrastruktur penataan bangunan dan lingkungan.
- d. Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik;
- e. Terbatasnya Penanganan Infrastruktur drainase perkotaan;
- f. Masih terdapat infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi rusak (sedang dan berat) yang harus dipelihara/ditingkatkan terutama menuju kawasan pemukiman masyarakat, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sentra-sentra produksi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- b. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni;
- c. Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak;

- d. Masih belum teridentifikasi kebutuhan rumah pada daerah yang akan terkena dampak program pemerintah;
- e. Masih rendahnya kawasan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana utilitas dalam kondisi baik.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya penegakan peraturan/kebijakan pemerintah daerah;
- b. Belum optimalnya penerapan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tanggap bencana;
- d. Belum terciptanya sistem peringatan dini;
- e. Masih terjadinya potensi konflik di masyarakat;
- f. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat.

6. Sosial

- a. Belum optimalnya peran Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- d. Belum terkelolanya data PMKS dan PSKS secara optimal.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT);
- b. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan;
- d. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dengan perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya pemenuhan Pengarus Utamaan Gender (PUG);
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- c. Masih belum optimalnya perwujudan Kota Layak Anak;
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga.

3. Pangan

- a. Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Gunungsitoli;

- b. Belum mantapnya ketersediaan cadangan pangan yang tersedia di Kota Gunungsitoli;
- c. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin-rentan.

4. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA;
- b. Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah;
- c. Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup;
- d. Belum optimalnya penanganan tutupan lahan;
- e. Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih adanya penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran;
- b. Masih rendahnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. Belum optimalnya capaian akta nikah dan akta kematian.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Persentase desa mandiri belum dapat diidentifikasi, perlu upaya perwujudan desa mandiri agar memberikan kontribusi bagi pencapaian indeks desa mandiri tingkat nasional;
- b. Belum semua desa memiliki BUMDes.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih kurangnya optimalnya kesadaan masyarakat ber-KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber-KB;
- b. Belum optimalnya indeks ketahanan keluarga hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam BKB, BKL dan BKR.

8. Perhubungan

- a. Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik;
- b. Belum terkoneksi antar wilayah dengan pemenuhan trayek transportasi lokal.

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Menurunnya pertumbuhan UKM hal ini menunjukkan minat masyarakat terkait dengan kewirausahaan masih kurang;
- b. Menurunnya status koperasi aktif;

- c. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.

11. Penanaman Modal

- a. Rendahnya jumlah investor yang melakukan investasi di Kota Gunungsitoli;
- b. Belum terperbaikinya peta potensi investasi Kota Gunungsitoli.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga;
- b. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kota Gunungsitoli (organisasi kepemudaan);
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.

13. Statistik

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan **informasi pembangunan daerah**;
- b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.

14. Persandian

- a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

15. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya upaya pelestarian dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah di Kota Gunungsitoli;
- b. Belum adanya SDM yang tersertifikasi dalam pendataan dan penetapan cagar budaya.

16. Perpustakaan

- a. Masih kurangnya minat baca di masyarakat;
- b. Belum optimalnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan;
- c. Kondisi perpustakaan yang masih belum optimal.

17. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pemeliharaan arsip;
- b. Cakupan sarana dan prasarana pemeliharaan arsip yang masih belum memadai;
- c. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku yang masih rendah;

- d. Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan masih terbatas.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

- a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan perikanan.

2. Pariwisata

- a. Minimnya sarana dan prasarana pendukung dan belum memadainya pengelolaan destinasi wisata di Kota Gunungsitoli;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan informasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli;
- c. Belum optimalnya pengembangan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

- a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura dan perkebunan;
- b. Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan (kambing, ayam ras pedaging dan lainnya) dan produksi daging.

4. Perdagangan

- a. Sarana dan prasarana perdagangan yang masih minim dan belum tersebar secara merata di wilayah Kota Gunungsitoli;
- b. Minimnya data dan informasi serta laporan mengenai perkembangan usaha yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh pemerintah;
- c. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif.

5. Perindustrian

- a. Kurangnya inovasi produk hasil industri kecil dan menengah;
- b. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam bidang pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya proses perencanaan dalam menetapkan program prioritas pembangunan daerah;

- b. Belum terintegrasinya dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

- a. Belum optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah;
- b. Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal, beberapa ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum semuanya mengikuti diklat pengembangan kompetensi;
- b. Profesionalisme ASN masih belum sesuai harapan.

4. Pengawasan

- a. Belum optimalnya Pengendalian pada unsur pelaksanaan program/kegiatan OPD;
- b. Pengawasan kinerja OPD yang belum optimal;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan Audit Kinerja dan terdokumentasinya Audit Berbasis Resiko.

5. Kewilayahan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan;
- b. Belum optimalnya realisasi dana desa.

6. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga perlu diatasi secara bertahap dengan perencanaan yang benar. Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebagai lingkungan strategis.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Daerah Kota Gunungsitoli yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Isu Global (Internasional) dan Aktual

A. Tantangan yang termuat dalam Kesepakatan Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

1) Tidak Ada Kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana saja.

2) Menghapuskan Kelaparan

Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

3) Kesehatan yang Baik

Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada **segala usia**.

4) Pendidikan Berkualitas

Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.

5) Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan **anak perempuan**.

6) Air Bersih dan Sanitasi

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.

7) Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi

Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.

8) Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.

9) Kota dan Masyarakat Berkelanjutan

Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.

10) Pemakaian yang Bertanggungjawab

Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.

11) Aksi Iklim

Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.

12) Kehidupan di Bawah Air

Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.

13) Kehidupan di Darat

Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati.

14) Perdamaian dan Keadilan

Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.

B. Pemulihan ekonomi dan penanganan Pandemi virus Covid-19 secara tepat, cepat, terukur dan holistik.

Pada tahun-tahun awal periode RPJMD pemulihan sektor ekonomi menjadi isu yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli yang mengalami penurunan sebagai akibat terjadinya Pandemi Virus Covid-19. Sejalan dengan ditemukannya Vaksin yang dapat menekan laju penyebaran Virus Covid-19, diharapkan proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan cepat baik secara nasional maupun regional.

2. Isu Strategis Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024)

Permasalahan strategis sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

- 1) Keberlanjutan sumber daya alam;
- 2) Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi;
- 3) Transformasi struktur perekonomian berjalan lambat;
- 4) Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah.

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Pemenuhan layanan dasar;
- 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- 5) Pengentasan kemiskinan;
- 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

D. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

- 1) Melemahnya Ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
- 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan indonesia;
- 3) Belum optimalnya peran keluarga;
- 4) Rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- 1) Infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) Infrastruktur ekonomi;
- 3) Infrastruktur perkotaan;
- 4) Energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Transformasi digital.

F. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.

G. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik

- 1) Konsolidasi demokrasi;
- 2) Reformasi birokrasi dan tata kelola.

3. Isu Strategis Skala Provinsi (Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023)

Isu strategis Skala Provinsi Sumatera Utara sebagaimana termuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- b. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah;
- c. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
- e. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan.

4. Isu Strategis Skala Kota

Isu strategis Skala Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025, evaluasi terhadap hasil pencapaian dan kinerja dokumen RPJMD periode sebelumnya, serta mencermati situasi kondisi saat ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Letak geografis Kota Gunungsitoli yang sangat strategis sebagai pintu masuk Kepulauan Nias;
- b. Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kepulauan Nias;
- c. Ketersediaan infrastruktur strategis perhubungan laut dan perhubungan udara yang mendukung daya saing daerah;
- d. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif cukup tinggi;
- e. Potensi ketersediaan lahan produktif yang relatif cukup besar;
- f. Sebagai satu-satunya daerah otonom yang berbentuk kota di Kepulauan Nias, memiliki potensi yang sangat besar pada sektor jasa, perdagangan dan industri;
- g. Sebagai pusat pendidikan dan kesehatan bagi daerah otonom lainnya di Kepulauan Nias;
- h. Bencana alam dan perubahan iklim global;
- i. Arus globalisasi yang berdampak pada degradasi moral generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pencapaian dan kinerja dokumen RPJMD periode sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang dapat menjadi isu strategis tambahan skala Kota sebagai berikut :

A. Akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas

Kota Gunungsitoli memiliki isu yang cukup serius dengan penyediaan air bersih. Beberapa isu yang perlu diperhatikan Pemerintah yang berkaitan dengan akses air bersih dan lingkungan yang sehat yaitu :

1. Rendahnya sarana dan prasarana air bersih serta relatif besarnya cakupan wilayah yang belum teraliri jaringan PDAM sehingga berpotensi menjadi kawasan kekurangan air.
2. Masih rendahnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, serta layak huni dan tidak kumuh.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

B. Pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi perlu adanya optimalisasi potensi sektor unggulan di Kota Gunungsitoli untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

C. Disparitas Pendapatan GUNUNGSI

Indeks gini ratio di Kota Gunungsitoli berada dalam klasifikasi rendah serta persebaran penduduk yang masih belum merata. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa sebaran kapasitas SDM belum optimal. Kondisi tersebut sangat memungkinkan menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada level nasional dan provinsi, isu kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah.

D. Sinergitas Antar Wilayah Kepulauan Nias

Pembangunan daerah memerlukan sinergitas pembangunan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan, atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kota Gunungsitoli sebagai salah satu daerah otonomi berada pada wilayah kepulauan Nias dimana terdapat 2 daerah Kabupaten yang berbatasan langsung yaitu Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias. Sedangkan daerah Kabupaten yang tidak berbatasan langsung dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Secara geografis, pembangunan berbasis kewilayahan menjadi faktor penting dalam mengelola serta memanfaatkan peluang pembangunan daerah berkesinambungan.

Berdasarkan analisa dan kajian dapat dirumuskan beberapa isu terkait perencanaan pembangunan daerah secara simultan yaitu :

1. Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah perbatasan;
2. Penegakan batas wilayah administratif;
3. Pembangunan jalan lingkar (*Ring Road*) Kepulauan Nias;
4. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana kewilayahan;
5. Pembangunan pariwisata kepulauan Nias;
6. Pengembangan jalur transportasi serta moda transportasi lintas Kabupaten/Kota Kepulauan Nias.

Berdasarkan isu diatas, maka pembangunan daerah Kota Gunungsitoli sejatinya tidak hanya memperhatikan kepentingan sektoral wilayahnya, namun juga tetap memperhatikan sektor dan kepentingan kolektif yang melibatkan pemerintah daerah baik yang berbatasan langsung maupun tidak melalui forum-forum perencanaan serta pengambilan kebijakan di tingkat forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA).

4.3 Isu Berdasarkan Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rumusan isu strategis Berdasarkan Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB) dan yang belum memiliki data (NA). Selain kedua kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Secara umum strategi terhadap capaian TPB untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong pencapaian indikator yang telah ada dalam RPJMD yang belum tercapai sesuai target nasional.
- b. Melengkapi data dan target pada Indikator yang ditetapkan secara nasional.

Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Gunungsitoli, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; tujuan 2 tanpa kelaparan, tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dari berbagai indikator yang telah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kota Gunungsitoli.

2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup empat tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau, Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.

3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup tiga tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.



BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli yang telah dilantik dan disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang seterusnya dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran.

5.1 Visi

Didasarkan pada visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli yang telah dilantik dan mempedomani arah Pembangunan dokumen Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli 2005-2025, maka visi Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah :

“ Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman, Dan Sejahtera”

Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---|
| Kota Gunungsitoli | : Meliputi seluruh wilayah administrasi dan masyarakat kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008. |
| Berdaya Saing | : Kapabilitas pemerintahan dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi persaingan, menciptakan kesetaraan dan merespon dinamika tuntutan pembangunan daerah. |
| Nyaman | : Kota Gunungsitoli yang menjadi rumah bagi semua kalangan sebagai kota yang ramah, bersih, berbudaya dan tenteram dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta sistem perkotaan dan tata lingkungan yang terintegrasi. |
| Sejahtera | : Masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya secara layak melalui peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya penduduk miskin. |

5.2 Misi

Perwujudan visi ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun Misi Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul.
2. Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal.
3. Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.

Penjelasan Misi sebagai berikut :

Misi 1. Membangun sumber daya manusia yang unggul

Misi ini merupakan upaya dalam membangun sumberdaya manusia yang unggul serta sehat yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Dalam misi ini sekaligus memberikan perhatian pada kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatnya prestasi olahraga.

Misi 2. Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dalam misi ini akan memberikan perhatian pada peningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan potensi pertanian dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM dan pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Misi 3. Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Misi ini merupakan upaya dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana berbasis wilayah yang berkualitas guna mendukung kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Gunungsitoli melalui pembangunan infrastruktur yang memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta perhatian terhadap pengurangan resiko bencana dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas publik yang memadai.

Misi 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah menghadirkan pelayanan birokrasi pemerintah yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis teknologi informasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Dalam misi ini birokrasi dituntut harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima dalam pembangunan daerah. Tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki peran yang sama dan harus berkolaborasi dalam melaksanakan aktivitas pembangunan. Misi ini menjadi dasar implementasi untuk mendukung keberhasilan misi-misi yang lain.

Misi 5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum

Misi ini merupakan upaya untuk mewujudkan lingkungan sosial yang aman, damai dan tertib sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat tercapai. Perbedaan pemahaman terhadap keragaman agama dan budaya; perbedaan kondisi sosial-ekonomi; masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk; berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya peredaran miras dan narkoba, prostitusi dan perjudian serta kecenderungan meningkatnya kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial sehingga timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Melalui misi ini diharapkan dapat terwujud rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat dengan mengeliminasi ketegangan dan potensi ancaman konflik; menurunkan angka kriminalitas; meningkatkan ketertiban umum; mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air; mewujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis dan dinamis; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kesadaran hukum, menegakkan hukum secara adil, konsekuensi dan tidak diskriminatif serta terpeliharanya nilai-nilai budaya *ono niha* sebagai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

5.3 Tujuan dan Sasaran

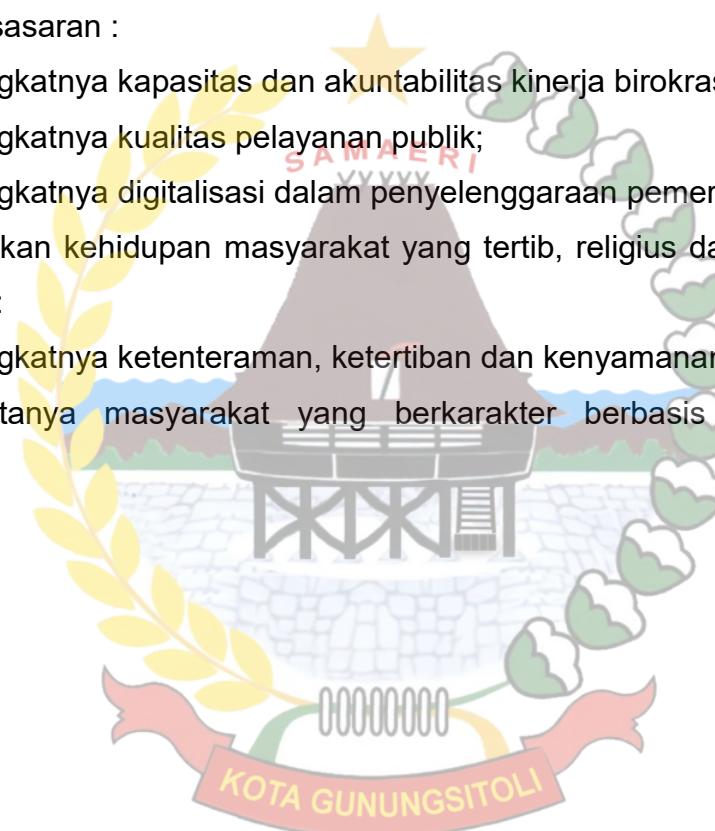
Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada hakikatnya merupakan arahan pelaksanaan misi daerah, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Gunungsitoli kurun waktu 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian sektor unggulan.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya.

Sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Meningkatnya kesetaraan gender.
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian sektor unggulan dengan sasaran :

- a. Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan;
 - b. Menurunnya jumlah penduduk miskin;
 - c. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial;
 - d. Meningkatnya kemandirian desa.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan, berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah;
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - c. Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana.
 4. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - c. Meningkatnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat;
 - b. Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis nilai budaya lokal.



Tabel 5.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD
Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Target Akhir RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Membangun sumber daya manusia yang unggul.	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,71	70,11	70,51	70,91	71,31	71,71	71,71
				1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan.	Indeks Pendidikan	Indeks	76,44	77,83	79,21	80,60	81,99	83,37
				2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,40	71,61	71,82	72,03	72,24	72,45
				3. Meningkatnya kesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase	89,36	89,41	89,46	89,51	89,56	89,61
				Pertumbuhan ekonomi	Persentase	1,00	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05	6,05
				Indeks Gini	Indeks	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29
				1. PDRB Per Kapita	Rp.000	42.893,38	45.612,36	48.331,34	51.050,32	53.769,30	56.488,28	56.488,28
				2. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha	Persentase	15,02	15,07	15,12	15,17	15,22	15,27	15,27

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Target Akhir RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.			pertanian, kehutanan dan perikanan								
				3. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	Persentase	3,14	3,16	3,18	3,19	3,20	3,20	3,20
				4. Nilai investasi	Miliar	16	17	18	19	20	21	21
				5. Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,12	3,11	3,10	3,09	3,08	3,07	3,07
				2. Menurunnya jumlah penduduk miskin.	Persentase penduduk miskin	Persentase	16,41	15,21	14,01	12,81	11,61	10,41
				3. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	Persentase penurunan masalah kesejahteraan sosial	Persentase	13,84	10,34	6,84	3,34	0	0
				4. Meningkatnya kemandirian desa.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5938	0,6026	0,6114	0,6202	0,6290	0,6378
3	Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan, berkualitas dan berwawasan lingkungan.		Tingkat pembangunan infrastruktur	Persentase	57,96	59,29	60,62	61,95	63,28	64,61	64,61

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Target Akhir RPJMD	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik.	Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.		1. Meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah.	1. Persentase jalan kondisi baik	Persentase	31,92	32,30	32,68	33,06	33,44	33,82	33,82
					2. Persentase ketersediaan fasilitas sarana perhubungan	Persentase	23	25	50	65	80	95	95
					3. Persentase kawasan non kumuh perkotaan	Persentase	98,62	98,75	98,88	99,01	99,14	99,27	99,27
				2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,08	54,33	54,58	54,83	55,08	55,33	55,33
					1. Persentase bencana yang tertangani	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase	68,87	70,87	72,87	74,87	76,87	78,87	78,87
					Indeks reformasi birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
					1. Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	*	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
				2. Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	BB

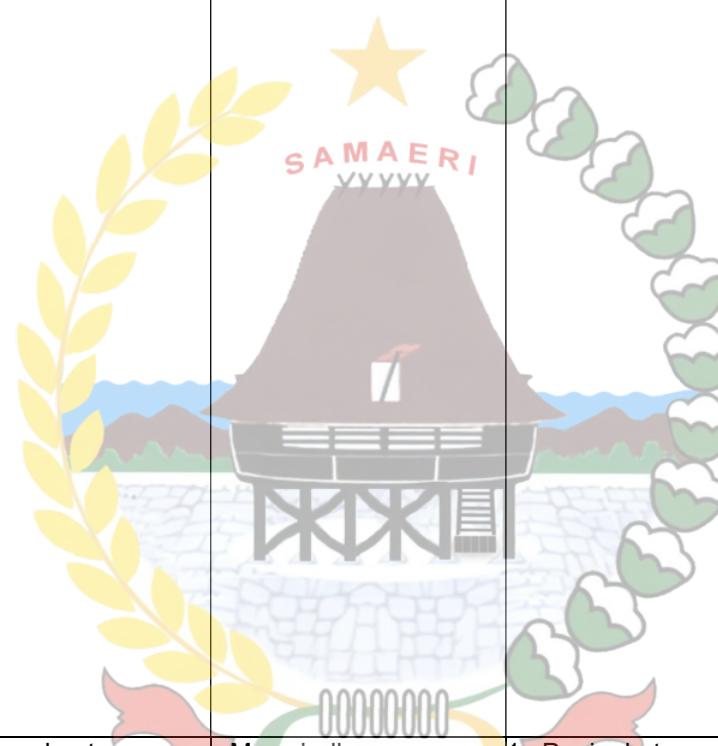
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Target Akhir RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya.		3. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00
				2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM baik	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
				3. Meningkatnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	1,80	2,02	2,24	2,46	2,68	2,90	2,90
5	Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya.		Indeks harmoni sosial	Persentase	59,97	64,88	69,78	74,68	79,59	81,72	81,72
				1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	65,09	66,37	67,65	68,93	70,21	71,49	71,49
				2. Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis nilai budaya lokal.	Indeks budaya lokal	54,85	63,38	71,91	80,44	88,97	91,94	91,94

Selain tabel diatas, Untuk melihat substansi keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya maka dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :



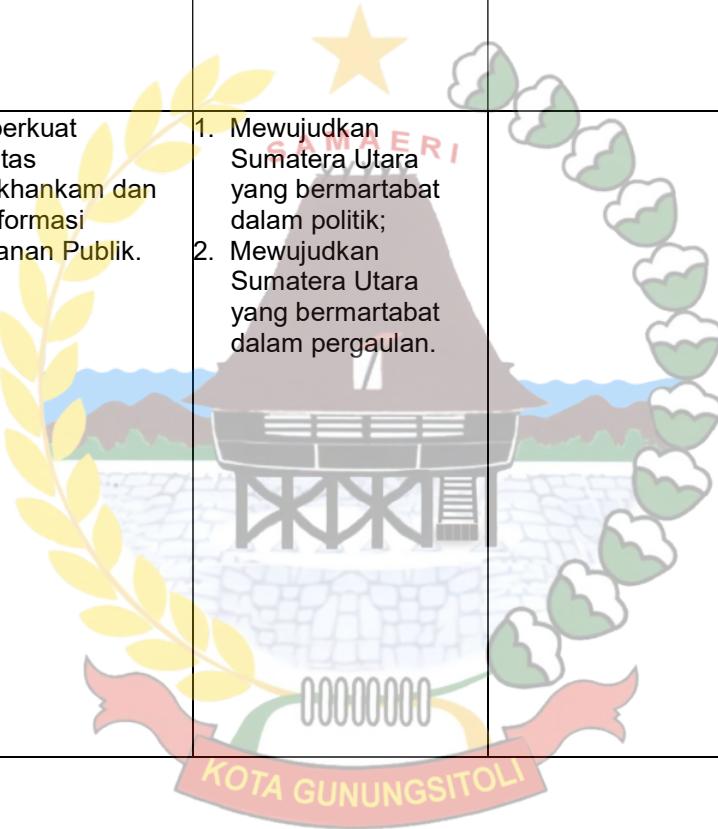
Tabel 5.2
**Keterkaitan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024,
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025**

Misi RPJMD Kota Gunungsitoli	Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Arah Kebijakan Tahapan Ke IV RPJPD Kota Gunungsitoli
1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul.	Peningkatan kualitas manusia Indonesia.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan penuhan akses pendidikan; 2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara berkesinambungan melalui optimisasi aksesibilitas terhadap seluruh aspek pembangunan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau; 2. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial; 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberian ruang bagi peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan serta menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi yang berlebihan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; 4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan simultan dengan upaya pembangunan lainnya yang berbasis kemasyarakatan; 5. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penguatan kelembagaan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas menuju keluarga kecil yang sejahtera dan didukung penataan

Misi RPJMD Kota Gunungsitoli	Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Arah Kebijakan Tahapan Ke IV RPJPD Kota Gunungsitoli
					<p>administrasi kependudukan;</p> <p>6. Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi;</p> <p>7. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui optimisasi aksesibilitas masyarakat terhadap seluruh aspek pembangunan kependidikan.;</p> <p>8. Pengembangan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi muda dalam rangka memasuki era persaingan global;</p> <p>9. Meningkatkan pengembangan budaya berolahraga dan pembinaan prestasi olahraga bagi masyarakat;</p> <p>10. Meningkatkan kualitas partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan dan pengembangan potensi kepemudaan secara berkelanjutan.</p>
2. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian sektor unggulan.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan.	<p>1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;</p> <p>2. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan produksi diseluruh aspek pengelolaan potensi sumber daya ekonomi lokal;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk memperoleh kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar</p>

Misi RPJMD Kota Gunungsitoli	Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Arah Kebijakan Tahapan Ke IV RPJPD Kota Gunungsitoli
					<p>tenaga kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi daerah secara lestari dan ramah lingkungan; 4. Meningkatkan pengembangan industri rumah tangga dan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah; 5. Meningkatkan pengembangan industri jasa kepariwisataan secara terintegrasi dengan upaya pembangunan sektor perekonomian lainnya; 6. Meningkatkan pengembangan aktivitas perdagangan dan daya tarik investasi daerah; 7. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam berbagai sektor perekonomian; 8. Penguatan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi; 9. Meningkatkan pengembangan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung investasi;

Misi RPJMD Kota Gunungsitoli	Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Arah Kebijakan Tahapan Ke IV RPJPD Kota Gunungsitoli
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan, berkualitas dan berwawasan lingkungan.	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan. 	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas perdagangan, jasa dan industri; 2. Meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; 3. Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi sumber daya mineral sebagai sumber daya energi alternatif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
4. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; 2. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas dan budaya kerja yang memiliki komitmen terhadap percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal, fungsional, DPRD dan pengawasan masyarakat; 3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan

Misi RPJMD Kota Gunungsitoli	Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Arah Kebijakan Tahapan Ke IV RPJPD Kota Gunungsitoli
					pembangunan melalui optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah dengan tidak membebani masyarakat.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 2. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 3. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. 	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik; 2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penegakkan hukum serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia; 2. Meningkatkan penguatan kelembagaan politik yang demokratis melalui pengembangan wawasan kebangsaan untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan NKRI; 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum serta kondisi kehidupan beragama yang toleran, rukun, damai dan saling menghargai perbedaan dalam harmoni kebhinekaan; 4. Meningkatkan penggalian dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran diatas maka dapat dirumuskan Program Prioritas Pembangunan Kota Gunungsitoli yaitu :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
3. Peningkatan aktivitas sektor perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
6. Peningkatan kerukunan kehidupan sosial masyarakat.

Program prioritas ini nantinya akan menjadi acuan utama pembangunan serta menjadi prioritas di setiap tahun perencanaan, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam masing-masing program perangkat daerah yang terkait.

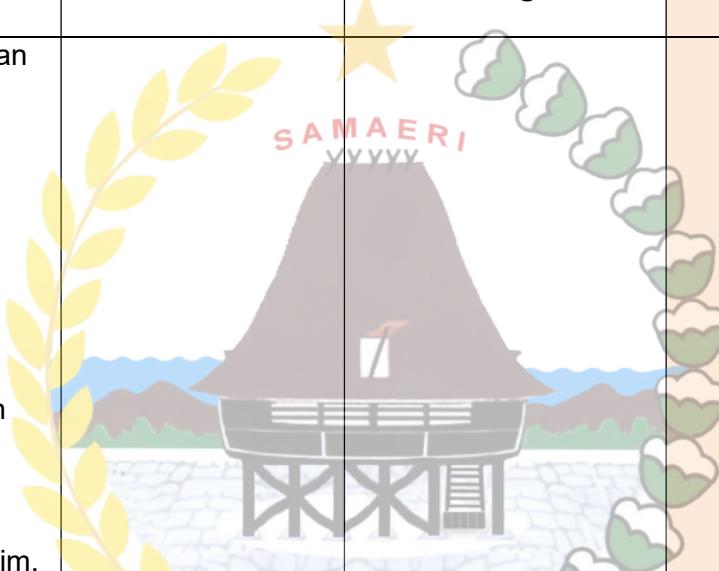
Untuk melihat keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Gunungsitoli dengan prioritas tingkat nasional maupun provinsi maka dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

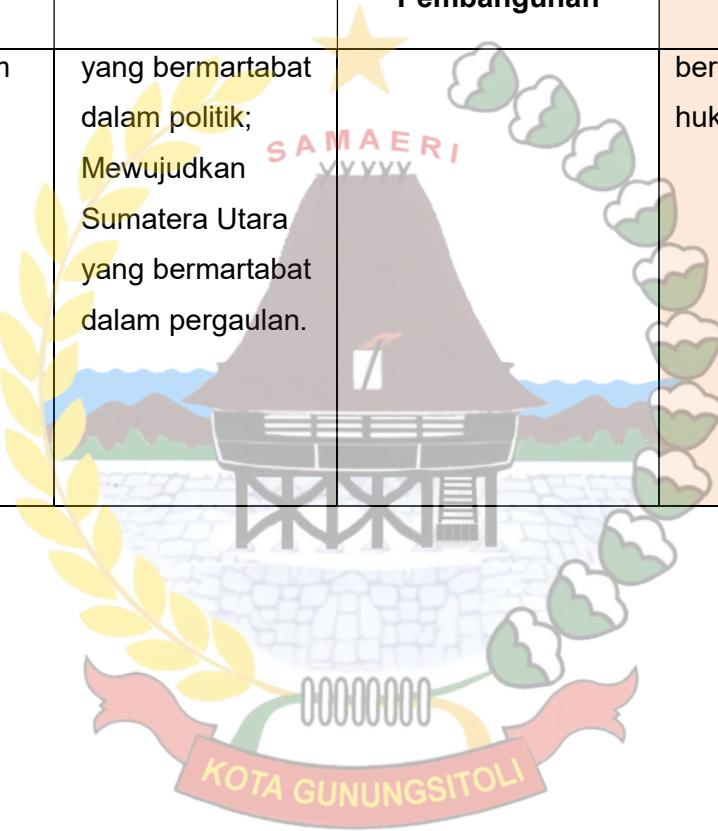


Tabel 5.3
Keterkaitan Antar Misi dan Agenda/Program Prioritas Pembangunan Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

NASIONAL		PROVINSI SUMATERA UTARA		KOTA GUNUNGSTITOLI	
Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan
Peningkatan kualitas manusia Indonesia.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan.	Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan; Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.	Membangun sumber daya manusia yang unggul; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan; Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

NASIONAL		PROVINSI SUMATERA UTARA		KOTA GUNUNGSTITOLI	
Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan.	 Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja; Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.	Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal.	Peningkatan aktivitas sektor perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan.
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.	Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan.

NASIONAL		PROVINSI SUMATERA UTARA		KOTA GUNUNGSIHOLI	
Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan
	<p>pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;</p> <p>Membangun lingkungan hidup,</p> <p>meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.</p>				
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	<p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.</p>			<p>Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.</p>	<p>Peningkatan kerukunan kehidupan sosial masyarakat</p>
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian	<p>Memperkuat Stabilitas</p>	Mewujudkan Sumatera Utara		<p>Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang</p>	<p>Peningkatan kerukunan</p>

NASIONAL		PROVINSI SUMATERA UTARA		KOTA GUNUNGSIHOLI	
Misi RPJMN	Agenda Prioritas Nawa Cita	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan
Bangsa; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.	Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	yang bermartabat dalam politik; Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan.		berbudaya, religius dan taat hukum.	kehidupan sosial masyarakat

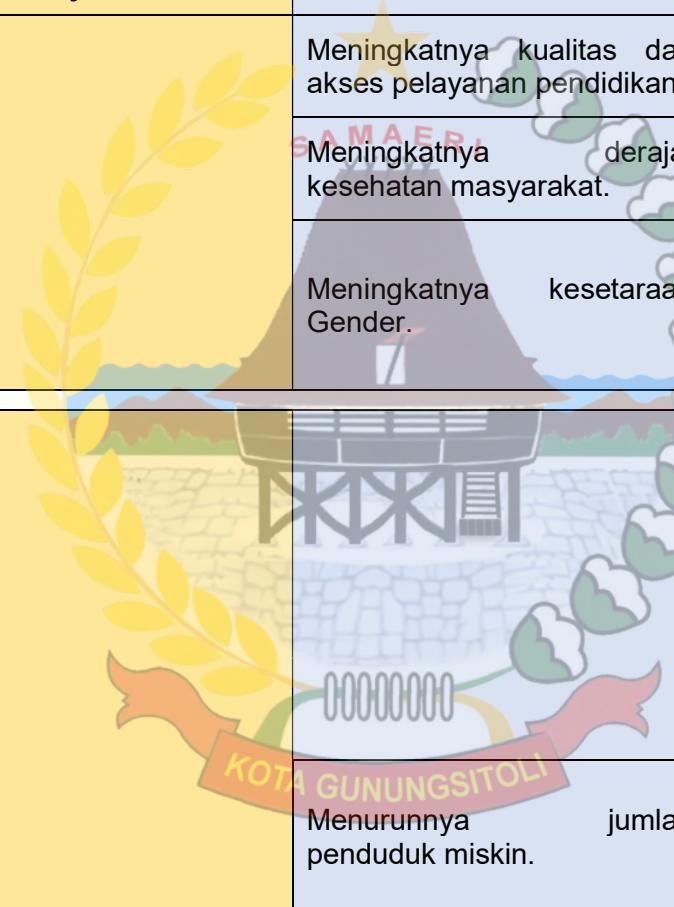
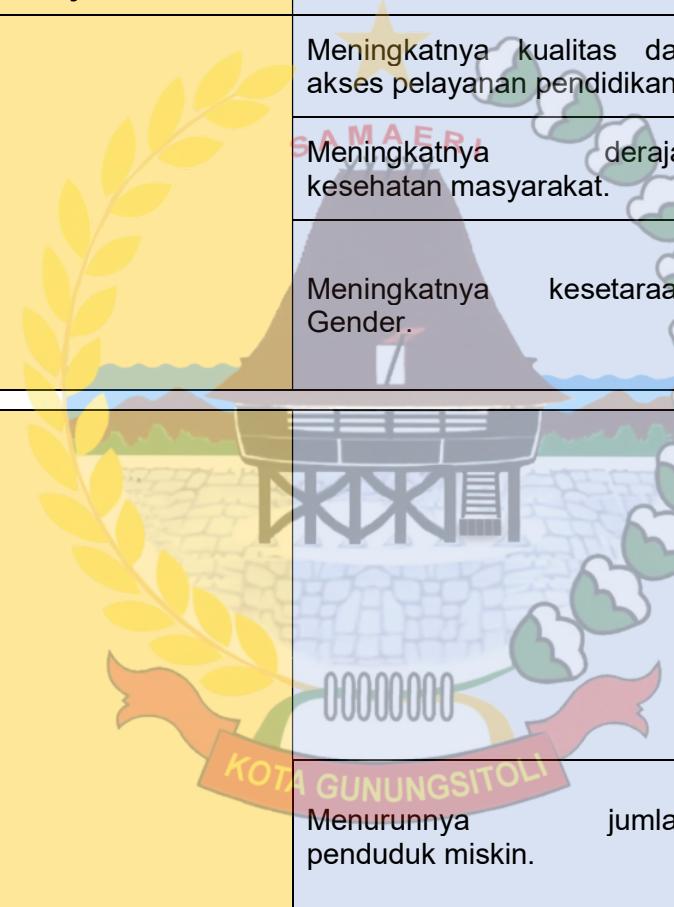
BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

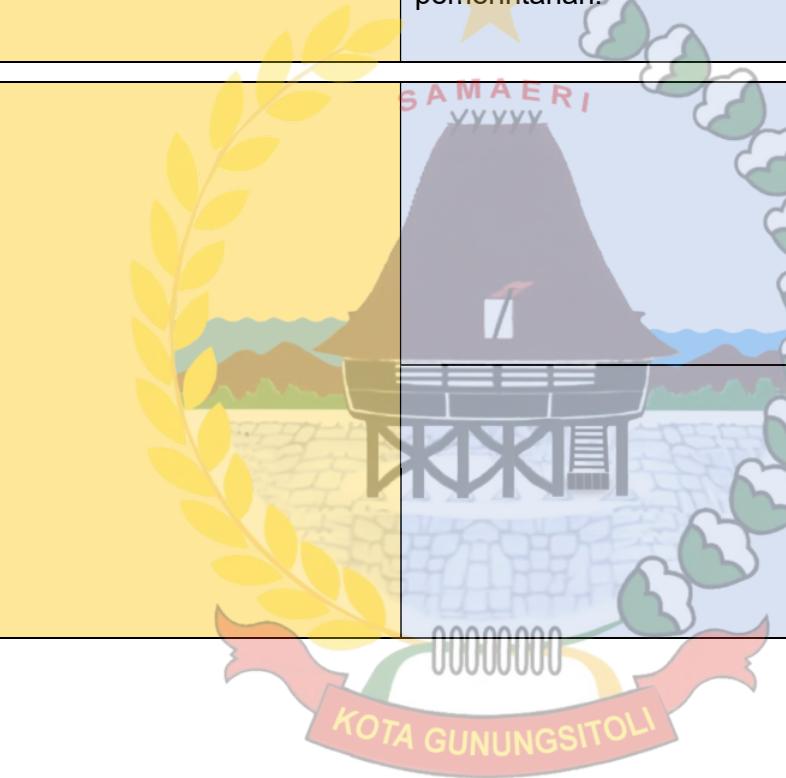
6.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan daerah akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan dijabarkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026 dapat dirumuskan pada tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
Keterkaitan Antara Misi, Tujuan dan Strategi RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan.	Peningkatan mutu pendidikan yang memadai serta memenuhi SPM bidang Pendidikan.
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan kualitas keluarga sehat serta akses pelayanan kesehatan yang terjangkau.
			Meningkatnya kesetaraan Gender.	Pengarus Utamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.
			Menurunnya jumlah penduduk miskin.	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
				Peningkatan promosi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suasana iklim investasi yang ramah dan kondusif.
				Peningkatan pelatihan bagi para pencari kerja serta menciptakan peluang usaha kerja mandiri.
				Meningkatkan peran masyarakat melalui UMKM serta melibatkan kelompok petani maupun nelayan untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian lokal.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			<p>Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial.</p> 	Penguatan program penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban kemiskinan, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta sinergitas APBD dan APBDes.
			<p>Meningkatkan peran BUMDes serta aparatur desa dalam mengembangkan potensi desa terutama pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.</p> 	Meningkatkan kemandirian desa.
				<p>Pembangunan infrastruktur strategis wilayah kota.</p> <p>Penurunan luas kawasan kumuh.</p> <p>Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih dan persampahan.</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana bidang penanganan bencana serta penanggulangan kebakaran.</p> <p>Edukasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah kebakaran serta kesiapsiagaan terhadap bencana.</p>
			<p>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik.</p>	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	berbasis elektronik.		Meningkatnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Optimalisasi penerapan <i>E-Goverment</i> dalam setiap proses birokrasi melalui pendekatan sistem informasi serta peningkatan kompetensi ASN terhadap implementasi teknologi informasi berbasis digital.
				Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama serta penyelesaian jalur non litigasi.
				Peningkatan sosialisasi serta kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Daerah.
				Pemberdayaan berbasis komunitas seni dan budaya melalui penyelenggaraan event secara reguler.
				Peningkatan ekspansi serta identifikasi terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dilestarikan sebagai bagian dari sejarah dan potensi ekonomi berbasis wisata.

6.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Gunungsitoli, maka dirumuskan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

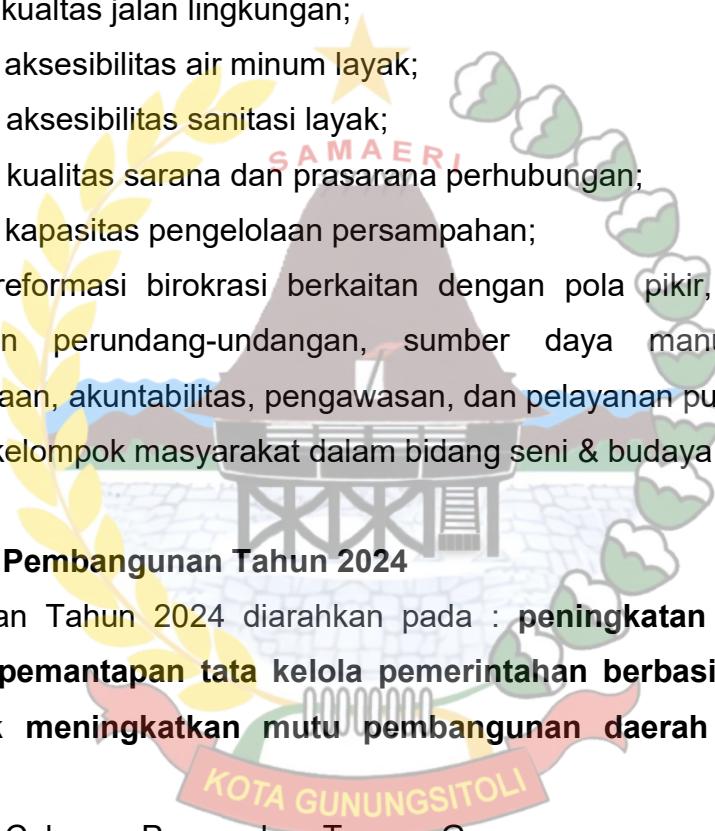
- Pembangunan Tahun 2022 sebagai tahun awal RPJMD diarahkan pada : **melanjutkan Capaian Kinerja Pembangunan pada Periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat** dengan fokus pembangunan :
- a. Digitalisasi Sekolah;
 - b. Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
 - c. Peningkatan Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
 - d. Peningkatan prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar;
 - e. Peningkatan Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah;
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
 - g. Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;
 - h. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;
 - i. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - j. Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan;
 - k. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja;
 - l. Optimalisasi data masyarakat PMKS sehingga dapat tertangani tepat sasaran;
 - m. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - n. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;
 - o. Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota;

- p. Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling terhubung dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat;
- q. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
- r. Peningkatan aksesibilitas air minum layak;
- s. Peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
- t. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- u. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 diarahkan pada : **percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya** dengan fokus pembangunan :

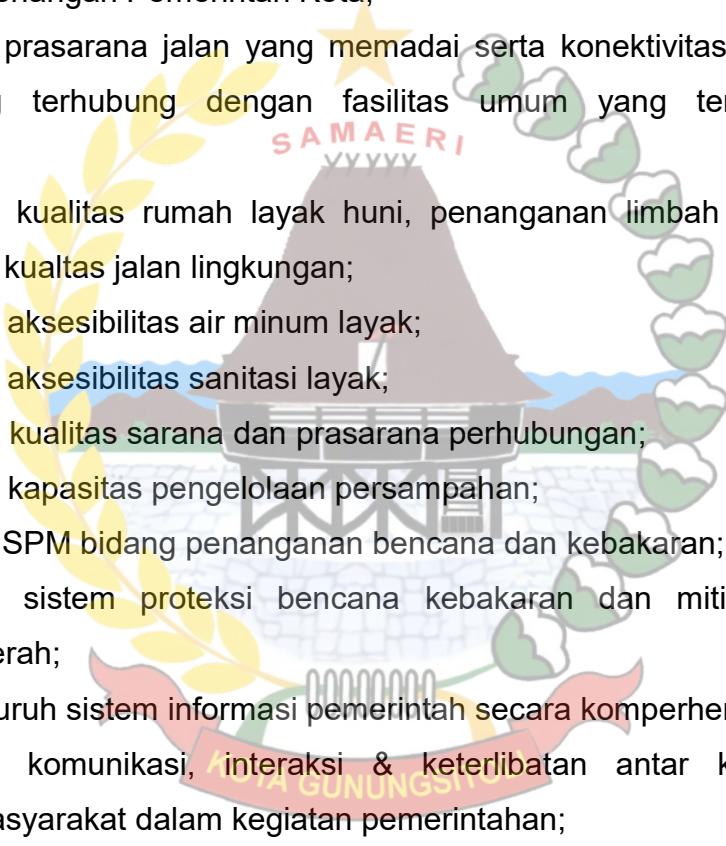
- a. Digitalisasi Sekolah;
- b. Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
- c. Peningkatan Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
- d. Peningkatan prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- e. Peningkatan Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
- g. Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi kelompok masyarakat di bidang pertanian dan perikanan;
- v. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;
- w. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- i. Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan;
- j. Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;

- 
- k. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - l. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;
 - m. Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
 - n. Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling terhubung dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat;
 - o. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
 - p. Peningkatan aksesibilitas air minum layak;
 - x. Peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
 - y. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
 - q. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan;
 - r. Perubahan reformasi birokrasi berkaitan dengan pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik;
 - s. Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

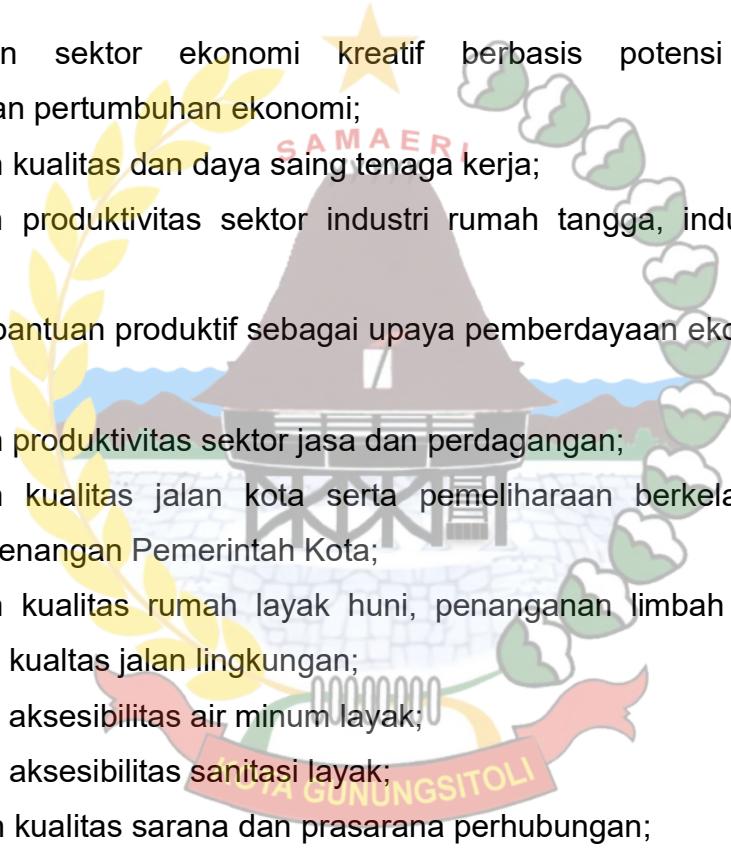
Pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada : **peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah** dengan fokus pembangunan :

- a. Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
- b. Peningkatan Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
- c. Peningkatan prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- d. Peningkatan Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
- f. Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;
- g. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;

- 
- h. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - i. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja;
 - j. Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
 - k. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - l. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;
 - m. Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
 - n. Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling terhubung dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat;
 - o. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
 - p. Peningkatan aksesibilitas air minum layak;
 - q. Peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
 - r. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
 - s. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan;
 - t. Pemenuhan SPM bidang penanganan bencana dan kebakaran;
 - u. Peningkatan sistem proteksi bencana kebakaran dan mitigasi terhadap bencana daerah;
 - v. Integrasi seluruh sistem informasi pemerintah secara komprehensif;
 - w. Peningkatan komunikasi, interaksi & keterlibatan antar kelompok dan golongan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan;
 - x. Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya
 - y. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 diarahkan pada : “**Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayah Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat**” dengan fokus pembangunan :

- 
- a. Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
 - b. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja;
 - c. Peningkatan kompetensi guru, pengawas dan kepala sekolah;
 - d. Peningkatan prestasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
 - e. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan daerah;
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
 - g. Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;
 - h. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;
 - i. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - j. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja;
 - k. Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
 - l. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - m. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;
 - n. Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
 - o. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
 - p. peningkatan aksesibilitas air minum layak;
 - q. peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
 - r. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
 - s. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan;
 - t. Peningkatan komunikasi, interaksi dan keterlibatan antar kelompok dan golongan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan;
 - u. Perluasan sasaran kelompok masyarakat paham Peraturan Daerah;
 - v. Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya;
 - w. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada : **“Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing”** dengan fokus pembangunan :

- a. Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
- b. Peningkatan kompetensi guru, pengawas dan kepala sekolah;
- c. Peningkatan prestasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar;
- d. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan daerah;
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
- f. Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;
- g. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;
- h. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- i. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja;
- j. Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
- k. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- l. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;
- m. Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
- n. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
- o. Peningkatan aksesibilitas air minum layak;
- p. Peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
- q. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- r. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan;
- s. Peningkatan komunikasi, interaksi dan keterlibatan antar kelompok dan golongan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan;
- t. Perluasan sasaran kelompok masyarakat paham Peraturan Daerah;
- u. Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya;

v. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Selain itu arah kebijakan disesuaikan dengan kondisi dan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah yang dianggap masih harus dimaksimalkan pencapaiannya.



Tabel 6.2
Penjabaran Arah Kebijakan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
				Melanjutkan capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat	Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya	Peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah	Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat	Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing	
				Digitalisasi sekolah.					
				Peningkatan cakupan pemenuhan tenaga guru.					
				Peningkatan kompetensi guru, pengawas dan kepala sekolah.					
				Peningkatan prestasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.					
				Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan daerah.					
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan kualitas keluarga sehat serta akses pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan di daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu.					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
				Melanjutkan capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat	Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya	Peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah	Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat	Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing	
3	Meningkatnya kesetaraan Gender.	Pengarus Utamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah.					
				Penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi kelompok masyarakat di bidang pertanian dan perikanan.					
				Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan.					
				Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal.					
				Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
5	Menurunnya jumlah penduduk miskin.	Meningkatkan peran masyarakat melalui UMKM serta melibatkan kelompok petani maupun nelayan untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian lokal.	Meningkatkan peluang para pencari kerja serta menciptakan peluang usaha kerja mandiri.	Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.	Melanjutkan capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat	Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya	Peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah	Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat	Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing
6	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial.	Penguatan program penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban kemiskinan, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta sinergitas APBD dan APBDes.	Meningkatkan aktivitas UMKM	Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.					
				Optimalisasi data masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga dapat tertangani tepat sasaran.					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
				Melanjutkan capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat	Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya	Peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah	Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat	Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing	
7	Meningkatnya kemandirian desa.	Meningkatkan peran BUMDes serta aparatur desa dalam mengembangkan potensi desa terutama pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.	Peningkata kualitas dan peran BUMDes	Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.					
				Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota.					
				Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling terhubung dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat.					
				peningkatan aksesibilitas air minum layak.					
				peningkatan aksesibilitas sanitasi layak.					
				Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan					
		Penurunan luas kawasan kumuh.	Meningkatkan kawasan perkotaan berkualitas	Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan.					
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih dan persampahan.	Meningkatkan jangkauan layanan persampahan	Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan.					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
				Melanjutkan capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat	Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya	Peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah	Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat	Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing	
10	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana.	Peningkatan sarana dan prasarana bidang penanganan bencana serta penanggulangan kebakaran. Edukasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah kebakaran serta kesiapsiagaan terhadap bencana.	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana dan kebakaran	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanganan bencana dan kebakaran. Peningkatan sistem proteksi bencana kebakaran dan mitigasi terhadap bencana daerah.					
11	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.			Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan.					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
					Melanjutkan capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat	Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya	Peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah	Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat	Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing
13	Meningkatnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Optimalisasi penerapan E-Goverment dalam setiap proses birokrasi melalui pendekatan sistem informasi serta peningkatan kompetensi ASN terhadap implementasi teknologi informasi berbasis digital.	Menerapkan satu data dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Integrasi seluruh sistem informasi pemerintah secara komprehensif.					
		Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama serta penyelesaian jalur non litigasi.	Menjalin interaksi yang harmonis antar golongan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemerintahan	Peningkatan komunikasi, interaksi dan keterlibatan antar kelompok dan golongan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.					
		Peningkatan sosialisasi serta kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Daerah.	Meningkatkan peran masyarakat dalam penerapan peraturan daerah	Perluasan sasaran kelompok masyarakat paham Peraturan Daerah.					

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Arah Pembangunan				
					2022	2023	2024	2025	2026
15	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis nilai budaya lokal.	Pemberdayaan berbasis komunitas seni dan budaya melalui penyelenggaraan event secara reguler.	Membina kelompok masyarakat golongan seni dan budaya	Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya.	Melanjutkan capaian kinerja pembangunan periode RPJMD sebelumnya sekaligus meletakkan dasar pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 untuk memulihkan ekonomi masyarakat	Percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya	Peningkatan sumber daya manusia serta pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang bersaing untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah	Penguatan Ekonomi Serta Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Strategis Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat	Sinergitas Segala Bidang Serta Optimalisasi Pembangunan Daerah Untuk Menciptakan Kota yang Berdaya Saing
	Meningkatnya kualitas penanganan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.	Peningkatan ekspansi serta identifikasi terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dilestarikan sebagai bagian dari sejarah dan potensi ekonomi berbasis wisata.	Meningkatkan peran masyarakat untuk menjaga serta melestarikan nilai kebudayaan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.					

6.3 Program Pembangunan Daerah

Selain menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, untuk melaksanakan strategi maka dirumuskan program pembangunan daerah yang akan menjadi program prioritas utama dalam setiap penyusunan rencana pembangunan daerah. Program pembangunan daerah seterusnya akan dijabarkan dalam program perangkat daerah beserta kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Program pembangunan daerah Kota Gunungsitoli tahun 2021-2026 dijabarkan dalam tabel 6.3 sebagai berikut :



TABEL 6.3
KETERKAITAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2021-2026

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah
1	Peningkatan mutu pendidikan yang memadai serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.	Program Pengelolaan Pendidikan.
2	Peningkatan kualitas keluarga sehat serta akses pelayanan kesehatan yang terjangkau.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3	Pengarus Utamaan Gender dan pemenuhan hak perempuan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait.	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata. Program Promosi Penanaman Modal.

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah
6	Peningkatan pelatihan bagi para pencari kerja serta menciptakan peluang usaha kerja mandiri.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
7	Meningkatkan peran masyarakat melalui UMKM serta melibatkan kelompok petani maupun nelayan untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian lokal.	Program Pengembangan UMKM.
8	Penguatan program penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban kemiskinan, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta sinergitas APBD dan APBDes.	Program Rehabilitasi Sosial.
9	Meningkatkan peran BUMDes serta aparatur desa dalam mengembangkan potensi desa terutama pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.	Program Penataan Desa.
		Program Penyelenggaraan Jalan.
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
		Program Pengelolaan Pelayaran.

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah
11	Penurunan luas kawasan kumuh.	Program Kawasan Permukiman. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
12	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih dan persampahan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
13	Peningkatan sarana dan prasarana bidang penanganan bencana serta penanggulangan kebakaran.	Program Penanggulangan Bencana.
14	Edukasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah kebakaran serta kesiapsiagaan terhadap bencana.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
		Program Penyelenggaraan Pengawasan. Program Kepegawaian Daerah.
		Program Pendaftaran Penduduk. Program Pencatatan Sipil. Program Aplikasi Informatika.
17	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama serta penyelesaian jalur non litigasi.	
18	Peningkatan sosialisasi serta kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Daerah.	

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah
19	Pemberdayaan berbasis komunitas seni dan budaya melalui penyelenggaraan event secara reguler.	Program Pengembangan Kebudayaan.
20	Peningkatan ekspansi serta identifikasi terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dilestarikan sebagai bagian dari sejarah dan potensi ekonomi berbasis wisata.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.



Berdasarkan tabel diatas, program pembangunan daerah selanjutnya diproyeksi pendanaannya selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan hingga akhir tahun perencanaan. Hal tersebut dijabarkan pada tabel 6.4 sebagai berikut :



TABEL 6.4
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KOTA GUNUNGSILOI

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	Rumus/Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang unggul																									
Tujuan : Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul																									
Sasaran :																									
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan																									
Program Pengelolaan Pendidikan																									
			Persen	71,04	100,00	58.999.348.855	100,00	60.827.983.258	100,00	28.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00				
	APK SD/MI	(jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang sekolah dasar / jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%	Persen	98,38	98,00		98,50		99,00		99,50		100,00		100,50		100,50		100,50		100,50				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya) x 100%	Persen	99,72	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD/MI / jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang SD/MI) x 100%	Persen	0,17	0,17		0,16		0,15		0,14		0,13		0,12		0,12		0,12		0,12				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs / Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya) x 100%	Persen	109,94	103,00		105,00		107,00		109,00		111,00		113,00		113,00		113,00		113,00				
	APK SMP/MTs	(jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama / jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%	Persen	107,94	98,00		98,50		99,00		99,50		100,00		100,50		100,50		100,50		100,50				
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya) x 100%	Persen	99,43	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(Jumlah siswa putus sekolah jenjang SMP/MTs / jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang SMP/MTs) x 100%	Persen	0,29	0,29		0,28		0,27		0,26		0,25		0,24		0,24		0,24		0,24				
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	(Jumlah Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar +SMP/MTs) / Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) x 10.000	Nilai	12,74	773,33		776,79		780,25		783,71		787,17		790,63		790,63		790,63		790,63				
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	(Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs) x 100%	Persen	80,73	77,00		70,00		81,00		83,00		85,00		87,00		87,00		87,00		87,00				
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	(Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SD/MI) x100%	Persen	93,04	92,50		93,00		93,50		94,00		94,50		95,00		95,00		95,00		95,00				
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	(Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs) x100%	Persen	85,00	82,00		83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		87,00		87,00		87,00				
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	(Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn) x 10.000	Nilai	59,73	51,67		53,45		55,36		57,41		59,62		62,00		62,00		62,00		62,00				

	APK PAUD	(jumlah siswa TK/RA/Penitipan Anak/PAUD / jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun) x 100%	Persen	76,41	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas	Jumlah ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas DIBAGI jumlah puskesmas DiKALI 100%	Persen	90,00	100,00	30.415.435.931	100,00	35.000.000.000	100,00	55.642.659.329	100,00	64.119.369.746	100,00	62.612.489.190	100,00	79.626.689.190	100,00
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar DIBAGI Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	87,90	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu hamil yang bersalin sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	98,09	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang dilayani sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh bayi baru lahir (usia 0-28 hari) di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	94,02	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita (usia 0 -59 bulan) yang dilayani sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh balita (usia 0 -59 bulan) di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	85,61	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh anak usia sekolah yang berada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	94,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15– 59 tahun di kab/kota mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun DIBAGI Jumlah orang usia 15– 59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama DIKALI 100%	Persen	45,56	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh lanjut usia yang berada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	81,57	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DIBAGI Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kota pada tahun berkenaan DIKALI 100%	Persen	23,76	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DIBAGI Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia >15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kota pada tahun berkenaan DIKALI 100%	Persen	91,64	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar DIBAGI Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kota pada tahun berkenaan DIKALI 100%	Persen	19,40	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang pada tahun berkenaan DIBAGI Jumlah orang yang terduga TBC pada tahun berkenaan DIKALI 100%	Persen	42,22	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar DIBAGI Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kota pada tahun berkenaan DIKALI 100%	Persen	49,77	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Presentase Keluarga dengan IKS Pra Sehat yang dibina oleh petugas kesehatan	Jumlah keluarga dengan IKS 0,50-0,80 yang dibina oleh petugas kesehatan puskesmas DIBAGI jumlah seluruh keluarga dengan IKS 0,50-0,80 di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	-	-		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00
	Presentase Keluarga dengan IKS Sehat	Jumlah keluarga dengan IKS >0,80 DIBAGI jumlah seluruh keluarga di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	14,00	14,00		15,00		16,00		17,00		18,00		19,00
	Presentase Calon Pengantin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah catin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi DIBAGI jumlah seluruh catin di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	-	-		50,00		60,00		70,00		80,00		90,00
	Presentase Akseptor KB mendapatkan Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi DIBAGI jumlah seluruh pasangan usia subur di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	35,07	35,07		38,00		40,00		42,00		44,00		46,00
	Presentase Pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar	Jumlah ibu nifas yang dilayani sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh ibu nifas di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	88,55	88,55		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Presentase Penanganan komplikasi (PK) kebidanan	Jumlah penanganan komplikasi kebidanan (PK) DIBAGI jumlah seluruh komplikasi kebidanan di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

	Prevalensi Berat Badan Kurang (Underweight) Pada Balita	Jumlah balita (0-59 bulan) Berat Badan Kurang (underweight) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah balita (0-59 bulan) yang diukur indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 100%	Persen	4,37	4,37			4,31			4,26		4,21			4,15		4,10		4,10
	Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih DIBAGI jumlah seluruh rumah tangga di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	59,85	59,85			60,00			62,00		64,00			66,00		68,00		68,00
	Presentase Desa / kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	Jumlah desa / kelurahan yang terverifikasi ODF DIBAGI jumlah seluruh desa / kelurahan di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	1,98	1,98			4,04			8,08		16,16			32,32		64,64		64,64
	Presentase Fasyankes yang mengelola limbah medis sesuai standar	Jumlah fasnyankes yang mengelola limbah medis sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh fasyankes yang dibina DIKALI 100 %	Persen	-	-			9,00			12,00		15,00			18,00		21,00		21,00
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/ kelurahan UCI DIBAGI Jumlah seluruh Desa/Kelurahan DIKALI 100%	Persen	65,30	75,25			76,00			77,00		78,00			79,00		80,00		80,00
	Percentase Indikator Kinerja yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Jumlah seluruh indikator kinerja yang telah dikelola secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan (SIK) DIBAGI Jumlah seluruh indikator kinerja DIKALI 100%	Persen	-	-			16,67			33,33		50,00			58,33		66,67		66,67
	Percentase Potensial Kejadian Luar Biasa di Desa/Kelurahan yang ditanggulangi	Jumlah Potensial KLB di desa/kelurahan yang ditanggulangi pada periode waktu tertentu DIBAGI Jumlah KLB yang terjadi pada wilayah desa/kelurahan pada periode waktu yang sama DIKALI 100%	Persen	-	-			100,00			100,00		100,00			100,00		100,00		100,00
Meningkatnya kesetaraan gender																				
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Percentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD X 100%	Persen	38,00	43,00	103.718.999	48,00	194.254.950	53,00	1.054.500.000	58,00	1.159.950.000	65,00	1.275.945.000	72,00	1.403.539.500	72,00			

Misi 2 : Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal

Tujuan : Mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian sektor unggulan

Sasaran :

Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan																				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Percentase peningkatan produksi perikanan tangkap	(Total Produksi Tahun N - Total Produksi Tahun Awal)/Total Produksi Tahun Awal x 100	Persen	100,00	0,00	2.051.601.517	100,00	299.878.380	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase Peningkatan produksi Tanaman Pangan, hortikultura,perternakan ,dan perkebunan/tahun	Percentase Rata-rata Produksi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dibagi dengan Jumlah Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dikali 100	Persen	65,00	70,00	1.837.845.353	75,00	255.673.830	80,00	1.840.000.000	85,00	2.260.000.000	90,00	3.280.000.000	95,00	2.780.000.000	95,00			
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Percentase Pemenuhan Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan	(Jumlah dokumen yang disusun / Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100	persen	100,00	0,00	0	100,00	0	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	45.000.000	100,00	50.000.000	100,00			
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Hasil perhitungan Pola Pangan Harapan	Persen	100,00	100,00	559.858.591	100,00	542.978.880	100,00	320.000.000	100,00	350.000.000	100,00	380.000.000	100,00	400.000.000	100,00			

Menurunnya jumlah penduduk miskin		Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata daerah	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata daerah	Objek	4,00	4,00	149.516.877	5,00	1.100.009.692	5,00	15.000.000.000	5,00	15.000.000.000	5,00	25.000.000.000	6,00	35.000.000.000	6,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		Jumlah Penanaman Modal yang Merealisasikan investasinya	Jumlah Realisasi Nilai Investasi	Rp. (Miliar)	15,49	4,00	5.112.450	5,00	0	6,00	100.000.000	7,00	100.000.000	8,00	100.000.000	9,00	100.000.000	9,00
Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Σ Usaha Mikro yang bertumbuh dibagi Σ Usaha mikro yang dibina x 100%	persen	72,68	73,00	140.170.914	73,00	178.399.926	74,00	150.000.000	75,00	175.000.000	78,00	200.000.000	80,00	250.000.000	80,00	
Menurunnya masalah kesejahteraan sosial																		
Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	(Jumlah orang yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial / Jumlah orang yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial) x 100	persen	100,00	86,00	1.274.754.738	100,00	883.763.840	100,00	1.563.713.745	100,00	1.566.841.173	100,00	1.566.841.173	100,00	1.566.841.173	100,00	
Meningkatnya kemandirian desa																		
Program Penataan Desa							0		0		220.000.000		220.000.000		240.000.000		240.000.000	
	Persentase Desa yang telah menetapkan PERDES Tentang Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang telah menetapkan Perdes tentang Kewenangan Desa / Jumlah Desa Se Kota	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Jumlah Desa yang memiliki kantor desa/Jumlah desa sekota Gunungsitoli x 100 %	Persen	21,00	22,00		30,00		50,00		60,00		100,00		100,00		100,00	
Misi 3 : Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan																		
Tujuan : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan, berkualitas dan berwawasan lingkungan																		
Sasaran :																		
Meningkatnya Infrastruktur dan prasarana wilayah																		
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	(Total jalan dalam kondisi baik / Panjang jalan keseluruhan di Kota Gunungsitoli) x 100	Persen	63,04	65,73	60.332.031.901	67,47	89.696.388.539	69,22	45.000.000.000	70,97	50.000.000.000	72,55	55.000.000.000	74,12	60.000.000.000	74,12	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	(Total penanganan instalasi dan jaringan air minum dalam kondisi baik / Total kebutuhan Saluran Rumah di Kota Gunungsitoli) x 100%	Persen	31,04	31,04	3.288.950.000	33,37	4.500.000.000	34,40	2.300.000.000	35,43	2.300.000.000	36,46	2.300.000.000	37,48	2.300.000.000	37,48	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	(Total Panjang Saluran Irigasi Tertangani dalam Kondisi Baik / Total Panjang Rencana Penanganan Saluran Irigasi) x 100%	Persen	61,48	66,34	18.370.785.912	68,67	13.429.999.898	70,99	10.000.000.000	73,32	10.000.000.000	75,64	20.075.008.026	77,96	9.773.260.870	77,96	
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			Persen	36,68	40,81		47,06		56,34		63,61		69,91		74,24		74,24	
	Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	(Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang / Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan) x 100%	Persen	22,13	22,13		25,00		50,00		65,00		80,00		95,00		95,00	
	Persentase kendaraan yang lulus uji	(Jumlah kendaraan yang lulus uji / Target kendaraan yang wajib uji) x 100%	Persen	61,88	70,00		77,00		80,00		81,00		82,00		83,00		83,00	
	Jumlah ruas jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas	(Jumlah ruas jalan yang sudah dilaksanakan rekayasa lalu lintas / Ruas jalan yang akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas) x 100%	Ruas Jalan	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Program Pengelolaan Pelayaran	Capaian Pendapatan Asli Daerah di Pelabuhan Penyeberangan	Realisasi PAD di Pelabuhan Penyeberangan / Target PAD di Pelabuhan Penyeberangan	Persen	100,00	100,00	16.030.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	440.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) dibagi Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha dikali 100	Persen	2,98	17,64	29.743.586	35,28	0	52,92	0	70,56	0	82,36	0	82,36	0	82,36	
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Rumah Tangga yang bersanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal dikali 100%	Persen	31,11	33,09	4.795.988.351	43,09	4.964.997.840	53,09	4.964.997.840	63,09	4.964.997.840	73,09	4.964.997.840	83,09	4.964.997.840	83,09	

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 30% IKA + 30%IKU + 40%IKTL	Indeks	43,62	43,62	79.748.594	44,32	76.470.790	45,02	269.000.000	45,72	269.000.000	46,42	269.000.000	47,12	269.000.000	47,12
Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana			Persen			327.589.578		497.253.976		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusuri di Bagi Jumlah total dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan X 100%	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan / Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana X 100%	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

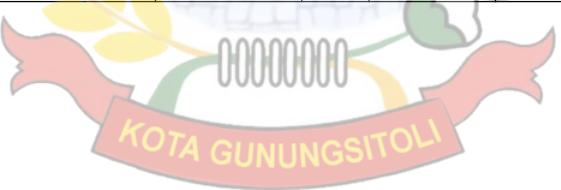
Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik

Tujuan : Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi																			
Program Penyelenggaraan Pengawasan				100,00	100,00	446.603.553	100,00	1.074.517.860	100,00	984.500.000	100,00	1.082.950.000	100,00	1.191.245.000	100,00	1.310.369.500	100,00		
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi x 100%	Persen	30,00	30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		70,00		70,00		
	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	Jumlah Perangkat Daerah yang diperiksa / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai Minimal B	Jml Perangkat Daerah yg nilai SAKIP nya B dibagi jmlh seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi x 100%	Persen	60,00	60,00		65,00		68,00		70,00		75,00		80,00		80,00		
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat temuan Material di bagi total Perangkat Daerah x 100 %	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	Jumlah Sekolah yang diawasi / Jumlah Sekolah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	Jumlah Desa yang diawasi/Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/ pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti /Total Pengaduan x 100%	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Program Kepegawaian Daerah	Indeks profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	54,00	55,00	452.771.842	56,00	857.599.551	57,00	2.788.324.000	58,00	2.049.324.000	59,00	3.067.324.000	60,00	3.067.324.000	60,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik						490.777.428		434.704.304		307.311.060		387.726.763		343.235.439		366.189.483			
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KK	(Jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga)/(Jumlah Keluarga) X100%	Persen	99,18	0,00		99,19		99,20		99,21		99,22		99,23		99,23		

	Percentase kepemilikan KIA	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu)hari yang sudah memiliki KIA)/(Jumlah anak usia 0-17 tahun) X100%	Per센	21,37	0,00		40,00		50,00		60,00		65,00		70,00		70,00
Program Pencatatan Sipil						0		100.789.856		261.500.000		295.400.000		322.540.000		351.044.000	
	Percentase kepemilikan akta lahir	(Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir)/(Jumlah anak usia 0-18 tahun) X100%	Per센	95,40	95,40		96,00		96,50		97,00		97,50		98,00		98,00
	Percentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan	(Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan)/(Peristiwa perkawinan yang dilaporkan) X100%	Per센	74,74	74,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Percentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan	(Jumlah akta perceraian yang diterbitkan)/(Peristiwa perceraian yang dilaporkan) X100%	Per센	64,25	64,25		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Percentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	(Jumlah akta kematian yang diterbitkan)/(Peristiwa kematian yang dilaporkan) X100%	Per센	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Meningkatnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan																	
Program Aplikasi Informatika	Percentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	Jumlah aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah pada tahun n dibagi Jumlah aplikasi pada tahun n dikali seratus	Per센	100,00	100,00	501.782.800	100,00	2.384.853.000	100,00	3.150.000.000	100,00	3.740.000.000	100,00	4.080.000.000	100,00	4.080.000.000	100,00
Misi 5 : Memperkokoh kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, religius dan taat hukum																	
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya																	
Sasaran :																	
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat																	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Percentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP x 100%	per센	12,00	100,00	3184604718,00	100,00	282048078,00	100,00	1000000000,00	100,00	1000000000,00	100,00	1000000000,00	100,00	1000000000,00	100,00
Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis nilai budaya lokal																	
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah event kebudayaan daerah	Event	3,00	3,00	123707627,00	4,00	114999988,00	4,00	1315000000,00	4,00	1485000000,00	5,00	1445000000,00	5,00	1445000000,00	5,00
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Percentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang telah dilestarikan dibagi Jumlah Cagar Budaya di Kota Gunungsitoli x 100%	Per센	36,73	36,73	96325155,00	37,84	428135803,00	38,97	750000000,00	40,14	850000000,00	41,35	900000000,00	42,59	950000000,00	42,59
TOTAL PENDANAAN						188.074.805.370		218.025.702.339		184.116.506.074		200.855.559.622		226.758.625.768		248.394.255.656	



6.4 Program Unggulan Daerah

Program unggulan Daerah Kota Gunungsitoli merupakan 65 Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Masa Jabatan Tahun 2021-2024 yang dijabarkan ke dalam program sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tercantum pada Tabel 6.4 berikut ini :



TABEL 6.5
PROGRAM UNGGULAN DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2021-2026

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 <i>s AJO KEPMENDAGRI 050-3708/2020</i>	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
1	Pemenuhan tenaga guru melalui pengangkatan guru kontrak daerah		
2	Pemberian beasiswa berprestasi untuk siswa SD, SMP dan Mahasiswa		
3	Pembangunan unit sekolah baru PAUD/TK		
4	Penyediaan komputer dan peralatan IT di SMP		
5	Pelatihan bagi guru, pengawas, kepala sekolah dan petugas administrasi sekolah		
6	Pembangunan perpustakaan daerah	Program pembinaan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
7	Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat		
8	Peningkatan standarisasi akreditasi Puskesmas		
9	Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak		
10	Layanan unit reaksi cepat ambulance gratis		

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
11	Penanganan stunting dan gizi buruk		
12	Pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengangkatan tenaga kesehatan kontrak daerah	MAFRI peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
13	Peningkatan ruas jalan strategis menjadi berpermukaan hotmiks		
14	Pembangunan jalan antar desa, menuju sentra produksi, dan menuju objek wisata		
15	Menata fungsi terminal dan angkutan dalam kota	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan.
16	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Program aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika.
		Program pelayanan penanaman modal Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
18	Penguatan kelembagaan pemerintahan kecamatan dan desa	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
19	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas pemerintahan	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
20	Pembentukan kecamatan dan kelurahan baru	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah.
21	Penataan prasarana pasar	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
22	Pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan.
23	Pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas Pendidikan.
24	Pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
25	Fasilitasi kemudahan berinvestasi	Program pengembangan UMKM	Dinas Penanaman Modal

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
			dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
26	Pengembangan spot pariwisata perkotaan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
27	Penataan dan pemanfaatan aset daerah	Program pengelolaan barang milik daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
28	Optimalisasi sarana dan prasarana penanganan Covid-19	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas terkait lainnya.
29	Menata sistem drainase untuk mengatasi masalah genangan air di beberapa lokasi	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
30	Menyediakan penerangan jalan umum pada kawasan pemukiman masyarakat	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Dinas Perhubungan.
31	Layanan internet gratis pada ruang – ruang publik	Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika.

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
32	Menata kawasan pemukiman kumuh (jalan lingkungan, drainase dan sanitasi)	Program kawasan permukiman <i>SAMAERI</i>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
33	Memelihara dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang Terbuka Publik, dan Pedestrian bagi pejalan kaki	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
34	Memperluas jaringan pemantauan CCTV	Program aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika.
35	Penyediaan lampu penerangan jalan umum di pusat ibu kota kecamatan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Dinas Perhubungan.
36	Membangun ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	
37	Pembangunan sarana air bersih dan SPAM	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
38	Pembangunan sarana air limbah dan sanitasi lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang /Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
39	Memperluas cakupan wilayah layanan persampahan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	
40	Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Gunungsitoli Utara		Dinas Lingkungan Hidup.
41	Pembangunan Tempat pembuangan Sementara (TPS)		
42	Menyediakan layanan tempat pemakaman umum	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Dinas Sosial; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
43	Peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
44	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
45	Fasilitasi kegiatan organisasi keagamaan dan hari besar keagamaan		
46	Fasilitasi penguatan peran FKUB		

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
47	Penerapan New Normal dalam menghadapi pandemi Covid-19	 SAMAERI	Seluruh Dinas terkait yang memiliki relevansi dengan penerapan <i>New Normal</i> .
48	Pemberian bantuan pupuk gratis untuk petani padi, palawija, dan hortikultura	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
49	Penyediaan alat berat gratis untuk membuka lahan pertanian	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
50	Pemberian bantuan alat-alat perikanan bagi nelayan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan.
51	Pemberian bantuan alat-alat mesin pertanian bagi petani	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
52	Membantu petani dan nelayan dalam pengolahan hasil dan pemasaran	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan.

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
53	Memfasilitasi kelompok tani dan nelayan menjadi kelompok yang berbadan hukum	Program perekonomian dan pembangunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan.
54	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
55	Pemberdayaan kelembagaan kelompok petani pemakai air	Program penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
		Program pengembangan ekspor	
		Program perencanaan dan pembangunan industri	
57	Memfasilitasi pengurusan sertifikasi produksi (label halal, IRTP, dll) dan pemasaran hasil produksi industri rumah tangga	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
58	Bantuan modal bergulir untuk usaha mikro dan koperasi dengan Penyederhanaan persyaratan	Program perekonomian dan pembangunan	Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (BLUD).

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INTEGRASI NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 JO KEPMENDAGRI 050-3708/2020	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB
59	Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sumber permodalan dari perbankan	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan.
60	Penataan objek – objek wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
61	Penyelenggaraan even pagelaran seni budaya	Program pengembangan kesenian tradisional	
62	Pembinaan sanggar seni budaya	Program pengembangan kebudayaan	
63	Pembinaan dan penguatan terhadap Badan Usaha Milik Desa	Program perekonomian dan pembangunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
64	Menata dan membangun pasar rakyat sebagai sumber pertumbuhan baru di kecamatan	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan.
65	Perlindungan bagi orang terlantar, penyandang cacat, dan orang dengan gangguan jiwa	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial.

6.5 Inovasi Daerah Kota Gunungsitoli

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Bentuk inovasi daerah terdiri dari inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Kemudian inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang pelayanan publik. Sedangkan inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana pengembangan inovasi daerah yang ada di seluruh perangkat daerah untuk jangka 5 tahun kedepan diharapkan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat menghasilkan output inovasi daerah.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta yang dijabarkan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 :



TABEL 7.1

Urusan	KODE		Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Bidang	Urusan						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1	01																			
	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi/Jumlah Administrasi Umum	(Pemenuhan Administrasi/Jumlah Administrasi Umum) x 100%	Kebutuhan Administrasi Umum	Persen	100,00	100,00	131.455.338.633	100,00	148.945.380.527	100,00	150.200.000.000	100,00	160.259.100.000	100,00	166.321.800.000	100,00	172.479.500.000
	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI	(jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang sekolah dasar / jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun) x 100%		Persen	100,00	58.999.348.855	100,00	60.627.983.258	100,00	28.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya) x 100%		Persen	99,72	100,00		100,00			100,00			100,00		100,00	
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD/MI / jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang SD/MI) x 100%		Persen	0,17	0,17		0,16			0,15			0,14		0,13	0,12
					Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs / Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya) x 100%		Persen	109,94	103,00		105,00			107,00			109,00		111,00	113,00
					APK SMP/MTs	(jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama / jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun) x 100%		Persen	107,94	98,00		98,50			99,00			99,50		100,00	100,50
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs / Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya) x 100%		Persen	99,43	100,00		100,00			100,00			100,00		100,00	100,00
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(Jumlah siswa putus sekolah jenjang SMP/MTs / jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang SMP/MTs) x 100%		Persen	0,29	0,29		0,28			0,27			0,26		0,25	0,24
					Rasio Guru/Murid Sekolah Dasar	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) x 10.000		Nilai	12,74	773,33		776,79			780,25			783,71		787,17	790,63
					Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	(Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs) x 100%		Persen	80,73	77,00		70,00			81,00			83,00		85,00	87,00
					Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	(Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SD/MI) x100%		Persen	93,04	92,50		93,00			93,50			94,00		94,50	95,00
					Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	(Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs) x100%		Persen	85,00	82,00		83,00			84,00			85,00		86,00	87,00
					Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	(Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn) x 10.000		Nilai	59,73	51,67		53,45			55,36			57,41		59,62	62,00
					APK PAUD	(jumlah siswa TK/RA/Penitipan Anak/PAUD / jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun) x 100%		Persen	76,41	50,00		55,00			60,00			65,00		70,00	75,00

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun												
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase lembaga mitra non pemerintah bidang pendidikan aktif/Jumlah lembaga non pemerintah bidang pendidikan yang ada) x 100%	Jumlah lembaga non pemerintah bidang pendidikan aktif/Jumlah lembaga non pemerintah bidang pendidikan yang ada) x 100%	Persen	100,00	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1	02																			
	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum yang dilaksanakan DIBAGI jumlah kegiatan DIKALI 100%	Jumlah pemenuhan pelaksanaan administrasi umum yang dilaksanakan DIBAGI jumlah kegiatan DIKALI 100%	Persen	100,00	100,00	30.708.000.000	100,00	30.708.000.000	100,00	30.708.000.000	100,00	30.708.000.000	100,00	30.708.000.000	100,00	30.708.000.000	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur DIBAGI Total Unsur yang Terisi DIKALI Nilai Penimbang	Persen	82,59	82,59		83,00			83,50		84,00		84,50		85,00		
	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA PENCEGAHAN	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas DIKALI 100%	Jumlah ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di puskesmas DIKALI 100%	Persen	90,00	100,00	30.415.435.931	100,00	35.000.000.000	100,00	55.642.659.329	100,00	64.119.369.746	100,00	62.612.489.190	100,00	79.626.689.190	
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu Hamil yang dilayani sesuai standar DIBAGI Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	87,90	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	
					Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu hamil yang bersalin sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	98,09	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	
					Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir (usia 0- 28 hari) yang dilayani sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh bayi baru lahir (usia 0-28 hari) di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	94,02	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	
					Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita (usia 0 -59 bulan) yang dilayani sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh balita (usia 0 -59 bulan) di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	85,61	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	
					Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh anak usia sekolah yang berada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	94,00	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	
					Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15- 59 tahun di kab/kota mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun DIBAGI Jumlah orang usia 15- 59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama DIKALI 100%	Persen	45,56	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	
					Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh lanjut usia yang berada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	81,57	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	
					Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar DIBAGI Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kota pada tahun berkenaan DIKALI 100%	Persen	23,76	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun														
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Target	Rp											
										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
KESEHATAN MASYARAKAT																							
										88,55	88,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
										100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
										4,37	4,37	4,31	4,26	4,21	4,15	4,10							
										59,85	59,85	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00							
										1,98	1,98	4,04	8,08	16,16	32,32	64,64							

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Presentase Fasyankes yang mengelola limbah medis sesuai standar	Jumlah fasyankes yang mengelola limbah medis sesuai standar DIBAGI jumlah seluruh fasyankes yang dibina DIKALI 100 %	Persen	-	-	9,00		12,00		15,00		18,00		21,00		
					Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/ kelurahan UCI DIBAGI Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan DIKALI 100%	Persen	65,30	75,25	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		
					Persentase Indikator Kinerja yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Jumlah seluruh indikator kinerja yang telah dikelola secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan (SIK) DIBAGI Jumlah seluruh indikator kinerja DIKALI 100%	Persen	-	-	16,67		33,33		50,00		58,33		66,67		
					Persentase Potensial Kejadian Luar Biasa di Desa/Kelurahan yang di tanggulangi	Jumlah Potensial KLB di desa/kelurahan yang ditanggulangi pada periode waktu tertentu DIBAGI Jumlah KLB yang terjadi pada wilayah desa/kelurahan pada periode waktu yang sama DIKALI 100%	Persen	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan	Jumlah tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan DIBAGI Jumlah seluruh tenaga kesehatan puskesmas DIKALI 100%	Persen	100,00	100,00	2.460.009.510	100,00	2.848.529.560	100,00	5.245.000.000	100,00	5.250.000.000	100,00	5.255.000.000	100,00	5.310.000.000
					Persentase pustikesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
					Persentase tenaga kesehatan puskesmas yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan		Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan (menyelenggarakan) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) DIBAGI jumlah seluruh kecamatan di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100%	Persen	83	83,00	172.950.634	100,00	275.000.000	100,00	2.150.000.000	100,00	2.150.000.000	100,00	2.150.000.000	100,00	2.150.000.000
					Presentase Keluarga yang dibina PHBS	Jumlah keluarga yang dibina PHBS DIBAGI jumlah seluruh keluarga di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	-	-	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		
					Presentase Posyandu Aktif	Jumlah posyandu aktif DIBAGI jumlah seluruh posyandu di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	48	48,00	54,00		60,00		66,00		72,00		78,00		
					Presentase Desa/kelurahan yang membentuk (menyelenggarakan) Posyandu Remaja	Jumlah Desa / Kelurahan yang membentuk Posyandu Remaja DIBAGI Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	4	4,00	8,00		16,00		32,00		40,00		48,00		
					Presentase Desa/kelurahan yang membentuk (menyelenggarakan) Posyandu Lansia	Jumlah Desa / Kelurahan yang membentuk Posyandu Lansia DIBAGI Jumlah Desa/Kelurahan di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Presentase Pos UKK Aktif minimal Strata Pratama	Jumlah pos UKK aktif minimal strata pratama DIBAGI jumlah seluruh pos UKK yang dibentuk di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Persen	-	-	-		-		50,00		50,00		50,00		
	1	02	PROGRAM SEDIAAN	FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi yang memenuhi syarat	Jumlah sarana farmasi yang memenuhi syarat DIBAGI jumlah sarana farmasi DIKALI 100%	Persen	-	-	100,00	-	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	310.000.000	
					Presentase Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman yang dilakukan pembinaan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman yang dilakukan pembinaan DIBAGI Jumlah Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun DIKALI 100 %	Persen	86,10	86,10	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	03									91,11	92,45	93,45	94,50	95,63					
	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	(Pemenuhan Administrasi/Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum) x 100%	Persen	100,00	100,00	11.346.903.177	91,11	14.913.137.959	92,45	11.744.946.606	93,45	12.169.946.606	94,50	12.169.946.606	95,63	12.169.946.606
	1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	(Total Panjang Saluran Irigasi Tertangani dalam Kondisi Baik / Total Panjang Rencana Penanganan Saluran Irigasi) x 100%	Persen	61,48	66,34	18.370.785.912	68,67	13.429.999.898	70,99	10.000.000.000	73,32	10.000.000.000	75,64	20.075.008.026	77,96	9.773.260.870
	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	(Total penanganan instalasi dan jaringan air minum dalam kondisi baik / Total kebutuhan Saluran Rumah di Kota Gunungsitoli) x 100%	Persen	31,04	31,04	3.288.950.000	33,37	4.500.000.000	34,40	2.300.000.000	35,43	2.300.000.000	36,46	2.300.000.000	37,48	2.300.000.000
	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	(Total penanganan drainase dalam kondisi baik / Panjang kebutuhan drainase di Kota Gunungsitoli) x 100	Persen	67,92	68,61	6.706.637.100	69,61	6.000.000.000	70,61	8.000.000.000	71,61	8.000.000.000	72,61	8.000.000.000	73,61	8.000.000.000
	1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luas kawasan yang tertata	(Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang ditangani / Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang direncanakan) x 100	Persen	50,00	50,93	0	51,93	20.070.000.000	54,93	26.760.000.000	58,93	26.760.000.000	62,93	26.760.000.000	66,93	26.760.000.000
	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	(Total jalan dalam kondisi baik / Panjang jalan keseluruhan di Kota Gunungsitoli) x 100	Persen	63,04	65,73	60.332.031.901	67,47	89.696.388.539	69,22	45.000.000.000	70,97	50.000.000.000	72,55	55.000.000.000	74,12	60.000.000.000
	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga jasa konstruksi yang terampil	(Jumlah tenaga jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan / Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terdata) x 100	Persen	30,20	30,20		50,00	100.000.000,00	60,00	50.000.000,00	70,00	50.000.000,00	80,00	50.000.000,00	90,00	50.000.000,00
	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	(Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan / Jumlah pemohon pemanfaatan ruang) x 100	Persen	73,86	74,00	4.497.332.341	76,00	943.424.498	78,00	2.000.000.000	80,00	2.250.000.000	82,00	2.250.000.000	84,00	2.250.000.000
	2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	((Luasan ruang terbuka hijau/ publik yang tertata) / (Total luas ruang terbuka hijau/ publik di Kota Gunungsitoli)) x 100	Persen	24,79	28,15	6.185.338.400	49,69	2.893.264.830	78,80	2.000.000.000	92,76	2.000.000.000	99,24	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000
	1	3	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase luasan bangunan gedung yang tertata	(Luas bangunan gedung milik pemerintah yang ditata / Total Luas bangunan gedung milik pemerintah) x 100	Persen	43,52	48,59		50,92	9.450.000.000	65,39	8.250.000.000	74,36	8.250.000.000	78,85	8.250.000.000	83,33	8.450.000.000
	2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	(Tanah kosong milik pemerintah kota yang dikelola / Jumlah tanah kosong milik pemerintah) x 100	Persen	100,00	-		100,00	1.000.000.000	100,00	100.000.000	100,00	175.000.000	100,00	175.000.000	100,00	175.000.000
	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu jalan yang berfungsi	(Jumlah titik lampu yang berfungsi / Jumlah titik lampu yang ada) x 100	Persen	100,00	-		100,00	6.149.818.344	100,00	5.845.316.527	100,00	5.548.069.693	100,00	5.659.095.390	100,00	5.779.563.094

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun												
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																					
	1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	Persen	100,00	100,00	2.912.711.575	100,00	2.729.190.686	100,00	3.341.900.000	100,00	5.500.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00	5.377.227.000	
	1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan program pengembangan perumahan	Jumlah rumah yang ditangani pada program pengembangan perumahan dibagi jumlah rumah pada daerah program pengembangan perumahan dikali 100	Persen	100,00	100,00	19.999.690	100,00	0	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	
	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) dibagi Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha dikali 100	Persen	2,98	17,64	29.743.586	35,28	0	52,92	0	70,56	0	82,36	0	82,36	0	
	1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan RTLH di luar kawasan kumuh.	Jlh rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh dibagi jumlah rumah di luar kawasan kumuh dikali 100%	Persen	18,58	0,00	0	18,49	0	18,22	1.500.000.000	17,68	2.000.000.000	17,50	2.000.000.000	17,50	2.000.000.000	
	1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Jumlah Perumahan yang sudah dilingkapi PSU	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota dikali 100% (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100,00	100,00	1.474.898.551	100,00	674.916.857	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	
	1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Tangga bersanitasi	Rumah yang Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal dikali 100%	Persen	31,11	33,09	4.795.988.351	43,09	4.964.997.840	53,09	4.964.997.840	63,09	4.964.997.840	73,09	4.964.997.840	83,09	4.964.997.840	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05																			
	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	persen	100	100	4.523.746.037	100	9.941.206.940	100	9.478.328.814	100	9.723.442.960	100	9.980.124.094	100	10.249.519.888	
	1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Persentase tingkat pelanggaran (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	K3 Pelanggaran K3 yang terselesaikan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP x 100%	persen	12	100%	3.184.604.718	100%	2.820.480.780	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULGAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Percentase tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	persen	100,00	100	494.800.400	100	480.192.100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000
URUSAN BENCANA																				
	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pemenuhan jasa administrasi sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	Persen	100,00	100,00	3.527.367.410	100,00	2.923.525.451	100,00	3.955.200.000	100,00	4.056.200.000	100,00	4.162.200.000	100,00	4.288.200.000
	1	05	03	PROGRAM PENANGGULGAN BENCANA	Percentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun di Bagi Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan X 100%	Persen	100,00	100,00	327.589.578	100,00	497.253.976	100,00	5.000.000.000	100,00	5.000.000.000	100,00	5.000.000.000	100,00	5.000.000.000
					Percentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan / Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana X 100%	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																				
	1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pemenuhan jasa administrasi sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	persen	100,00	100,00	2.814.581.475	100,00	2.647.864.850	100,00	3.389.511.856	100,00	3.396.290.879	100,00	3.735.919.967	100,00	3.743.391.807
	1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Sosial	(Jumlah KPM yang menerima bantuan / Jumlah KPM yang terdata) x 100	Persen	100,00	100,00	124.348.823	100,00	57.613.680	100,00	756.510.000	100,00	758.023.020	100,00	799.387.985	100,00	822.456.382
	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial	(Jumlah orang yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial / Jumlah orang yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial) x 100	persen	100,00	100,00	1.274.754.738	100,00	883.763.840	100,00	1.563.713.745	100,00	1.566.841.173	100,00	1.566.841.173	100,00	1.566.841.173
	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	(Jumlah orang/keluarga yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dibagi Jumlah orang/keluarga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial) x 100	persen	100,00	100,00	193.637.018	100,00	54.756.874	100,00	41.164.164	100,00	45.280.580	100,00	47.544.609	100,00	216.071.354
	1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.	(Jumlah orang/keluarga yang mendapat bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial dibagi Jumlah orang/keluarga yang membutuhkan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial) x 100	Persen	100,00	100,00	347.787.176	100,00	227.305.420	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
TENAGA KERJA	2	07																		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2	07	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Penyusunan Rencana Kerja	$\sum \text{Dokumen RTK dibagi } \sum \text{dokumen RTK} \times 100\%$	Persen	-	-	-	100,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITA	1. Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi 2. Persentase Laporan Pembinaan Swasta	$\sum \text{Tenaga kerja dilatih} \times 100\%$	Persen	85,55	16,60	33,33	50,00	66,66	83,33	100,00	Persen	20.210.005	20.803.600	50.000.000	51.000.000	52.000.000	53.000.000	
	2	07	S TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\sum \text{Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi } \sum \text{Pencari Kerja terdaftar} \times 100\%$	Persen	10,71	0,00	0	80,00	0	85,00	0	90,00	0	95,00	0	100,00	0	0		
	2	07	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenaga kerjaan)	$\sum \text{Kasus diselesaikan dibagi } \sum \text{Kasus yang dicatat} \times 100\%$	Perusahaan	360	360,00	18.500.000	365,00	19.325.200	370,00	219.000.000	375,00	231.600.000	380,00	243.900.000	385,00	256.500.000			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERTOLAKAN ANAK	2	08																				
	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD X 100%	Persen	38,00	43,00	103.718.999	48,00	194.254.950	53,00	1.054.500.000	58,00	1.159.950.000	65,00	1.275.945.000	72,00	1.403.539.500			
	2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	Persen	7,00	15,00	14.278.608	21,00	44.997.640	27,00	600.000.000	33,00	700.000.000	39,00	800.000.000	44,00	900.000.000		
	2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyiapan aplikasi data gender dan anak dengan fokus pada update data dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data	Jumlah Aplikasi	-	10,00	14.984.527	12,00	14.984.527	14,00	150.000.000	16,00	150.000.000	18,00	150.000.000	22,00	150.000.000			
	2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penanganan Pengaduan Korban kekerasan Perempuan dan anak	Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Tingkat Kabupaten setiap Kota yang didampingi / Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) x 100%	Persen	20,00	100,00	31.308.437	100,00	69.998.040	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000		
	2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang di fokuskan pada TPPO	Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Tingkat Kabupaten setiap Kota yang didampingi / Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) x 100%	Persen	-	100,00	42.836.926	100,00	84.995.336	100,00	220.000.000	100,00	242.000.000	100,00	266.200.000	100,00	292.820.000		
URUSA PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2	09																				

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan jasa administrasi sara, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	persen	100,00	100,00	4.791.505.358	100,00	6.487.112.360	100,00	6.126.000.000	100,00	6.126.000.000	100,00	6.126.000.000	100,00	6.590.502.883		
	2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Persen	100,00	100,00	559.858.591	100,00	542.978.880	100,00	320.000.000	100,00	350.000.000	100,00	380.000.000	100,00	400.000.000		
	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan	(Jumlah dokumen yang disusun / Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100	persen	100,00	0,00	0	100,00	0	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	45.000.000	100,00	50.000.000		
	2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan keamanan pangan	(Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana / Jumlah kegiatan pengawasan yang direncanakan) x 100	persen		0,00	0	0,00	0	0,00	75.000.000	100,00	80.000.000	100,00	100.000.000	100,00	150.000.000		
URUSA PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2	11																				
	2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100 (satuan %)	Persen	100,00	100,00	5.464.772.230	100,00	5.145.778.884	100,00	10.291.000.000	100,00	6.384.000.000	100,00	7.358.000.000	100,00	6.358.000.000		
	2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan dokumen perencanaan lingkungan hidup (persentase perencanaan lingkungan terlaksana) yg	Pemenuhan dokumen Perencanaan lingkungan disusun dibagi dokumen perencanaan lingkungan dikali 100%	Persen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	350.000.000	0,00	100.000.000	100,00	100.000.000		
	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = 30% IKA + 30%IKU + 40%IKTL	Indeks	43,62	43,62	79.748.594	44,32	76.470.790	45,02	269.000.000	45,72	269.000.000	46,42	269.000.000	47,12	269.000.000		
	2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Cakupan usaha dan /atau kegiatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengelolaan LB3 (jlh usaha diverifikasi per jlh usaha penghasil LB3)	Jumlah usaha diverifikasi per jumlah usaha penghasil LB3	Persen	-	100,00	0	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	15.000.000	100,00	10.000.000	100,00	0		
	2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Pelaku Usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan dikali 100%	Persen	-	41,18	58.357.576	47,06	119.726.088	52,94	148.000.000	58,82	148.000.000	64,71	68.000.000	70,59	68.000.000		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun																				
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026									
		Urusan	Program	5	6	7	8	9	Target	Rp	11	12	Rp	13	Target	Rp	15	Target	Rp	17	Target	Rp	18	Target	Rp	20	Rp	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Target	Rp	11	12	Rp	13	Target	Rp	15	Target	Rp	17	Target	Rp	18	Target	Rp	20	Rp	21	
	2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan yang diberikan	Persen	100,00	100,00		0	100,00		0	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000							
	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase Penanganan Pengaduan	Jumlah pengaduan diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang ada dikali 100%	Persen	74,00	80,00	82,00	0	84,00	25.000.000	86,00	25.000.000	88,00	25.000.000	90,00	25.000.000										
	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Percentase sampah yang tertangani (ton)	Jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi total jumlah timbunan sampah dikabupaten/kota (ton) dikali 100	Persen	-	65,04	3.940.959.947	42,00	6.438.346.834	10.449.000.000		10.654.000.000		11.159.000.000		11.664.000.000										
						Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha) dibagi luas area kabupaten/kota (km ² /ha) dikali 100	Persen	-	42,00	42,00	42,00	46,00		50,00		54,00		60,00											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	12																											
	2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pemenuhan pelaksanaan Administrasi Umum	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100 (satuan %)	Persen	100,00	100,00	4.005.725.583	100,00	3.771.748.476	100,00	6.837.127.877	100,00	9.739.649.527	100,00	8.637.164.480	100,00	9.234.689.538									
	2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Percentase kepemilikan KK	(Jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga)/(Jumlah Kepala Keluarga) X100%	Persen	99,18	0,00	490.777.428	99,19	434.704.304		307.311.060		387.726.763		343.235.439		366.189.483									
					Percentase kepemilikan KIA	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satuhari) yang sudah memiliki KIA)/(Jumlah anak usia 0-17 tahun) X100%	Persen	21,37	0,00	40,00	50,00		60,00		65,00		70,00												
	2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						201.222.070		235.733.600		347.000.000		418.400.000		448.640.000		608.804.000									
					Percentase pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	(Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama)/(Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menandatangani perjanjian kerjasama) X100%	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00								
	2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						0,00	0	100.789.856		261.500.000		295.400.000		322.540.000		351.044.000									
					Percentase kepemilikan akta lahir	(Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir)/(Jumlah anak usia 0-18 tahun) X100%	Persen	95,40	95,40	96,00		96,50		97,00		97,50		98,00											
					Percentase cakupan akta perkawinan yg diterbitkan	(Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan)/(Peristiwa perkawinan yang dilaporkan) X100%	Persen	74,74	74,74	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
					Percentase cakupan akta perceraian yg diterbitkan	(Jumlah akta perceraian yang diterbitkan)/(Peristiwa perceraian yang dilaporkan) X100%	Persen	64,25	64,25		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Percentase cakupan akta kematian yg diterbitkan	(Jumlah akta kematian yang diterbitkan)/(Peristiwa kematian yang dilaporkan) X100%	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKA	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	(Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan)/(Jumlah profil kependudukan yang disusun) X100%	Persen	100,00	100,00	0	100,00	9.754.360	100,00	10.763.940	100,00	11.840.334	100,00	13.024.367	100,00	14.326.804									

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	13																				
	2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100 (satuan %)	Persen	100,00	100,00	4.747.477.389	100,00	3.272.190.402	100,00	5.620.649.070	100,00	6.206.283.977	100,00	6.687.972.374	100,00	7.214.819.612		
	2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN N LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatannya Aktif	Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif/Jumlah desa seKota Gunungsitoli x 100%	Persen	100,00	100,00	228.297.524	100,00	324.999.856	100,00	1.020.000.000	100,00	1.020.000.000	100,00	1.020.000.000	100,00	1.020.000.000		
	2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang telah menetapkan PERDES Tentang Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang telah menetapkan Perdes tentang Kewenangan Desa / Jumlah Desa Se Kota	Persen	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	220.000.000	100,00	220.000.000	100,00	240.000.000	100,00	240.000.000		
					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Jumlah Desa yang memiliki kantor desa/Jumlah desa Gunungsitoli x 100 %	Persen	21,00	22,00	30,00	50,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa/Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa/pihak ketiga dibagi Jumlah desa se kota Gunungsitoli x 100 %	Persen	-	-	-	0	0,00	0	6,00	50.000.000	10,00	50.000.000	12,00	50.000.000			
	2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan administrasi pemerintahan desa/Jumlah desa se kota Gunungsitoli x 100 %	Persen	100,00	100,00	687.137.029	100,00	3.607.052.432	100,00	4.460.000.000	100,00	1.460.000.000	100,00	1.460.000.000	100,00	3.960.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	14																				
	2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100 (satuan %)	Persen	100,00	100,00	3.522.170.804	100,00	3.600.874.199	100,00	1.974.055.455	100,00	2.198.250.000	100,00	2.421.150.000	100,00	2.607.790.000		
	2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Total Angka Kelahiran Hidup (TFR)	$TFR = \sum_{i=15-49}^{45-49} ASFR_i$ ASFR : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	Persen	100,00	100,00	17.414.517	100,00	233.720.478	100,00	167.500.000	100,00	82.500.000	100,00	212.500.000	100,00	112.500.000		
	2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun	Angka Pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun x 100	Persen	63,97	63,97	4.472.951.188	79,00	3.166.294.878	78,00	345.000.000	77,00	370.000.000	76,00	350.000.000	75,00	340.000.000		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun												
	Bidang	Urusan	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase cakupan keluarga Tribina (BKB,BKR,BKL), PIK R, PPKS, UPPKS x 100%	Rata-rata tingkat capaian anggota keluarga Tribina (BKB,BKR,BKL), PIK R, PPKS, UPPKS x 100%	Persen	51,80	51,80	44.996.441	55,00	499.992.940	60,00	226.500.000	65,00	270.002.280	70,00	310.000.000	85,00	500.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	15																			
	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pemerlukan sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	Persen	100,00	100,00	4.581.560.043	100,00	6.178.722.546	100,00	11.579.000.000	100,00	10.259.000.000	100,00	10.979.000.000	100,00	10.029.000.000	
	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU ANGGUKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemasangan sarana perhubungan dan angkutan jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang / Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan) x 100%	Persen	22,13	22,13	261.827.778	25,00	84.721.000	25,00	50,00	25,00	65,00	25,00	80,00	25,00	95,00	
				LINTAS DAN ANGGUKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan yang lulus uji	(Jumlah kendaraan yang lulus uji / Target kendaraan yang wajib uji) x 100%	Persen	61,88	70,00	77,00	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	83,00	83,00		
					Jumlah ruas jalan yang dilakukan renyaya lalu lintas	(Jumlah ruas jalan yang sudah dilaksanakan renyaya lalu lintas / Ruas jalan yang akan dilaksanakan renyaya lalu lintas) x 100%	Ruas Jalan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
	2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Capaian Pendapatan Asli Daerah di Pelabuhan Penyeberangan	Realisasi PAD di Pelabuhan Penyeberangan / Target PAD di Pelabuhan Penyeberangan	Persen	100,00	100,00	16.030.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	440.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16																			
	2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	3.859.901.045	100,00	2.155.000.227	100,00	4.278.886.874	100,00	4.278.886.874	100,00	4.278.886.874	100,00	4.278.886.874	
	2	16	02	PROGRAM INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola dibagi Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik dikali seratus	Persen	100,00	100,00	336.206.278	100,00	392.541.560	100,00	663.500.000	100,00	820.500.000	100,00	981.050.000	100,00	1.056.050.000	
	2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah	Jumlah aplikasi yang menggunakan domain/ sub domain pemerintah daerah pada tahun n dibagi Jumlah aplikasi pada tahun n dikali seratus	Persen	100,00	100,00	501.782.800	100,00	2.384.853.000	100,00	3.150.000.000	100,00	3.740.000.000	100,00	4.080.000.000	100,00	4.080.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2	21																			

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase kegiatan yang diamankan	Jumlah kegiatan yang diamankan pada tahun n dibagi Jumlah kegiatan pada tahun n dikali seratus	Persen	100,00	100,00	23.264.236	100,00	6.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2	17																		
	2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT di Bagi Jumlah seluruh Koperasi X100%	Persen	63,00	63,00	20.000.000	63,00	-	63,30	20.000.000	63,80	20.000.000	64,00	20.000.000	64,00	20.000.000
	2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan di Bagi Jumlah seluruh Koperasi X100%	Persen	30,00	31,00	146.691.680	32,11	117.902.792	34,00	150.000.000	35,00	150.000.000	36,00	150.000.000	37,00	150.000.000
	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang bermitra	Σ Usaha Mikro yang bermitra dibagi usaha mikro yang dibina x 100%	persen	4,10	5,00	243.557.357	5,00	382.326.220	6,00	56.399.150	7,00	56.399.150	8,00	56.399.150	9,00	56.399.150
	2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Σ Usaha Mikro yang bertumbuh dibagi Σ Usaha mikro yang dibina x 100%	persen	72,68	73,00	140.170.914	73,00	178.399.926	74,00	150.000.000	75,00	175.000.000	78,00	200.000.000	80,00	250.000.000
	2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan di Bagi Jumlah seluruh Koperasi X100%	Persen	-	0,00	0	1,00	100.000.000	1,00	125.000.000	1,00	125.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2	18																		
	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan jasa administrasi sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	persen	100,00	100,00	1.250.419.890	100,00	6.640.105.345	100,00	8.826.683.666	100,00	8.393.683.666	100,00	9.210.703.666	100,00	9.026.283.666
	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang melakukan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan (n-1) + 1	Investor	6	1	-	1	-	1	-	1	500.000.000	1	-	1	500.000.000
	2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanaman Modal yang Merealisasikan investasinya	Jumlah Realisasi Nilai Investasi	Miliar	15.490.000.000	16.264.500.000	5.112.450	17.077.725.000	100.000.000	17.931.611.250	100.000.000	18.828.191.813	100.000.000	19.769.601.404	100.000.000	20.758.081.474	100.000.000
	2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pelayanan Pemrosesan Perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Perizinan yang diterima dikali 100%	Dokumen	0	0	0	0	0	1.250	370.000.000	1.275	370.000.000	1.300	370.000.000	1.325	370.000.000
	2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal Berdasarkan Lokasi dan Sektor pada tahun (n)	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal berdasarkan lokasi dan sektor pada tahun (n)	Perusahaan	0	255	326.121.597	273	391.376.334	273	391.376.334	273	391.376.334	273	391.376.334	273	391.376.334

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen setiap tahun (n+25)	Dokumen	1.926	1.550	231.600.000	1.575	195.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	19																				
	2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi ke pemudaan	Jlh pemuda yang aktif dalam organisasi ke pemudaan/Jlh pemuda usia 16-30 tahun x 100%	Persen	-	3,14	586.823.454		554.868.940		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		
					Persentase wirausaha muda	(Jumlah wirausaha muda / jumlah wirausaha) x 100%	Persen	-	5,00	219.999.923		313.383.860		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
	2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAA N	Persentase pembinaan atlit	(Jumlah cabang olahraga yang dibina / Jumlah seluruh cabang olahraga ada/terdaftar) x 100%	Persen	-	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
					Persentase pelatih yang bersertifikat	(Jumlah pelatih bersertifikat / Jumlah seluruh pelatih) x 100%	Persen	-	6,84		6,84		7,84		8,84		9,84		10,84			
					Persentase pembinaan atlit muda	(Jumlah atlit pelajar yang dibina / Jumlah seluruh atlit pelajar) x 100%	Persen	-	20,00		20,00		22,00		24,00		26,00		28,00			
					Jumlah atlit berprestasi	Jumlah atlit berprestasi	Orang	-	1,00		1,00		2,00		3,00		4,00		5,00			
					Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	Cabang	-	5,00		5,00		6,00		7,00		8,00		9,00			
	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah pembinaan organisasi kepramukaan	Jumlah pembinaan organisasi kepramukaan	Organisasi		1,00	150.000.000	1,00	100.000.000	1,00	250.000.000	1,00	300.000.000	1,00	350.000.000	1,00	400.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2	20																				
	2	20	02	PROGRAM PENELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Statistik Sektoral yang dikelola	Jumlah PD yang menyerahkan data Statistik Sektoral dibagi jumlah PD dikali seratus	Persen	100,00	100,00	9.986.843	100,00	12.367.952	100,00	56.000.000	100,00	69.000.000	100,00	77.200.000	100,00	78.200.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2	22																				
	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah event kebudayaan daerah	Event	3,00	3,00	123.707.627	4,00	114.999.988	4,00	1.315.000.000	4,00	1.485.000.000	5,00	1.445.000.000	5,00	1.445.000.000		
	2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	Jumlah sanggar yang dibina	Kelompok		5,00	0	5,00	0	6,00	75.000.000	7,00	75.000.000	8,00	100.000.000	9,00	100.000.000		
	2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah momentum sejarah yang didokumentasikan	Jumlah momentum sejarah yang didokumentasikan	Jenis	-	0,00	0	1,00	0	1,00	0	2,00	0	2,00	70.000.000	2,00	120.000.000		
	2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang telah dilestarikan bagi jumlah Cagar Budaya di Kota Gunungsitoli x 100%	Persen	36,73	36,73	96.325.155	37,84	428.135.803	38,97	750.000.000	40,14	850.000.000	41,35	900.000.000	42,59	950.000.000		
	2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yang dibina	Jumlah museum yang dibina	Unit	1,00	1,00	0	1,00	35.000.000	1,00	85.000.000	1,00	90.000.000	1,00	90.000.000	1,00	3.090.000.000		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
		Urusan	Urusan						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	23																				
	2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	2.377.506.962	100,00	2.213.708.869	100,00	3.440.750.319	100,00	3.440.750.319	100,00	3.440.750.319	100,00	3.440.750.319		
	2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = \sum UPLM dibagi AM x 100 UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan AM = aspek masyarakat	Indeks	2,00	2,15	38.590.983	11.083.937.898	204.040.000	444.000.000	468.000.000	496.000.000							
							Nilai	-	10,00	34,00	36,00		38,00		40,00		42,00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	24			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang salah dan pertanggungjawaban nasional	T = $(a+i+s+j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persen	50,00	50,00	0	50,00	140.000.000	50,00	830.000.000	57,50	640.000.000	60,00	660.000.000	62,50	680.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	25																				
	3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	2.771.743.143	100,00	2.454.020.035	100,00	3.940.959.947	100,00	3.940.959.947	100,00	3.940.959.947	100,00	3.940.959.947		
	3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	(Total Produksi Tahun N - Total Produksi Tahun Awal)/Total Produksi Tahun Awal x 100	Persen	100,00	0,00	2.051.601.517	100,00	299.878.380	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000		
	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Total Produksi Ikan Konsumsi Yang di Budidayakan di Wilayah Kota Gunungsitoli	Persen	100,00	0,00	179.997.470	100,00	603.264.478	100,00	1.875.000.000	100,00	1.515.000.000	100,00	1.065.000.000	100,00	1.015.000.000		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun												
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan persentase produksi ikan olahan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Persen	100,00	0,00	0	100,00	0	100,00	180.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	26																			
	3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	3.440.750.319	100,00	3.127.942.008	100,00	4.595.800.000	100,00	4.774.200.000	100,00	4.942.200.000	100,00	5.191.200.000	
	3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata daerah	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata daerah	Objek	4,00	4,00	149.516.877	5,00	1.100.009.692	5,00	15.000.000.000	5,00	15.000.000.000	5,00	25.000.000.000	6,00	35.000.000.000	
	3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah penyelenggaraan event/promosi pariwisata	Jumlah penyelenggaraan event/promosi pariwisata	Event	1,00	1,00	198.472.824	3,00	144.999.702	3,00	984.000.000	3,00	1.049.000.000	3,00	1.069.000.000	3,00	1.099.000.000	
	3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kompetensi	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	500,00	500,00	0	550,00	54.998.940	600,00	205.000.000	650,00	275.000.000	700,00	275.000.000	750,00	275.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3	27																			
				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Hasil perhitungan Pola Pangan Harapan	persen		100,00	270.000.000	100,00	300.000.000	100,00	370.000.000	100,00	270.000.000	100,00	300.000.000	100,00	370.000.000	
	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi Tanaman Pangan, hortikultura,perternakan ,dan perkebunan/tahun	Persentase Rata-rata Produksi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dibagi dengan Jumlah Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dikali 100%	Persen	91,00	92,00	0	94,00	0	95,00	3.375.000.000	97,00	3.440.000.000	98,00	3.415.000.000	100,00	3.305.000.000	
	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	Jumlah prasaranan pertanian yang terbangun/jumlah target prasaranan pertanian yang dibangun dikali 100%	Persen	65,00	70,00	1.837.845.353	75,00	255.673.830	80,00	1.840.000.000	85,00	2.260.000.000	90,00	3.280.000.000	95,00	2.780.000.000	
	3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Jumlah Kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) jumlah kejadian per kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya dibagi jumlah kejadian per kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	Persen	100,00	100,00	179.536.436	100,00	181.980.380	100,00	265.000.000	100,00	275.000.000	100,00	285.000.000	100,00	295.000.000	

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Urusan	Bidang	Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	(Luas areal bencana pertanian yang tertangani / Luas areal bencana pertanian yang terjadi) x 100	Persen	100,00	100,00	419.479.220	100,00	0	100,00	435.000.000	100,00	435.000.000	100,00	435.000.000	100,00	435.000.000
	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM Petani penyuluh pertanian, dan persentase tan.hortikultura yang dibudidayakan	Jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan PEMDA tahun n dibagi jumlah kelompok tani x 100%	Persen	100,00	100,00	1.319.152.045	100,00	100,00	100,00	1.315.000.000	100,00	1.350.000.000	100,00	1.600.000.000	100,00	1.650.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3	30																		
	3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	persen	100,00	100,00	4.190.051.137	100,00	4.718.216.937	100,00	4.192.316.651	100,00	4.433.829.928	100,00	4.436.429.928	100,00	4.130.034.384
	3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar di Bagi Jumlah seluruh pasar X100%	Persen	-	48,00	300.725.738	50,00	97.499.449	52,00	300.000.000	54,00	300.000.000	56,00	350.000.000	60,00	350.000.000
	3	30	04	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien harga antar waktu	Nilai rata-rata deviasi harga barang perkomoditi di Bagi Nilai rata-rata deviasi harga barang keseluruhan komoditi X100%	Persen	100,00	100,00	32.355.467	100,00	45.775.864	100,00	47.355.467	100,00	52.355.467	100,00	57.355.467	100,00	62.355.467
	3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	Jumlah alat UTTP yang di tera/teraulang dibagi jumlah alat UTTP yang wajib tera x 100	Persen	20,05	24,51	44.770.794	27,50	74.124.750	28,00	115.000.000	27,00	130.000.000	28,00	135.000.000	30,00	498.895.544
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	31																		
	3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kelompok IKM bina	\sum Kelompok IKM yang dibina dibagi \sum kelompok IKM x 100%	persen	25,00	30,00	211.441.164	30,00	410.916.876		300.000.000	40,00	300.000.000	45,00	300.000.000	50,00	300.000.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4																			
SEKRETARIAT DAERAH	4	01	01				Persen	100,00	100,00	23.375.456.520	100,00	22.978.132.128	100,00	25.000.000.000	100,00	31.000.000.000	100,00	31.000.000.000	100,00	36.205.000.000

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025				
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang ditetapkan dan komunikasi pimpinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan	(Jumlah Kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang ditetapkan / Jumlah rancangan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi dan protokol dan komunikasi pimpinan yang diperlukan) x 100%	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
					Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	(Jumlah Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam APBD / Jumlah Anggaran Yang Direncanakan Dalam Renstra Setiap Tahun) x 100%	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					Persentase target prioritas dalam Rensstra setda yang tercapai	(Capaian realisasi IKU/target IKU) x 100%	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	(Jumlah Kebijakan Daerah di Bidang Pemkesra yang ditetapkan/ Jumlah Rancangan Kebijakan Daerah di Bidang Pemkesra Yang Difasilitasi) x 100%	Persen	100,00	100,00	5.549.741.023	100,00	3.583.144.925	100,00	5.991.000.000	100,00	6.295.000.000	100,00	6.107.000.000	100,00	6.226.000.000		
	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan	(Jumlah Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditetapkan / Jumlah Rancangan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan) x 100%	Persen	100,00	100,00	1.173.594.193	100,00	1.165.734.672	100,00	2.332.000.000	100,00	2.275.000.000	100,00	2.486.000.000	100,00	2.717.000.000		
					Persentase Capaian Realisasi APBD	(Realisasi APBD /Pagu APBD) x 100%	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
SEKETARIAT DPRD																						
	4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan jasa administrasi, sarana, perlengkapan dan operasional kantor	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100	Persen	100,00	100,00	19.437.500.170	100,00	19.171.973.765	100,00	5.877.569.181	100,00	6.441.943.003	100,00	7.074.445.755	100,00	7.769.614.206		
	4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD dan peningkatan kapasitas DPRD	(Rata-Rata Jumlah rapat DPRD terfasilitasi + Rata-Rata Jumlah anggota DPRD mengikuti Bimtek atau Diklat) x 100%	Persen	100,00	100,00	6.382.210.356	100,00	6.348.838.020	100,00	7.020.431.392	100,00	7.722.474.531	100,00	8.494.721.984	100,00	9.344.194.182		
UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN																						
URUSAN PERENCANAAN		5	01																			
		5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	4.450.417.977	100,00	3.681.181.702	100,00	4.935.000.000	100,00	4.935.000.000	100,00	4.935.000.000	100,00	4.935.000.000	
		5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program kedalam RPBD	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Program Dalam RPJMD Tahun Berkenaan X 100 %	Persen	84,88	81,00	1.093.685.406	82,00	622.584.712	83,00	650.000.000	84,00	1.150.000.000	85,00	650.000.000	86,00	650.000.000	

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program kedalam APBD	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan dibagi Jumlah Program Dalam APBD Tahun Berkenaan X 100 %	Persen	86,04	86,00	195.923.344	87,00	303.530.352	88,00	305.000.000	89,00	375.290.440	90,00	375.290.440	90,00	375.290.440
URUSAN KEUANGAN	5	02																		
	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	14.678.143.756	100,00	9.521.610.229	100,00	16.064.592.828	100,00	16.867.822.469	100,00	17.711.213.593	100,00	18.596.774.272
	5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah	(Jumlah Dokumen/Laporan yang ada / Jumlah Dokumen/laporan yang seharusnya) x 100	Persen	100,00	100,00	133.195.436.140	100,00	138.216.516.638	100,00	142.886.598.015	100,00	150.030.927.916	100,00	157.532.474.312	100,00	165.409.098.027
	5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Dokumen / Laporan Barang Milik Daerah	(Jumlah Dokumen/Laporan yang ada / Jumlah Dokumen/laporan yang seharusnya) x 100	Persen	100,00	100,00	739.641.946	100,00	856.873.968	100,00	776.624.043	100,00	815.455.245	100,00	856.228.008	100,00	899.039.408
	5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD	(Jumlah Realisasi PAD / Jumlah Target PAD) x 100	Persen	100,00	100,00	796.689.774	100,00	742.780.647	100,00	900.952.499	100,00	946.000.124	100,00	993.300.130	100,00	1.042.965.137
URUSAN KEPEGAWAIAN	5	03																		
	5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	3.604.328.693	100,00	858.268.020	100,00	5.322.160.000	100,00	5.793.660.000	100,00	6.324.660.000	100,00	6.324.660.000
	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	54,00	55,00	452.771.842	56,00	857.599.551	57,00	2.788.324.000	58,00	2.049.324.000	59,00	3.067.324.000	60,00	3.067.324.000
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5	04																		
	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang lulus sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dibagi jumlah seluruh ASN Pemko Gunungsih dikali 100%	Persen	100,00	1,00	128.394.787	1,00	111.902.448	8,00	2.404.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	05																		
	5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah Total Perangkat Daerah X 100%	Persen	100,00	9,38	30.301.238	40,63	270.474.234	56,25	310.000.000	71,88	310.000.000	87,50	310.000.000	100,00	310.000.000
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	01	01																	
	6	01	01																	
										3.454.257.002		3.732.832.282		4.576.314.000		5.034.055.620		5.632.049.600		6.189.721.494

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun												
	Urusan	Bidang	Program						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelaksanaan Administrasi Umum	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100 (satuan %)	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	Jumlah JFA atau P2UPD dibagi Jumlah JFA atau P2UPD yang dibutuhkan x 100% (Perhitungan Tahun Berikut diakumulasi dari tahun sebelumnya)	Persen	25,00	20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		50,00		
	6	01	02		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi x 100%	Persen	100,00	100,00	446.603.553	100,00	1.074.517.860	100,00	984.500.000	100,00	1.082.950.000	100,00	1.191.245.000	100,00	1.310.369.500	
					Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	Jumlah Perangkat Daerah yang diperiksa / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase hasil evaluasi SAKIP	Jml Perangkat Daerah yg nilai SAKIP nya B dibagi jmlh seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi x 100%	Persen	60,00	60,00		65,00		68,00		70,00		75,00		80,00		
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan Material	Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat temuan Material dibagi total Perangkat Daerah x 100%	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	Jumlah Sekolah yang diawasi / Jumlah Sekolah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	Jumlah Desa yang diawasi/Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase Tindak Lanjut kasus/ pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti /Total Pengaduan x 100 %	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						36.201.621		385.083.210		333.366.000		366.702.600		403.372.860		443.710.146	
					Persentase Regulasi Bidang Pengawasan yang tersusun	Jumlah Regulasi yang tersusun/Total Kebutuhan Regulasi (dilasumisikan Jumlah Regulasi yang dibutuhkan hingga akhir periode sebanyak 16 Regulasi) x 100%	Persen	100,00	75,00		80,00		82,00		84,00		86,00		90,00		
					Nilai PMRB Online	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi secara online oleh TPI	Persen	40,00	55,00		62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		
					Persentase OPD yang dilakukan Pendampingan Penilaian ZI	Jumlah OPD yang didampingi / Total OPD x 100 %	Persen	-	0,00	5,00			10,00		12,00		15,00		20,00		
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8																				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSILOLI	8	01																			
	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	3.119.675.223	100,00	2.773.774.903	100,00	3.316.804.235	100,00	3.316.804.235	100,00	3.316.804.235	100,00	3.316.804.235	

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Urusan	Program						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAKILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguanan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Realisasi Kegiatan dibagi banyaknya kegiatan x 100%	Persen	100,00	100,00	153.447.398	100,00	97.566.820	100,00	1.650.000.000	100,00	1.710.000.000	100,00	1.710.000.000	100,00	1.710.000.000
	8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Realisasi Kegiatan dibagi banyaknya kegiatan x 100%	Persen	100,00	100,00	1.077.012.770	100,00	1.073.539.090	100,00	3.858.636.150	100,00	4.155.000.000	100,00	4.155.000.000	100,00	4.155.000.000
	8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Realisasi Kegiatan dibagi banyaknya kegiatan x 100%	Persen	100,00	100,00	315.000.000	100,00	210.261.920	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000
	8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Realisasi Kegiatan dibagi banyaknya kegiatan x 100%	Persen	100,00	100,00	4.675.640	100,00	7.695.880	100,00	1.155.000.000	100,00	1.155.000.000	100,00	1.155.000.000	100,00	1.155.000.000
	8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Realisasi Kegiatan dibagi banyaknya kegiatan x 100%	Persen	100,00	100,00	8.080.280	100,00	6.722.880	100,00	1.305.000.000	100,00	1.305.000.000	100,00	1.305.000.000	100,00	1.305.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN	7																			
KECAMATAN																				
KECAMATAN GUNUNGSILOLI																				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	6.487.909.433	100,00	5.796.637.763	100,00	5.920.676.751	100,00	5.929.719.224	100,00	6.146.297.643	100,00	6.191.895.796

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun											
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Urusan	Bidang	Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah yang didelegasikan Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan / Jumlah urusan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah x 100	Persen	100,00	100,00	26.935.620	100,00	31.960.320	100,00	10.762.500	100,00	11300625	100,00	11865656	100,00	12.458.939		
	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ditetapkan X100%	Persen	100,00	100,00	1.100.041.298	100,00	262.169.760	100,00	1.099.786.356	100,00	1099980561	100,00	1100184477	100,00	1.100.398.588		
	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah capaian urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan kecamatan dibagi Jumlah urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	51.793.090	100,00	51.771.720	100,00	73.861.253	100,00	77.554.317	100,00	81.432.032	100,00	85.503.635		
	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase realisasi APBDes	Total persentase capaian APBDes seluruh desa dibagi jumlah desa di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	125.328.880	100,00	143.300.940	100,00	164.729.578	100,00	172.966.057	100,00	181.614.359	100,00	190.695.078		
KECAMATAN GUNUNG SITOLI IDANOI																				
	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	2.430.853.205	100,00	2.270.666.813	100,00	2.642.403.280	100,00	2.632.653.281	100,00	2.742.203.282	100,00	2.855.953.283		
	7 01 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAHAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban	Jumlah masalah keamanan dan ketertiban umum yang diselesaikan dibagi Jumlah masalah keamanan dan ketertiban umum yang dilaporkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	19.200.000	100,00	0	100,00	42.500.000	100,00	45.300.000	100,00	46.100.000	100,00	50.000.000		
	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah capaian urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan kecamatan dibagi Jumlah urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	67.960.415	100,00	62.619.740	100,00	137.000.000	100,00	140.000.000	100,00	143.000.000	100,00	146.000.000		
	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase realisasi APBDes	Total persentase capaian APBDes seluruh desa dibagi jumlah desa di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	67.296.799	100,00	90.183.120	100,00	129.499.270	100,00	125.499.270	100,00	128.499.270	100,00	136.499.270		
KECAMATAN GUNUNG SITOLI SELATAN	7 01																			
	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	2.141.686.313	100,00	1.985.961.040	100,00	2.595.823.400	100,00	2.595.823.400	100,00	2.595.823.400	100,00	2.595.823.400		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Urusan						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah capaian urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dibagi Jumlah urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	90.824.112	100,00	62.366.720	100,00	97.500.000	100,00	98.200.000	100,00	98.900.000	100,00	99.600.000		
	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase realisasi APBDes	Total persentase capaian APBDes seluruh desa dibagi jumlah desa di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	59.638.266	100,00	61.229.115	100,00	67.500.000	100,00	67.500.000	100,00	67.500.000	100,00	67.500.000		
KECAMATAN GUNUNG SITOLI UTARA	7	01																				
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	2.587.399.781	100,00	2.429.669.158	100,00	3.196.126.560	100,00	3.302.126.560	100,00	3.331.426.560	100,00	3.381.626.560		
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah yang didelegasikan oleh Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan / Jumlah urusan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah x 100	Persen	100,00	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000		
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	Jumlah capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dibagi Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000		
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masalah keamanan dan keteribatan umum yang diselesaikan dibagi Jumlah masalah keamanan dan keteribatan umum yang dilaporkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000		
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah capaian urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dibagi Jumlah urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	38.067.470	100,00	14.334.720	100,00	132.500.000	100,00	132.500.000	100,00	132.500.000	100,00	132.500.000		
	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Total persentase capaian APBDes seluruh desa dibagi jumlah desa di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	66.244.689	100,00	62.994.160	100,00	145.414.925	100,00	142.500.000	100,00	157.500.000	100,00	142.500.000		
KECAMATAN GUNUNG SITOLI ALOOA	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	1.930.594.307	100,00	1.772.582.839	100,00	2.201.600.000	100,00	2.200.200.000	100,00	2.247.800.000	100,00	2.396.400.000		

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun												
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
		Urusan	Bidang						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dibagi Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	14.585.800	100,00	11.807.760	100,00	17.600.000	100,00	18.100.000	100,00	19.600.000	100,00	20.100.000	
	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban	Jumlah masalah keamanan dan ketertiban umum yang diselesaikan dibagi Jumlah masalah keamanan dan ketertiban umum yang dilaporkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	12.000.000	100,00	13.000.000	100,00	14.000.000	100,00	15.000.000
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah capaian urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dibagi Jumlah urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	85.322.400	100,00	67.360.145	100,00	131.500.000	100,00	132.200.000	100,00	144.900.000	100,00	172.600.000	
	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percentase realisasi APBDes	Total persentase capaian APBDes seluruh desa dibagi Jumlah Desa di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	39.892.300	100,00	47.165.991	100,00	91.500.000	100,00	101.000.000	100,00	110.500.000	100,00	120.000.000	
KECAMATAN GUNUNG SITOLI BARAT																					
	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pemenuhan pelaksanaan administrasi umum	Jumlah capaian penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	1.922.160.381	100,00	1.777.804.940	100,00	2.648.500.000	100,00	2.874.500.000	100,00	2.998.750.000	100,00	3.188.250.000	
	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase capaian PAD	Jumlah PAD yang tercapai dibagi jumlah PAD yang ditetapkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	12.478.020	100,00	8.613.840	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	
	7	01	04	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase penyelesaian masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah masalah keamanan dan ketertiban umum yang diselesaikan dibagi Jumlah masalah keamanan dan ketertiban umum yang dilaporkan dikali 100	Persen	100,00	100,00	19.308.780	100,00	5.724.000	100,00	41.500.000	100,00	43.500.000	100,00	43.500.000	100,00	46.500.000	
	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan yang dilaksanakan	Jumlah capaian urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dibagi Jumlah urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	77.923.531	100,00	28.638.076	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	145.000.000	100,00	145.000.000	
	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Percentase rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluaran	Jumlah desa yang malaksanakan pemilihan kepala desa dibagi jumlah desa dikali 100	Persen	100,00	0,00	0	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
					Percentase Desa yang melaksanakan Musrenbang	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang dibagi jumlah desa dikali 100	Persen	100,00	100,00	27.500.000	100,00	30.500.000	100,00	30.500.000	100,00	32.000.000	100,00	32.000.000	100,00	32.000.000	

Urusan	KODE			Program	Indikator	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal Indikator	Target Capaian Setiap Tahun													
	Urusan	Bidang	Program						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Urusan	Urusan						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi / jumlah lembaga masyarakat yang ada dikali 100	Persen	100,00	100,00	35.000.000	100,00	55.000.000	100,00	60.000.000	100,00	65.000.000	100,00	65.000.000	100,00	70.000.000		
					Persentase realisasi APBDes	Total persentase capaian APBDes seluruh desa dibagi Jumlah Desa di kecamatan dikali 100	Persen	100,00	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	37.250.000	100,00	38.750.000	100,00	40.250.000	100,00	47.500.000		
						TOTAL		701.230.204.685		800.535.156.527		838.259.332.147		881.654.859.356		928.824.414.688		980.713.094.778				



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator tersebut selanjutnya akan digunakan mulai dari awal hingga akhir periode perencanaan.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Gunungsitoli sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,31	69,71	70,11	70,51	70,91	71,31	71,71	71,71	
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	0,38	1,00	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05	6,05	
3	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	
4	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	16,41	16,41	15,21	14,01	12,81	11,61	10,41	10,41	
5	Laju Inflasi	Persentase	5,32	4,80	4,28	3,76	3,24	2,72	2,20	2,20	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	
7	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	57,36	59,97	64,88	69,78	74,68	79,59	81,72	81,72	
8	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Persentase	56,63	57,96	59,29	60,62	61,95	63,28	64,61	64,61	

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Gunungsitoli pada awal tahun perencanaan tahun 2021 sebesar 69,71% dan diproyeksikan peningkatan target IPM Kota Gunungsitoli pada tahun 2026 sebesar 71,71%.

Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia menurut (BPS, 2014), dikatakan rendah jika $IPM < 60$, sedang $60 \leq IPM < 70$, tinggi $70 \leq IPM < 80$, dan ≥ 80 sangat tinggi. Kondisi pencapaian IPM Kota Gunungsitoli pada awal tahun kinerja sebesar 69,71 masih dalam klasifikasi sedang, dan diproyeksikan pada tahun 2026 sebesar 71,71 dengan klasifikasi tinggi.

Komponen IPM yang relatif mempengaruhi pencapaian IPM adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pergerakan komponen lain, seperti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, relatif lebih lambat kenaikannya, sesuai dengan metode perhitungan dari BPS. Pengeluaran per kapita per tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional, bahkan internasional.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli ditargetkan pada tahun 2021 hanya mencapai pada kisaran angka 1%, dikarenakan penurunan yang drastis pada kondisi tahun 2020 yaitu pada kisaran angka 0,38 % yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Sehingga diproyeksikan pada tahun 2022 akan kembali stabil pada kisaran angka 6,01%. Pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 6,05%.

Uraian tentang Laju Pertumbuhan Ekonomi ini akan terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produksi nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya :

- 1) Tanah dan kekayaan alam;
- 2) Mutu tenaga kerja dan penduduk;
- 3) Barang modal dan tingkat teknologi;
- 4) Sistem sosial dan sikap masyarakat.

c. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini ratio*) atau koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila *gini ratio* bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai *gini ratio* lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 0,4 berarti ketimpangan rendah. Nilai *gini ratio* antara 0,4 sampai dengan 0,5 berarti ketimpangan sedang. Nilai *gini ratio* lebih dari 0,5 sampai dengan kurang dari 1 berarti ketimpangan tinggi.

Rasio gini atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya, pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini (*gini ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien gini nya makin mendekati satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Tabel Perbandingan Nilai Koefisien Gini

NILAI KOEFISIEN	DISTRIBUSI PENDAPATAN
$< 0,4$	Ketimpangan Rendah
$0,4 - 0,5$	Ketimpangan Sedang
$> 0,5$	Ketimpangan Tinggi

$$\text{Rumus Gini Ratio GR} = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

f_i : jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.

Y_i : jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

Bila $GR = 0$, artinya ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila $GR = 1$, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Kondisi pencapaian Indeks Gini Kota Gunungsitoli pada awal tahun kinerja sebesar 0,31 masih dalam klasifikasi Ketimpangan Rendah, dan diharapkan proyeksi pada tahun 2026 sebesar 0,29 dengan klasifikasi Ketimpangan Rendah.

d. Persentase Penduduk Miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah angka kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau "tidak memiliki harta benda". Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,41% dari tahun 2019 sebesar 16,23%. Hal ini disebabkan oleh pengaruh Pandemi Covid 19 pada sektor perekonomian masyarakat dimana banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan dan lapangan pekerjaan yang berkurang. Persentase penduduk miskin di tahun 2021 masih berada pada kondisi normal seperti tahun 2020 sebesar 16,41% dan diproyeksikan pada tahun 2026 akan mengalami penurunan sebesar 10,41%.

e. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan;
2. Adanya peningkatan biaya produksi;
3. Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat;
4. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran;
5. Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspektasi;
6. Kekacauan ekonomi dan politik;

Klasifikasi Laju inflasi berdasarkan harga ada 4 (empat) yaitu :

- **Inflasi ringan:** kenaikan harga di bawah 0% - 10% dalam setahun.
- **Inflasi sedang:** kenaikan harga di antara 10% - 30% dalam setahun.
- **Inflasi berat:** kenaikan harga di antara 30% - 100% dalam setahun
- **Hiperinflasi (inflasi tak terkendali):** kenaikan harga di atas 100% dalam setahun

Kondisi pencapaian laju Inflasi Kota Gunungsitoli awal tahun kinerja sebesar 4,80% masih dalam kondisi inflasi ringan dan diproyeksikan pada tahun 2026 akan mengalami masih dalam kondisi inflasi ringan dengan nilai 2,20%.

f. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Kategori nilai akhir penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 8.3
Kategori Nilai Akhir Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90-100	Istimewa
2	A	> 80-90	Memuaskan
3	BB	> 70-80	Sangat Baik
4	B	> 60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
7	C	> 30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
8	D	> 0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Kota Gunungsitoli pada tahun 2019-2020 mendapatkan penilaian akhir untuk Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori C pada tahun 2019 dan kategori C pada tahun 2020. Pada tahun 2026 diproyeksikan akan mendapat penilaian akhir untuk Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori BB.

g. Indeks Harmoni Sosial

Indeks harmoni sosial merupakan indikator kinerja mandiri yang dirumuskan untuk menghitung tingkat pembangunan dalam urusan ketentraman dan ketertiban serta urusan budaya dan kesenian. Indikator ini diproyeksikan menggunakan variabel antara lain Indeks Ketentraman dan Ketertiban dan Indeks Budaya Lokal. Indeks Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Tingkat Keamanan;
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA;
3. Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS.

Selanjutnya untuk Indeks Budaya Lokal terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun;
2. Persentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya;

3. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

h. Tingkat Pembangunan Infrastruktur

Tingkat Pembangunan Infrastruktur wilayah meliputi 6 (enam) indikator pembangunan yang diantaranya adalah :

1. Persentase Jalan Mantap;
2. Persentase Penduduk yang Mengakses Air Minum;
3. Persentase Rumah Layak Huni;
4. Persentase Kawasan non Kumuh Perkotaan;
5. Persentase Penduduk Mengakses Sanitasi Layak;
6. Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi.

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pendekatan aspek pembangunan dan urusan pemerintahan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran selain indikator kinerja utama Kota Gunungsitoli, indikator kinerja kunci (IKK), indikator sasaran/*impact* dan indikator standar pelayanan minimal (SPM). Indikator kinerja ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama berkenaan setelah ditetapkan sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain.

Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Gunungsitoli dijabarkan pada Tabel 8.4 sebagai berikut :

Tabel 8.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Gunungsitoli
Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA 5 TAHUN								TARGET AKHIR RPJMD
			KONDISI AWAL KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,31	69,71	70,11	70,51	70,91	71,31	71,71	71,71	
2	Pertumbuhan Ekonomi	Percentase		1,00	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05	6,05	
3	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	
4	Percentase Penduduk Miskin	Percentase	16,41	16,41	15,21	14,01	12,81	11,61	10,41	10,41	
5	Laju Inflasi	Percentase	5,32	4,80	4,28	3,76	3,24	2,72	2,20	2,20	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	
7	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	57,36	59,97	64,88	69,78	74,68	79,59	81,72	81,72	
8	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Percentase	56,63	57,96	59,29	60,62	61,95	63,28	64,61	64,61	
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000	7.980	8.234,25	8.488,50	8.742,75	8.997,00	9.251,25	9.505,50	9.505,50	
10	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Rp.000	40.174,40	42.893,38	45.612,36	48.331,34	51.050,32	53.769,30	56.488,28	56.488,28	
B. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1)	Urusan Pendidikan										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Indeks Pendidikan	Indeks	78,70	76,44	77,83	79,21	80,60	81,99	83,37	83,37	
2	Angka Rata Rata Lama sekolah	Tahun	8,61	8,64	8,74	8,84	8,94	9,04	9,14	9,14	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,74	13,76	13,78	13,80	13,82	13,84	13,86	13,86	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persentase	87,54	89,37	91,20	93,03	94,86	96,69	98,52	98,52	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persentase	80,25	79,63	81,57	83,51	85,46	87,40	89,35	89,35	
6	Rasio Ruang Kelas kategori baik SD	Persentase	84,13	83,93	84,03	84,13	84,23	84,33	84,43	84,43	
7	Rasio Ruang Kelas kategori baik SMP	Persentase	69,95	68,95	69,45	69,95	70,45	70,95	71,45	71,45	
8	Nilai Rata-Rata UN SD	Persentase	79,33	79,73	81,44	83,14	84,84	86,55	88,25	88,25	
9	Nilai Rata-Rata UN SMP	Persentase	80,22	63,74	66,56	69,38	72,20	75,03	77,85	77,85	
10	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persentase	*	41,91	100	100	100	100	100	100	
11	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kesetaraan	Persentase	0,83		100	100	100	100	100	100	
2)	Urusan Kesehatan										
12	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,19	71,40	71,61	71,82	72,03	72,24	72,45	72,45	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
13	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	229,20	229,20	205,00	194,00	183,00	180,00	180,00	180,00	180,00
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	13,75	13,75	13,50	13,25	13,00	12,75	12,75	12,75	12,75
15	Angka Kematian Balita (AKABa)	Per 1.000 Balita	2,74	2,74	2,70	2,68	2,66	2,64	2,64	2,64	2,64
16	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	5,53	5,53	5,50	5,47	5,43	5,40	5,40	5,40	5,40
17	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20
18	Persentase Faskes (Puskesmas, RS) Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	28,34	29,39	30,43	31,48	32,53	33,57	34,62	34,62	34,62
20	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00	56,00
21	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	0,30	0,30	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,40	0,40
22	Rasio paramedis per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	3,94	3,94	3,98	4,01	4,05	4,09	4,12	4,12	4,12

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3)	Urusan Pekerjaan Umum										
23	Persentase Jalan Mantap	Persentase	63,04	64,37	65,70	67,03	68,36	69,69	71,02	71,02	
24	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	Persentase	36,21	37,54	38,87	40,20	41,53	42,86	44,19	44,19	
25	Persentase jalan kondisi baik	Persentase	31,54	31,92	32,30	32,68	33,06	33,44	33,82	33,82	
26	Persentase Penduduk yang mengakses air minum (perpipaan dan bukan perpipaan)	Persentase	32,37	33,70	35,03	36,36	37,69	39,02	40,35	40,35	
27	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persentase	93,92	94,90	95,13	95,36	95,59	95,82	96,05	96,05	
28	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase	73,86	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00	
29	Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	Persentase	38,25	42,45	42,68	43,02	43,17	43,23	43,24	43,24	
30	Persentase penduduk mengakses sanitasi layak	Persentase	31,31	32,64	33,97	35,30	36,63	37,96	39,29	39,29	
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
31	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	78,36	79,69	81,02	82,35	83,68	85,01	86,34	86,34	
32	Persentase kawasan non kumuh perkotaan	Persentase	98,49	98,62	98,75	98,88	99,01	99,14	99,27	99,27	
5)	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
33	Persentase bencana yang tertangani	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase	66,87	68,87	70,87	72,87	74,87	76,87	78,87	78,87	
35	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	58,47	65,09	66,37	67,65	68,93	70,21	71,49	71,49	
36	Tingkat Keamanan	Persentase	61,63	66,64	69,44	72,24	75,04	77,84	80,64	80,64	
37	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persentase	100,00	97,96	98,37	98,78	99,19	99,60	100,00	100,00	
38	Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS	Persentase	13,79	30,67	31,30	31,93	32,56	33,19	33,82	33,82	
6)	Urusan Sosial										
39	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase	76,92	66,92	56,92	46,92	36,92	26,92	16,92	16,92	
40	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	Persentase	75,00	65,00	55,00	45,00	35,00	25,00	15,00	15,00	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	dasar										
41	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase	80,00	70,00	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	20,00	
42	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase	70,00	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	10,00	10,00	
7)	Urusan Tenaga Kerja										
43	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,79	3,12	3,11	3,10	3,09	3,08	3,07	3,07	
8)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
44	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,31	89,36	89,41	89,46	89,51	89,56	89,61	89,61	
9)	Urusan Lingkungan Hidup										
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,83	54,08	54,33	54,58	54,83	55,08	55,33	55,33	
10)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
46	Persentase Kepemilikan Dokumen	Persentase	87,54	88,23	90,33	91,89	93,43	94,25	95,05	95,05	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Kependudukan										
47	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persentase	87,54	88,23	90,33	91,89	93,43	94,25	95,05	95,05	
48	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Persentase	99,18	99,10	99,19	99,20	99,21	99,22	99,23	99,23	
49	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia)	Persentase	96,82	98,50	97,10	97,50	97,80	98,00	98,15	98,15	
50	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	21,37	30,00	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	
51	Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	Persentase cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	0,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	Persentase yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	95,40	90,00	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,00	
53	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang	Persentase yang dilaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	perceraiannya tercatat	diberikan akta perceraian	SAMAERI YYYY								
54	Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	Persentase kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
56	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5850	0,5938	0,6026	0,6114	0,6202	0,6290	0,6378	0,6378	
12)	Urusan Perhubungan		KOTA GUNUNG SITOLI								
57	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Persentase	23	23	25	50	65	80	95	95	
13)	Urusan Komunikasi dan Informatika										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
58	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,98	1,80	2,02	2,24	2,46	2,68	2,90	2,90	
14)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
59	Persentase koperasi Aktif	Persentase	64,22	64,22	65,22	66,22	67,22	68,22	69,22	69,22	
15)	Urusan Penanaman Modal										
60	Nilai realisasi investasi	Miliar	4	4	*	1	2	3	4	4	
61	Jumlah investor	Investor	6	1	1	1	1	1	1	1	
62	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	Persentase	*	*	80	81	82	83	84	84	
16)	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										
63	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	88,24	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
64	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang Olahraga	*	5	5	6	7	8	9	9	
65	Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda	Kegiatan	*	5	7	9	11	13	15	15	
17)	Urusan Kebudayaan										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
66	Indeks budaya lokal	Indeks	56,24	56,47	48,62	57,43	58,25	67,07	67,56	67,56	
67	Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun	Persentase	8,33	75,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	
68	Persentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya	Persentase	79,21	70,00	71,00	72,00	74,00	75,00	76,00	76,00	
69	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persentase	81,18	24,42	24,86	25,30	25,76	26,22	26,69	26,69	
18)	Urusan Perpustakaan										
70	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	2,00	2,15	2,27	2,39	2,51	2,63	2,75	2,75	
71	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	*	10,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	42,00	
19)	Urusan Kearsipan										
72	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase	50,00	50,00	50,00	55,00	57,50	60,00	62,50	62,50	
20)	Urusan Kelautan dan Perikanan										
73	Rata-rata Nilai Tukar Nelayan	Persentase	98,00	98,00	99,00	100,00	101,00	101,50	102,00	102,00	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
74	Rata -rata Nilai Tukar Pembudidaya	Persentase	92,80	92,80	95,00	96,50	97,50	98,00	99,00	99,00	
75	Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase	*	*	10,23	14,34	20,05	25,77	17,58	17,58	
76	Kelompok usaha perikanan yang berkualitas	Persentase	*	*	5,45	8,48	11,52	14,55	17,58	17,58	
21)	Urusan Pariwisata										
77	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Persentase	4,16	4,18	4,20	4,22	4,24	4,26	4,28	4,28	
78	Jumlah kunjungan wisata	Orang	*	20.000	22.050	23.153	24.310	25.526	26.802	26.802	
79	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDBRB lapangan usaha pariwisata (penyediaan akomodasi makan dan minum)	Persentase	*	4,33	4,52	4,71	4,91	5,12	5,33	5,33	
22)	Urusan Pertanian										
80	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	14,97	15,02	15,07	15,12	15,17	15,22	15,27	15,27	
81	Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi	Ton/Ha	*	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	
82	Peningkatan Populasi Tanaman Hortikultura	Batang	*	2.295	2.525	2.777	3.055	3.360	3.696	3.696	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Tahunan										
83	Peningkatan produksi Tanaman Hortikultura Semusim	Ton	*	229	231	234	236	238	241	241	
84	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	*	1.946	1.965	1.985	2.004	2.024	2.043	2.043	
85	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Ekor	*	220.819	242.901	264.983	287.065	309.147	331.229	331.229	
86	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	Persentase	*	8,41	9,28	10,14	11,00	11,86	12,72	12,72	
87	Cakupan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut dan Madya	Persen	*	11,76	13,17	14,50	15,76	16,96	18,10	18,10	
23)	Urusan Perdagangan										
88	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Persentase	3,12	3,14	3,16	3,18	3,19	3,20	3,20	3,20	
89	Distribusi Persentase Lapangan Usaha Perdagangan dalam PDRB	Persentase	26,54	26,56	26,58	26,60	26,62	26,64	26,68	26,68	
24)	Urusan Perindustrian										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
90	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Perindustrian (Industri Pengolahan)	Persentase	1,53	1,53	1,70	1,87	1,92	2,00	2,30	2,30	
91	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,66	2,66	2,80	3,00	3,30	3,70	3,90	3,90	
92	Persentase Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam PDRB berdasarkan harga berlaku	Persentase	34,55	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	53,00	
25)	Sekretariat Daerah										
93	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Setda)	Persentase	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
94	Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)	Indeks	*	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
95	Nilai SAKIP	Indeks	C	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	
26)	Sekretariat DPRD										
96	Persentase Kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	90	90	90	90	90	90	90	90	90
27)	Unsur Penunjang Perencanaan										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
97	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase	84,88	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00	
28)	Unsur Penunjang Keuangan										
98	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	*	*	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	
29)	Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
99	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	*	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00	
30)	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan										
100	Percentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	*	9,38	40,63	56,25	71,88	87,50	100	100	
31)	Unsur Penunjang Pengawasan										
101	Rata-rata Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase	40,9	50	60	62	65	67	70	70	
32)	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA 5 TAHUN							TARGET AKHIR RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
102	Persentase Potensi Gangguan / konflik sosial yang tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34)	Urusan Pangan										
103	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	*	49,53	50,53	51,53	52,53	53,55	54,55	54,55	54,55
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Persentase	57,66	58,16	58,66	59,16	59,16	59,66	60,16	60,16	60,16

Indikator kinerja daerah diatas selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam tabel berikut :

Tabel 8.5
Penjabaran Indikator Kinerja Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>Dimana:</p> $X_{(1)} : \text{Indeks harapan hidup}$ $X_{(2)} : \text{Indeks pendidikan} = \frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ $X_{(3)} : \text{Indeks standar hidup layak}$ $\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{[X_{(i)\max} - X_{(i)\min}]}$ <p>Dimana:</p> $X_{(1)} : \text{Indikator ke-}i \ (i = 1, 2, 3)$ $X_{(2)} : \text{Nilai maksimum sekolah } X_{(i)}$ $X_{(3)} : \text{Nilai minimum sekolah } X_{(i)}$
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
3	Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi
4	Percentase Penduduk Miskin	Percentase	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk x 100
5	Laju Inflasi	Percentase	Indeks Harga Konsumen Tahun n dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya x 100
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks reformasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB
7	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	(Indeks Ketentraman dan Ketertiban+Indeks budaya lokal) / 2
8	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Percentase	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Percentase rumah layak huni; Percentase kawasan perkotaan non kumuh; Percentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Percentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Percentase jalan mantap; Percentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Percentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, Percentase sarana perhubungan kondisi baik)
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000	Indeks Harga Konsumen Tahun n dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dikali 100
10	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Rp.000	Berita Resmi Statistik BPS
11	Indeks Pendidikan	Indeks	=((Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/Target Nasional*100)+(Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Target Nasional*100)+(Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Target Nasional*100)+(Rasio Ruang Kelas kategori baik SD/Target Nasional*100)+(Rasio Ruang Kelas kategori baik SMP/Target Nasional*100)+(Nilai Rata-Rata UN SD/Target Nasional*100)+(Nilai Rata-Rata UN SMP/Target Nasional*100)) / 7
12	Angka Rata Rata Lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	$EYS'_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t; E'_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t; P'_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t; i : Usia ($a, a+1, \dots, n$); FK : Faktor koreksi.
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Percentase	(Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD / Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun) x 100
15	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Percentase	(Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP / Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun) x 100
16	Rasio Ruang Kelas kategori baik SD	Percentase	Jumlah ruang kelas SD kategori baik / Jumlah keseluruhan ruang kelas SD
17	Rasio Ruang Kelas kategori baik SMP	Percentase	Jumlah ruang kelas SMP kategori baik / Jumlah keseluruhan ruang kelas SMP
18	Nilai Rata-Rata UN SD	Percentase	Nilai rata-rata UN/Ujian Sekolah/Ujian Akhir jenjang SD selama 1 tahun berkenan
19	Nilai Rata-Rata UN SMP	Percentase	Nilai rata-rata UN/Ujian Sekolah/Ujian Akhir jenjang SMP selama 1 tahun berkenan
20	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Percentase	(Jumlah siswa usia 5-6 Tahun pada jenjang PAUD/TK/RA) / (Jumlah penduduk usia 5-6 Tahun) x 100
21	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kesetaraan	Percentase	(Jumlah siswa usia 7-18 Tahun pada jenjang pendidikan nonformal) / (Jumlah penduduk usia 7-18 Tahun) x 100
22	Umur Harapan Hidup	Tahun	Jumlah keseluruhan usia orang meninggal / Jumlah orang meninggal
23	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus, dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirknya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 100.000 KH
24	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
			pada kurun waktu yang sama DIKALI 1.000 KH
25	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 Balita	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang meninggal (termasuk kematian bayi) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah balita (0-59 bulan) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 1.000 Balita
26	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah balita (0-59 bulan) yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 100%
27	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	Jumlah indikator keluarga sehat yang bernilai 1 DIBAGI 12 – Jumlah indikator yang tidak ada di keluarga : Tahap 2 Jumlah keluarga dengan IKS > 0,800 DIBAGI Jumlah seluruh keluarga di Kab/Kota
28	Persentase Faskes (Puskesmas, RS) Terakreditasi	%	Jumlah Faskes (Puskesmas, RS) yang telah terakreditasi DIBAGI jumlah seluruh Faskes (Puskesmas, RS) DIKALI 100%
29	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	Jumlah rumah tangga yang telah ber-PHBS DIBAGI Jumlah seluruh rumah tangga DIKALI 100%
30	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) : Rumah Makan/ Restoran/Jasa Boga/ Sentra Pangan Jajanan, Depot Air Minum yang memenuhi syarat sesuai standar DIBAGI Jumlah seluruh Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) : Rumah Makan/ Restoran/Jasa Boga/ Sentra Pangan Jajanan, Depot Air Minum DIKALI 100%
31	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	Jumlah kumulatif dokter (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 1.000 penduduk
32	Rasio paramedis per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	Jumlah kumulatif paramedis (bidan, perawat dan perawat gigi) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 1.000 penduduk
33	Persentase Jalan Mantap	Persentase	((Total jalan dalam kondisi baik+ Total jalan dalam kondisi sedang) / Panjang jalan keseluruhan di Kota Gunungsitoli) x 100
34	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	Persentase	(Total Panjang Saluran Irigasi Tertangani dalam Kondisi Baik/Total Panjang Rencana Penanganan Saluran Irigasi) x 100
35	Persentase jalan kondisi baik	Persentase	(Total jalan dalam kondisi bisa dilalui lebih dari 40 Km/Jam / Panjang jalan keseluruhan di Kota Gunungsitoli) x 100
36	Persentase Penduduk yang	Persentase	(Total penanganan instalasi dan jaringan air minum dalam kondisi baik/Total kebutuhan Saluran Rumah di Kota Gunungsitoli) x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
	mengakses air minum		
37	Percentase drainase dalam kondisi baik	Percentase	(Total penanganan drainase dalam kondisi baik/Panjang kebutuhan drainase di Kota Gunungsitoli) x 100
38	Percentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Percentase	(Jumlah rekomendasi yang disetujui/Jumlah rekomendasi keseluruhan) x 100
39	Percentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	Percentase	(Luas area terbuka hijau/publik yang tertata / Luas area permukiman) x 100
40	Percentase Penduduk Mengakses Sanitasi Layak	Percentase	(Jumlah Penduduk yang mengakses sanitasi layak / Jumlah Penduduk) x 100
41	Percentase Rumah Layak Huni	Percentase	(Jumlah rumah layak huni / Jumlah rumah tempat tinggal) x 100
42	Percentase kawasan non kumuh perkotaan	Percentase	(Luas kawasan non kumuh perkotaan / Luas kawasan permukiman) x 100
43	Percentase bencana yang tertangani	Percentase	(Jumlah Bencana yang tertangani / Jumlah Bencana yang terjadi) x 100
44	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Percentase	(Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran/Luas wilayah kota) x 100 %
45	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	(Tingkat Keamanan+Percentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA+Percentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS) / 3
46	Tingkat Keamanan	Percentase	100-Angka Kriminalitas Tahun n ; n=tahun berjalan
47	Percentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Percentase	(Jumlah pelanggaran PERDA yang diselesaikan / jumlah pelanggaran PERDA) x 100
48	Percentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS	Percentase	(Jumlah Polisi Pamong Praja PNS / Target Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja PNS) x 100
49	Percentase PMKS yang tertangani	Percentase	(Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada) x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
50	Percentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Percentase	(Jumlah PMKS yang diberi bantuan / Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan) x 100
51	Percentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Percentase	(Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun) x 100
52	Percentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Percentase	(Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kota) x 100
53	Tingkat pengangguran terbuka	Percentase	(Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja) x 100
54	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan / Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki
55	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	30% Indeks Kualitas Air + 30% Indeks Kualitas Udara + 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan
56	Percentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Percentase	Jumlah persentase 7 jenis dokumen kependudukan / 7 jenis dokumen kependudukan
57	Percentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Percentase	(Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/Jumlah Kepala Keluarga) x 100
58	Percentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Percentase	(Jumlah penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin@ atau pernah kawin yang telah merekam KTP-el / Jumlah penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin) x 100
59	Percentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia)	Percentase	(Penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang memiliki KIA / Penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah) x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN												
-1	-2	-3	-4												
60	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	(Jumlah profil kependudukan yang diterbitkan / 1 (tahun) x 100)												
61	Percentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	Persentase	(Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / Jumlah anak usia 0-18 tahun) x 100												
62	Percentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	Persentase	(Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan / Peristiwa perkawinan yang dilaporkan) x 100												
63	Percentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	Persentase	(Jumlah akta perceraian yang diterbitkan / Peristiwa perceraian yang dilaporkan) x 100												
64	Percentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	Persentase	(Jumlah akta kematian yang diterbitkan / Peristiwa kematian yang dilaporkan) x 100												
65	Percentase Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase	(Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama / Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menandatangani perjanjian kerjasama) x 100												
66	Indeks Desa Membangun	Indeks	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>IDM</td><td>:</td><td>Indeks Desa Membangun</td></tr> <tr> <td>IS</td><td>:</td><td>Indeks Sosial</td></tr> <tr> <td>IEK</td><td>:</td><td>Indeks Ekonomi</td></tr> <tr> <td>IL</td><td>:</td><td>Indeks Lingkungan (Ekologi)</td></tr> </table>	IDM	:	Indeks Desa Membangun	IS	:	Indeks Sosial	IEK	:	Indeks Ekonomi	IL	:	Indeks Lingkungan (Ekologi)
IDM	:	Indeks Desa Membangun													
IS	:	Indeks Sosial													
IEK	:	Indeks Ekonomi													
IL	:	Indeks Lingkungan (Ekologi)													
67	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Persentase	(Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang / Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan) X 100												
68	Nilai Indeks Sistem	Indeks	Rilis Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)												

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
69	Percentase koperasi Aktif	Percentase	(Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi keseluruhan yang ada) x 100
70	Nilai realisasi investasi	Miliar	Jumlah investasi yang direalisasikan selama tahun berkenan
71	Jumlah investor	Investor	Jumlah Investor yang memberikan penanaman modal selama tahun berjalan
72	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Percentase	(Jumlah permohonan perizinan yang diterbitkan / Jumlah permohonan perizinan yang diterima) x 100
73	Percentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Percentase	(Jumlah organisasi pemuda aktif / Jumlah keseluruhan organisasi pemuda) x 100
74	Jumlah Prestasi Olahraga	Percentase	Jumlah prestasi olahraga yang diraih
75	Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda	Jumlah	Jumlah kegiatan organisasi pemuda yang terbentuk dan aktif
76	Indeks budaya lokal	Indeks	(Percentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun + Percentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya + Percentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan) / 3
77	Percentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun	Percentase	(Realisasi Pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun / Rencana Pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun) x 100
78	Percentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya	Percentase	(Jumlah Sanggar Seni dan Budaya ada / Rencana Jumlah Sanggar Seni dan Budaya) x 100
79	Percentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Percentase	(Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan / Jumlah Keseluruhan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya) x 100
80	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	<p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum UPLM/ALM \times 100$</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</p> <p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p> <p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</p>

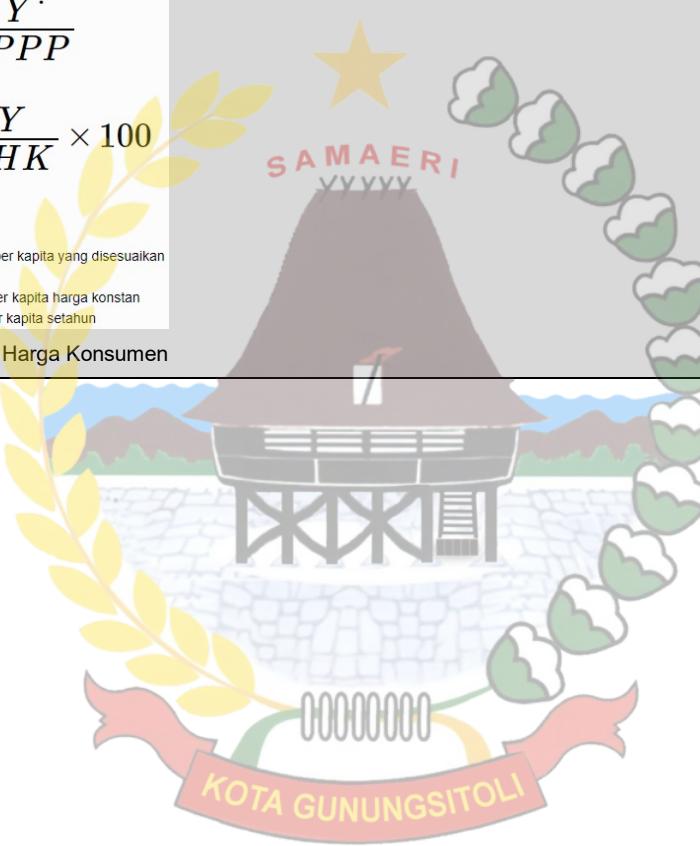
NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
			UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan ALM = aspek literasi masyarakat
81	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survey / Kajian kegemaran membaca masyarakat
82	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Percentase	$T = \frac{(a+i+s+j)}{4}$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Percentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Percentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Percentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Percentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
83	Rata-rata Nilai Tukar Nelayan	Percentase	Nilai Tukar Nelayan adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga yang diterima nelayan adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi nelayan. Indeks harga yang dibayar nelayan adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga nelayan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi perikanan tangkap.
84	Rata -rata Nilai Tukar Pembudidaya	Percentase	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil budidaya terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (I_b) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
85	Peningkatan Produksi Perikanan	Percentase	$\left(\frac{\text{Total produksi tahun berkenan} - \text{Total produksi tahun awal}}{\text{Total Produksi Tahun Awal}} \right) \times 100$
86	Kelompok usaha perikanan yang berkualitas	Percentase	$\left(\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya yang berkelas Madya atau utama}}{\text{Jumlah total kelompok nelayan dan pembudidaya}} \right) \times 100$
87	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Percentase	Akumulasi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
88	Jumlah kunjungan wisata	Orang	Jumlah kunjungan wisata selama 1 (satu) tahun

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
89	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDBRB lapangan usaha pariwisata (penyediaan akomodasi makan dan minum)	Persentase	Akumulasi Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDBRB lapangan usaha pariwisata (penyediaan akomodasi makan dan minum)
90	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	Akumulasi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
91	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Persentase	Akumulasi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)
92	Distribusi Persentase Lapangan Usaha Perdagangan dalam PDRB	Persentase	Distribusi Berupa Persentase Lapangan Usaha Perdagangan terhadap keseluruhan PDRB tahun berkenan
93	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Perindustrian (Industri Pengolahan)	Persentase	Nilai PDRB sektor Industri pengolahan Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi Nilai PDRB Tahun N-1 dikali 100%
94	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Persentase	Jumlah UMKM tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi Tahun N-1 dikali 100%
95	Persentase Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam PDRB berdasarkan harga berlaku	Persentase	Jumlah lapangan usaha industri tahun sekarang dibagi total keseluruhan usaha industri dikali 100%
96	Peningkatan Produktivitas	Ton/Ha	Jumlah produksi padi / Jumlah luas panen

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
	Tanaman Padi		
97	Peningkatan Populasi Tanaman Hortikultura Tahunan	Batang	Jumlah tanaman holtikultura tahunan
98	Peningkatan produksi Tanaman Hortikultura Semusim	Ton	Jumlah luas panen tanaman holtikultura x produktivitas tanaman holtikultura tahunan
99	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	Jumlah luas panen tanaman perkebunan x produktivitas tanaman perkebunan
100	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Ekor	Jumlah populasi ternak se-Kota Gunungsitoli
101	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	Persentase	Jumlah kelompok tani / Jumlah penyuluh pertanian
102	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya
103	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Setda)	Persentase	(Perencanaan pembangunan daerah + Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah + Penjaminan mutu layanan perangkat daerah + Standar operasional prosedur (sop) pelayanan perangkat daerah + Pendidikan dan pelatihan aparatur + Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah + Manajemen sumber daya yang terukur + Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur + Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur + Pengembangan inovasi pelayanan perangkat daerah + Budaya organisasi perangkat daerah)
104	Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)	Indeks	Hasil survei internal Sekretariat Daerah ; Rumus = (Jumlah bobot yang disurvei / Jumlah unsur yang disurvei) x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	
			-1	-2
105	Nilai SAKIP	Indeks	(Perencanaan Kinerja x 30%) + (Pengukuran Kinerja 25%) + (Pelaporan Kinerja x 15%) + (Evaluasi Internal x 10%) + Capaian Kinerja x 20%)	
	Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	Survey Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Internal/Eksternal/Mandiri)	
107	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase	((Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Dokumen RKPD Tahun Berkenan) / (Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen RPJMD Tahun Berkenan)) x 100%	
108	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Hasil pengukuran terhadap : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Kualitas anggaran belanja dalam APBD Transparansi pengelolaan keuangan daerah Penyerapan anggaran Kondisi keuangan daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). (Permendagri 19 Tahun 2020)	
109	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	Gabungan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN (Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019)	
110	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	(Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan inovasi daerah/ Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) x 100	
111	Rata-rata Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	
112	Persentase Potensi Gangguan / konflik sosial yang tertangani	Persentase	(Potensi Gangguan / konflik sosial yang tertangani / Potensi Gangguan / konflik sosial yang terjadi) x 100	
113	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	Standarisasi 9 (sembilan) nilai indikator Ketahanan Pangan Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator	

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	-2	-3	-4
			Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan <i>cut off point</i>
114	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Percentase	$Y^* = \frac{Y^**}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>Y^{**} = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan</p> <p>Y^* = Pengeluaran per kapita harga konstan</p> <p>Y = Pengeluaran per kapita setahun</p> <p>IHK = Indeks Harga Konsumen</p>



BAB IX PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Gunungsitoli serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Pembangunan daerah Kota Gunungsitoli. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu Lima Tahun sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2026. Untuk menjaga Kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan Setelah RPJMD Tahun berakhir, maka RPJMD ini juga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

- A. Pemerintah Kota Gunungsitoli berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah Tentang RPJMD kepada masyarakat Kota Gunungsitoli;
- B. Dengan mempertimbangkan perubahan yang mendasar yang di luar kendali Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka dapat dilakukan Perubahan RPJMD Kota Gunungsitoli;
- C. Seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan pemangku kepentingan pembangunan daerah wajib melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya serta mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah RPJMD;
- D. Seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli berkewajiban melakukan penyusunan rencana strategis (renstra) Perangkat daerah dengan mengacu pada peraturan daerah RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan renja perangkat daerah Tahun 2022 hingga Tahun 2026;
- E. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

berkewajiban melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD secara reguler.

Melalui peraturan daerah RPJMD yang telah disusun ini semoga rencana pembangunan daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dapat berjalan dengan baik dan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai untuk mewujudkan **“KOTA GUNUNGSTITOLI BERDAYA SAING, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**.



